



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan kinerja dan iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.613.844.117.767,99
b. belanja	<u>Rp1.547.446.405.511,66</u>
surplus/defisit	Rp 66.397.712.256,33
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp 52.299.328.048,49
- pengeluaran	<u>Rp 50.974.849.892,00</u>
surplus/defisit	Rp 1.324.478.156,49
SILPA	Rp 67.722.190.412,82

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 52.013.334.567,01) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.665.857.452.335,00
 - b. realisasi Rp 1.613.844.117.767,99
 - selisih lebih/(kurang) (Rp 52.013.334.567,01)
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp 118.045.787.323,34) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.665.492.192.835,00
 - b. realisasi Rp 1.547.446.405.511,66
 - selisih lebih/(kurang) (Rp 118.045.787.323,34)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp66.032.452.756,33 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. surplus /defisit setelah perubahan Rp 365.259.500,00
 - b. realisasi Rp 66.397.712.256,33
 - selisih lebih / (kurang) Rp 66.032.452.756,33
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp33.374.343,51) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 52.332.702.392,00
 - b. realisasi Rp 52.299.328.048,49
 - selisih lebih/(kurang) (Rp 33.374.343,51)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp 1.723.112.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 52.697.961.892,00
 - b. realisasi Rp 50.974.849.892,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp 1.723.112.000,00)
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp1.689.737.656,49 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
(Rp 365.259.500,00)
 - b. realisasi Rp 1.324.478.156,49
 - selisih lebih/(kurang) Rp 1.689.737.656,49

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b periode 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp 2.506.434.174.755,29
b. jumlah kewajiban	Rp 119.682.720.180,87
c. jumlah ekuitas	Rp 2.386.751.454.574,42

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp 52.332.702.992,53
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 371.382.466.709,51
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 307.123.198.453,18)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 48.836.405.892,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp 67.772.190.412,82

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp 1.360.578.512.826,99
b. Beban	<u>Rp 1.248.749.417.403,79</u>
Surplus/(defisit)Kegiatan Operasional	Rp 111.829.095.423,20
c. Surplus/(defisit)Kegiatan Non Operasional	Rp 2.192.736.302,00
d. Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
Surplus/Defisit) LO	Rp 114.021.831.725,20

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 52.332.702.992,53
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan tahun berjalan	<u>Rp 52.299.328.048,49</u>
Sub Total	Rp 33.374.944,04

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 67.722.190.412,82
Sub Total	Rp 67.755.565.356,86
d. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp (33.374.944,04)
e. Lain-Lain	Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 67.722.190.412,82

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 2.270.452.390.192,32
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 114.021.831.725,20
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan dasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
d. Koreksi Ekuitas	Rp 2.277.323.656,90
Ekuitas Akhir	Rp 2.384.029.495.188,85

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX, terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan Menurut kelompok dan jenis pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan Kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program Kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : LPE;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
- a. Laporan kinerja; dan
 - b. Ikhtislar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATIN MOROWALI UTARA,
DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 24,02/2025.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lampiran I LRA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1 - 2
Lampiran I.1	
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	3 - 19
Lampiran I.2	
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN	20 - 37
Lampiran I.3	
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38 - 42
Dinas Kesehatan	43 - 46
Puskesmas Lee	47 - 48
Puskesmas Tomata	49 - 50
Puskesmas Beteleme	51
Puskesmas Petumbea	52
Puskesmas Molino	53
Puskesmas Kolonodale	54
Puskesmas Baturube	55 - 56
Puskesmas Panca Makmur	57
Puskesmas Pandauke	58
Puskesmas Wongkondaya	59 - 60
Puskesmas Tambayoli	61
Puskesmas Anutoluwu	62
Puskesmas Potowe Indo Lijo	63
Puskesmas Mayumba	64 - 65
RSUD Kolonodale	66 - 67
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah	68 - 73
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	74 - 76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77 - 79
Dinas Sosial Daerah	80 - 83
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	84 - 86
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	87 - 89
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	90 - 92
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	93 - 94
Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	95 - 99
Dinas Perhubungan Daerah	100 - 101
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	102
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	103 - 109
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	110 - 112
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	113 - 115
Dinas Perikanan Daerah	116 - 118
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah	119 - 122

Dinas Pertanian Daerah	123 - 128
Bagian Umum	129 - 130
Bagian Administrasi Pembangunan	131 - 132
Bagian Administrasi Pemerintahan	133 - 134
Bagian Kesejahteraan Rakyat	135 - 136
Bagian Hukum	137 - 138
Bagian Organisasi	139 - 140
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	141 - 142
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	143 - 144
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	145 - 146
Sekretariat DPRD	147 - 149
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	150 - 153
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	154 - 157
Badan Pendapatan Daerah	158 - 160
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	161 - 163
Inspektorat Daerah	164 - 165
Kecamatan Petasia	166 - 167
Kecamatan Petasia Barat	168 - 169
Kecamatan Petasia Timur	170 - 171
Kecamatan Bungku Utara	172 - 173
Kecamatan Mamosalato	174 - 175
Kecamatan Soyo Jaya	176 - 177
Kecamatan Lembo	178 - 179
Kecamatan Lembo Raya	180 - 181
Kecamatan Mori Atas	182 - 183
Kecamatan Mori Utara	184 - 185
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	186 - 188
Lampiran I.4	
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	189 - 230
Lampiran II	
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	231
Lampiran III	
LAPORAN OPERASIONAL	232
Lampiran IV	
LPE	233
Lampiran V	
NERACA	234
Lampiran VI	
LAPORAN ARUS KAS	235
Lampiran VII	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	236 - 416
Lampiran VIII	
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	417
Lampiran IX	
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	418
Lampiran X	
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	419

Lampiran XI	
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	420
Lampiran XII	
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	421
Lampiran XIII	
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH	422
Lampiran XIV	
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	423 - 424
Lampiran XV	
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	425
Lampiran XVI	
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	426
Lampiran XVII	
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	427
Lampiran XVIII	
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	428
Lampiran XIX	
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM TERSELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	429
Lampiran XX	
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	430
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	431 - 434
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)	435
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	436 - 437
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,JENIS,OBYEK,RINCIAN OBYEK,PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIYAN	438 - 441
REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	442
REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	443
REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKORNISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	444
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	445 - 446
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	447 - 450
REKAPITULASI REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING	451 - 452
REKAPITULASI REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI YANG BERSUMBER DARI APBD	453

LAMPIRAN 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN





PEMERINTAHAN KAB. MOROWALI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.665.857.452.335,00	1.613.844.117.767,99	96,88	1.208.809.173.144,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.610.133.180,00	168.802.883.879,99	73,84	134.607.242.716,42
4.1.01	Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.555.959.818,00	62,72	35.305.535.224,00
4.1.02	Retribusi Daerah	39.125.000.000,00	22.045.729.269,00	56,35	34.769.349.686,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.748.577.180,00	67.003.477.838,99	103,43	60.668.193.934,42
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,84	134.607.242.716,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	921.236.099.328,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	522.391.471.000,00	528.688.970.555,00	101,21	248.076.707.621,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	555.056.781.671,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.782.277.000,00	62.110.361.172,00	97,38	42.255.915.242,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.718.290.000,00	78.784.991.456,00	93,00	75.846.694.794,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	921.236.099.328,00
4.2.01.05	Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	110.554.350.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	116.259.668.000,00	122.109.793.000,00	287,60	110.554.350.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	42.411.481.100,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	40.134.041.100,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.277.440.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	42.411.481.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.665.857.452.335,00	1.613.844.117.767,99	96,88	1.208.809.173.144,42

5	BELANJA DAERAH	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53
5.1	BELANJA OPERASI	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26
5.1.01	Belanja Pegawai	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93	425.231.570.909,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.830.016.908,82	418.957.792.995,49	92,72	376.440.314.339,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83	22.516.369.666,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86	33.215.227.288,26
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26
5.2	BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	1.110.890.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.070.107.453,00	76.216.049.055,00	92,87	36.930.658.470,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26	80.182.171.788,27
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50	113.670.285.431,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	94.125.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	512.743.648,00	0,00	0,00	506.340.755,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	0,00	0,00	427.113.816,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	214.140.316.018,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
	JUMLAH BELANJA	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53
	SURPLUS/DEFISIT	365.259.500,00	66.366.281.044,33	18.169,62	-97.455.335.727,11
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-365.259.500,00	1.324.478.156,49	(362,61)	149.788.038.719,64
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	190.873.934.975,64
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	190.873.934.975,64
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	190.873.934.975,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-365.259.500,00	1.324.478.156,49	(362,61)	149.788.038.719,64
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	67.722.190.412,82	0,00	52.332.702.992,53

Kolondale, 28 Agustus 2025
 BUPATI MOROWALI UTARA

 DELVI JULKARSON HEHI

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN MENURUT URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
ORGANISASI**





KAB. MOROWALI UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.665.857.452.335	1.613.844.117.767,99	(52.013.334.567,01)	96,88
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	62.100.620.675	66.672.882.339,88	4.572.261.664,88	107,36
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	196.438.321,00	196.438.321,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0	196.438.321,00	196.438.321,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	0	196.438.321,00	196.438.321,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	159.838.321,00	159.838.321,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	159.838.321,00	159.838.321,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	62.050.620.675	66.454.444.018,88	4.403.823.343,88	107,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN DAERAH	12.082.080.312	11.062.975.062,00	(1.019.105.250,00)	91,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	12.082.080.312	11.062.975.062,00	(1.019.105.250,00)	91,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000.000	2.785.879.300,00	(214.120.700,00)	92,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000.000	2.785.879.300,00	(214.120.700,00)	92,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312	8.277.095.762,00	(804.984.550,00)	91,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312	8.277.095.762,00	(804.984.550,00)	91,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	49.968.540.363	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	49.968.540.363	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.968.540.363	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.968.540.363	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS LEE	0	13.489.400,00	13.489.400,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0	13.489.400,00	13.489.400,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	13.489.400,00	13.489.400,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.01	Pajak Daerah	0	959.400,00	959.400,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS TOMATA	0	69.017.070,00	69.017.070,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0	69.017.070,00	69.017.070,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	69.017.070,00	69.017.070,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.01	Pajak Daerah	0	697.000,00	697.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0	68.214.386,00	68.214.386,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	105.684,00	105.684,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS BETELEME	0	58.458.196,00	58.458.196,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0	58.458.196,00	58.458.196,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	58.458.196,00	58.458.196,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.01	Pajak Daerah	0	12.440.300,00	12.440.300,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	0	43.171.649,00	43.171.649,00	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.846.247,00	2.846.247,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS PETUMBEA	0	27.758.100,00	27.758.100,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0	27.758.100,00	27.758.100,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	27.758.100,00	27.758.100,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.01	Pajak Daerah	0	10.344.000,00	10.344.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	0	16.345.000,00	16.345.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.069.100,00	1.069.100,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS MOLINO	0	106.545.793,00	106.545.793,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	0	106.545.793,00	106.545.793,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	106.545.793,00	106.545.793,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	0	106.210.000,00	106.210.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	335.793,00	335.793,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS KOLONODALE	0	61.440.471,00	61.440.471,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0	61.440.471,00	61.440.471,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	61.440.471,00	61.440.471,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	0	61.061.000,00	61.061.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	379.471,00	379.471,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS BATURUBE	0	52.833.228,00	52.833.228,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0	52.833.228,00	52.833.228,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	52.833.228,00	52.833.228,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.01	Pajak Daerah	0	5.771.700,00	5.771.700,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	0	44.048.700,00	44.048.700,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	3.012.828,00	3.012.828,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS PANCAMAKMUR	0	2.711.936,00	2.711.936,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.711.936,00	2.711.936,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2.711.936,00	2.711.936,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	0	2.421.000,00	2.421.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	290.936,00	290.936,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS PANDAUKE	0	16.180.356,00	16.180.356,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	0	16.180.356,00	16.180.356,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	16.180.356,00	16.180.356,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.01	Pajak Daerah	0	3.159.500,00	3.159.500,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	0	12.796.000,00	12.796.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	224.856,00	224.856,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		PUSKESMAS WONGKO NDAYA	0	5.438.290,00	5.438.290,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	0	5.438.290,00	5.438.290,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	5.438.290,00	5.438.290,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.01	Pajak Daerah	0	288.000,00	288.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	0	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	5.290,00	5.290,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		PUSKESMAS TAMBAYOLI	0	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.02	Retribusi Daerah	0	2.473.000,00	2.473.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		PUSKESMAS ANUTOLUWU	0	4.639.104,00	4.639.104,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	0	4.639.104,00	4.639.104,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4.639.104,00	4.639.104,00	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.02	Retribusi Daerah	0	4.113.000,00	4.113.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	526.104,00	526.104,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	0	7.429.200,00	7.429.200,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	0	7.429.200,00	7.429.200,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	7.429.200,00	7.429.200,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.01	Pajak Daerah	0	2.227.200,00	2.227.200,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.02	Retribusi Daerah	0	5.202.000,00	5.202.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		PUSKESMAS MAYUMBA	0	14.119.954,00	14.119.954,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	0	14.119.954,00	14.119.954,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	14.119.954,00	14.119.954,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.02	Retribusi Daerah	0	13.982.000,00	13.982.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	137.954,00	137.954,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.000.000	22.000.000,00	(28.000.000,00)	44,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	50.000.000	22.000.000,00	(28.000.000,00)	44,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	22.000.000,00	(28.000.000,00)	44,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	22.000.000,00	(28.000.000,00)	44,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000	22.000.000,00	(28.000.000,00)	44,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	36.025.000.000	18.777.455.804,00	(17.247.544.196,00)	52,12
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.000.000.000	17.525.861.100,00	2.525.861.100,00	116,84
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15.000.000.000	17.525.861.100,00	2.525.861.100,00	116,84
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000.000	17.525.861.100,00	2.525.861.100,00	116,84
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000.000	17.525.861.100,00	2.525.861.100,00	116,84
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000.000	17.525.861.100,00	2.525.861.100,00	116,84
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.000.000	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	50.000.000	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	600.000.000	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERA	600.000.000	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	375.000.000	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	375.000.000	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	375.000.000	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	20.000.000.000	355.910.213,00	(19.644.089.787,00)	1,78
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	20.000.000.000	355.910.213,00	(19.644.089.787,00)	1,78
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000.000	355.910.213,00	(19.644.089.787,00)	1,78
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000.000	355.910.213,00	(19.644.089.787,00)	1,78
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000.000	355.590.643,00	(19.644.409.357,00)	1,78
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	319.570,00	319.570,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	50.000.000	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN DAERAH	50.000.000	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00

3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	27.287.197,00	27.287.197,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	0	27.287.197,00	27.287.197,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BAGIAN UMUM	0	25.770.025,00	25.770.025,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0	25.770.025,00	25.770.025,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	25.770.025,00	25.770.025,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	25.770.025,00	25.770.025,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	28.498,00	28.498,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0	28.498,00	28.498,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	28.498,00	28.498,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	28.498,00	28.498,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN PEMERINTAHAN	0	2.200,00	2.200,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.200,00	2.200,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2.200,00	2.200,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	2.200,00	2.200,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	1.409.410,00	1.409.410,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.409.410,00	1.409.410,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1.409.410,00	1.409.410,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.409.410,00	1.409.410,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN HUKUM	0	3.711,00	3.711,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0	3.711,00	3.711,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3.711,00	3.711,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	3.711,00	3.711,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN ORGANISASI	0	3.916,00	3.916,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	0	3.916,00	3.916,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3.916,00	3.916,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	3.916,00	3.916,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	53.332,00	53.332,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0	53.332,00	53.332,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	53.332,00	53.332,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	53.332,00	53.332,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0	7.327,00	7.327,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0	7.327,00	7.327,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	7.327,00	7.327,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	7.327,00	7.327,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	8.778,00	8.778,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	0	8.778,00	8.778,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	8.778,00	8.778,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	8.778,00	8.778,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.567.681.831.660	1.528.303.491.427,11	(39.378.340.232,89)	97,49
5.02			KEUANGAN	1.567.681.831.660	1.528.303.491.427,11	(39.378.340.232,89)	97,49
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.428.165.238.843	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.428.165.238.843	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.059.614.000	1.386.852.773.248,00	2.793.159.248,00	100,20

5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843	49.843.333.666,00	5.737.708.823,00	113,01
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	139.516.592.817	91.607.384.513,11	(47.909.208.303,89)	65,66
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	139.516.592.817	91.607.384.513,11	(47.909.208.303,89)	65,66
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.516.592.817	91.607.384.513,11	(47.909.208.303,89)	65,66
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.01	Pajak Daerah	118.875.000.000	74.520.072.718,00	(44.354.927.282,00)	62,69
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000	5.229.148.166,00	(632.407.834,00)	89,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.780.036.817	11.858.163.629,11	(2.921.873.187,89)	80,23
		5	Belanja	1.665.492.192.835	1.545.785.917.121,66	119.706.275.713,34)	92,81
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	868.555.243.815	801.306.330.820,60	(67.248.912.994,44)	92,26
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	291.056.974.816	250.205.126.444,00	(40.851.848.372,00)	85,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	291.056.974.816	250.205.126.444,00	(40.851.848.372,00)	85,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	291.056.974.816	250.205.126.444,00	(40.851.848.372,00)	85,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	258.557.393.871	219.253.510.655,00	(39.303.883.216,00)	84,80
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	204.432.239.771	173.547.629.844,00	(30.884.609.927,00)	84,89
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.735.156.146	43.322.105.811,00	(8.413.050.335,00)	83,74
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.389.997.954	2.383.775.000,00	(6.222.954,00)	99,74
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	32.499.580.945	30.951.615.789,00	(1.547.965.156,00)	95,24
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.449.405.995	10.907.877.824,00	(1.541.528.171,00)	87,62
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.050.174.950	20.043.737.965,00	(6.436.985,00)	99,97
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	324.746.657.431	320.387.532.802,60	(4.359.124.629,09)	98,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN DAERAH	186.174.300.722	182.723.628.078,00	(3.450.672.644,69)	98,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	186.174.300.722	182.723.628.078,00	(3.450.672.644,69)	98,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	165.771.996.394	162.638.825.110,00	(3.133.171.284,99)	98,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	105.528.435.843	104.638.345.627,00	(890.090.216,00)	99,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.543.560.551	57.300.479.483,00	(2.243.081.068,99)	96,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000	700.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.402.304.327	20.084.802.968,00	(317.501.359,70)	98,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.610.116.751	9.393.998.800,00	(216.117.951,00)	97,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.466.187.576	8.364.809.708,00	(101.377.868,70)	98,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.326.000.000	2.325.994.460,00	(5.540,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	123.736.552.179	123.823.242.925,60	86.690.746,60	100,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	123.736.552.179	123.823.242.925,60	86.690.746,60	100,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.853.486.735	79.071.569.087,60	218.082.352,60	100,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.089.430.181	29.440.111.682,00	4.350.681.501,00	117,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.764.056.554	49.631.457.405,60	(4.132.599.148,40)	92,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	44.883.065.444	44.751.673.838,00	(131.391.606,00)	99,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.823.981.721	35.710.592.691,00	(113.389.030,00)	99,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.059.083.723	9.041.081.147,00	(18.002.576,00)	99,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS LEE	414.767.332	409.684.013,00	(5.083.319,00)	98,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	414.767.332	409.684.013,00	(5.083.319,00)	98,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	399.767.332	394.684.013,00	(5.083.319,00)	98,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	123.197.455	123.197.455,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.569.877	271.486.558,00	(5.083.319,00)	98,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS TOMATA	1.397.083.536	1.357.414.258,00	(39.669.278,00)	97,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.397.083.536	1.357.414.258,00	(39.669.278,00)	97,16

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.372.059.036	1.323.736.758,00	(48.322.278,00)	96,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	496.010.632	477.734.901,00	(18.275.731,00)	96,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	876.048.404	846.001.857,00	(30.046.547,00)	96,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	25.024.500	33.677.500,00	8.653.000,00	134,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.024.500	33.677.500,00	8.653.000,00	134,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS BETELEME	1.734.085.094	1.639.170.122,00	(94.914.972,00)	94,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.734.085.094	1.639.170.122,00	(94.914.972,00)	94,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.525.360.094	1.431.620.122,00	(93.739.972,00)	93,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	661.164.460	591.299.000,00	(69.865.460,00)	89,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.195.634	840.321.122,00	(23.874.512,00)	97,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	208.725.000	207.550.000,00	(1.175.000,00)	99,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.725.000	207.550.000,00	(1.175.000,00)	99,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS PETUMBEA	1.011.394.697	966.631.001,00	(44.763.696,00)	95,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.011.394.697	966.631.001,00	(44.763.696,00)	95,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	884.196.697	839.433.001,00	(44.763.696,00)	94,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	408.915.329	383.403.877,00	(25.511.452,00)	93,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.281.368	456.029.124,00	(19.252.244,00)	95,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	127.198.000	127.198.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.198.000	127.198.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS MOLINO	1.474.479.523	1.345.178.082,00	(129.301.441,00)	91,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.474.479.523	1.345.178.082,00	(129.301.441,00)	91,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.262.337.023	1.155.485.582,00	(106.851.441,00)	91,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	746.988.433	689.967.718,00	(57.020.715,00)	92,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.348.590	465.517.864,00	(49.830.726,00)	90,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	212.142.500	189.692.500,00	(22.450.000,00)	89,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.142.500	189.692.500,00	(22.450.000,00)	89,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS KOLONDALE	1.841.906.144	1.734.439.182,00	(107.466.962,00)	94,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	1.841.906.144	1.734.439.182,00	(107.466.962,00)	94,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.770.223.294	1.659.836.332,00	(110.386.962,00)	93,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	672.620.718	661.661.632,00	(10.959.086,00)	98,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.602.576	998.174.700,00	(99.427.876,00)	90,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	71.682.850	74.602.850,00	2.920.000,00	104,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.682.850	74.602.850,00	2.920.000,00	104,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS BATURUBE	2.060.241.036	1.866.026.579,00	(194.214.457,00)	90,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	2.060.241.036	1.866.026.579,00	(194.214.457,00)	90,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.872.941.036	1.703.726.579,00	(169.214.457,00)	90,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	663.353.736	547.063.816,00	(116.289.920,00)	82,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.209.587.300	1.156.662.763,00	(52.924.537,00)	95,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	187.300.000	162.300.000,00	(25.000.000,00)	86,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.300.000	162.300.000,00	(25.000.000,00)	86,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS PANCAMAKMUR	770.309.125	710.368.121,00	(59.941.004,00)	92,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	770.309.125	710.368.121,00	(59.941.004,00)	92,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	755.309.125	695.368.121,00	(59.941.004,00)	92,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	287.482.535	256.147.110,00	(31.335.425,00)	89,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.826.590	439.221.011,00	(28.605.579,00)	93,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS PANDAUKE	1.088.854.223	1.003.129.975,00	(85.724.248,00)	92,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	1.088.854.223	1.003.129.975,00	(85.724.248,00)	92,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.063.854.223	999.769.975,00	(64.084.248,00)	93,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	434.456.023	391.626.144,00	(42.829.879,00)	90,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.398.200	608.143.831,00	(21.254.369,00)	96,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000	3.360.000,00	(21.640.000,00)	13,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	3.360.000,00	(21.640.000,00)	13,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		PUSKESMAS WONGKO NDAYA	455.990.533	439.198.688,00	(16.791.845,00)	96,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	455.990.533	439.198.688,00	(16.791.845,00)	96,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	431.603.533	414.818.688,00	(16.784.845,00)	96,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	78.450.000	68.035.624,00	(10.414.376,00)	86,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.153.533	346.783.064,00	(6.370.469,00)	98,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	24.387.000	24.380.000,00	(7.000,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.387.000	24.380.000,00	(7.000,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		PUSKESMAS TAMBAYOLI	416.699.248	388.410.792,00	(28.288.456,00)	93,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	416.699.248	388.410.792,00	(28.288.456,00)	93,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	387.271.748	370.983.292,00	(16.288.456,00)	95,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	151.849.124	138.024.008,00	(13.825.116,40)	90,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.422.623	232.959.284,00	(2.463.339,60)	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	29.427.500	17.427.500,00	(12.000.000,00)	59,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.427.500	17.427.500,00	(12.000.000,00)	59,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		PUSKESMAS ANUTOLUWU	807.379.125	713.706.964,00	(93.672.161,00)	88,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	807.379.125	713.706.964,00	(93.672.161,00)	88,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	697.510.425	649.114.864,00	(48.395.561,00)	93,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	385.543.725	347.656.793,00	(37.886.932,00)	90,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.966.700	301.458.071,00	(10.508.629,00)	96,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	109.868.700	64.592.100,00	(45.276.600,00)	58,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.868.700	64.592.100,00	(45.276.600,00)	58,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	371.165.067	360.232.125,00	(10.932.942,00)	97,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	371.165.067	360.232.125,00	(10.932.942,00)	97,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	363.258.817	352.326.125,00	(10.932.692,00)	96,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	77.834.667	76.037.735,00	(1.796.932,00)	97,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.424.150	276.288.390,00	(9.135.760,00)	96,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	7.906.250	7.906.000,00	(250,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.906.250	7.906.000,00	(250,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		PUSKESMAS MAYUMBA	991.449.847	907.071.897,00	(84.377.950,00)	91,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	991.449.847	907.071.897,00	(84.377.950,00)	91,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	906.199.847	827.961.147,00	(78.238.700,00)	91,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	334.339.429	293.000.000,00	(41.339.429,00)	87,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.860.418	534.961.147,00	(36.899.271,00)	93,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	85.250.000	79.110.750,00	(6.139.250,00)	92,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.250.000	79.110.750,00	(6.139.250,00)	92,80
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.767.796.341	159.477.210.939,00	(19.290.585.402,55)	89,21
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	178.767.796.341	159.477.210.939,00	(19.290.585.402,55)	89,21
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	178.767.796.341	159.477.210.939,00	(19.290.585.402,55)	89,21
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	44.178.770.928	42.082.746.170,00	(2.096.024.758,24)	95,26
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.464.275.481	7.174.597.574,00	(289.677.907,00)	96,12

1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.714.495.447	34.908.148.596,00	(1.806.346.851,24)	95,08
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	134.589.025.413	117.394.464.769,00	(17.194.560.644,31)	87,22
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	572.410.900	570.165.000,00	(2.245.900,00)	99,61
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.670.124.172	15.274.795.681,00	(5.395.328.491,00)	73,90
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.346.490.341	101.549.504.088,00	(11.796.986.253,31)	89,59
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.189.113.179	27.994.104.891,00	(195.008.288,31)	99,31
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	28.189.113.179	27.994.104.891,00	(195.008.288,31)	99,31
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	28.189.113.179	27.994.104.891,00	(195.008.288,31)	99,31
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.559.102.660	3.547.740.283,00	(11.362.377,00)	99,68
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.559.102.660	3.547.740.283,00	(11.362.377,00)	99,68
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.630.010.519	24.446.364.608,00	(183.645.911,31)	99,25
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000	18.000.000,00	0,00	100,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.582.974.684	7.496.430.608,00	(86.544.076,31)	98,86
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.029.035.835	16.931.934.000,00	(97.101.835,00)	99,43
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.308.464.430	36.452.599.022,00	(1.855.865.408,49)	95,16
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	16.225.233.787	15.935.501.334,00	(289.732.453,00)	98,21
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.225.233.787	15.935.501.334,00	(289.732.453,00)	98,21
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.767.282.587	15.477.590.334,00	(289.692.253,00)	98,16
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.304.313.939	5.077.118.234,00	(227.195.705,00)	95,72
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.462.968.648	10.400.472.100,00	(62.496.548,00)	99,40
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	457.951.200	457.911.000,00	(40.200,00)	99,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.951.200	457.911.000,00	(40.200,00)	99,99
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.083.230.643	20.517.097.688,00	(1.566.132.955,49)	92,91
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	22.083.230.643	20.517.097.688,00	(1.566.132.955,49)	92,91
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.004.198.947	9.602.641.434,00	(401.557.513,99)	95,99
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.113.744.148	2.968.336.325,00	(145.407.823,00)	95,33
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.890.454.799	6.634.305.109,00	(256.149.690,99)	96,28
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.079.031.695	10.914.456.254,00	(1.164.575.441,50)	90,36
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534.494.650	533.937.688,00	(556.962,00)	99,90
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.964.537.045	1.964.537.000,00	(45,50)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.580.000.000	8.415.981.566,00	(1.164.018.434,00)	87,85
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.486.237.616	6.789.756.722,00	(696.480.894,00)	90,70
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL DAERAH	7.486.237.616	6.789.756.722,00	(696.480.894,00)	90,70
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.486.237.616	6.789.756.722,00	(696.480.894,00)	90,70
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.437.437.616	6.741.356.722,00	(696.080.894,00)	90,64
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.947.685.798	2.783.439.651,00	(164.246.147,00)	94,43
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.489.751.818	3.957.917.071,00	(531.834.747,00)	88,15
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.800.000	48.400.000,00	(400.000,00)	99,18
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.800.000	48.400.000,00	(400.000,00)	99,18
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	126.737.659.016	117.393.410.962,18	(9.344.248.053,82)	92,63
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.866.520.972	5.577.594.925,00	(288.926.047,00)	95,08
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.866.520.972	5.577.594.925,00	(288.926.047,00)	95,08
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.866.520.972	5.577.594.925,00	(288.926.047,00)	95,08
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.323.120.972	5.119.934.925,00	(203.186.047,00)	96,18
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.199.305.677	3.083.742.478,00	(115.563.199,00)	96,39
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.123.815.295	2.036.192.447,00	(87.622.848,00)	95,87

2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	543.400.000	457.660.000,00	(85.740.000,00)	84,22
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543.400.000	457.660.000,00	(85.740.000,00)	84,22
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.035.793.000	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	1.035.793.000	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.035.793.000	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.035.793.000	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.793.000	608.543.175,00	(27.249.825,00)	95,71
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000	400.000.000,00	0,00	100,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	439.607.250	399.448.500,00	(40.158.750,00)	90,86
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	439.607.250	399.448.500,00	(40.158.750,00)	90,86
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	439.607.250	399.448.500,00	(40.158.750,00)	90,86
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	426.777.250	386.618.500,00	(40.158.750,00)	90,59
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.777.250	386.618.500,00	(40.158.750,00)	90,59
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.830.000	12.830.000,00	0,00	100,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.830.000	12.830.000,00	0,00	100,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.645.912.327	9.356.460.064,00	(289.452.263,00)	97,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	9.645.912.327	9.356.460.064,00	(289.452.263,00)	97,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.645.912.327	9.356.460.064,00	(289.452.263,00)	97,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.672.912.327	8.383.769.964,00	(289.142.363,00)	96,67
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.615.211.380	3.482.399.197,00	(132.812.183,00)	96,33
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.042.700.947	4.901.370.767,00	(141.330.180,00)	97,20
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000	0,00	(15.000.000,00)	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	973.000.000	972.690.100,00	(309.900,00)	99,97
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	973.000.000	972.690.100,00	(309.900,00)	99,97
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.378.791.796	6.376.518.293,00	(2.002.273.503,00)	76,10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	8.378.791.796	6.376.518.293,00	(2.002.273.503,00)	76,10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.378.791.796	6.376.518.293,00	(2.002.273.503,00)	76,10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.133.841.796	5.833.268.293,00	(300.573.503,00)	95,10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.901.301.795	3.626.613.288,00	(274.688.507,00)	92,96
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.232.540.001	2.206.655.005,00	(25.884.996,00)	98,84
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.244.950.000	543.250.000,00	(1.701.700.000,00)	24,20
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.244.950.000	543.250.000,00	(1.701.700.000,00)	24,20
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.212.264.322	13.610.404.183,00	(601.860.139,00)	95,77
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	14.212.264.322	13.610.404.183,00	(601.860.139,00)	95,77
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.212.264.322	13.610.404.183,00	(601.860.139,00)	95,77
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.922.864.322	13.321.350.183,00	(601.514.139,00)	95,68
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.914.194.293	2.635.220.728,00	(278.973.565,00)	90,43
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.008.670.029	9.686.129.455,00	(322.540.574,00)	96,78
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	289.400.000	289.054.000,00	(346.000,00)	99,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.400.000	289.054.000,00	(346.000,00)	99,88
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.405.959.881	13.642.558.257,00	(763.401.624,00)	94,70
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	14.405.959.881	13.642.558.257,00	(763.401.624,00)	94,70
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.405.959.881	13.642.558.257,00	(763.401.624,00)	94,70
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.505.959.881	12.823.283.657,00	(682.676.224,00)	94,95

2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.194.319.561	4.940.932.842,00	(253.386.719,00)	95,12
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.311.640.320	7.882.350.815,00	(429.289.505,00)	94,84
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	900.000.000	819.274.600,00	(80.725.400,00)	91,03
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000.000	819.274.600,00	(80.725.400,00)	91,03
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.184.294.910	16.393.892.260,00	(790.402.650,00)	95,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	17.184.294.910	16.393.892.260,00	(790.402.650,00)	95,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.184.294.910	16.393.892.260,00	(790.402.650,00)	95,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.684.729.285	7.298.677.900,00	(386.051.385,00)	94,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.700.612.579	3.516.628.425,00	(183.984.154,00)	95,03
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.984.116.706	3.782.049.475,00	(202.067.231,00)	94,93
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.499.565.625	9.095.214.360,00	(404.351.265,00)	95,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.324.326	27.900.000,00	(424.326,00)	98,50
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.801.241.299	3.424.550.000,00	(376.691.299,00)	90,09
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.670.000.000	5.642.764.360,00	(27.235.640,00)	99,52
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.923.339.444	8.228.136.495,00	(695.202.949,00)	92,21
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	8.923.339.444	8.228.136.495,00	(695.202.949,00)	92,21
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.923.339.444	8.228.136.495,00	(695.202.949,00)	92,21
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.717.602.444	8.086.766.495,00	(630.835.949,00)	92,76
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.633.770.944	3.420.599.903,00	(213.171.041,00)	94,13
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.083.831.500	4.666.166.592,00	(417.664.908,00)	91,78
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	205.737.000	141.370.000,00	(64.367.000,00)	68,71
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.737.000	141.370.000,00	(64.367.000,00)	68,71
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.688.271.747	4.378.962.088,00	(309.309.659,00)	93,40
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERA	4.688.271.747	4.378.962.088,00	(309.309.659,00)	93,40
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.688.271.747	4.378.962.088,00	(309.309.659,00)	93,40
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.602.911.747	4.293.602.088,00	(309.309.659,00)	93,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.339.621.839	3.098.043.312,00	(241.578.527,00)	92,77
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.289.908	1.195.558.776,00	(67.731.132,00)	94,64
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	85.360.000	85.360.000,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.360.000	85.360.000,00	0,00	100,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.393.372.553	17.973.849.493,18	(419.523.059,82)	97,72
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	18.393.372.553	17.973.849.493,18	(419.523.059,82)	97,72
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.393.372.553	17.973.849.493,18	(419.523.059,82)	97,72
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.845.348.003	7.560.517.929,00	(284.830.074,00)	96,37
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.264.660.362	5.128.344.971,00	(136.315.391,00)	97,41
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.687.641	2.432.172.958,00	(148.514.683,00)	94,25
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.548.024.550	10.413.331.564,18	(134.692.985,82)	98,72
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	953.203.000	830.813.500,00	(122.389.500,00)	87,16
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.594.821.550	9.582.518.064,18	(12.303.485,82)	99,87
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	4.739.472.850	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAHA DAERAH	4.739.472.850	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.739.472.850	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.739.472.850	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.558.632.350	2.331.320.488,00	(227.311.862,00)	91,12
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.180.840.500	1.910.000.000,00	(270.840.500,00)	87,58
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175.145.000	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	175.145.000	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34

2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	175.145.000	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	175.145.000	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.145.000	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	48.726.000	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	48.726.000	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	48.726.000	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.726.000	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.726.000	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.464.829.700	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.464.829.700	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.464.829.700	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.464.829.700	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.464.829.700	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.951.830.064	14.625.543.104,00	(2.326.286.960,00)	86,28
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	16.951.830.064	14.625.543.104,00	(2.326.286.960,00)	86,28
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.951.830.064	14.625.543.104,00	(2.326.286.960,00)	86,28
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.614.928.240	4.238.439.904,00	(376.488.336,00)	91,84
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.268.111.658	2.016.810.615,00	(251.301.043,00)	88,92
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.346.816.582	2.221.629.289,00	(125.187.293,00)	94,67
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.336.901.824	10.387.103.200,00	(1.949.798.624,00)	84,20
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.281.600	780.166.000,00	(115.600,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.100.000.000	8.150.722.500,00	(1.949.277.500,00)	80,70
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.201.620.224	1.201.600.000,00	(20.224,00)	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000	254.614.700,00	(385.300,00)	99,85
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	183.527.200	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	183.527.200	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	183.527.200	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	177.937.200	177.629.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.937.200	177.629.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.590.000	5.590.000,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.590.000	5.590.000,00	0,00	100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	85.760.500.379	81.883.895.465,89	(3.876.604.913,11)	95,48
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.242.224.270	13.810.662.774,00	(431.561.496,00)	96,97
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN DAERAH	14.242.224.270	13.810.662.774,00	(431.561.496,00)	96,97
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.242.224.270	13.810.662.774,00	(431.561.496,00)	96,97
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.924.598.270	13.500.538.774,00	(424.059.496,00)	96,95
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.256.003.084	3.913.892.705,00	(342.110.379,00)	91,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.668.595.186	9.586.646.069,00	(81.949.117,00)	99,15
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	317.626.000	310.124.000,00	(7.502.000,00)	97,64
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.211.000	152.896.000,00	(315.000,00)	99,79
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.415.000	157.228.000,00	(7.187.000,00)	95,63
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.545.628.328	8.777.686.023,00	(767.942.305,00)	91,96
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA DAERAH	9.545.628.328	8.777.686.023,00	(767.942.305,00)	91,96
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.545.628.328	8.777.686.023,00	(767.942.305,00)	91,96
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.149.992.787	7.621.774.523,00	(528.218.264,00)	93,52
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.984.061.672	3.792.187.640,00	(191.874.032,00)	95,18
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.931.115	3.814.586.883,00	(336.344.232,00)	91,90

3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.395.635.541	1.155.911.500,00	(239.724.041,00)	82,82
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.635.541	441.240.000,00	(58.395.541,00)	88,31
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	706.000.000	525.068.500,00	(180.931.500,00)	74,37
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.000.000	189.603.000,00	(397.000,00)	99,79
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.886.776.102	49.442.659.456,89	(2.444.116.645,11)	95,29
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	51.886.776.102	49.442.659.456,89	(2.444.116.645,11)	95,29
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	51.886.776.102	49.442.659.456,89	(2.444.116.645,11)	95,29
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	51.150.608.419	48.720.408.686,89	(2.430.199.732,11)	95,25
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	17.712.454.003	17.559.344.944,00	(153.109.059,00)	99,14
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.438.154.416	31.161.063.742,89	(2.277.090.673,11)	93,19
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	736.167.683	722.250.770,00	(13.916.913,00)	98,11
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.651.575	373.442.770,00	(13.208.805,00)	96,58
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.516.108	348.808.000,00	(708.108,00)	99,80
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.635.847.429	4.604.378.610,00	(31.468.819,00)	99,32
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERA	4.635.847.429	4.604.378.610,00	(31.468.819,00)	99,32
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.635.847.429	4.604.378.610,00	(31.468.819,00)	99,32
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.328.509.850	3.300.638.610,00	(27.871.240,00)	99,16
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.328.509.850	3.300.638.610,00	(27.871.240,00)	99,16
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.307.337.579	1.303.740.000,00	(3.597.579,00)	99,72
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	0,00	(3.000.000,00)	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.104.337.579	1.103.890.000,00	(447.579,00)	99,96
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	199.850.000,00	(150.000,00)	99,93
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	534.999.850	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERA	534.999.850	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	5	BELANJA DAERAH	534.999.850	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	534.999.850	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.999.850	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.915.024.400	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.915.024.400	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.915.024.400	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.856.024.400	1.833.252.852,00	(22.771.548,00)	98,77
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.856.024.400	1.833.252.852,00	(22.771.548,00)	98,77
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.059.000.000	2.903.999.000,00	(155.001.000,00)	94,93
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.000.000	274.500.000,00	(150.500.000,00)	64,59
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.634.000.000	2.629.499.000,00	(4.501.000,00)	99,83
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	145.868.929.212	134.868.533.014,00	(11.000.396.198,00)	92,46
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	101.617.270.551	93.362.540.803,00	(8.254.729.748,00)	91,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	0	5.233.711.460,00	5.233.711.460,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	0	5.233.711.460,00	5.233.711.460,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	0	4.318.651.460,00	4.318.651.460,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	0	2.169.488.399,00	2.169.488.399,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.149.163.061,00	2.149.163.061,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	0	915.060.000,00	915.060.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	915.060.000,00	915.060.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BAGIAN UMUM	37.646.610.171	32.508.037.632,00	(5.138.572.539,00)	86,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	37.646.610.171	32.508.037.632,00	(5.138.572.539,00)	86,35

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.878.225.171	31.749.663.632,00	(5.128.561.539,00)	86,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.644.745.295	11.368.994.943,00	(2.275.750.352,00)	83,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.233.479.876	20.380.668.689,00	(2.852.811.187,00)	87,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	768.385.000	758.374.000,00	(10.011.000,00)	98,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	768.385.000	758.374.000,00	(10.011.000,00)	98,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.079.999.950	934.462.428,00	(145.537.522,00)	86,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.079.999.950	934.462.428,00	(145.537.522,00)	86,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.030.799.950	885.292.428,00	(145.507.522,00)	85,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000	19.000.000,00	(3.800.000,00)	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.999.950	866.292.428,00	(141.707.522,00)	85,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	49.200.000	49.170.000,00	(30.000,00)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.200.000	49.170.000,00	(30.000,00)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN PEMERINTAHAN	8.468.792.100	2.539.372.976,00	(5.929.419.124,00)	29,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	8.468.792.100	2.539.372.976,00	(5.929.419.124,00)	29,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.554.584.950	1.312.522.976,00	(1.242.061.974,00)	51,38
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000	22.800.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.531.784.950	1.289.722.976,00	(1.242.061.974,00)	50,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.914.207.150	1.226.850.000,00	(4.687.357.150,00)	20,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150	1.048.200.000,00	(4.522.207.150,00)	18,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.800.000	178.650.000,00	(150.000,00)	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.000.000	0,00	(165.000.000,00)	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.756.746.080	42.941.251.235,00	(815.494.845,00)	98,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	43.756.746.080	42.941.251.235,00	(815.494.845,00)	98,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.521.346.080	42.706.053.235,00	(815.292.845,00)	98,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	28.800.000	24.000.000,00	(4.800.000,00)	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.542.437.060	6.773.084.235,00	(769.352.825,00)	89,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	7.428.184.965	7.427.031.945,00	(1.153.020,00)	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055	28.481.937.055,00	(39.987.000,00)	99,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	235.400.000	235.198.000,00	(202.000,00)	99,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.400.000	36.363.000,00	(37.000,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000	198.835.000,00	(165.000,00)	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN HUKUM	1.378.000.000	1.134.654.292,00	(243.345.708,00)	82,34
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.378.000.000	1.134.654.292,00	(243.345.708,00)	82,34
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.251.158.050	1.007.894.292,00	(243.263.758,00)	80,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000	19.000.000,00	(3.800.000,00)	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.228.358.050	988.894.292,00	(239.463.758,00)	80,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	126.841.950	126.760.000,00	(81.950,00)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.841.950	126.760.000,00	(81.950,00)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN ORGANISASI	1.438.000.000	1.282.215.833,00	(155.784.167,00)	89,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.438.000.000	1.282.215.833,00	(155.784.167,00)	89,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.303.415.000	1.147.937.833,00	(155.477.167,00)	88,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000	22.800.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.615.000	1.125.137.833,00	(155.477.167,00)	87,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	134.585.000	134.278.000,00	(307.000,00)	99,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.585.000	34.500.000,00	(85.000,00)	99,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	99.778.000,00	(222.000,00)	99,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.304.455.000	3.897.356.922,00	(407.098.078,00)	90,54

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	4.304.455.000	3.897.356.922,00	(407.098.078,00)	90,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.020.205.000	2.630.759.299,00	(389.445.701,00)	87,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	861.500.000	724.500.000,00	(137.000.000,00)	84,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.705.000	1.906.259.299,00	(252.445.701,00)	88,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.284.250.000	1.266.597.623,00	(17.652.377,00)	98,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.209.250.000	1.191.707.550,00	(17.542.450,00)	98,55
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000	74.890.073,00	(109.927,00)	99,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.351.797.450	1.026.032.907,00	(325.764.543,00)	75,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	1.351.797.450	1.026.032.907,00	(325.764.543,00)	75,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.182.127.450	872.242.907,00	(309.884.543,00)	73,79
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000	19.000.000,00	(3.800.000,00)	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.327.450	853.242.907,00	(306.084.543,00)	73,60
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	169.670.000	153.790.000,00	(15.880.000,00)	90,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.670.000	153.790.000,00	(15.880.000,00)	90,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.192.869.800	1.865.445.118,00	(327.424.682,00)	85,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	2.192.869.800	1.865.445.118,00	(327.424.682,00)	85,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.561.050	1.823.136.368,00	(327.424.682,00)	84,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000	19.000.000,00	(3.800.000,00)	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.127.761.050	1.804.136.368,00	(323.624.682,00)	84,79
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	42.308.750	42.308.750,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.308.750	42.308.750,00	0,00	100,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	44.251.658.661	41.505.992.211,00	(2.745.666.450,00)	93,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	44.251.658.661	41.505.992.211,00	(2.745.666.450,00)	93,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	44.251.658.661	41.505.992.211,00	(2.745.666.450,00)	93,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	39.980.858.661	37.379.175.211,00	(2.601.683.450,00)	93,49
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.325.979.521	14.067.452.749,00	(258.526.772,00)	98,20
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.654.879.140	23.311.722.462,00	(2.343.156.678,00)	90,87
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.270.800.000	4.126.817.000,00	(143.983.000,00)	96,63
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.010.800.000	2.869.415.000,00	(141.385.000,00)	95,30
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	785.000.000	783.537.000,00	(1.463.000,00)	99,81
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	475.000.000	473.865.000,00	(1.135.000,00)	99,76
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	331.785.425.436	307.824.512.153,00	(23.960.913.283,96)	92,78
5.01			PERENCANAAN	9.283.872.097	8.918.155.495,00	(365.716.602,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.283.872.097	8.918.155.495,00	(365.716.602,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.283.872.097	8.918.155.495,00	(365.716.602,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.157.365.453	8.801.655.495,00	(355.709.958,00)	96,12
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.153.703.379	3.970.306.570,00	(183.396.809,00)	95,58
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.003.662.074	4.831.348.925,00	(172.313.149,00)	96,56
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	126.506.644	116.500.000,00	(10.006.644,00)	92,09
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.506.644	116.500.000,00	(10.006.644,00)	92,09
5.02			KEUANGAN	311.344.930.040	288.215.911.985,00	(23.129.018.055,96)	92,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	299.056.780.096	276.658.924.509,00	(22.397.855.587,96)	92,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	299.056.780.096	276.658.924.509,00	(22.397.855.587,96)	92,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	62.948.166.494	45.480.177.647,00	(17.467.988.847,96)	72,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	42.089.030.127	27.931.955.650,00	(14.157.074.477,96)	66,36
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.017.931.707	8.925.356.826,00	(3.092.574.881,00)	74,27
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.03	Belanja Bunga	8.841.204.660	8.622.865.171,00	(218.339.489,00)	97,53

5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.895.752.650	3.569.269.000,00	(1.326.483.650,00)	72,91
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.697.956.650	3.371.690.000,00	(1.326.266.650,00)	71,77
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.796.000	197.579.000,00	(217.000,00)	99,89
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000	1.157.886.000,00	(1.992.114.000,00)	36,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000	1.157.886.000,00	(1.992.114.000,00)	36,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	228.062.860.952	226.451.591.862,00	(1.611.269.090,00)	99,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	944.103.854	0,00	(944.103.854,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098	226.451.591.862,00	(667.165.236,00)	99,71
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	12.288.149.944	11.556.987.476,00	(731.162.468,00)	94,05
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	12.288.149.944	11.556.987.476,00	(731.162.468,00)	94,05
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.806.149.944	11.075.928.248,00	(730.221.696,00)	93,81
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.708.085.811	7.037.212.447,00	(670.873.364,00)	91,30
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.098.064.133	4.038.715.801,00	(59.348.332,00)	98,55
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	482.000.000	481.059.228,00	(940.772,00)	99,80
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.500.000	283.316.700,00	(183.300,00)	99,94
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.500.000	197.742.528,00	(757.472,00)	99,62
5.03			KEPEGAWAIAN	8.132.288.209	7.725.664.975,00	(406.623.234,00)	95,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.132.288.209	7.725.664.975,00	(406.623.234,00)	95,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.132.288.209	7.725.664.975,00	(406.623.234,00)	95,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.918.968.209	7.527.416.175,00	(391.552.034,00)	95,06
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.824.259.089	4.607.996.945,00	(216.262.144,00)	95,52
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.094.709.120	2.919.419.230,00	(175.289.890,00)	94,34
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	213.320.000	198.248.800,00	(15.071.200,00)	92,93
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.320.000	198.248.800,00	(71.200,00)	99,96
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.550.810.800	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.550.810.800	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.550.810.800	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.810.800	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.810.800	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	473.524.290	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	473.524.290	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	473.524.290	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	473.524.290	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.524.290	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.409.972.099	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	16.409.972.099	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	16.409.972.099	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.409.972.099	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.351.649.599	13.068.739.776,00	(1.282.909.823,00)	91,06
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.807.132.111	5.544.361.691,00	(262.770.420,00)	95,48
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.544.517.488	7.524.378.085,00	(1.020.139.403,00)	88,06
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.058.322.500	1.861.176.000,00	(197.146.500,00)	90,42
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.759.762.500	1.562.676.000,00	(197.086.500,00)	88,80
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.560.000	298.500.000,00	(60.000,00)	99,98
7			UNSUR KEWILAYAHAN	38.616.678.815	36.623.631.461,00	(1.993.047.354,00)	94,84
7.01			KECAMATAN	38.616.678.815	36.623.631.461,00	(1.993.047.354,00)	94,84

7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN PETASIA	8.997.786.886	8.830.469.649,00	(167.317.237,00)	98,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.997.786.886	8.830.469.649,00	(167.317.237,00)	98,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.468.424.665	7.312.347.667,00	(156.076.998,00)	97,91
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.711.553.205	4.592.100.429,00	(119.452.776,00)	97,46
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.756.871.460	2.720.247.238,00	(36.624.222,00)	98,67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.529.362.221	1.518.121.982,00	(11.240.239,00)	99,27
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.226.250	264.023.732,00	(202.518,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	287.080.000	281.490.250,00	(5.589.750,00)	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	978.055.971	972.608.000,00	(5.447.971,00)	99,44
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PETASIA BARAT	2.766.269.490	2.581.243.408,00	(185.026.082,00)	93,31
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.766.269.490	2.581.243.408,00	(185.026.082,00)	93,31
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.758.363.240	2.573.337.158,00	(185.026.082,00)	93,29
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.313.272.016	2.152.758.072,00	(160.513.944,00)	93,06
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.091.224	420.579.086,00	(24.512.138,00)	94,49
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.906.250	7.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.906.250	7.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN PETASIA TIMUR	3.476.049.885	3.311.832.785,00	(164.217.100,00)	95,28
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	3.476.049.885	3.311.832.785,00	(164.217.100,00)	95,28
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.163.049.885	3.001.521.785,00	(161.528.100,00)	94,89
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.519.249.930	2.358.171.090,00	(161.078.840,00)	93,61
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.799.955	643.350.695,00	(449.260,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	313.000.000	310.311.000,00	(2.689.000,00)	99,14
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	298.000.000	295.311.000,00	(2.689.000,00)	99,10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN BUNGKU UTARA	4.971.425.078	4.788.892.752,00	(182.532.326,00)	96,33
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	4.971.425.078	4.788.892.752,00	(182.532.326,00)	96,33
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.668.125.078	4.485.847.752,00	(182.277.326,00)	96,10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.066.425.178	3.884.235.245,00	(182.189.933,00)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.699.900	601.612.507,00	(87.393,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	303.300.000	303.045.000,00	(255.000,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.300.000	153.220.000,00	(80.000,00)	99,95
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.825.000,00	(175.000,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN MAMOSALATO	2.950.348.938	2.743.870.301,00	(206.478.637,00)	93,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	2.950.348.938	2.743.870.301,00	(206.478.637,00)	93,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.917.442.688	2.710.964.051,00	(206.478.637,00)	92,92
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.358.548.938	2.154.073.747,00	(204.475.191,00)	91,33
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.893.750	556.890.304,00	(2.003.446,00)	99,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	32.906.250	32.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.906.250	32.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN SOYO JAYA	2.446.706.899	2.208.096.204,00	(238.610.695,00)	90,25
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	2.446.706.899	2.208.096.204,00	(238.610.695,00)	90,25
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.417.414.749	2.178.804.054,00	(238.610.695,00)	90,13
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.971.706.899	1.734.236.648,00	(237.470.251,00)	87,96
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.707.850	444.567.406,00	(1.140.444,00)	99,74
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	29.292.150	29.292.150,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.292.150	29.292.150,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN LEMBO	3.665.007.082	3.493.148.248,00	(171.858.834,00)	95,31

7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	3.665.007.082	3.493.148.248,00	(171.858.834,00)	95,31
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.609.450.832	3.437.591.998,00	(171.858.834,00)	95,24
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.831.517.182	2.663.146.459,00	(168.370.723,00)	94,05
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.933.650	774.445.539,00	(3.488.111,00)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	55.556.250	55.556.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.556.250	55.556.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		KECAMATAN LEMBO RAYA	2.669.233.771	2.573.230.150,00	(96.003.621,00)	96,40
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	2.669.233.771	2.573.230.150,00	(96.003.621,00)	96,40
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.612.927.521	2.516.923.900,00	(96.003.621,00)	96,33
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.080.202.276	1.994.278.066,00	(85.924.210,00)	95,87
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.725.245	522.645.834,00	(10.079.411,00)	98,11
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	56.306.250	56.306.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.306.250	56.306.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		KECAMATAN MORI ATAS	3.551.285.625	3.392.351.208,00	(158.934.417,00)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	3.551.285.625	3.392.351.208,00	(158.934.417,00)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.380.285.625	3.221.524.208,00	(158.761.417,00)	95,30
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.976.685.787	2.818.056.393,00	(158.629.394,00)	94,67
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.599.838	403.467.815,00	(132.023,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	171.000.000	170.827.000,00	(173.000,00)	99,90
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.827.000,00	(173.000,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		KECAMATAN MORI UTARA	3.122.565.161	2.700.496.756,00	(422.068.405,00)	86,48
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	3.122.565.161	2.700.496.756,00	(422.068.405,00)	86,48
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.122.565.161	2.700.496.756,00	(422.068.405,00)	86,48
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.730.768.211	2.308.715.806,00	(422.052.405,00)	84,54
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.796.950	391.780.950,00	(16.000,00)	100,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	51.757.784.062	50.955.687.468,99	(802.096.593,01)	98,45
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.757.784.062	50.955.687.468,99	(802.096.593,01)	98,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	51.757.784.062	50.955.687.468,99	(802.096.593,01)	98,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	51.757.784.062	50.955.687.468,99	(802.096.593,01)	98,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	51.355.784.062	50.554.017.468,99	(801.766.593,01)	98,44
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.317.824.285	2.129.443.620,00	(188.380.665,00)	91,87
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.790.933.114	3.577.547.186,00	(213.385.928,00)	94,37
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	45.247.026.663	44.847.026.662,99	(400.000.000,01)	99,12
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	402.000.000	401.670.000,00	(330.000,00)	99,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.000.000	201.820.000,00	(180.000,00)	99,91
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	199.850.000,00	(150.000,00)	99,93
			Jumlah	365.259.500	68.058.200.646,33	67.692.941.146,33	18.632,84

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DESI YULKARSON HEHI

**RINGKASAN APBD YANG
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIYAAAN**





PEMERINTAHAN KAB. MOROWALI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.665.857.452.335,00	1.613.844.117.767,99	96,88	1.208.809.173.144,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
4.1.01	Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.555.959.818,00	62,72	35.305.535.224,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000,00	196.054.950,00	98,03	182.041.100,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	200.000.000,00	196.054.950,00	98,03	182.041.100,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	200.000.000,00	196.054.950,00	98,03	182.041.100,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	98,03	2.121.715.078,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	156,52	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	156,52	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	156,52	2.121.715.078,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.121.715.078,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00	11.800.000,00	47,20	8.920.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	25.000.000,00	11.800.000,00	47,20	8.920.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	25.000.000,00	11.800.000,00	47,20	8.920.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	100.000.000,00	337.875.945,00	337,88	99.493.191,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	337.875.945,00	337,88	99.493.191,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	337.875.945,00	337,88	99.493.191,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	78.020.000.000,00	41.769.100.617,00	53,54	16.899.697.283,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	78.020.000.000,00	41.769.100.617,00	53,54	16.899.697.283,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	78.020.000.000,00	41.769.100.617,00	53,54	16.899.697.283,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000.000,00	18.254.572.618,00	73,02	5.872.137.110,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	25.000.000.000,00	18.254.572.618,00	73,02	5.872.137.110,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	25.000.000.000,00	18.254.572.618,00	73,02	5.872.137.110,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	6.812.038.018,00	68,12	5.646.019.379,00
4.1.01.15.01	PBBP2	10.000.000.000,00	6.812.038.018,00	68,12	5.646.019.379,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	10.000.000.000,00	6.812.038.018,00	68,12	5.646.019.379,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.826.723.929,00	120,67	4.475.512.083,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	4.826.723.929,00	120,67	4.475.512.083,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	4.826.723.929,00	120,67	4.475.512.083,00
4.1.02	Retribusi Daerah	39.125.000.000,00	22.045.729.269,00	56,35	34.769.349.686,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.600.000.000,00	3.666.087.035,00	101,84	6.824.553.030,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.183.592.035,00	106,12	6.313.053.030,00

4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.000.000.000,00	3.183.592.035,00	106,12	2.949.301.409,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	3.363.751.621,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	482.495.000,00	80,42	511.500.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	0,00	0,00	0,00	416.975.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	600.000.000,00	482.495.000,00	80,42	94.525.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	525.000.000,00	498.190.491,00	94,89	312.512.204,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	53.632.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	53.632.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	175.000.000,00	72.750.000,00	41,57	68.868.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	175.000.000,00	72.750.000,00	41,57	68.868.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	25.740.000,00	51,48	35.020.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	25.740.000,00	51,48	35.020.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	314.699.491,00	157,35	122.662.204,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	314.699.491,00	157,35	122.662.204,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	63.001.000,00	126,00	32.330.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	50.000.000,00	63.001.000,00	126,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00	32.330.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	35.000.000.000,00	17.881.771.313,00	51,09	27.632.284.452,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	(319.570,00)	0,00	17.771.530.832,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	(319.570,00)	0,00	17.771.530.832,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	355.910.213,00	1,78	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	355.910.213,00	1,78	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	15.000.000.000,00	17.525.861.100,00	116,84	9.860.753.620,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	15.000.000.000,00	17.525.861.100,00	116,84	9.860.753.620,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.748.577.180,00	67.003.477.838,99	103,48	60.668.193.934,42
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	2.860.463.600,00	0,00	1.153.895.200,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	2.860.463.600,00	0,00	1.153.895.200,00
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	2.860.463.600,00	0,00	1.153.895.200,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.232.544.021,00	74,42	4.143.819.084,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.228.979.159,00	74,30	4.143.818.016,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.228.979.159,00	74,30	4.143.818.016,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	3.564.862,00	0,00	1.068,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	3.564.862,00	0,00	1.068,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.000.000,00	1.608.177.761,59	76,58	1.760.001.994,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.000.000,00	1.608.177.761,59	76,58	1.760.001.994,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.000.000,00	1.608.177.761,59	76,58	1.760.001.994,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	8.050.036.817,00	5.327.288.027,52	66,18	6.775.150.413,42
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	27.961.434,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	27.961.434,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.050.036.817,00	5.167.449.706,52	64,19	6.747.188.979,42

4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	8.050.036.817,00	5.167.449.706,52	64,19	6.747.188.979,42
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	109,97	38.673.695.152,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	38.673.695.152,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	38.673.695.152,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.968.540.363,00	54.918.236.613,88	109,91	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.968.540.363,00	54.918.236.613,88	109,91	0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	8.161.632.091,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	8.161.632.091,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	8.161.632.091,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.696.106.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.059.614.000,00	1.386.852.773.248,00	100,20	1.031.790.449.328,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.267.799.946.000,00	1.264.742.980.248,00	99,76	921.236.099.328,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	522.391.471.000,00	528.688.970.555,00	101,21	248.076.707.621,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.621.760.000,00	82.256.909.150,00	334,08	23.498.960.621,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.926.052.000,00	5.066.779.000,00	63,93	4.702.988.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	66.626.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.220.000,00	7.825.000,00	45,44	1.208.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	109.574.610.000,00	12.093.218.000,00	11,04	12.740.860.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	31.383.780.000,00	94.842.760.000,00	302,20	54.169.631.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.210.905.000,00	1.652.138.000,00	26,60	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	332.698.763.000,00	322.859.438.405,00	97,04	141.682.131.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	430.182.000,00	315.078.000,00	73,24	9.023.533.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.002.581.000,00	2.002.581.000,00	100,00	2.257.396.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	7.525.618.000,00	7.525.618.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	555.056.781.671,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	554.456.781.671,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.782.277.000,00	62.110.361.172,00	97,38	42.255.915.242,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	498.076.000,00	498.076.000,00	100,00	566.116.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.672.152.000,00	6.672.152.000,00	100,00	11.477.140.900,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.928.672.000,00	14.928.672.000,00	100,00	10.839.466.100,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	10.908.566.000,00	99,17	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	99.963.000,00	99.950.000,00	99,99	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.404.053.000,00	9.209.487.893,00	97,93	18.836.177.242,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.639.959.000,00	1.581.432.000,00	96,43	237.165.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	299.850.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.539.402.000,00	18.212.025.279,00	93,21	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.718.290.000,00	78.748.391.456,00	92,95	75.846.694.794,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.948.780.000,00	16.789.684.944,00	88,61	16.871.648.350,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.070.000.000,00	897.500.000,00	83,88	1.005.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.780.156.000,00	36.266.234.800,00	101,36	32.386.533.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.645.500.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.799.250.000,00	6.047.225.200,00	126,00	3.926.468.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	5.536.011.481,00

4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	11.447.076.935,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	394.744.000,00	232.076.500,00	58,79	450.927.200,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.682.775.000,00	4.619.468.000,00	98,65	1.734.241.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	200.920.900,00	49,49	438.800.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	404.488.828,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.795.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.328.327.000,00	3.363.545.999,00	101,06	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	316.631.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.731.227.000,00	10.331.735.113,00	88,07	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.267.799.946.000,00	1.264.742.980.248,00	99,76	921.236.099.328,00
4.2.01.05	Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	110.554.350.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	110.554.350.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	110.554.350.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	116.259.668.000,00	122.109.793.000,00	105,03	110.554.350.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	42.411.481.100,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	40.134.041.100,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	40.134.041.100,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.078.666.714,00	6.895.774.080,00	97,42	6.718.905.427,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.296.953.566,00	8.019.832.291,00	96,66	7.205.161.489,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.473.367.484,00	22.719.078.806,00	146,83	14.909.457.838,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.262.848.077,00	3.465.855.075,00	81,30	2.905.626.373,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.993.789.002,00	8.742.793.414,00	97,21	8.394.889.973,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.277.440.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.277.440.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.277.440.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	42.411.481.100,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.696.106.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.665.857.452.335,00	1.613.368.982.299,99	96,85	1.208.809.173.144,42
5	BELANJA DAERAH	1.665.492.192.835,00	1.547.409.805.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53
5.1	BELANJA OPERASI	1.095.412.945.221,18	1.011.965.609.596,48	92,38	859.062.606.693,26
5.1.01	Belanja Pegawai	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93	425.231.570.909,00

5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.403.752.186,96	289.868.847.673,00	88,54	246.704.342.115,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	236.830.308.538,96	220.890.693.943,00	93,27	187.213.344.078,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	188.645.960.970,96	174.415.816.217,00	92,46	173.548.580.878,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.184.347.568,00	46.474.877.726,00	96,45	13.664.763.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.302.460.515,00	19.927.674.155,00	85,52	17.166.207.732,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.700.092.502,00	16.226.414.969,00	91,67	15.813.485.330,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.602.368.013,00	3.701.259.186,00	66,07	1.352.722.402,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.293.514.449,00	4.717.333.096,00	89,12	4.752.923.800,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.293.514.449,00	4.717.333.096,00	89,12	4.752.923.800,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.754.489.325,00	16.458.236.004,00	69,28	14.101.040.100,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.510.647.005,00	12.299.317.004,00	66,44	12.574.826.100,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.243.842.320,00	4.158.919.000,00	79,31	1.526.214.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.522.360.248,00	2.085.374.000,00	82,68	2.386.075.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.291.110.248,00	1.856.164.000,00	81,02	2.386.075.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	231.250.000,00	229.210.000,00	99,12	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.485.084.483,00	11.903.458.140,00	82,18	10.843.012.080,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.624.788.700,00	9.220.079.880,00	86,78	9.854.986.020,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.860.295.783,00	2.683.378.260,00	69,51	988.026.060,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.019.064.947,00	904.534.863,00	15,03	598.206.252,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.964.064.947,00	902.395.780,00	15,13	598.206.252,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	55.000.000,00	2.139.083,00	3,89	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.762.920,00	3.156.582,00	66,27	2.869.980,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.522.784,00	2.509.007,00	71,22	2.748.324,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.240.136,00	647.575,00	52,22	121.656,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.311.851.902,00	11.349.308.031,00	85,26	7.755.259.790,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.977.074.539,00	9.344.400.115,00	85,13	7.182.057.646,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.334.777.363,00	2.004.907.916,00	85,87	573.202.144,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	544.579.351,00	433.123.351,00	79,53	534.943.988,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	367.171.351,00	367.171.351,00	100,00	389.585.588,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	177.408.000,00	65.952.000,00	37,18	145.358.400,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.335.275.508,00	1.195.955.508,00	89,57	1.350.459.315,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.113.515.508,00	1.113.515.508,00	100,00	1.168.761.315,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	221.760.000,00	82.440.000,00	37,18	181.698.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.568.582.264,00	109.791.307.469,00	88,14	95.457.476.468,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	124.568.582.264,00	109.791.307.469,00	88,14	91.945.002.457,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	121.367.473.856,00	109.434.414.322,00	90,17	91.945.002.457,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.201.108.408,00	356.893.147,00	11,15	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	3.512.474.011,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00	0,00	3.512.474.011,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.812.818.766,40	56.367.126.065,00	97,50	55.055.678.452,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.990.650.062,00	2.514.919.500,00	84,09	1.582.942.895,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.000.000,00	7.500.000,00	75,00	7.505.505,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	75.000.000,00	56.250.000,00	75,00	75.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.250.000,00	500.000,00	40,00	207.500,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.917.210,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.560.400.062,00	1.560.400.000,00	100,00	750.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	937.500.000,00	500.000.000,00	53,33	236.110.680,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	200.000.000,00	185.269.500,00	92,63	310.202.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	615.257.668,00	597.874.250,00	97,17	1.439.911.379,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	195.413.895,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	30.000.000,00	21.874.250,00	72,91	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	8.757.668,00	3.500.000,00	39,96	1.312.500,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	438.184.984,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	562.500.000,00	562.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.263.934.020,00	37.259.773.150,00	99,99	33.517.602.844,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	37.263.934.020,00	37.259.773.150,00	99,99	33.517.602.844,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.813.584.350,00	4.810.891.500,00	99,94	4.427.400.300,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.813.584.350,00	4.810.891.500,00	99,94	4.427.400.300,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.856.524.000,00	1.592.250.000,00	85,77	1.689.230.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.856.524.000,00	1.592.250.000,00	85,77	1.689.230.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.485.006.266,40	6.007.589.265,00	92,64	9.641.311.034,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.485.006.266,40	6.007.589.265,00	92,64	9.641.311.034,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.509.800.000,00	3.354.320.000,00	95,57	2.751.280.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.158.840.000,00	2.046.930.000,00	94,82	2.009.590.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	896.960.000,00	853.390.000,00	95,14	702.690.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	454.000.000,00	454.000.000,00	100,00	39.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	189.012.400,00	140.958.400,00	74,58	0,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	189.012.400,00	140.958.400,00	74,58	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	84.250.000,00	83.750.000,00	99,41	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	84.250.000,00	83.750.000,00	99,41	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.049.685.981,00	10.951.341.721,00	99,11	10.835.454.019,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	563.271.551,00	558.495.000,00	99,15	557.340.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	563.271.551,00	558.495.000,00	99,15	557.340.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	40.867.800,00	38.885.700,00	95,15	36.514.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	40.867.800,00	38.885.700,00	95,15	36.514.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.797.200,00	49.535.280,00	99,47	47.724.780,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.797.200,00	49.535.280,00	99,47	47.724.780,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.292.440,00	39.952.500,00	82,73	47.712.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.292.440,00	39.952.500,00	82,73	47.712.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.551.291,00	816.551.291,00	100,00	808.143.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.551.291,00	816.551.291,00	100,00	808.143.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.337.900,00	24.953.359,00	77,16	29.795.325,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.337.900,00	24.953.359,00	77,16	29.795.325,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	46.510.632,00	33.373.200,00	71,75	45.340.050,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	46.510.632,00	33.373.200,00	71,75	45.340.050,00

5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.170.000.000,00	3.170.000.000,00	100,00	3.139.500.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.170.000.000,00	3.170.000.000,00	100,00	3.139.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.420,00	514.500.000,00	98,00	777.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.420,00	514.500.000,00	98,00	777.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.000.000,00	322.829,00	4,04	373.528,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.000.000,00	322.829,00	4,04	373.528,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.180.981.747,00	2.169.197.562,00	99,46	2.160.010.536,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59.981.747,00	48.197.562,00	80,35	48.010.536,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.121.000.000,00	2.121.000.000,00	100,00	2.112.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.346.000.000,00	3.313.500.000,00	99,03	3.186.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.346.000.000,00	3.313.500.000,00	99,03	3.186.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.075.000,00	222.075.000,00	100,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.075.000,00	222.075.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	196.640.136,00	172.506.157,00	87,73	173.075.819,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000,00	7.140.000,00	81,73	6.630.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000,00	7.140.000,00	81,73	6.630.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.713.096,00	6.590.220,00	98,17	6.590.220,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.713.096,00	6.590.220,00	98,17	6.590.220,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.836.400,00	407.557,00	1,87	1.487.219,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.836.400,00	407.557,00	1,87	1.487.219,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	1.980,00	19,80	1.980,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	1.980,00	19,80	1.980,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.464.640,00	5.486.400,00	84,87	5.486.400,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.464.640,00	5.486.400,00	84,87	5.486.400,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	828.000.000,00	746.000.000,00	90,10	1.080.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	210.000.000,00	168.000.000,00	80,00	264.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	210.000.000,00	168.000.000,00	80,00	264.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	618.000.000,00	578.000.000,00	93,53	816.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	618.000.000,00	578.000.000,00	93,53	816.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117,47	15.924.944.036,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117,47	15.924.944.036,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117,47	15.924.944.036,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.830.016.908,82	418.931.692.995,49	92,72	376.440.314.339,00
5.1.02.01	Belanja Barang	104.549.758.439,84	97.796.917.133,89	93,54	86.155.198.379,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.135.391.534,84	95.464.026.268,89	93,47	86.155.198.379,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.105.571.704,00	1.083.390.745,89	97,99	620.452.070,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	132.066.815,00	131.723.339,00	99,74	2.569.665.073,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.684.674.436,00	1.618.961.493,00	96,10	1.555.136.011,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	310.333.600,00	283.161.450,00	91,24	677.904.650,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	234.445.000,00	205.045.000,00	87,46	179.460.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	1.982.043.800,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.590.351.145,00	5.549.312.251,00	99,27	3.870.276.451,00

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.896.136.483,00	1.768.254.923,00	93,26	1.781.017.684,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.446.384.746,60	2.213.363.293,00	90,47	2.035.365.705,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.128.756.310,00	4.669.245.996,00	91,04	4.353.085.546,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	336.780.000,00	317.783.786,00	94,36	198.068.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	553.087.100,00	496.885.853,00	89,84	535.549.170,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	485.527.458,00	459.364.120,00	94,61	628.468.328,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	494.429.770,00	224.740.722,00	45,45	376.913.676,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	378.601.300,00	350.998.900,00	92,71	819.101.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	203.930.000,00	201.888.400,00	99,00	89.600.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	174.000.000,00	173.959.975,00	99,98	55.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	612.392.200,00	587.946.700,00	96,01	257.465.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.915.488.250,00	4.870.623.852,00	99,09	7.392.332.464,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.901.912,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.724.829.962,00	42.264.943.894,00	96,66	31.260.177.120,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.934.803.422,24	4.676.932.500,00	94,77	2.255.142.098,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.135.975.730,00	2.607.741.900,00	83,16	2.559.412.254,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	73.000.000,00	72.760.000,00	99,67	115.265.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.070.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.848.974.633,00	10.123.705.132,00	85,44	9.556.697.796,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.219.648.000,00	4.868.626.765,00	93,28	5.325.240.568,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.893.551.500,00	2.052.565.331,00	70,94	1.984.295.760,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	110.700.000,00	110.700.000,00	100,00	344.400.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	325.000.000,00	323.750.000,00	99,62	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	114.000.000,00	112.750.000,00	98,90	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	390.375.000,00	383.975.500,00	98,36	575.646.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	273.700.000,00	273.229.290,00	99,83	273.340.408,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	100.000.000,00	98.750.000,00	98,75	95.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.630.620,00	5.630.000,00	99,99	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	41.250.000,00	40.200.000,00	97,45	40.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	317.791.350,00	317.258.125,00	99,83	369.467.570,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.618.260.000,00	1.601.162.033,00	98,94	1.193.741.765,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	196.945.000,00	196.945.000,00	100,00	111.000.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	88.000.000,00	85.750.000,00	97,44	15.950.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	118.212.400,00	118.000.000,00	99,82	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	118.212.400,00	118.000.000,00	99,82	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.296.154.505,00	2.214.890.865,00	96,46	0,00
5.1.02.01.04.0003	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	959.310.000,00	959.310.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	592.123.000,00	536.410.000,00	90,59	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	35.050.000,00	26.152.360,00	74,61	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I),Home Use],	35.013.000,00	30.000.000,00	85,68	0,00

5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	603.129.080,00	603.129.080,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	9.889.425,00	9.889.425,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	166.022.331.469,00	154.942.886.592,00	93,33	143.177.571.679,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	118.855.909.187,00	110.578.204.464,00	93,04	105.647.535.159,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.223.150.000,00	2.835.040.000,00	87,96	3.391.118.400,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.042.120.000,00	2.712.760.000,00	89,17	2.515.540.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.270.900.000,00	2.245.900.000,00	98,90	1.564.298.850,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.400.000,00	5.900.000,00	70,24	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.800.000,00	22.800.000,00	88,37	105.558.408,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	141.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	954.000.000,00	811.700.000,00	85,08	892.250.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.648.500.000,00	7.621.000.000,00	99,64	9.208.750.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.278.824.000,00	16.076.013.697,00	93,04	10.367.326.016,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.550.000,00	32.936.523,00	62,68	12.010.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.418.974.000,00	3.412.733.667,00	99,82	1.748.129.500,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00	66.300.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	249.840.000,00	212.400.000,00	85,01	164.540.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	111.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.063.350.000,00	40.103.093.665,00	97,66	42.803.959.400,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.710.300.000,00	1.450.050.000,00	84,78	2.510.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	400.200.000,00	396.700.000,00	99,13	387.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.177.545.875,00	10.460.747.130,00	85,90	7.957.656.003,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.652.450.000,00	3.428.970.833,00	93,88	3.285.300.364,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	912.900.000,00	781.442.200,00	85,60	733.950.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	538.500.000,00	481.500.000,00	89,42	416.570.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	495.000.000,00	410.000.000,00	82,83	372.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	83.500.000,00	79.500.000,00	95,21	133.250.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	54.600.000,00	48.800.000,00	89,38	42.260.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	508.800.000,00	463.750.000,00	91,15	668.150.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	151.800.000,00	150.840.000,00	99,37	244.159.216,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	254.941,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.000.000,00	2.400.776,00	80,03	209.790.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.351.241.000,00	2.720.220.000,00	81,17	2.816.446.200,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	82.086.000,00	80.976.390,00	98,65	139.193.500,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	149.776.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	750.000.000,00	23.165.600,00	3,09	70.569.120,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	30.400.000,00	28.100.000,00	92,43	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	112.100.000,00	85.311.117,00	76,10	74.590.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.998.492.108,00	3.811.365.325,00	95,32	4.171.982.645,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.301.150.000,00	1.245.057.000,00	95,69	1.674.936.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.359.335.204,00	3.021.263.971,00	89,94	2.405.281.856,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	67.400.000,00	32.300.000,00	47,92	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.800.000,00	0,00	0,00	4.248.750,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.772.525.000,00	4.237.046.838,00	88,78	3.800.444.945,00

5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	128.500.000,00	87.706.982,00	68,25	130.082.945,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	25.776.000,00	25.392.000,00	98,51	55.132.000,00
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	600.000.000,00	584.220.750,00	97,37	49.130.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.440.294.368,00	22.973.384.384,00	98,01	20.070.297.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.336.160.000,00	2.306.488.784,00	98,73	1.954.093.810,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.331.259.200,00	20.008.450.800,00	98,41	17.609.420.200,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	772.875.168,00	658.444.800,00	85,19	506.782.990,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.014.803.500,00	6.778.367.530,00	96,63	2.379.696.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.022.791.000,00	5.873.555.500,00	97,52	1.821.990.500,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	459.000.000,00	427.349.530,00	93,10	45.293.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	40.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44	25.900.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	445.712.500,00	424.762.500,00	95,30	416.913.000,00
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.817.500.000,00	1.549.065.000,00	85,23	1.162.143.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	457.500.000,00	399.565.000,00	87,34	470.163.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	109.480.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	215.000.000,00	211.500.000,00	98,37	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	945.000.000,00	738.000.000,00	78,10	535.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.157.403.284,00	5.533.544.014,00	89,87	7.571.395.400,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.727.153.077,00	1.325.927.981,00	76,77	648.432.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	817.016.000,00	815.389.541,00	99,80	585.258.150,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	129.900.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	86.000.000,00	69.955.500,00	81,34	134.704.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	274.000.000,00	273.407.500,00	99,78	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	2.752.405.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	15.500.000,00	15.217.000,00	98,17	464.100.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.025.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.064.784.207,00	1.894.066.492,00	91,73	1.551.546.250,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	289.950.000,00	289.580.000,00	99,87	131.700.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	25.000.000,00	0,00	0,00	138.350.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.181.826.130,00	2.180.568.000,00	68,53	947.337.400,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	2.007.194.880,00	1.233.000.000,00	61,43	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	449.631.250,00	447.828.000,00	99,60	349.447.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	725.000.000,00	499.740.000,00	68,93	597.889.900,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.030.000.000,00	900.000.000,00	87,38	640.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.030.000.000,00	900.000.000,00	87,38	640.000.000,00

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.524.595.000,00	4.449.753.200,00	98,35	4.759.167.220,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00	498.826.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.749.820.000,00	2.689.453.200,00	97,80	2.583.045.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	100,00	1.480.796.220,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	211.775.000,00	197.300.000,00	93,16	196.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.940.333.219,98	39.790.645.977,00	92,66	43.001.431.073,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	405.212.000,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	305.212.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.682.035.000,00	5.229.050.502,00	92,03	4.988.540.281,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00	9.762.525,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.802.040.000,00	2.625.211.684,00	93,69	3.161.452.470,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	17.020.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	650.000.000,00	550.479.207,00	84,69	457.463.193,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	636.540.000,00	634.661.043,00	99,70	651.417.152,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	60.720.000,00	60.687.415,00	99,95	3.978.000,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	388.750.000,00	387.840.518,00	99,77	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	204.460.000,00	180.201.150,00	88,14	168.231.216,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	256.665.000,00	209.251.395,00	81,53	150.748.354,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	249.660.000,00	191.368.015,00	76,65	204.666.196,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	124.200.000,00	94.175.295,00	75,83	110.805.145,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	49.996.030,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	246.000.000,00	235.174.780,00	95,60	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.399.004.037,99	22.776.421.710,00	89,67	23.533.477.185,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.848.032.629,99	21.426.538.710,00	89,85	21.806.995.198,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	199.818.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.349.971.408,00	1.149.477.000,00	85,15	99.962.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	26.000.000,00	25.950.000,00	99,81	93.850.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	150.000.000,00	149.556.000,00	99,70	675.621.987,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	0,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	199.700.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	0,00	0,00	0,00	159.850.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	297.680.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.859.294.181,99	11.785.173.765,00	99,38	14.074.201.607,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.877.294.182,00	7.854.002.765,00	99,70	8.806.054.234,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	219.749.721,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.512.000.000,00	1.466.262.000,00	96,98	164.345.000,00
5.1.02.03.04.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	0,00	199.999.752,00
5.1.02.03.04.0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	2.269.999.999,99	2.264.909.000,00	99,78	4.186.996.000,00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5.1.02.03.04.0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	0,00	0,00	0,00	49.860.000,00
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	99.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	298.696.900,00

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.851.421.731,00	87.341.007.680,00	93,06	72.551.707.887,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.743.526.731,00	87.341.007.680,00	93,17	72.217.472.279,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.643.685.400,00	59.270.639.580,00	94,62	44.774.708.097,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.099.841.331,00	28.070.368.100,00	90,26	27.440.264.182,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	107.895.000,00	0,00	0,00	334.235.608,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	107.895.000,00	0,00	0,00	334.235.608,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	677.500.000,00	620.298.000,00	91,56	1.619.484.980,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	467.500.000,00	425.550.000,00	91,03	1.619.484.980,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	467.500.000,00	425.550.000,00	91,03	1.610.484.980,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	210.000.000,00	194.748.000,00	92,74	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	210.000.000,00	194.748.000,00	92,74	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.679.177.468,00	16.886.508.419,00	81,66	17.284.204.955,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.679.177.468,00	16.886.508.419,00	81,66	17.284.204.955,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.679.177.468,00	16.886.508.419,00	81,66	17.284.204.955,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	465.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	465.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	95,18	12.650.715.386,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	95,18	12.650.715.386,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	95,18	12.650.715.386,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
5.1.03.01.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83	22.516.369.666,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	9.666.957.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	9.500.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	9.500.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	166.957.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	166.957.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.850.637.218,00	14.358.626.945,00	96,69	12.197.632.666,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	726.784.965,00	570.631.945,00	78,51	2.742.713.800,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	726.784.965,00	570.631.945,00	78,51	2.742.713.800,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.957.452.253,00	6.636.595.000,00	95,39	3.589.918.950,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.957.452.253,00	6.636.595.000,00	95,39	3.589.918.950,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.716.400.000,00	6.701.400.000,00	99,78	5.764.999.916,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.716.400.000,00	6.701.400.000,00	99,78	5.764.999.916,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	0,00

5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.663,00	692.026.662,99	100,00	651.780.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.663,00	692.026.662,99	100,00	651.780.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.663,00	692.026.662,99	100,00	651.780.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86	33.215.227.288,26
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100,00	11.875.008.400,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100,00	11.875.008.400,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100,00	11.875.008.400,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	18.524.640.005,00	18.484.653.005,00	99,78	21.340.218.888,26
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.398.525.925,00	2.398.525.925,00	100,00	0,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.398.525.925,00	2.398.525.925,00	100,00	0,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	16.126.114.080,00	16.086.127.080,00	99,75	21.340.218.888,26
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	16.126.114.080,00	16.086.127.080,00	99,75	21.340.218.888,26
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.095.412.945.221,18	1.011.965.609.596,48	92,38	859.062.606.693,26
5.2	BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	307.834.718.053,18	90,84	231.988.131.589,27
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	1.110.890.900,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	1.110.890.900,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	300.000.000,00	0,00	0,00	330.006.300,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	300.000.000,00	0,00	0,00	330.006.300,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.270.407.150,00	1.963.260.000,00	37,25	780.884.600,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	5.215.061.700,00	1.963.260.000,00	37,65	681.000.000,00
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	55.345.450,00	0,00	0,00	99.884.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.070.107.453,00	76.205.549.055,00	92,85	36.930.658.470,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	224.293.351,00	219.385.000,00	97,81	35.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	224.293.351,00	219.385.000,00	97,81	35.500.000,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	201.293.351,00	199.385.000,00	99,05	33.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.656.242.700,00	14.642.085.300,00	82,93	3.496.981.100,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.218.115.300,00	14.205.030.000,00	82,50	3.069.025.600,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.332.100.000,00	6.122.500.000,00	73,48	900.190.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	681.000.000,00	681.000.000,00	100,00	1.068.700.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.950.730.000,00	1.862.730.000,00	95,49	1.000.135.600,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.204.285.300,00	5.488.800.000,00	88,47	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	163.127.400,00	163.070.000,00	99,96	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	13.127.400,00	13.120.000,00	99,94	0,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	150.000.000,00	149.950.000,00	99,97	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	275.000.000,00	273.985.300,00	99,63	427.955.500,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	328.055.500,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	275.000.000,00	273.985.300,00	99,63	99.900.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.887.405,00	44.881.000,00	99,99	52.848.600,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	30.887.405,00	30.881.000,00	99,98	6.948.600,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	30.887.405,00	30.881.000,00	99,98	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	6.948.600,00

5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.742.000,00	29.514.000,00	82,58	1.727.590.520,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.742.000,00	29.514.000,00	82,58	1.727.590.520,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	810.000,00	810.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.826.000,00	4.598.000,00	42,47	2.700.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	23.161.000,00	23.161.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	945.000,00	945.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.724.890.520,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.034.901.134,00	9.699.253.688,00	96,66	15.355.110.317,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	698.147.231,00	560.225.716,00	80,24	3.930.640.740,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	211.722.205,00	181.767.916,00	85,85	5.200.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	486.425.026,00	378.457.800,00	77,80	3.925.440.740,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.937.753.903,00	8.740.574.972,00	97,79	10.467.491.597,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.887.189.712,00	6.821.888.122,00	99,05	4.242.675.495,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	25.600.000,00	25.240.100,00	98,59	40.706.250,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	722.480.450,00	649.815.000,00	89,94	650.596.580,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	217.079.772,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.169.452.541,00	1.110.640.750,00	94,97	5.169.879.342,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	127.781.200,00	127.741.000,00	99,97	146.554.158,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	399.000.000,00	398.453.000,00	99,86	956.977.980,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	144.000.000,00	143.658.000,00	99,76	409.069.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.960.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	211.500.000,00	211.295.000,00	99,90	349.833.980,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	93.447.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	74.668.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.725.339.517,00	1.664.039.500,00	96,45	2.863.690.885,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.717.339.517,00	1.656.039.500,00	96,43	2.741.439.246,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	535.086.017,00	502.383.000,00	93,89	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.147.950.000,00	1.120.086.500,00	97,57	2.570.773.446,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	34.303.500,00	33.570.000,00	97,86	170.665.800,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	122.251.639,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	122.251.639,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.547.601.141,00	33.411.169.861,00	99,59	2.197.267.554,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	33.444.189.141,00	33.311.219.861,00	99,60	1.885.353.868,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	33.439.539.141,00	33.308.099.861,00	99,61	1.642.210.870,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	4.650.000,00	3.120.000,00	67,10	0,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	237.165.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.2.02.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	0,00	0,00	0,00	477.998,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	103.412.000,00	99.950.000,00	96,65	311.913.686,00

5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	103.412.000,00	99.950.000,00	96,65	311.913.686,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.195.153.750,00	1.194.800.000,00	99,97	1.352.625.863,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	54.789.863,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	9.359.863,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.195.153.750,00	1.194.800.000,00	99,97	1.200.340.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	164.800.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	566.403.750,00	566.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	628.750.000,00	628.400.000,00	99,94	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.035.540.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	97.496.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	97.496.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.640.645.250,00	8.924.884.382,00	92,58	9.095.377.779,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.707.973.900,00	6.190.356.382,00	92,28	7.427.367.951,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	235.500.000,00	169.955.000,00	72,17	100.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.472.473.900,00	6.020.401.382,00	93,02	6.656.282.951,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	671.085.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.932.671.350,00	2.734.528.000,00	93,24	1.668.009.828,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.482.294.550,00	2.330.951.100,00	93,90	931.891.328,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	101.676.800,00	70.196.900,00	69,04	629.088.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	348.700.000,00	333.380.000,00	95,61	107.030.500,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	2.101.176,00
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0,00	0,00	0,00	2.101.176,00
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00	2.101.176,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	213.163.360,00	213.160.000,00	100,00	106.373.348,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	208.463.360,00	208.460.000,00	100,00	106.373.348,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	1.384.548,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	104.988.800,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	208.463.360,00	208.460.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	599.089.200,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	599.089.200,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	599.089.200,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	46.102.128,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	46.102.128,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	12.602.128,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	33.500.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.604.362.245,00	4.097.032.824,00	73,10	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.604.362.245,00	4.097.032.824,00	73,10	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.604.362.245,00	4.097.032.824,00	73,10	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	96,15	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	96,15	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	96,15	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26	80.182.171.788,27
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	94.132.372.787,51	85.886.267.524,18	91,24	77.451.712.195,27

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.821.990.065,51	63.226.908.918,00	94,62	68.236.234.146,27
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.474.344.718,50	41.473.917.059,00	93,25	46.527.725.936,27
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000,00	199.648.000,00	99,82	409.000.942,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	199.999.985,00	199.902.500,00	99,95	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.746.187.576,70	7.650.289.382,00	98,76	2.305.299.513,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	599.000.000,00	442.728.000,00	73,91	274.541.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00	99.822.000,00	99,82	249.147.464,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.079.337.579,00	1.078.940.000,00	99,96	309.100.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	199.996.457,00	199.950.000,00	99,98	199.994.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.901.301.311,00	1.900.923.000,00	99,98	819.996.480,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	8.032.870.684,31	7.945.623.608,00	98,91	12.738.029.946,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	164.415.000,00	157.228.000,00	95,63	185.847.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	99.778.000,00	99,78	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.134.536.754,00	889.415.104,00	78,39	2.779.201.156,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	500.000.000,00	499.437.908,00	99,89	243.991.298,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	390.000.000,00	389.306.357,00	99,82	994.408.411,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.951.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	27.310.382.722,00	22.659.358.606,18	82,97	9.215.478.049,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	26.810.382.722,00	22.305.085.649,18	83,20	9.015.906.049,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	199.572.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	500.000.000,00	354.272.957,00	70,85	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.510.296.900,00	2.296.962.300,00	91,50	2.730.459.593,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.510.296.900,00	2.296.962.300,00	91,50	2.730.459.593,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.175.296.900,00	2.172.252.300,00	99,86	2.730.459.593,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	335.000.000,00	124.710.000,00	37,23	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50	113.670.285.431,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	106.524.179.989,20	97.440.430.969,00	91,47	86.057.885.870,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	92.092.315.864,80	86.333.120.273,00	93,75	76.315.781.553,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	71.879.280.029,80	66.221.596.813,00	92,13	63.027.381.791,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	199.500.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	20.213.035.835,00	20.111.523.460,00	99,50	13.088.899.762,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	14.431.864.124,40	11.107.310.696,00	76,96	9.742.104.317,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	14.431.864.124,40	11.107.310.696,00	76,96	9.742.104.317,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.167.484.451,01	28.607.837.525,00	94,83	19.355.718.711,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.929.995.315,01	2.924.769.760,00	99,82	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.929.995.315,01	2.924.769.760,00	99,82	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.490.745.841,00	4.481.820.000,00	99,80	4.358.091.148,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	4.490.745.841,00	4.481.820.000,00	99,80	4.358.091.148,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	18.740.743.295,00	17.356.478.866,00	92,61	10.149.964.563,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	7.498.011.200,00	7.280.062.300,00	97,09	4.789.178.974,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	11.242.732.095,00	10.076.416.566,00	89,63	5.360.785.589,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.006.000.000,00	3.844.768.899,00	95,98	4.717.813.000,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.830.000.000,00	1.668.768.899,00	91,19	4.712.813.000,00

5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.176.000.000,00	2.176.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	129.850.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	129.850.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00	49.425.000,00	98,85	87.536.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	50.000.000,00	49.425.000,00	98,85	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	50.000.000,00	49.425.000,00	98,85	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	87.536.000,00
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.536.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	17.386.537.931,10	14.930.670.980,00	85,87	8.169.144.850,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	11.366.537.931,10	8.938.612.620,00	78,64	4.219.079.000,00
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	11.236.537.931,10	8.848.773.620,00	78,75	3.919.792.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	130.000.000,00	89.839.000,00	69,11	299.287.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.020.000.000,00	5.992.058.360,00	99,54	3.950.065.850,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	6.020.000.000,00	5.992.058.360,00	99,54	3.950.065.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	94.125.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	94.125.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	94.125.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	94.125.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	55.000.000,00	54.914.700,00	99,84	0,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	55.000.000,00	54.914.700,00	99,84	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	307.834.718.053,18	90,84	231.988.131.589,27
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	944.103.854,00	0,00	0,00	933.454.571,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	512.743.648,00	0,00	0,00	506.340.755,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	512.743.648,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	512.743.648,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	506.340.755,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	506.340.755,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	0,00	0,00	427.113.816,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	0,00	0,00	427.113.816,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	0,00	0,00	427.113.816,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	214.140.316.018,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	214.140.316.018,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	110.554.350.000,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	110.554.350.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	103.585.966.018,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	25.256.315.015,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	25.229.508.200,00	24.567.189.866,00	97,37	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	109.581.662.000,00	121.282.113.111,00	110,68	0,00

5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	92.307.586.898,00	80.602.288.885,00	87,32	78.329.651.003,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
	JUMLAH BELANJA	1.665.492.192.835,00	1.547.409.805.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53
	SURPLUS/DEFISIT	365.259.500,00	65.959.176.788,33	18.058,17	(97.455.335.727,11)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(365.259.500,00)	1.357.853.100,53	(371,75)	149.788.038.719,64
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00	190.873.934.975,64
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00	190.873.934.975,64
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00	190.974.549.361,64
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00	190.974.549.361,64
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00	190.974.549.361,64
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	(100.614.386,00)
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	(100.614.386,00)
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	(100.614.386,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00	190.873.934.975,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
6.2.03.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	0,00
6.2.03.03.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	0,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	37.585.896.256,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	37.585.896.256,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(365.259.500,00)	1.357.853.100,53	(371,75)	149.788.038.719,64
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	67.722.190.412,82	0,00	52.332.702.992,53

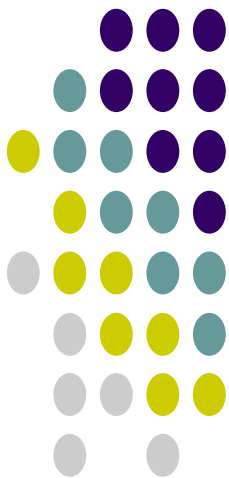
Kolodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DESI JULKARSON HEHI

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAH ANDA ERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.464.829.700,00	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	549.086.100,00	517.946.550,00	(31.139.550,00)	94,33
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	549.086.100,00	517.946.550,00	(31.139.550,00)	94,33
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	149.087.000,00	148.416.500,00	(670.500,00)	99,55
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	149.087.000,00	148.416.500,00	(670.500,00)	99,55
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.087.000,00	148.416.500,00	(670.500,00)	99,55
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	399.999.100,00	369.530.050,00	(30.469.050,00)	92,38
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	399.999.100,00	369.530.050,00	(30.469.050,00)	92,38
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.100,00	369.530.050,00	(30.469.050,00)	92,38
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	601.613.600,00	395.984.600,00	(205.629.000,00)	65,82
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	601.613.600,00	395.984.600,00	(205.629.000,00)	65,82
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	509.824.450,00	308.853.450,00	(200.971.000,00)	60,58
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	509.824.450,00	308.853.450,00	(200.971.000,00)	60,58
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.824.450,00	308.853.450,00	(200.971.000,00)	60,58
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	91.789.150,00	87.131.150,00	(4.658.000,00)	94,93
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	91.789.150,00	87.131.150,00	(4.658.000,00)	94,93
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.789.150,00	87.131.150,00	(4.658.000,00)	94,93
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	314.130.000,00	309.194.063,00	(4.935.937,00)	98,43
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	314.130.000,00	309.194.063,00	(4.935.937,00)	98,43
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002		Pengembangan Cagar Budaya	314.130.000,00	309.194.063,00	(4.935.937,00)	98,43
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	314.130.000,00	309.194.063,00	(4.935.937,00)	98,43
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.130.000,00	309.194.063,00	(4.935.937,00)	98,43

Kolonadale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

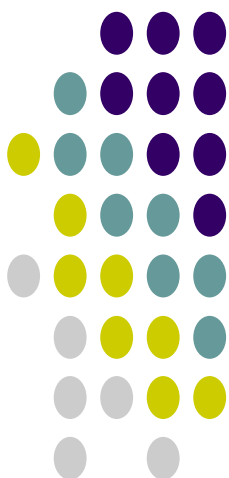
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	291.031.974.816,00	250.205.126.444,00	-40.826.848.372,00	85,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.796.977.548,00	62.157.492.396,00	-9.639.485.152,00	86,57
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.015.234.772,00	36.664.109.710,00	-4.351.125.062,00	89,39
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.624.000.000,00	1.621.639.000,00	-2.361.000,00	99,85
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	243.000.000,00	242.640.000,00	-360.000,00	99,85
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	242.640.000,00	-360.000,00	99,85
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.381.000.000,00	1.378.999.000,00	-2.001.000,00	99,86
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.381.000.000,00	1.378.999.000,00	-2.001.000,00	99,86
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	2.749.825.000,00	2.722.950.000,00	-26.875.000,00	99,02
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.600.000,00	-400.000,00	99,84
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.600.000,00	-400.000,00	99,84
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.499.825.000,00	2.473.350.000,00	-26.475.000,00	98,94
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.499.825.000,00	2.473.350.000,00	-26.475.000,00	98,94
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.172.750.000,00	2.172.140.000,00	-610.000,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	2.172.750.000,00	2.172.140.000,00	-610.000,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.172.750.000,00	2.172.140.000,00	-610.000,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	24.226.828.914,00	20.096.335.193,00	-4.130.493.721,00	82,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	18.622.466.669,00	15.999.302.369,00	-2.623.164.300,00	85,91
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.189.080.468,00	15.567.122.369,00	-2.621.958.099,00	85,58
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	433.386.201,00	432.180.000,00	-1.206.201,00	99,72
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	5.604.362.245,00	4.097.032.824,00	-1.507.329.421,00	73,10
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.604.362.245,00	4.097.032.824,00	-1.507.329.421,00	73,10
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	445.189.960,00	443.024.902,00	-2.165.058,00	99,51
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	445.189.960,00	443.024.902,00	-2.165.058,00	99,51
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.189.960,00	443.024.902,00	-2.165.058,00	99,51
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	334.328.498,00	300.716.484,00	-33.612.014,00	89,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	334.328.498,00	300.716.484,00	-33.612.014,00	89,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.328.498,00	300.716.484,00	-33.612.014,00	89,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.828.117.770,00	5.816.087.999,00	-12.029.771,00	99,79
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	1.427.481.370,00	1.416.684.599,00	-10.796.771,00	99,24
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.427.481.370,00	1.416.684.599,00	-10.796.771,00	99,24
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	4.400.636.400,00	4.399.403.400,00	-1.233.000,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.400.636.400,00	4.399.403.400,00	-1.233.000,00	99,97

1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	347.864.430,00	345.157.930,00	-2.706.500,00	99,22
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	347.864.430,00	345.157.930,00	-2.706.500,00	99,22
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.864.430,00	345.157.930,00	-2.706.500,00	99,22
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.286.330.200,00	3.146.058.202,00	-140.271.998,00	95,73
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	3.286.330.200,00	3.146.058.202,00	-140.271.998,00	95,73
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.286.330.200,00	3.146.058.202,00	-140.271.998,00	95,73
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.633.331.450,00	22.686.138.139,00	-1.947.193.311,00	92,10
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.897.196.100,00	4.961.544.714,00	-1.935.651.386,00	71,94
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	6.897.196.100,00	4.961.544.714,00	-1.935.651.386,00	71,94
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.897.196.100,00	4.961.544.714,00	-1.935.651.386,00	71,94
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	1.350.140.000,00	1.346.250.000,00	-3.890.000,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	1.350.140.000,00	1.346.250.000,00	-3.890.000,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.140.000,00	1.346.250.000,00	-3.890.000,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	666.403.750,00	666.320.000,00	-83.750,00	99,99
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	666.403.750,00	666.320.000,00	-83.750,00	99,99
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	666.403.750,00	666.320.000,00	-83.750,00	99,99
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	278.154.150,00	276.495.650,00	-1.658.500,00	99,40
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	278.154.150,00	276.495.650,00	-1.658.500,00	99,40
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.154.150,00	276.495.650,00	-1.658.500,00	99,40
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	296.457.400,00	293.814.700,00	-2.642.700,00	99,11
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	296.457.400,00	293.814.700,00	-2.642.700,00	99,11
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.457.400,00	293.814.700,00	-2.642.700,00	99,11
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.144.980.050,00	15.141.713.075,00	-3.266.975,00	99,98
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	876.441.500,00	876.377.510,00	-63.990,00	99,99
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	876.441.500,00	876.377.510,00	-63.990,00	99,99
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	14.268.538.550,00	14.265.335.565,00	-3.202.985,00	99,98
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.268.538.550,00	14.265.335.565,00	-3.202.985,00	99,98
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.359.027.876,00	2.454.201.097,00	-2.904.826.779,00	45,80
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	20.999.964,00	20.990.000,00	-9.964,00	99,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.999.964,00	20.990.000,00	-9.964,00	99,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.999.964,00	20.990.000,00	-9.964,00	99,95
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		Pengadaan Mebel PAUD	69.795.763,00	20.264.100,00	-49.531.663,00	29,03
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	69.795.763,00	20.264.100,00	-49.531.663,00	29,03
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.795.763,00	20.264.100,00	-49.531.663,00	29,03
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.985.393.800,00	144.212.293,00	-2.841.181.507,00	4,83
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.977.393.800,00	136.212.293,00	-2.841.181.507,00	4,57
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.977.393.800,00	136.212.293,00	-2.841.181.507,00	4,57
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.629.999.692,00	1.627.527.392,00	-2.472.300,00	99,85
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.629.999.692,00	1.627.527.392,00	-2.472.300,00	99,85
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.629.999.692,00	1.627.527.392,00	-2.472.300,00	99,85
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.633.000,00	130.692.000,00	-4.941.000,00	96,36
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	135.633.000,00	130.692.000,00	-4.941.000,00	96,36
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.633.000,00	130.692.000,00	-4.941.000,00	96,36
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	299.484.400,00	292.853.312,00	-6.631.088,00	97,79

1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	299.484.400,00	292.853.312,00	-6.631.088,00	97,79
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.484.400,00	292.853.312,00	-6.631.088,00	97,79
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.721.257,00	217.662.000,00	-59.257,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	5.1	BELANJA OPERASI	217.721.257,00	217.662.000,00	-59.257,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.721.257,00	217.662.000,00	-59.257,00	99,97
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	789.383.450,00	353.043.450,00	-436.340.000,00	44,72
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	124.266.970,00	123.526.970,00	-740.000,00	99,40
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	124.266.970,00	123.526.970,00	-740.000,00	99,40
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.266.970,00	123.526.970,00	-740.000,00	99,40
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	665.116.480,00	229.516.480,00	-435.600.000,00	34,51
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	665.116.480,00	229.516.480,00	-435.600.000,00	34,51
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.116.480,00	229.516.480,00	-435.600.000,00	34,51
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	516.778.490,00	513.099.090,00	-3.679.400,00	99,29
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	174.946.000,00	172.245.000,00	-2.701.000,00	98,46
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	174.946.000,00	172.245.000,00	-2.701.000,00	98,46
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	174.946.000,00	172.245.000,00	-2.701.000,00	98,46
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.946.000,00	172.245.000,00	-2.701.000,00	98,46
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	341.832.490,00	340.854.090,00	-978.400,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	341.832.490,00	340.854.090,00	-978.400,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	341.832.490,00	340.854.090,00	-978.400,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.832.490,00	340.854.090,00	-978.400,00	99,71
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	-114.396.147,00	94,07
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	-114.396.147,00	94,07
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	-114.396.147,00	94,07
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.879.454.480,00	1.768.198.333,00	-111.256.147,00	94,08
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.454.480,00	1.518.198.333,00	-106.256.147,00	93,46
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	255.000.000,00	250.000.000,00	-5.000.000,00	98,04
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	46.860.000,00	-3.140.000,00	93,72
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	46.860.000,00	-3.140.000,00	93,72
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	216.788.764.298,00	185.719.476.625,00	-31.069.287.673,00	85,67
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.882.750,00	90.777.050,00	-105.700,00	99,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.882.750,00	90.777.050,00	-105.700,00	99,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.882.750,00	90.777.050,00	-105.700,00	99,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.882.750,00	90.777.050,00	-105.700,00	99,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	204.311.779.771,00	173.428.849.844,00	-30.882.929.927,00	84,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	204.311.779.771,00	173.428.849.844,00	-30.882.929.927,00	84,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	204.311.779.771,00	173.428.849.844,00	-30.882.929.927,00	84,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	204.311.779.771,00	173.428.849.844,00	-30.882.929.927,00	84,88
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.421.047.770,00	1.271.573.131,00	-149.474.639,00	89,48
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	134.163.250,00	3.100.000,00	-131.063.250,00	2,31
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	134.163.250,00	3.100.000,00	-131.063.250,00	2,31
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.163.250,00	3.100.000,00	-131.063.250,00	2,31
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	616.015.000,00	599.815.000,00	-16.200.000,00	97,37
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	518.090.000,00	501.890.000,00	-16.200.000,00	96,87
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.090.000,00	501.890.000,00	-16.200.000,00	96,87

1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	97.925.000,00	97.925.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.925.000,00	97.925.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.804.400,00	58.103.500,00	-700.900,00	98,81
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.804.400,00	58.103.500,00	-700.900,00	98,81
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.804.400,00	58.103.500,00	-700.900,00	98,81
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.065.120,00	610.554.631,00	-1.510.489,00	99,75
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	612.065.120,00	610.554.631,00	-1.510.489,00	99,75
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.065.120,00	610.554.631,00	-1.510.489,00	99,75
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.864.334.007,00	10.827.556.600,00	-36.777.407,00	99,66
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.731.154,00	106.650.500,00	-7.080.654,00	93,77
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.731.154,00	106.650.500,00	-7.080.654,00	93,77
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.731.154,00	106.650.500,00	-7.080.654,00	93,77
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	148.669.100,00	148.669.100,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.669.100,00	148.669.100,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.601.933.753,00	10.572.237.000,00	-29.696.753,00	99,72
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.601.933.753,00	10.572.237.000,00	-29.696.753,00	99,72
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	120.460.000,00	118.780.000,00	-1.680.000,00	98,61
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.779.862.000,00	8.751.862.000,00	-28.000.000,00	99,68
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.05	Belanja Hibah	1.701.611.753,00	1.701.595.000,00	-16.753,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00
1.0	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00
1								

Kolonodale, 28 Agustus 2024
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS IULKARSON HEHI



DINAS KESEHATAN DAERAH

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
Organisasi DINAS KESEHATAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	12.082.080.312,00	11.062.975.062,00	-1.019.105.250,00	91,57
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000.000,00	2.785.879.300,00	-214.120.700,00	92,86
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000.000,00	2.785.879.300,00	-214.120.700,00	92,86
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	-804.984.550,00	91,14
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	-804.984.550,00	91,14
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	186.174.300.722,69	182.504.567.129,00	-3.669.733.593,69	98,03
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67.217.793.714,70	63.452.987.006,00	-3.764.806.708,70	94,40
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.189.742.552,70	27.791.096.987,00	-398.645.565,70	98,59
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.680.253.501,00	5.602.380.820,00	-77.872.681,00	98,63
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	747.613.000,00	709.620.000,00	-37.993.000,00	94,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.613.000,00	709.620.000,00	-37.993.000,00	94,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.932.640.501,00	4.892.760.820,00	-39.879.681,00	99,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.240.501,00	298.113.400,00	-8.127.101,00	97,35
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.450.400.000,00	2.418.647.420,00	-31.752.580,00	98,70
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.176.000.000,00	2.176.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	7.655.930.576,70	7.503.906.990,00	-152.023.586,70	98,01
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.328.000,00	1.597.444.599,00	-2.883.401,00	99,82
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.328.000,00	1.597.444.599,00	-2.883.401,00	99,82
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	6.055.602.576,70	5.906.462.391,00	-149.140.185,70	97,54
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.825.787.576,70	5.756.467.931,00	-69.319.645,70	98,81
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.994.460,00	-5.540,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.953.549.430,00	9.826.628.880,00	-126.920.550,00	98,72
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	932.409.080,00	930.939.080,00	-1.470.000,00	99,84
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.409.080,00	930.939.080,00	-1.470.000,00	99,84
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	9.021.140.350,00	8.895.689.800,00	-125.450.550,00	98,61
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.021.140.350,00	8.895.689.800,00	-125.450.550,00	98,61
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.818.100,00	29.852.350,00	-4.965.750,00	85,74
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	34.818.100,00	29.852.350,00	-4.965.750,00	85,74
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.818.100,00	29.852.350,00	-4.965.750,00	85,74
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.865.190.945,00	4.828.327.947,00	-36.862.998,00	99,24
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.865.190.945,00	4.828.327.947,00	-36.862.998,00	99,24
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.865.190.945,00	4.828.327.947,00	-36.862.998,00	99,24
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.706.277.012,00	35.356.996.219,00	-3.349.280.793,00	91,35
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.990.400,00	19.985.500,00	-4.900,00	99,98
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.990.400,00	19.985.500,00	-4.900,00	99,98
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.400,00	19.985.500,00	-4.900,00	99,98
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.257.200,00	9.250.000,00	-7.200,00	99,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.257.200,00	9.250.000,00	-7.200,00	99,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.257.200,00	9.250.000,00	-7.200,00	99,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.728.400,00	40.728.000,00	(400,00)	100,00

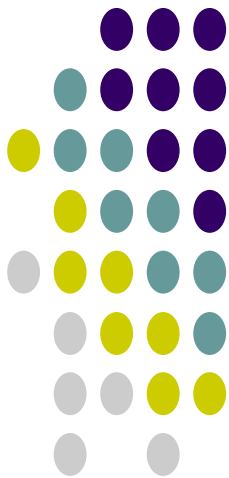
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI		40.728.400,00	40.728.000,00	(400,00)	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		40.728.400,00	40.728.000,00	(400,00)	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		19.500.800,00	15.066.000,00	-4.434.800,00	77,26
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI		19.500.800,00	15.066.000,00	-4.434.800,00	77,26
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.500.800,00	15.066.000,00	-4.434.800,00	77,26
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		15.405.500,00	12.720.000,00	-2.685.500,00	82,57
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI		15.405.500,00	12.720.000,00	-2.685.500,00	82,57
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		15.405.500,00	12.720.000,00	-2.685.500,00	82,57
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		19.991.200,00	17.871.000,00	-2.120.200,00	89,39
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI		19.991.200,00	17.871.000,00	-2.120.200,00	89,39
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.991.200,00	17.871.000,00	-2.120.200,00	89,39
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		19.991.200,00	18.031.000,00	-1.960.200,00	90,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI		19.991.200,00	18.031.000,00	-1.960.200,00	90,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.991.200,00	18.031.000,00	-1.960.200,00	90,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		9.934.000,00	7.471.000,00	-2.463.000,00	75,21
2									
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI		9.934.000,00	7.471.000,00	-2.463.000,00	75,21
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		9.934.000,00	7.471.000,00	-2.463.000,00	75,21
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		269.006.150,00	266.843.860,00	-2.162.290,00	99,20
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI		269.006.150,00	266.843.860,00	-2.162.290,00	99,20
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		269.006.150,00	266.843.860,00	-2.162.290,00	99,20
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		19.993.600,00	19.990.000,00	-3.600,00	99,98
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI		19.993.600,00	19.990.000,00	-3.600,00	99,98
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.993.600,00	19.990.000,00	-3.600,00	99,98
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		24.997.700,00	24.251.250,00	-746.450,00	97,01
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI		24.997.700,00	24.251.250,00	-746.450,00	97,01
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		24.997.700,00	24.251.250,00	-746.450,00	97,01
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		20.014.700,00	19.895.000,00	-119.700,00	99,40
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI		20.014.700,00	19.895.000,00	-119.700,00	99,40
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		20.014.700,00	19.895.000,00	-119.700,00	99,40
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan		829.689.600,00	829.057.000,00	-632.600,00	99,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI		829.689.600,00	829.057.000,00	-632.600,00	99,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		129.689.600,00	129.057.000,00	-632.600,00	99,51
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.05	Belanja Hibah		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		50.143.500,00	48.710.700,00	-1.432.800,00	97,14
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI		50.143.500,00	48.710.700,00	-1.432.800,00	97,14
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		50.143.500,00	48.710.700,00	-1.432.800,00	97,14
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		19.840.000,00	18.940.000,00	-900.000,00	95,46
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI		19.840.000,00	18.940.000,00	-900.000,00	95,46
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.840.000,00	18.940.000,00	-900.000,00	95,46
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		20.331.259.200,00	20.008.450.800,00	-322.808.400,00	98,41
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI		20.331.259.200,00	20.008.450.800,00	-322.808.400,00	98,41
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		20.331.259.200,00	20.008.450.800,00	-322.808.400,00	98,41
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		19.999.750,00	19.999.250,00	(500,00)	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI		19.999.750,00	19.999.250,00	(500,00)	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.999.750,00	19.999.250,00	(500,00)	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1.958.129.015,00	1.496.888.600,00	-461.240.415,00	76,44
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI		1.841.774.015,00	1.381.160.400,00	-460.613.615,00	74,99
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.841.774.015,00	1.381.160.400,00	-460.613.615,00	74,99
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL		116.355.000,00	115.728.200,00	-626.800,00	99,46
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		116.355.000,00	115.728.200,00	-626.800,00	99,46
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas		11.858.448.200,00	10.331.735.113,00	-1.526.713.087,00	87,13
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI		11.858.448.200,00	10.331.735.113,00	-1.526.713.087,00	87,13
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		11.858.448.200,00	10.331.735.113,00	-1.526.713.087,00	87,13
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3.129.976.897,00	2.111.132.146,00	-1.018.844.751,00	67,45
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI		3.129.976.897,00	2.111.132.146,00	-1.018.844.751,00	67,45
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.129.976.897,00	2.111.132.146,00	-1.018.844.751,00	67,45

1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	56.485.100,00	53.614.600,00	-2.870.500,00	94,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	56.485.100,00	53.614.600,00	-2.870.500,00	94,92
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.099.200,00	48.897.200,00	-1.202.000,00	97,60
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.099.200,00	48.897.200,00	-1.202.000,00	97,60
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.385.900,00	4.717.400,00	-1.668.500,00	73,87
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.385.900,00	4.717.400,00	-1.668.500,00	73,87
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.289.050,00	251.279.200,00	-14.009.850,00	94,72
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.999.800,00	9.840.000,00	-159.800,00	98,40
2								
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.800,00	9.840.000,00	-159.800,00	98,40
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.800,00	9.840.000,00	-159.800,00	98,40
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	255.289.250,00	241.439.200,00	-13.850.050,00	94,57
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	255.289.250,00	241.439.200,00	-13.850.050,00	94,57
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.289.250,00	241.439.200,00	-13.850.050,00	94,57
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	24.976.400,00	24.963.000,00	-13.400,00	99,95
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	24.976.400,00	24.963.000,00	-13.400,00	99,95
2								
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.976.400,00	24.963.000,00	-13.400,00	99,95
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.976.400,00	24.963.000,00	-13.400,00	99,95
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.976.400,00	24.963.000,00	-13.400,00	99,95
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	336.542.400,00	247.192.900,00	-89.349.500,00	73,45
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	316.544.700,00	227.577.400,00	-88.967.300,00	71,89
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	316.544.700,00	227.577.400,00	-88.967.300,00	71,89
2								
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	316.544.700,00	227.577.400,00	-88.967.300,00	71,89
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.544.700,00	227.577.400,00	-88.967.300,00	71,89
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19.997.700,00	19.615.500,00	-382.200,00	98,09
2								
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19.997.700,00	19.615.500,00	-382.200,00	98,09
2								
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.997.700,00	19.615.500,00	-382.200,00	98,09
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.700,00	19.615.500,00	-382.200,00	98,09
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	676.160.100,00	668.706.168,00	-7.453.932,00	98,90
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.969.600,00	22.820.000,00	-2.149.600,00	91,39
2								
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.969.600,00	22.820.000,00	-2.149.600,00	91,39
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.969.600,00	22.820.000,00	-2.149.600,00	91,39
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.969.600,00	22.820.000,00	-2.149.600,00	91,39
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	651.190.500,00	645.886.168,00	-5.304.332,00	99,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	651.190.500,00	645.886.168,00	-5.304.332,00	99,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	651.190.500,00	645.886.168,00	-5.304.332,00	99,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.190.500,00	645.886.168,00	-5.304.332,00	99,19
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.918.828.107,99	118.110.718.055,00	191.889.947,01	100,16
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.664.750,00	190.953.000,00	-34.711.750,00	84,62
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.452.000,00	93.001.000,00	-451.000,00	99,52
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	93.452.000,00	93.001.000,00	-451.000,00	99,52
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.452.000,00	93.001.000,00	-451.000,00	99,52
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.212.750,00	97.952.000,00	-34.260.750,00	74,09

1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI		132.212.750,00	97.952.000,00	-34.260.750,00	74,09
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		132.212.750,00	97.952.000,00	-34.260.750,00	74,09
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		104.455.835.843,00	103.565.812.175,00	-890.023.668,00	99,15
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		104.455.835.843,00	103.565.812.175,00	-890.023.668,00	99,15
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI		104.455.835.843,00	103.565.812.175,00	-890.023.668,00	99,15
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai		104.455.835.843,00	103.565.812.175,00	-890.023.668,00	99,15
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.228.705.515,00	1.118.897.409,00	-109.808.106,00	91,06
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.174.080,00	8.295.000,00	-6.879.080,00	54,67
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI		15.174.080,00	8.295.000,00	-6.879.080,00	54,67
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		15.174.080,00	8.295.000,00	-6.879.080,00	54,67
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		41.180.000,00	40.750.000,00	-430.000,00	98,96
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL		41.180.000,00	40.750.000,00	-430.000,00	98,96
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		41.180.000,00	40.750.000,00	-430.000,00	98,96
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		113.982.635,00	101.821.050,00	-12.161.585,00	89,33
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI		113.982.635,00	101.821.050,00	-12.161.585,00	89,33
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		113.982.635,00	101.821.050,00	-12.161.585,00	89,33
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		285.480.200,00	169.613.200,00	-115.867.000,00	59,41
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI		285.480.200,00	169.613.200,00	-115.867.000,00	59,41
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		285.480.200,00	169.613.200,00	-115.867.000,00	59,41
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		772.888.600,00	798.418.159,00	25.529.559,00	103,30
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI		772.888.600,00	798.418.159,00	25.529.559,00	103,30
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		772.888.600,00	798.418.159,00	25.529.559,00	103,30
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.354.292.000,00	12.597.902.445,00	1.243.610.445,00	110,95
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		235.500.000,00	193.671.872,00	-41.828.128,00	82,24
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI		235.500.000,00	193.671.872,00	-41.828.128,00	82,24
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		235.500.000,00	193.671.872,00	-41.828.128,00	82,24
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		278.192.000,00	239.378.000,00	-38.814.000,00	86,05
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI		278.192.000,00	239.378.000,00	-38.814.000,00	86,05
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		278.192.000,00	239.378.000,00	-38.814.000,00	86,05
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		10.840.600.000,00	12.164.852.573,00	1.324.252.573,00	112,22
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI		10.840.600.000,00	12.164.852.573,00	1.324.252.573,00	112,22
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai		1.072.600.000,00	1.072.533.452,00	-66.548,00	99,99
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		9.768.000.000,00	11.092.319.121,00	1.324.319.121,00	113,56
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		615.329.999,99	598.153.026,00	-17.176.973,99	97,21
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		151.000.000,00	147.113.808,00	-3.886.192,00	97,43
2									
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI		151.000.000,00	147.113.808,00	-3.886.192,00	97,43
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		151.000.000,00	147.113.808,00	-3.886.192,00	97,43
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		24.330.000,00	12.173.137,00	-12.156.863,00	50,03
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI		24.330.000,00	12.173.137,00	-12.156.863,00	50,03
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		24.330.000,00	12.173.137,00	-12.156.863,00	50,03
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		439.999.999,99	438.866.081,00	-1.133.918,99	99,74
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI		249.999.999,99	249.171.724,00	-828.275,99	99,67
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		249.999.999,99	249.171.724,00	-828.275,99	99,67
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL		190.000.000,00	189.694.357,00	-305.643,00	99,84
1.0	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		190.000.000,00	189.694.357,00	-305.643,00	99,84

Kolonodale, 28 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



PUSKESMAS LEE



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

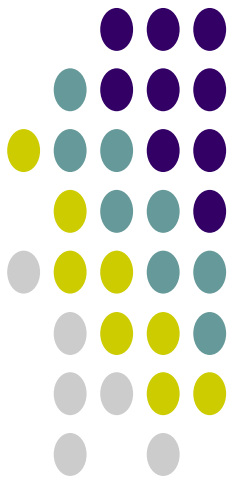


Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS LEE

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		5		BELANJA DAERAH	414.767.332,00	409.684.013,00	(5.083.319,00)	98,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	206.308.403,00	201.262.577,00	(5.045.826,00)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	206.308.403,00	201.262.577,00	(5.045.826,00)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas	206.308.403,00	201.262.577,00	(5.045.826,00)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1		BELANJA OPERASI	191.308.403,00	186.262.577,00	(5.045.826,00)	97,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.01		Belanja Pegawai	123.197.455,00	123.197.455,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	68.110.948,00	63.065.122,00	(5.045.826,00)	92,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.2		BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.458.929,00	208.421.436,00	(37.493,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.260.929,00	40.257.929,00	(3.000,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.038.680,00	1.038.680,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	1.038.680,00	1.038.680,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.038.680,00	1.038.680,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.136.399,00	22.136.399,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	22.136.399,00	22.136.399,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	22.136.399,00	22.136.399,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.469.850,00	2.469.850,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	2.469.850,00	2.469.850,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.469.850,00	2.469.850,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.616.000,00	14.613.000,00	(3.000,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	14.616.000,00	14.613.000,00	(3.000,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	14.616.000,00	14.613.000,00	(3.000,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0004	5.1		BELANJA OPERASI	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.198.000,00	27.163.507,00	(34.493,00)	99,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000,00	21.965.507,00	(34.493,00)	99,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	5.1		BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.965.507,00	(34.493,00)	99,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.965.507,00	(34.493,00)	99,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.198.000,00	5.198.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010	5.1		BELANJA OPERASI	5.198.000,00	5.198.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.198.000,00	5.198.000,00	0,00	100,00

Konradale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DESI KULKARSON HEHI



PUSKESMAS TOMATA



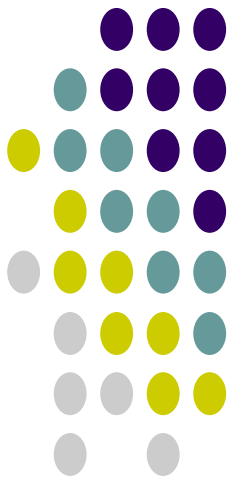
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi PUSKESMAS TOMATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	1.397.083.536,00	1.357.414.258,00	(39.669.278,00)	97,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	837.645.922,00	804.045.717,00	(33.600.205,00)	95,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.645.922,00	804.045.717,00	(33.600.205,00)	95,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	837.645.922,00	804.045.717,00	(33.600.205,00)	95,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	818.048.922,00	775.795.717,00	(42.253.205,00)	94,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	496.010.632,00	477.734.901,00	(18.275.731,00)	96,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.038.290,00	298.060.816,00	(23.977.474,00)	92,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	19.597.000,00	28.250.000,00	8.653.000,00	144,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.597.000,00	28.250.000,00	8.653.000,00	144,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	559.437.614,00	553.368.541,00	(6.069.073,00)	98,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.785.614,00	87.723.114,00	(62.500,00)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.617.464,00	3.617.464,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.617.464,00	3.617.464,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.617.464,00	3.617.464,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.427.500,00	5.427.500,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.427.500,00	5.427.500,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.427.500,00	5.427.500,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.907.450,00	51.848.150,00	(59.300,00)	99,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	51.907.450,00	51.848.150,00	(59.300,00)	99,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.907.450,00	51.848.150,00	(59.300,00)	99,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.833.200,00	26.830.000,00	(3.200,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.833.200,00	26.830.000,00	(3.200,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.833.200,00	26.830.000,00	(3.200,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.652.000,00	425.652.000,00	(6.000.000,00)	98,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.212.000,00	423.212.000,00	(6.000.000,00)	98,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	429.212.000,00	423.212.000,00	(6.000.000,00)	98,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.212.000,00	423.212.000,00	(6.000.000,00)	98,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	39.993.427,00	(6.573,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	39.993.427,00	(6.573,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.993.427,00	(6.573,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.993.427,00	(6.573,00)	99,98

Kabupaten, 28 Agustus 2025
BURATI MOROWALI UTARA
DELUSULUKARSON HEHI



PUSKESMAS BETELEME



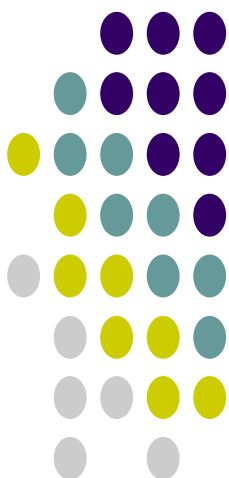
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi PUSKESMAS BETELEME

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	1.734.085.094,00	1.639.170.122,00	(94.914.972,00)	94,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.126.346.160,00	1.031.706.607,00	(94.639.553,00)	91,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.126.346.160,00	1.031.706.607,00	(94.639.553,00)	91,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.126.346.160,00	1.031.706.607,00	(94.639.553,00)	91,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	917.621.160,00	824.156.607,00	(93.464.553,00)	89,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	661.164.460,00	591.299.000,00	(69.865.460,00)	89,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.456.700,00	232.857.607,00	(23.599.093,00)	90,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	208.725.000,00	207.550.000,00	(1.175.000,00)	99,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.725.000,00	207.550.000,00	(1.175.000,00)	99,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.738.934,00	607.463.515,00	(275.419,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.738.934,00	157.463.515,00	(275.419,00)	99,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.238.934,00	147.963.515,00	(275.419,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.238.934,00	147.963.515,00	(275.419,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.238.934,00	147.963.515,00	(275.419,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELISULKARSON HEHI



PUSKESMAS PETUMBEA



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

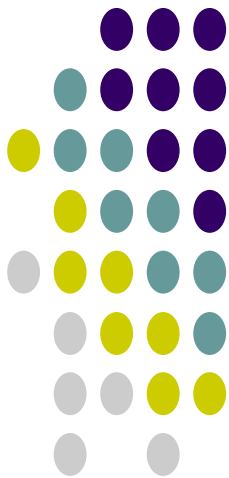
PUSKESMAS PETUMBEA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	1.011.394.697,00	966.631.001,00	(44.763.696,00)	95,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	621.688.329,00	576.924.633,00	(44.763.696,00)	92,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	621.688.329,00	576.924.633,00	(44.763.696,00)	92,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	621.688.329,00	576.924.633,00	(44.763.696,00)	92,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	549.088.329,00	504.324.633,00	(44.763.696,00)	91,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	371.715.329,00	346.203.877,00	(25.511.452,00)	93,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.373.000,00	158.120.756,00	(19.252.244,00)	89,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.318.150,00	89.318.150,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.318.150,00	89.318.150,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	54.598.000,00	54.598.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.598.000,00	54.598.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.814.218,00	10.814.218,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.814.218,00	10.814.218,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.814.218,00	10.814.218,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.736.000,00	29.736.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.736.000,00	29.736.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.200.000,00	140.200.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	100,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DEKUS WULKARSON HEHI



PUSKESMAS MOLINO



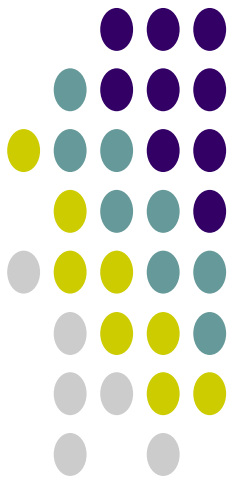
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi PUSKESMAS MOLINO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	1.474.479.523,00	1.345.178.082,00	(129.301.441,00)	91,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.260.901.243,00	1.164.428.082,00	(96.473.161,00)	92,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.260.901.243,00	1.164.428.082,00	(96.473.161,00)	92,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.260.901.243,00	1.164.428.082,00	(96.473.161,00)	92,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.048.758.743,00	974.735.582,00	(74.023.161,00)	92,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	746.988.433,00	689.967.718,00	(57.020.715,00)	92,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.770.310,00	284.767.864,00	(17.002.446,00)	94,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	212.142.500,00	189.692.500,00	(22.450.000,00)	89,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.142.500,00	189.692.500,00	(22.450.000,00)	89,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.578.280,00	180.750.000,00	(32.828.280,00)	84,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.578.280,00	180.750.000,00	(32.828.280,00)	84,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.578.280,00	15.000.000,00	(578.280,00)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.578.280,00	15.000.000,00	(578.280,00)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.578.280,00	15.000.000,00	(578.280,00)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.000.000,00	165.750.000,00	(32.250.000,00)	83,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	165.750.000,00	(32.250.000,00)	83,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	165.750.000,00	(32.250.000,00)	83,71

Uktomdale, 28 Agustus 2025
 BUPATI MOROWALI UTARA
 DELIS JULKARSON HEHI



PUSKESMAS KOLONODALE



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

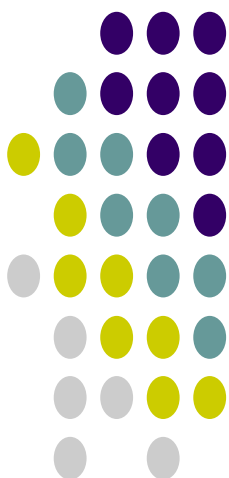
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS KOLONODALE



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	1.841.906.144,00	1.734.439.182,00	(107.466.962,00)	94,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.130.536.144,00	1.106.107.182,00	(24.428.962,00)	97,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.130.536.144,00	1.106.107.182,00	(24.428.962,00)	97,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.130.536.144,00	1.106.107.182,00	(24.428.962,00)	97,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.853.294,00	1.031.504.332,00	(27.348.962,00)	97,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	672.620.718,00	661.661.632,00	(10.959.086,00)	98,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.232.576,00	369.842.700,00	(16.389.876,00)	95,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	71.682.850,00	74.602.850,00	2.920.000,00	104,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.682.850,00	74.602.850,00	2.920.000,00	104,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	711.370.000,00	628.332.000,00	(83.038.000,00)	88,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.370.000,00	628.332.000,00	(83.038.000,00)	88,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.730.000,00	90.692.000,00	(13.038.000,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.730.000,00	90.692.000,00	(13.038.000,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.730.000,00	90.692.000,00	(13.038.000,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.640.000,00	537.640.000,00	(70.000.000,00)	88,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	607.640.000,00	537.640.000,00	(70.000.000,00)	88,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.640.000,00	537.640.000,00	(70.000.000,00)	88,48

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DESI SULKARSON HEHI



PUSKESMAS BATURUBE



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi PUSKESMAS BATURUBE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	2.060.241.036,00	1.866.026.579,00	(194.214.457,00)	90,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.113.781.036,00	919.964.579,00	(193.816.457,00)	82,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.113.781.036,00	919.964.579,00	(193.816.457,00)	82,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.113.781.036,00	919.964.579,00	(193.816.457,00)	82,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	951.481.036,00	782.664.579,00	(168.816.457,00)	82,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	663.353.736,00	547.063.816,00	(116.289.920,00)	82,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.127.300,00	235.600.763,00	(52.526.537,00)	81,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	162.300.000,00	137.300.000,00	(25.000.000,00)	84,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.300.000,00	137.300.000,00	(25.000.000,00)	84,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	946.460.000,00	946.062.000,00	(398.000,00)	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.515.600,00	164.144.000,00	(371.600,00)	99,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.664.500,00	45.296.500,00	(368.000,00)	99,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.664.500,00	20.296.500,00	(368.000,00)	98,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.664.500,00	20.296.500,00	(368.000,00)	98,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.395.000,00	9.393.500,00	(1.500,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.395.000,00	9.393.500,00	(1.500,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.395.000,00	9.393.500,00	(1.500,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.056.100,00	19.054.000,00	(2.100,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.056.100,00	19.054.000,00	(2.100,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.056.100,00	19.054.000,00	(2.100,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.944.400,00	751.918.000,00	(26.400,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.240.000,00	24.227.000,00	(13.000,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.240.000,00	24.227.000,00	(13.000,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	24.227.000,00	(13.000,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.954.400,00	145.941.000,00	(13.400,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.954.400,00	145.941.000,00	(13.400,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.954.400,00	145.941.000,00	(13.400,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.750.000,00	581.750.000,00	0,00	100,00

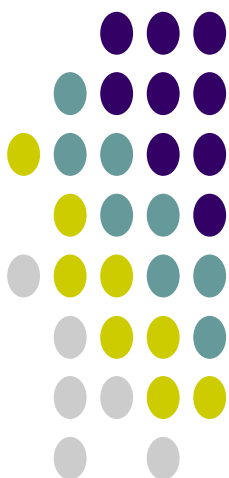
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	581.750.000,00	581.750.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.750.000,00	581.750.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00



Kabupaten, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS LULKARSON HEHI



PUSKESMAS PANCA MAKMUR



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

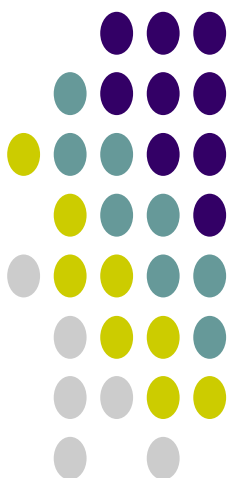


Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi PUSKESMAS PANCAMAKMUR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	770.309.125,00	710.368.121,00	(59.941.004,00)	92,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	507.901.125,00	447.960.121,00	(59.941.004,00)	88,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.901.125,00	447.960.121,00	(59.941.004,00)	88,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	507.901.125,00	447.960.121,00	(59.941.004,00)	88,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	492.901.125,00	432.960.121,00	(59.941.004,00)	87,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	287.482.535,00	256.147.110,00	(31.335.425,00)	89,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.418.590,00	176.813.011,00	(28.605.579,00)	86,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	262.408.000,00	262.408.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.408.000,00	262.408.000,00	0,00	100,00

Kotamodale, 28 Agustus 2025
 BUPATI MOROWALI UTARA

 DEVIS KARSON HEHI



PUSKESMAS PANDAUKE



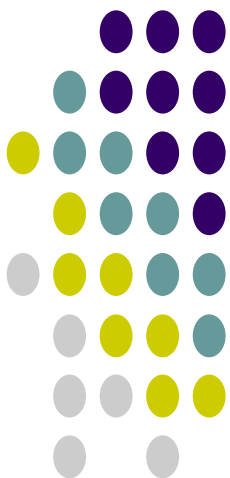
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi PUSKESMAS PANDAUKE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	1.078.854.223,00	1.003.129.975,00	(85.724.248,00)	92,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	726.512.123,00	655.129.975,00	(71.382.148,00)	90,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	726.512.123,00	655.129.975,00	(71.382.148,00)	90,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	726.512.123,00	655.129.975,00	(71.382.148,00)	90,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	711.512.123,00	651.769.975,00	(59.742.148,00)	91,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	434.456.023,00	391.626.144,00	(42.829.879,00)	90,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.056.100,00	260.143.831,00	(16.912.269,00)	93,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	3.360.000,00	(11.640.000,00)	22,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	3.360.000,00	(11.640.000,00)	22,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	352.342.100,00	348.000.000,00	(14.342.100,00)	96,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.342.100,00	28.000.000,00	(10.342.100,00)	73,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.342.100,00	28.000.000,00	(10.342.100,00)	73,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.342.100,00	28.000.000,00	(342.100,00)	98,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.342.100,00	28.000.000,00	(342.100,00)	98,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.000.000,00	320.000.000,00	(4.000.000,00)	98,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.000.000,00	320.000.000,00	(4.000.000,00)	98,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	324.000.000,00	320.000.000,00	(4.000.000,00)	98,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	320.000.000,00	(4.000.000,00)	98,77

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELLIS KULKARSON HEHI



PUSKESMAS WONGKO NDAYA



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

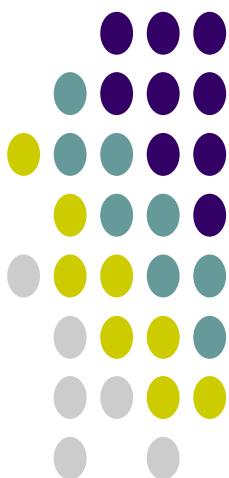
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS WONGKO NDAYA



KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		5		BELANJA DAERAH	455.990.533,00	439.198.688,00	(16.791.845,00)	96,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.750.000,00	114.658.688,00	(16.091.312,00)	87,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.750.000,00	114.658.688,00	(16.091.312,00)	87,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas	130.750.000,00	114.658.688,00	(16.091.312,00)	87,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1		BELANJA OPERASI	130.750.000,00	114.658.688,00	(16.091.312,00)	87,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.01		Belanja Pegawai	78.450.000,00	68.035.624,00	(10.414.376,00)	86,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	52.300.000,00	46.623.064,00	(5.676.936,00)	89,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	325.240.533,00	324.540.000,00	(700.533,00)	99,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.327.783,00	81.305.000,00	(22.783,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.295.183,00	2.292.000,00	(3.183,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.295.183,00	2.292.000,00	(3.183,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.295.183,00	2.292.000,00	(3.183,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.486.100,00	36.471.500,00	(14.600,00)	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	12.099.100,00	12.091.500,00	(7.600,00)	99,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	12.099.100,00	12.091.500,00	(7.600,00)	99,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	5.2		BELANJA MODAL	24.387.000,00	24.380.000,00	(7.000,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.387.000,00	24.380.000,00	(7.000,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.776.500,00	9.771.500,00	(5.000,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	9.776.500,00	9.771.500,00	(5.000,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	9.776.500,00	9.771.500,00	(5.000,00)	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	32.770.000,00	32.770.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	32.770.000,00	32.770.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.912.750,00	218.770.000,00	(142.750,00)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.060.000,00	2.930.000,00	(130.000,00)	95,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	5.1		BELANJA OPERASI	3.060.000,00	2.930.000,00	(130.000,00)	95,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	2.930.000,00	(130.000,00)	95,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.312.750,00	19.300.000,00	(12.750,00)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0003	5.1		BELANJA OPERASI	19.312.750,00	19.300.000,00	(12.750,00)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	19.312.750,00	19.300.000,00	(12.750,00)	99,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.540.000,00	196.540.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0004	5.1		BELANJA OPERASI	196.540.000,00	196.540.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	196.540.000,00	196.540.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	24.465.000,00	(535.000,00)	97,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	24.465.000,00	(535.000,00)	97,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002	5.1		BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.465.000,00	(535.000,00)	97,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.465.000,00	(535.000,00)	97,86

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEUS JULKARSON HEHI



PUSKESMAS TAMBAYOLI



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

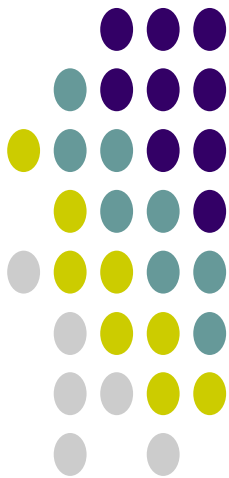
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAYOLI



KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		5		BELANJA DAERAH	416.699.248,00	388.410.792,00	(28.288.456,00)	93,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	253.440.618,00	227.103.479,00	(26.337.139,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	253.440.618,00	227.103.479,00	(26.337.139,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas	253.440.618,00	227.103.479,00	(26.337.139,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1		BELANJA OPERASI	224.013.118,00	209.675.979,00	(14.337.139,00)	93,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.01		Belanja Pegawai	151.849.124,40	138.024.008,00	(13.825.116,40)	90,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	72.163.993,60	71.651.971,00	(512.022,60)	99,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.2		BELANJA MODAL	29.427.500,00	17.427.500,00	(12.000.000,00)	59,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.427.500,00	17.427.500,00	(12.000.000,00)	59,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.258.630,00	161.307.313,00	(1.951.317,00)	98,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.821.600,00	31.878.313,00	(1.943.287,00)	94,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.644.050,00	19.642.000,00	(2.050,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	19.644.050,00	19.642.000,00	(2.050,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	19.644.050,00	19.642.000,00	(2.050,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.088.550,00	1.088.550,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	1.088.550,00	1.088.550,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.088.550,00	1.088.550,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.089.000,00	11.147.763,00	(1.941.237,00)	85,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	13.089.000,00	11.147.763,00	(1.941.237,00)	85,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	13.089.000,00	11.147.763,00	(1.941.237,00)	85,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08.0004	5.1		BELANJA OPERASI	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.030,00	429.000,00	(8.030,00)	98,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.030,00	429.000,00	(8.030,00)	98,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.09.0009	5.1		BELANJA OPERASI	437.030,00	429.000,00	(8.030,00)	98,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.09.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	437.030,00	429.000,00	(8.030,00)	98,16

Kolondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELISULKARSON HEHI



PUSKESMAS ANUTOLUWU



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

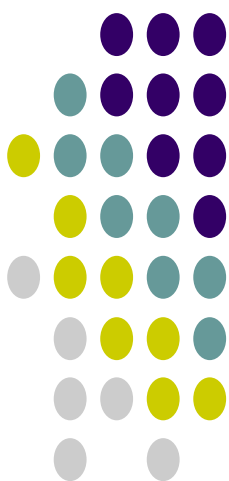
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS ANUTOLUWU



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		5	BELANJA DAERAH	807.379.125,00	713.706.964,00	(93.672.161,00)	88,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	671.706.975,00	579.361.964,00	(92.345.011,00)	86,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	671.706.975,00	579.361.964,00	(92.345.011,00)	86,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	671.706.975,00	579.361.964,00	(92.345.011,00)	86,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	561.838.275,00	514.769.864,00	(47.068.411,00)	91,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	385.543.725,00	347.656.793,00	(37.886.932,00)	90,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.294.550,00	167.113.071,00	(9.181.479,00)	94,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	109.868.700,00	64.592.100,00	(45.276.600,00)	58,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.868.700,00	64.592.100,00	(45.276.600,00)	58,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.672.150,00	134.345.000,00	(1.327.150,00)	99,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.672.150,00	3.345.000,00	(1.327.150,00)	71,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	448.350,00	390.000,00	(58.350,00)	86,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	448.350,00	390.000,00	(58.350,00)	86,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.350,00	390.000,00	(58.350,00)	86,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.688.800,00	420.000,00	(1.268.800,00)	24,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.688.800,00	420.000,00	(1.268.800,00)	24,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.800,00	420.000,00	(1.268.800,00)	24,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	100,00

Konmodale, 28 Agustus 2025
Bupati MOROWALI UTARA
DESI JULKARSON HEHI



PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

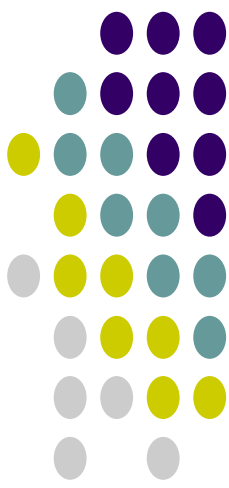
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		5	BELANJA DAERAH	371.165.067,00	360.232.125,00	(10.932.942,00)	97,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.347.067,00	128.926.125,00	(3.420.942,00)	97,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.347.067,00	128.926.125,00	(3.420.942,00)	97,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	132.347.067,00	128.926.125,00	(3.420.942,00)	97,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	132.347.067,00	128.926.125,00	(3.420.942,00)	97,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	77.834.667,00	76.037.735,00	(1.796.932,00)	97,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.512.400,00	52.888.390,00	(1.624.010,00)	97,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	238.818.000,00	231.306.000,00	(7.512.000,00)	96,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.988.000,00	63.976.000,00	(12.000,00)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.588.000,00	38.576.000,00	(12.000,00)	99,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.681.750,00	30.670.000,00	(11.750,00)	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.681.750,00	30.670.000,00	(11.750,00)	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.906.250,00	7.906.000,00	(250,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.906.250,00	7.906.000,00	(250,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.830.000,00	167.330.000,00	(7.500.000,00)	95,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.830.000,00	167.330.000,00	(7.500.000,00)	95,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	174.830.000,00	167.330.000,00	(7.500.000,00)	95,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.830.000,00	167.330.000,00	(7.500.000,00)	95,71

Kotenodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DESI JULKARSON HEHI



PUSKESMAS MAYUMBA



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

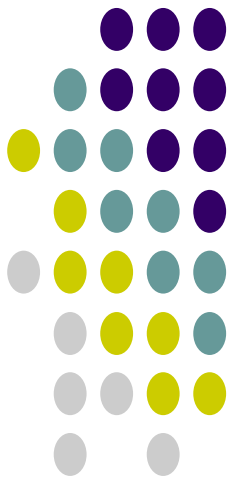
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PUSKESMAS MAYUMBA



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		5	BELANJA DAERAH	991.449.847,00	907.071.897,00	(84.377.950,00)	91,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	575.725.997,00	504.945.641,00	(70.780.356,00)	87,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	575.725.997,00	504.945.641,00	(70.780.356,00)	87,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	575.725.997,00	504.945.641,00	(70.780.356,00)	87,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	512.475.997,00	441.695.641,00	(70.780.356,00)	86,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	334.339.429,00	293.000.000,00	(41.339.429,00)	87,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.136.568,00	148.695.641,00	(29.440.927,00)	83,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	415.723.850,00	402.126.256,00	(13.597.594,00)	96,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.381.850,00	99.285.896,00	(7.095.954,00)	93,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.720.000,00	4.603.296,00	(1.116.704,00)	80,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	4.603.296,00	(1.116.704,00)	80,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	4.603.296,00	(1.116.704,00)	80,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.350.000,00	35.210.750,00	(139.250,00)	99,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.860.750,00	(139.250,00)	98,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.860.750,00	(139.250,00)	98,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.891.850,00	25.891.850,00	(4.000.000,00)	86,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.891.850,00	25.891.850,00	(4.000.000,00)	86,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.891.850,00	25.891.850,00	(4.000.000,00)	86,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.420.000,00	33.580.000,00	(1.840.000,00)	94,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.420.000,00	33.580.000,00	(1.840.000,00)	94,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.420.000,00	33.580.000,00	(1.840.000,00)	94,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.750.000,00	291.250.000,00	(6.500.000,00)	97,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.750.000,00	282.250.000,00	(500.000,00)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	282.750.000,00	282.250.000,00	(500.000,00)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.750.000,00	282.250.000,00	(500.000,00)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.592.000,00	11.590.360,00	(1.640,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.592.000,00	11.590.360,00	(1.640,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.592.000,00	11.590.360,00	(1.640,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.592.000,00	11.590.360,00	(1.640,00)	99,99

Kotamodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELSJULKARSON HEHI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

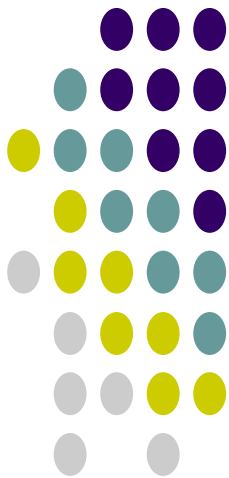
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	4.980.394.495,88	109,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	123.736.552.179,00	123.823.242.925,60	86.690.746,60	100,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46.297.157.617,00	45.594.069.635,00	-703.087.982,00	98,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.297.157.617,00	45.594.069.635,00	-703.087.982,00	98,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.023.752.000,00	3.746.705.426,00	-277.046.574,00	93,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.023.752.000,00	3.746.705.426,00	-277.046.574,00	93,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.752.000,00	3.746.705.426,00	-277.046.574,00	93,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.231.650.821,00	27.229.208.691,00	-2.442.130,00	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	27.231.650.821,00	27.229.208.691,00	-2.442.130,00	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.231.650.821,00	27.229.208.691,00	-2.442.130,00	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit	9.833.083.723,00	9.413.831.147,00	-419.252.576,00	95,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	974.000.000,00	572.450.000,00	-401.550.000,00	58,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.000.000,00	572.450.000,00	-401.550.000,00	58,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	8.859.083.723,00	8.841.381.147,00	-17.702.576,00	99,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.859.083.723,00	8.841.381.147,00	-17.702.576,00	99,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.208.671.073,00	5.204.324.371,00	-4.346.702,00	99,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	5.208.671.073,00	5.204.324.371,00	-4.346.702,00	99,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.208.671.073,00	5.204.324.371,00	-4.346.702,00	99,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.439.394.562,00	78.229.173.290,60	789.778.728,60	101,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.240.000,00	253.639.600,00	-246.600.400,00	50,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.240.000,00	253.639.600,00	-246.600.400,00	50,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	500.240.000,00	253.639.600,00	-246.600.400,00	50,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.240.000,00	253.639.600,00	-246.600.400,00	50,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.906.399.900,00	3.800.520.229,00	-105.879.671,00	97,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.197.799.300,00	3.164.210.500,00	-33.588.800,00	98,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.529.300,00	82.170.000,00	-8.359.300,00	90,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.529.300,00	82.170.000,00	-8.359.300,00	90,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.107.270.000,00	3.082.040.500,00	-25.229.500,00	99,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.107.270.000,00	3.082.040.500,00	-25.229.500,00	99,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	417.918.600,00	407.701.375,00	-10.217.225,00	97,56

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI		417.918.600,00	407.701.375,00	-10.217.225,00	97,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		417.918.600,00	407.701.375,00	-10.217.225,00	97,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		290.682.000,00	228.608.354,00	-62.073.646,00	78,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI		290.682.000,00	228.608.354,00	-62.073.646,00	78,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		290.682.000,00	228.608.354,00	-62.073.646,00	78,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.345.285.300,00	3.342.000.000,00	-3.285.300,00	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3.345.285.300,00	3.342.000.000,00	-3.285.300,00	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL		3.345.285.300,00	3.342.000.000,00	-3.285.300,00	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		3.345.285.300,00	3.342.000.000,00	-3.285.300,00	99,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.718.929.000,00	17.673.389.086,00	-2.045.539.914,00	89,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		19.718.929.000,00	17.673.389.086,00	-2.045.539.914,00	89,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI		19.718.929.000,00	17.673.389.086,00	-2.045.539.914,00	89,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai		105.160.000,00	90.960.000,00	-14.200.000,00	86,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		19.613.769.000,00	17.582.429.086,00	-2.031.339.914,00	89,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		49.968.540.362,00	53.159.624.375,60	3.191.084.013,60	106,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		49.968.540.362,00	53.159.624.375,60	3.191.084.013,60	106,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI		47.628.764.762,00	50.902.580.875,60	3.273.816.113,60	106,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai		24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	4.364.881.501,00	117,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	-1.091.065.387,40	95,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL		2.339.775.600,00	2.257.043.500,00	-82.732.100,00	96,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	-82.432.100,00	96,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		200.000.000,00	199.700.000,00	-300.000,00	99,85

Kelondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DEKS. JU. KARSON HEHI



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH**



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	28.189.113.179,31	27.994.104.891,00	(195.008.288,31)	99,31
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.01			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004	5.1		BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.01.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.718.828.660,00	2.718.039.683,00	(788.977,00)	99,97
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.718.828.660,00	2.718.039.683,00	(788.977,00)	99,97
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.718.828.660,00	2.718.039.683,00	(788.977,00)	99,97
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.718.828.660,00	2.718.039.683,00	(788.977,00)	99,97
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.718.828.660,00	2.718.039.683,00	(788.977,00)	99,97
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25.470.284.519,31	25.276.065.208,00	(194.219.311,31)	99,24
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	25.470.284.519,31	25.276.065.208,00	(194.219.311,31)	99,24
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.470.284.519,31	25.276.065.208,00	(194.219.311,31)	99,24
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	840.274.000,00	829.700.600,00	(10.573.400,00)	98,74
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	840.274.000,00	829.700.600,00	(10.573.400,00)	98,74
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2		BELANJA MODAL	24.630.010.519,31	24.446.364.608,00	(183.645.911,31)	99,25
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.582.974.684,31	7.496.430.608,00	(86.544.076,31)	98,86
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.029.035.835,00	16.931.934.000,00	(97.101.835,00)	99,43

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELISULKARSON HEHI



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	178.767.796.341,55	159.477.210.939,00	(19.290.585.402,55)	89,21
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.492.947.015,01	13.268.092.397,00	(224.854.618,01)	98,33
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.753.411.300,00	9.532.838.727,00	(220.572.573,00)	97,74
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	2.019.732.000,00	2.014.213.667,00	(5.518.333,00)	99,73
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	2.019.732.000,00	2.014.213.667,00	(5.518.333,00)	99,73
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.732.000,00	2.014.213.667,00	(5.518.333,00)	99,73
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0102		Pembangunan Breakwater	367.166.400,00	366.331.500,00	(834.900,00)	99,77
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0102	5.1	BELANJA OPERASI	17.166.400,00	17.165.500,00	(900,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0102	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.166.400,00	17.165.500,00	(900,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0102	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	349.166.000,00	(834.000,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0102	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	349.166.000,00	(834.000,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0111		Pembangunan Bendungan	356.922.000,00	355.834.260,00	(1.087.740,00)	99,70
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0111	5.1	BELANJA OPERASI	6.922.000,00	6.920.000,00	(2.000,00)	99,97
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0111	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.922.000,00	6.920.000,00	(2.000,00)	99,97
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0111	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	348.914.260,00	(1.085.740,00)	99,69
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0111	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	348.914.260,00	(1.085.740,00)	99,69
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115		Pembangunan Tanggul Sungai	6.654.582.900,00	6.442.183.100,00	(212.399.800,00)	96,81
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.1	BELANJA OPERASI	28.708.000,00	28.708.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.708.000,00	28.708.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2	BELANJA MODAL	6.625.874.900,00	6.413.475.100,00	(212.399.800,00)	96,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.896.000,00	59.896.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.565.978.900,00	6.353.579.100,00	(212.399.800,00)	96,77
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	355.008.000,00	354.276.200,00	(731.800,00)	99,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.1	BELANJA OPERASI	5.008.000,00	4.970.000,00	(38.000,00)	99,24
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.008.000,00	4.970.000,00	(38.000,00)	99,24
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	349.306.200,00	(693.800,00)	99,80
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	349.306.200,00	(693.800,00)	99,80
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.739.535.715,01	3.735.253.670,00	(4.282.045,01)	99,89
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.084.458.000,00	1.082.387.370,00	(2.070.630,00)	99,81
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	234.458.000,00	234.445.170,00	(12.830,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.458.000,00	234.445.170,00	(12.830,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	850.000.000,00	847.942.200,00	(2.057.800,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	850.000.000,00	847.942.200,00	(2.057.800,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	385.148.800,00	384.382.700,00	(766.100,00)	99,80

1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	95.148.800,00	95.023.000,00	(125.800,00)	99,87
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.148.800,00	95.023.000,00	(125.800,00)	99,87
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	290.000.000,00	289.359.700,00	(640.300,00)	99,78
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.000.000,00	289.359.700,00	(640.300,00)	99,78
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015		Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.448.928.915,01	1.447.483.600,00	(1.445.315,01)	99,90
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	8.933.600,00	8.930.000,00	(3.600,00)	99,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.933.600,00	8.930.000,00	(3.600,00)	99,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	1.439.995.315,01	1.438.553.600,00	(1.441.715,01)	99,90
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.439.995.315,01	1.438.553.600,00	(1.441.715,01)	99,90
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	821.000.000,00	821.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	821.000.000,00	821.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	821.000.000,00	821.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.472.110.731,10	12.834.292.919,00	(2.637.817.812,10)	82,95
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.472.110.731,10	12.834.292.919,00	(2.637.817.812,10)	82,95
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000,00	199.830.000,00	(100.170.000,00)	66,61
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	199.830.000,00	(100.170.000,00)	66,61
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	199.830.000,00	(100.170.000,00)	66,61
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.335.496.400,00	2.250.914.900,00	(84.581.500,00)	96,38
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.465.496.400,00	1.422.093.900,00	(43.402.500,00)	97,04
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.496.400,00	1.422.093.900,00	(43.402.500,00)	97,04
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	870.000.000,00	828.821.000,00	(41.179.000,00)	95,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	870.000.000,00	828.821.000,00	(41.179.000,00)	95,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	304.971.200,00	304.860.800,00	(110.400,00)	99,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	304.971.200,00	304.860.800,00	(110.400,00)	99,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.971.200,00	304.860.800,00	(110.400,00)	99,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.531.643.131,10	10.078.687.219,00	(2.452.955.912,10)	80,43
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	555.105.200,00	549.956.700,00	(5.148.500,00)	99,07
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.105.200,00	549.956.700,00	(5.148.500,00)	99,07
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	11.976.537.931,10	9.528.730.519,00	(2.447.807.412,10)	79,56
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.976.537.931,10	9.528.730.519,00	(2.447.807.412,10)	79,56
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	550.288.400,00	543.419.943,00	(6.868.457,00)	98,75
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	550.288.400,00	543.419.943,00	(6.868.457,00)	98,75
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	550.288.400,00	543.419.943,00	(6.868.457,00)	98,75
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	538.288.400,00	532.282.443,00	(6.005.957,00)	98,88
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.288.400,00	532.282.443,00	(6.005.957,00)	98,88
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.137.500,00	(862.500,00)	92,81
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.137.500,00	(862.500,00)	92,81
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.362.939.641,00	4.353.575.526,00	(9.364.115,00)	99,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.362.939.641,00	4.353.575.526,00	(9.364.115,00)	99,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4.362.939.641,00	4.353.575.526,00	(9.364.115,00)	99,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	270.105.600,00	268.155.526,00	(1.950.074,00)	99,28
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.105.600,00	268.155.526,00	(1.950.074,00)	99,28
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	4.092.834.041,00	4.085.420.000,00	(7.414.041,00)	99,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.092.834.041,00	4.085.420.000,00	(7.414.041,00)	99,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	33.435.271.941,24	26.579.408.901,00	(6.855.863.040,24)	79,50
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	33.435.271.941,24	26.579.408.901,00	(6.855.863.040,24)	79,50

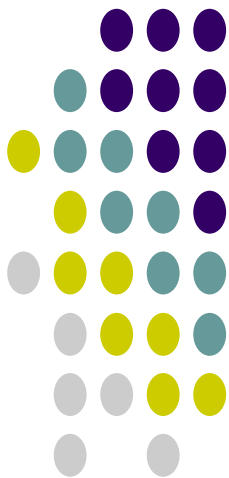
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.523.513.800,00	6.204.577.459,00	(318.936.341,00)	95,11
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	6.323.513.800,00	6.204.577.459,00	(118.936.341,00)	98,12
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.323.513.800,00	6.204.577.459,00	(118.936.341,00)	98,12
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	26.911.758.141,24	20.374.831.442,00	(6.536.926.699,24)	75,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.270.289.069,24	4.929.870.261,00	(1.340.418.808,24)	78,62
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.270.289.069,24	4.929.870.261,00	(1.340.418.808,24)	78,62
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	20.641.469.072,00	15.444.961.181,00	(5.196.507.891,00)	74,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.240.900,00	30.187.500,00	(1.053.400,00)	96,63
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.410.228.172,00	15.214.899.681,00	(5.195.328.491,00)	74,55
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.874.000,00	(126.000,00)	99,94
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	98.073.697.577,20	88.963.478.747,00	(9.110.218.830,20)	90,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	98.073.697.577,20	88.963.478.747,00	(9.110.218.830,20)	90,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	675.000.000,00	621.768.500,00	(53.231.500,00)	92,11
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	675.000.000,00	621.768.500,00	(53.231.500,00)	92,11
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.000.000,00	621.768.500,00	(53.231.500,00)	92,11
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031		Penggantian Jembatan	950.000.675,88	948.561.000,00	(1.439.675,88)	99,85
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	950.000.675,88	948.561.000,00	(1.439.675,88)	99,85
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950.000.675,88	948.561.000,00	(1.439.675,88)	99,85
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	16.677.923.089,29	14.712.541.156,00	(1.965.381.933,29)	88,22
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	585.040.000,00	584.390.000,00	(650.000,00)	99,89
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.040.000,00	584.390.000,00	(650.000,00)	99,89
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	16.092.883.089,29	14.128.151.156,00	(1.964.731.933,29)	87,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.092.883.089,29	14.128.151.156,00	(1.964.731.933,29)	87,79
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	57.002.298.508,51	53.303.009.957,00	(3.699.288.551,51)	93,51
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.615.901.568,00	1.608.779.300,00	(7.122.268,00)	99,56
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.615.901.568,00	1.608.779.300,00	(7.122.268,00)	99,56
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	55.386.396.940,51	51.694.230.657,00	(3.692.166.283,51)	93,33
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.386.396.940,51	51.694.230.657,00	(3.692.166.283,51)	93,33
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	7.799.611.855,00	7.776.117.438,00	(23.494.417,00)	99,70
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	7.799.611.855,00	7.776.117.438,00	(23.494.417,00)	99,70
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.799.611.855,00	7.776.117.438,00	(23.494.417,00)	99,70
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	70.000.000,00	69.939.000,00	(61.000,00)	99,91
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.939.000,00	(61.000,00)	99,91
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.939.000,00	(61.000,00)	99,91
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	13.281.863.448,52	10.012.948.696,00	(3.268.914.752,52)	75,39
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.819.000,00	(181.000,00)	99,88
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.819.000,00	(181.000,00)	99,88
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	13.131.863.448,52	9.863.129.696,00	(3.268.733.752,52)	75,11
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.131.863.448,52	9.863.129.696,00	(3.268.733.752,52)	75,11
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042		Pemeliharaan Berkala Jembatan	992.000.000,00	893.593.000,00	(98.407.000,00)	90,08
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	842.000.000,00	797.658.000,00	(44.342.000,00)	94,73
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.000.000,00	797.658.000,00	(44.342.000,00)	94,73

1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	95.935.000,00	(54.065.000,00)	63,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	95.935.000,00	(54.065.000,00)	63,96
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	168.364.960,00	51.717.700,00	(116.647.260,00)	30,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	168.364.960,00	51.717.700,00	(116.647.260,00)	30,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	168.364.960,00	51.717.700,00	(116.647.260,00)	30,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	168.364.960,00	51.717.700,00	(116.647.260,00)	30,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.364.960,00	51.717.700,00	(116.647.260,00)	30,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.384.582.020,00	1.384.533.729,00	(48.291,00)	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0011		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	653.837.020,00	653.837.020,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	74.767.020,00	74.767.020,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.767.020,00	74.767.020,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.767.020,00	74.767.020,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	579.070.000,00	579.070.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	579.070.000,00	579.070.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.070.000,00	579.070.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	380.745.000,00	380.696.709,00	(48.291,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	380.745.000,00	380.696.709,00	(48.291,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	380.745.000,00	380.696.709,00	(48.291,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.745.000,00	380.696.709,00	(48.291,00)	99,99
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.827.594.056,00	11.498.691.077,00	(328.902.979,00)	97,22
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.253.915.481,00	6.992.557.574,00	(261.357.907,00)	96,40
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.253.915.481,00	6.992.557.574,00	(261.357.907,00)	96,40
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.253.915.481,00	6.992.557.574,00	(261.357.907,00)	96,40
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.253.915.481,00	6.992.557.574,00	(261.357.907,00)	96,40
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	339.098.400,00	336.174.609,00	(2.923.791,00)	99,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	339.098.400,00	336.174.609,00	(2.923.791,00)	99,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	339.098.400,00	336.174.609,00	(2.923.791,00)	99,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.098.400,00	336.174.609,00	(2.923.791,00)	99,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.207.505.376,00	1.205.764.983,00	(1.740.393,00)	99,86
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	617.931.770,00	617.459.000,00	(472.770,00)	99,92
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.761.770,00	88.619.000,00	(142.770,00)	99,84
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.761.770,00	88.619.000,00	(142.770,00)	99,84
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	529.170.000,00	528.840.000,00	(330.000,00)	99,94
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.170.000,00	528.840.000,00	(330.000,00)	99,94
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.797.256,00	7.797.000,00	(256,00)	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.797.256,00	7.797.000,00	(256,00)	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.797.256,00	7.797.000,00	(256,00)	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.113.750,00	50.112.263,00	(1.487,00)	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.113.750,00	50.112.263,00	(1.487,00)	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.113.750,00	50.112.263,00	(1.487,00)	100,00

1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531.662.600,00	530.396.720,00	(1.265.880,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	531.662.600,00	530.396.720,00	(1.265.880,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.662.600,00	530.396.720,00	(1.265.880,00)	99,76
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.925.524.799,00	2.866.106.411,00	(59.418.388,00)	97,97
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.556.799,00	116.476.427,00	(7.080.372,00)	94,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.556.799,00	116.476.427,00	(7.080.372,00)	94,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.556.799,00	116.476.427,00	(7.080.372,00)	94,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.801.968.000,00	2.749.629.984,00	(52.338.016,00)	98,13
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.801.968.000,00	2.749.629.984,00	(52.338.016,00)	98,13
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	210.360.000,00	182.040.000,00	(28.320.000,00)	86,54
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.591.608.000,00	2.567.589.984,00	(24.018.016,00)	99,07
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.550.000,00	98.087.500,00	(3.462.500,00)	96,59
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	35.325.000,00	(675.000,00)	98,13
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.325.000,00	(675.000,00)	98,13
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.325.000,00	(675.000,00)	98,13
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000,00	47.567.500,00	(2.432.500,00)	95,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.567.500,00	(2.432.500,00)	95,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.567.500,00	(2.432.500,00)	95,14
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.550.000,00	15.195.000,00	(355.000,00)	97,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.550.000,00	15.195.000,00	(355.000,00)	97,72
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	15.195.000,00	(355.000,00)	97,72

Koronadale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DEUS JULKARSON HEHI



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN DAERAH**



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

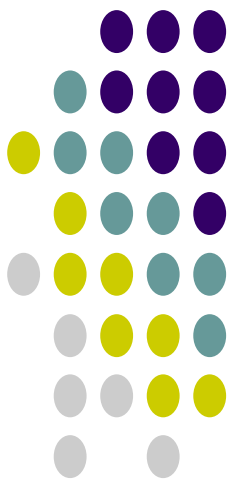
KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	16.225.233.787,00	15.935.501.334,00	(289.732.453,00)	98,21
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	574.037.600,00	573.287.974,00	(749.626,00)	99,87
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	281.245.500,00	281.148.500,00	(97.000,00)	99,97
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	215.857.500,00	215.779.500,00	(78.000,00)	99,96
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1		BELANJA OPERASI	215.857.500,00	215.779.500,00	(78.000,00)	99,96
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	215.857.500,00	215.779.500,00	(78.000,00)	99,96
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	65.388.000,00	65.369.000,00	(19.000,00)	99,97
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1		BELANJA OPERASI	65.388.000,00	65.369.000,00	(19.000,00)	99,97
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	65.388.000,00	65.369.000,00	(19.000,00)	99,97
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	292.792.100,00	292.139.474,00	(652.626,00)	99,78
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	115.857.500,00	115.796.500,00	(61.000,00)	99,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1		BELANJA OPERASI	115.857.500,00	115.796.500,00	(61.000,00)	99,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	115.857.500,00	115.796.500,00	(61.000,00)	99,95
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	176.934.600,00	176.342.974,00	(591.626,00)	99,67
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1		BELANJA OPERASI	176.934.600,00	176.342.974,00	(591.626,00)	99,67
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	176.934.600,00	176.342.974,00	(591.626,00)	99,67
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	663.669.250,00	663.579.050,00	(90.200,00)	99,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	647.157.850,00	647.067.650,00	(90.200,00)	99,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.373.350,00	97.373.350,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	97.373.350,00	97.373.350,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	97.373.350,00	97.373.350,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	457.895.000,00	457.806.800,00	(88.200,00)	99,98
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1		BELANJA OPERASI	27.943.800,00	27.895.800,00	(48.000,00)	99,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	27.943.800,00	27.895.800,00	(48.000,00)	99,83
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2		BELANJA MODAL	429.951.200,00	429.911.000,00	(40.200,00)	99,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429.951.200,00	429.911.000,00	(40.200,00)	99,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	91.889.500,00	91.887.500,00	(2.000,00)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1		BELANJA OPERASI	91.889.500,00	91.887.500,00	(2.000,00)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	91.889.500,00	91.887.500,00	(2.000,00)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	16.511.400,00	16.511.400,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.511.400,00	16.511.400,00	0,00	100,00

1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.511.400,00	16.511.400,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.511.400,00	16.511.400,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.987.526.937,00	14.698.634.310,00	(288.892.627,00)	98,07
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.266.513.939,00	5.039.318.234,00	(227.195.705,00)	95,69
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.266.513.939,00	5.039.318.234,00	(227.195.705,00)	95,69
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.266.513.939,00	5.039.318.234,00	(227.195.705,00)	95,69
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.266.513.939,00	5.039.318.234,00	(227.195.705,00)	95,69
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.483.300,00	108.023.300,00	(460.000,00)	99,58
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.483.300,00	108.023.300,00	(460.000,00)	99,58
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	108.483.300,00	108.023.300,00	(460.000,00)	99,58
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.483.300,00	108.023.300,00	(460.000,00)	99,58
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.194.200,00	411.665.987,00	(3.528.213,00)	99,15
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.603.250,00	31.518.750,00	(84.500,00)	99,73
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.603.250,00	31.518.750,00	(84.500,00)	99,73
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.603.250,00	31.518.750,00	(84.500,00)	99,73
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.159.750,00	20.946.956,00	(3.212.794,00)	86,70
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.159.750,00	20.946.956,00	(3.212.794,00)	86,70
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.159.750,00	20.946.956,00	(3.212.794,00)	86,70
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.431.200,00	359.200.281,00	(230.919,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	359.431.200,00	359.200.281,00	(230.919,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.431.200,00	359.200.281,00	(230.919,00)	99,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.797.070.648,00	8.744.931.499,00	(52.139.149,00)	99,41
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.516.648,00	12.499.499,00	(9.017.149,00)	58,09
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.516.648,00	12.499.499,00	(9.017.149,00)	58,09
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.516.648,00	12.499.499,00	(9.017.149,00)	58,09
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.254.000,00	24.882.000,00	(9.372.000,00)	72,64
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.254.000,00	24.882.000,00	(9.372.000,00)	72,64
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.254.000,00	24.882.000,00	(9.372.000,00)	72,64
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.737.800.000,00	8.704.050.000,00	(33.750.000,00)	99,61
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.737.800.000,00	8.704.050.000,00	(33.750.000,00)	99,61
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000.000,00	8.666.250.000,00	(33.750.000,00)	99,61
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.264.850,00	366.695.290,00	(5.569.560,00)	98,50
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.800.000,00	57.945.085,00	(3.854.915,00)	93,76
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.800.000,00	57.945.085,00	(3.854.915,00)	93,76

1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	57.945.085,00	(3.854.915,00)	93,76
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.464.850,00	308.750.205,00	(1.714.645,00)	99,45
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	310.464.850,00	308.750.205,00	(1.714.645,00)	99,45
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.464.850,00	308.750.205,00	(1.714.645,00)	99,45

Kp. Jombang, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS SULKARSON HEHI



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

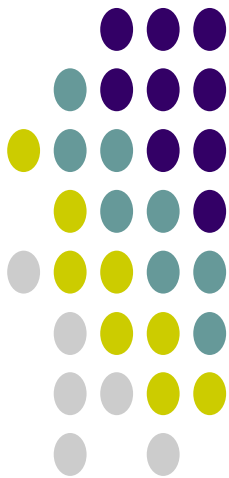
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	22.083.230.643,49	20.517.097.688,00	(1.566.132.955,49)	92,91
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	14.557.573.509,99	13.300.336.205,00	(1.257.237.304,99)	91,36
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	158.410.700,00	129.725.400,00	(28.685.300,00)	81,89
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	45.773.800,00	42.430.000,00	(3.343.800,00)	92,69
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.773.800,00	42.430.000,00	(3.343.800,00)	92,69
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.773.800,00	42.430.000,00	(3.343.800,00)	92,69
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	112.636.900,00	87.295.400,00	(25.341.500,00)	77,50
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	112.636.900,00	87.295.400,00	(25.341.500,00)	77,50
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.636.900,00	87.295.400,00	(25.341.500,00)	77,50
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	629.911.840,00	611.141.004,00	(18.770.836,00)	97,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	373.999.340,00	368.245.000,00	(5.754.340,00)	98,46
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	173.999.340,00	168.850.000,00	(5.149.340,00)	97,04
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.999.340,00	168.850.000,00	(5.149.340,00)	97,04
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.395.000,00	(605.000,00)	99,70
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.395.000,00	(605.000,00)	99,70
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	39.264.300,00	34.525.000,00	(4.739.300,00)	87,93
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.264.300,00	34.525.000,00	(4.739.300,00)	87,93
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.264.300,00	34.525.000,00	(4.739.300,00)	87,93
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	125.862.400,00	124.000.000,00	(1.862.400,00)	98,52
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	125.862.400,00	124.000.000,00	(1.862.400,00)	98,52
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.862.400,00	124.000.000,00	(1.862.400,00)	98,52
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	56.918.800,00	51.396.004,00	(5.522.796,00)	90,30
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	56.918.800,00	51.396.004,00	(5.522.796,00)	90,30
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.918.800,00	51.396.004,00	(5.522.796,00)	90,30
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	33.867.000,00	32.975.000,00	(892.000,00)	97,37
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	33.867.000,00	32.975.000,00	(892.000,00)	97,37
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.867.000,00	32.975.000,00	(892.000,00)	97,37
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.129.266.610,00	2.122.888.200,00	(6.378.410,00)	99,70
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	20.899.600,00	19.965.000,00	(934.600,00)	95,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.899.600,00	19.965.000,00	(934.600,00)	95,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.899.600,00	19.965.000,00	(934.600,00)	95,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.878.286.400,00	1.875.905.000,00	(2.381.400,00)	99,87

1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	298.286.400,00	295.905.000,00	(2.381.400,00)	99,20
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.286.400,00	295.905.000,00	(2.381.400,00)	99,20
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	178.329.760,00	177.724.200,00	(605.560,00)	99,66
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	93.616.400,00	93.014.200,00	(602.200,00)	99,36
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.616.400,00	93.014.200,00	(602.200,00)	99,36
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	84.713.360,00	84.710.000,00	(3.360,00)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.713.360,00	84.710.000,00	(3.360,00)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.750.850,00	49.294.000,00	(2.456.850,00)	95,25
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.750.850,00	49.294.000,00	(2.456.850,00)	95,25
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.750.850,00	49.294.000,00	(2.456.850,00)	95,25
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11.639.984.359,99	10.436.581.601,00	(1.203.402.758,99)	89,66
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0001		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67.592.000,00	56.565.445,00	(11.026.555,00)	83,69
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.592.000,00	56.565.445,00	(11.026.555,00)	83,69
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.592.000,00	56.565.445,00	(11.026.555,00)	83,69
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	11.572.392.359,99	10.380.016.156,00	(1.192.376.203,99)	89,70
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.872.392.359,99	3.843.209.590,00	(29.182.769,99)	99,25
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.872.392.359,99	3.843.209.590,00	(29.182.769,99)	99,25
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	7.700.000.000,00	6.536.806.566,00	(1.163.193.434,00)	84,89
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.700.000.000,00	6.536.806.566,00	(1.163.193.434,00)	84,89
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.525.657.133,50	7.216.761.483,00	(308.895.650,50)	95,90
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.069.944.148,00	2.924.536.325,00	(145.407.823,00)	95,26
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.069.944.148,00	2.924.536.325,00	(145.407.823,00)	95,26
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.069.944.148,00	2.924.536.325,00	(145.407.823,00)	95,26
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.069.944.148,00	2.924.536.325,00	(145.407.823,00)	95,26
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.975.252.985,50	2.868.598.008,00	(106.654.977,50)	96,42
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.571.007.435,50	2.472.199.638,00	(98.807.797,50)	96,16
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	180.439.100,00	82.404.950,00	(98.034.150,00)	45,67
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.439.100,00	82.404.950,00	(98.034.150,00)	45,67
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.390.568.335,50	2.389.794.688,00	(773.647,50)	99,97
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.031.290,00	325.477.688,00	(553.602,00)	99,83
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.964.537.045,50	1.964.537.000,00	(45,50)	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.780.000,00	(220.000,00)	99,78
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.120.550,00	13.800.250,00	(3.320.300,00)	80,61
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.120.550,00	13.800.250,00	(3.320.300,00)	80,61
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.120.550,00	13.800.250,00	(3.320.300,00)	80,61
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.125.000,00	382.598.120,00	(4.526.880,00)	98,83
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	387.125.000,00	382.598.120,00	(4.526.880,00)	98,83
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.125.000,00	382.598.120,00	(4.526.880,00)	98,83
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.010.000,00	534.208.900,00	(45.801.100,00)	92,10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.870.000,00	25.245.000,00	(8.625.000,00)	74,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.870.000,00	25.245.000,00	(8.625.000,00)	74,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.870.000,00	25.245.000,00	(8.625.000,00)	74,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	546.140.000,00	508.963.900,00	(37.176.100,00)	93,19

1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	546.140.000,00	508.963.900,00	(37.176.100,00)	93,19
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.340.000,00	465.163.900,00	(37.176.100,00)	92,60
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.500.000,00	844.468.250,00	(11.031.750,00)	98,71
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	855.500.000,00	844.468.250,00	(11.031.750,00)	98,71
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	731.750.000,00	720.718.250,00	(11.031.750,00)	98,49
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.750.000,00	720.718.250,00	(11.031.750,00)	98,49
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS FULKARSON HEHI



DINAS SOSIAL DAERAH



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL DAERAH

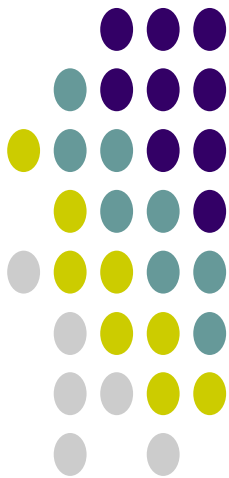


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.486.237.616,00	6.789.756.722,00	(696.480.894,00)	90,70
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	527.234.648,00	499.404.319,00	(27.830.329,00)	94,72
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	53.747.048,00	49.634.000,00	(4.113.048,00)	92,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	53.747.048,00	49.634.000,00	(4.113.048,00)	92,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.747.048,00	49.634.000,00	(4.113.048,00)	92,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.747.048,00	49.634.000,00	(4.113.048,00)	92,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.370.000,00	15.220.000,00	(150.000,00)	99,02
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.370.000,00	15.220.000,00	(150.000,00)	99,02
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.370.000,00	15.220.000,00	(150.000,00)	99,02
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.370.000,00	15.220.000,00	(150.000,00)	99,02
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	458.117.600,00	434.550.319,00	(23.567.281,00)	94,86
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	316.007.000,00	315.126.319,00	(880.681,00)	99,72
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	316.007.000,00	315.126.319,00	(880.681,00)	99,72
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.007.000,00	315.126.319,00	(880.681,00)	99,72
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		Kabupaten/Kota	38.483.600,00	32.709.200,00	(5.774.400,00)	85,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.483.600,00	32.709.200,00	(5.774.400,00)	85,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.483.600,00	32.709.200,00	(5.774.400,00)	85,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.740.000,00	20.830.000,00	(9.910.000,00)	67,76
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	20.830.000,00	(9.910.000,00)	67,76
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	20.830.000,00	(9.910.000,00)	67,76
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72.887.000,00	65.884.800,00	(7.002.200,00)	90,39
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.887.000,00	65.884.800,00	(7.002.200,00)	90,39
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.887.000,00	65.884.800,00	(7.002.200,00)	90,39
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	635.223.800,00	596.923.800,00	(38.300.000,00)	93,97
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	427.644.400,00	400.377.000,00	(27.267.400,00)	93,62
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	119.435.000,00	(5.474.600,00)	95,62
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	124.909.600,00	119.435.000,00	(5.474.600,00)	95,62
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.909.600,00	119.435.000,00	(5.474.600,00)	95,62
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	135.790.000,00	(19.647.600,00)	87,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	155.437.600,00	135.790.000,00	(19.647.600,00)	87,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.437.600,00	135.790.000,00	(19.647.600,00)	87,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	100,00

1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	137.092.000,00	(2.145.200,00)	98,46
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	139.237.200,00	137.092.000,00	(2.145.200,00)	98,46
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.237.200,00	137.092.000,00	(2.145.200,00)	98,46
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	207.579.400,00	196.546.800,00	(11.032.600,00)	94,69
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003		Penyediaan Permakanan	76.224.800,00	74.972.800,00	(1.252.000,00)	98,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	76.224.800,00	74.972.800,00	(1.252.000,00)	98,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.224.800,00	74.972.800,00	(1.252.000,00)	98,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004		Penyediaan Sandang	34.147.600,00	32.534.000,00	(1.613.600,00)	95,27
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.147.600,00	32.534.000,00	(1.613.600,00)	95,27
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.147.600,00	32.534.000,00	(1.613.600,00)	95,27
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	97.207.000,00	89.040.000,00	(8.167.000,00)	91,60
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	97.207.000,00	89.040.000,00	(8.167.000,00)	91,60
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.207.000,00	89.040.000,00	(8.167.000,00)	91,60
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.305.022.000,00	908.739.725,00	(396.282.275,00)	69,63
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.305.022.000,00	908.739.725,00	(396.282.275,00)	69,63
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.890.000,00	81.543.152,00	(2.346.848,00)	97,20
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.890.000,00	81.543.152,00	(2.346.848,00)	97,20
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.890.000,00	81.543.152,00	(2.346.848,00)	97,20
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.898.000,00	418.483.573,00	(20.414.427,00)	95,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	438.898.000,00	418.483.573,00	(20.414.427,00)	95,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.898.000,00	418.483.573,00	(20.414.427,00)	95,35
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	782.234.000,00	408.713.000,00	(373.521.000,00)	52,25
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	782.234.000,00	408.713.000,00	(373.521.000,00)	52,25
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.234.000,00	408.713.000,00	(373.521.000,00)	52,25
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	502.810.830,00	499.199.822,00	(3.611.008,00)	99,28
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	348.729.030,00	347.565.822,00	(1.163.208,00)	99,67
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	263.388.030,00	262.977.000,00	(411.030,00)	99,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	263.388.030,00	262.977.000,00	(411.030,00)	99,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.388.030,00	262.977.000,00	(411.030,00)	99,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	85.341.000,00	84.588.822,00	(752.178,00)	99,12
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.341.000,00	84.588.822,00	(752.178,00)	99,12
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.341.000,00	84.588.822,00	(752.178,00)	99,12
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	154.081.800,00	151.634.000,00	(2.447.800,00)	98,41
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	72.935.000,00	72.444.000,00	(491.000,00)	99,33
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.935.000,00	72.444.000,00	(491.000,00)	99,33
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.935.000,00	72.444.000,00	(491.000,00)	99,33
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	81.146.800,00	79.190.000,00	(1.956.800,00)	97,59
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.146.800,00	79.190.000,00	(1.956.800,00)	97,59
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.146.800,00	79.190.000,00	(1.956.800,00)	97,59
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	100,00

1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0001		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.478.216.338,00	4.247.759.056,00	(230.457.282,00)	94,85
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.909.885.798,00	2.745.639.651,00	(164.246.147,00)	94,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.909.885.798,00	2.745.639.651,00	(164.246.147,00)	94,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.909.885.798,00	2.745.639.651,00	(164.246.147,00)	94,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.909.885.798,00	2.745.639.651,00	(164.246.147,00)	94,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.125.540,00	496.986.603,00	(11.138.937,00)	97,81
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.730.740,00	2.752.247,00	(978.493,00)	73,77
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.730.740,00	2.752.247,00	(978.493,00)	73,77
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.730.740,00	2.752.247,00	(978.493,00)	73,77
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.077.050,00	125.338.700,00	(738.350,00)	99,41
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.277.050,00	76.938.700,00	(338.350,00)	99,56
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.277.050,00	76.938.700,00	(338.350,00)	99,56
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	48.800.000,00	48.400.000,00	(400.000,00)	99,18
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.800.000,00	48.400.000,00	(400.000,00)	99,18
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.468.750,00	20.327.950,00	(140.800,00)	99,31
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.468.750,00	20.327.950,00	(140.800,00)	99,31
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.468.750,00	20.327.950,00	(140.800,00)	99,31
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.849.000,00	348.567.706,00	(9.281.294,00)	97,41
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	357.849.000,00	348.567.706,00	(9.281.294,00)	97,41
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.849.000,00	348.567.706,00	(9.281.294,00)	97,41
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.755.000,00	727.589.515,00	(51.165.485,00)	93,43
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.620.000,00	24.304.515,00	(11.315.485,00)	68,23
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.620.000,00	24.304.515,00	(11.315.485,00)	68,23
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.620.000,00	24.304.515,00	(11.315.485,00)	68,23
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.845.000,00	36.600.000,00	(245.000,00)	99,34
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.845.000,00	36.600.000,00	(245.000,00)	99,34
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.845.000,00	36.600.000,00	(245.000,00)	99,34
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.290.000,00	660.685.000,00	(39.605.000,00)	94,34
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	700.290.000,00	660.685.000,00	(39.605.000,00)	94,34
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.490.000,00	622.885.000,00	(39.605.000,00)	94,02
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.450.000,00	277.543.287,00	(3.906.713,00)	98,61
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.610.000,00	81.939.372,00	(2.670.628,00)	96,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.610.000,00	81.939.372,00	(2.670.628,00)	96,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.610.000,00	81.939.372,00	(2.670.628,00)	96,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.840.000,00	195.603.915,00	(1.236.085,00)	99,37
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	196.840.000,00	195.603.915,00	(1.236.085,00)	99,37
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.840.000,00	195.603.915,00	(1.236.085,00)	99,37

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS TULKARSON HEHI



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.856.024.400,00	1.833.252.852,00	(22.771.548,00)	98,77
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.856.024.400,00	1.833.252.852,00	(22.771.548,00)	98,77
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.059.000.000,00	2.903.999.000,00	(155.001.000,00)	94,93
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.000.000,00	274.500.000,00	(150.500.000,00)	64,59
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.634.000.000,00	2.629.499.000,00	(4.501.000,00)	99,83

Kotamodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DESI FULKARSON HEHI



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

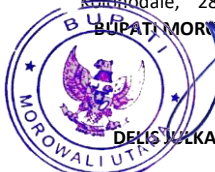
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

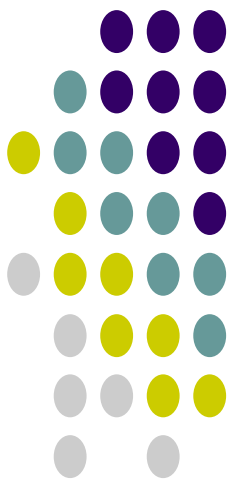
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	5.866.520.972,00	5.577.594.925,00	(288.926.047,00)	95,08
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	339.228.000,00	338.153.979,00	(1.074.021,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	339.228.000,00	338.153.979,00	(1.074.021,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	339.228.000,00	338.153.979,00	(1.074.021,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	339.228.000,00	338.153.979,00	(1.074.021,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	339.228.000,00	338.153.979,00	(1.074.021,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	346.053.100,00	279.609.304,00	(66.443.796,00)	80,80
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	346.053.100,00	279.609.304,00	(66.443.796,00)	80,80
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja	346.053.100,00	279.609.304,00	(66.443.796,00)	80,80
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1		BELANJA OPERASI	156.053.100,00	155.154.304,00	(898.796,00)	99,42
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	156.053.100,00	155.154.304,00	(898.796,00)	99,42
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.2		BELANJA MODAL	190.000.000,00	124.455.000,00	(65.545.000,00)	65,50
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	124.455.000,00	(65.545.000,00)	65,50
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	458.522.400,00	423.115.160,00	(35.407.240,00)	92,28
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	288.757.900,00	253.556.660,00	(35.201.240,00)	87,81
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	288.757.900,00	253.556.660,00	(35.201.240,00)	87,81
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	288.757.900,00	253.556.660,00	(35.201.240,00)	87,81
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	288.757.900,00	253.556.660,00	(35.201.240,00)	87,81
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	169.764.500,00	169.558.500,00	(206.000,00)	99,88
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	169.764.500,00	169.558.500,00	(206.000,00)	99,88
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	169.764.500,00	169.558.500,00	(206.000,00)	99,88
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	169.764.500,00	169.558.500,00	(206.000,00)	99,88
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.722.717.472,00	4.536.716.482,00	(186.000.990,00)	96,06
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.148.545.677,00	3.032.982.478,00	(115.563.199,00)	96,33
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.148.545.677,00	3.032.982.478,00	(115.563.199,00)	96,33
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	3.148.545.677,00	3.032.982.478,00	(115.563.199,00)	96,33
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	3.148.545.677,00	3.032.982.478,00	(115.563.199,00)	96,33
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.201.795,00	601.496.351,00	(2.705.444,00)	99,55
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.185.500,00	77.840.000,00	(345.500,00)	99,56
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	78.185.500,00	77.840.000,00	(345.500,00)	99,56
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	78.185.500,00	77.840.000,00	(345.500,00)	99,56
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.593.295,00	2.585.000,00	(8.295,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1		BELANJA OPERASI	2.593.295,00	2.585.000,00	(8.295,00)	99,68

2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.593.295,00	2.585.000,00	(8.295,00)	99,68
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.426.400,00	9.250.000,00	(176.400,00)	98,13
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.426.400,00	9.250.000,00	(176.400,00)	98,13
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.426.400,00	9.250.000,00	(176.400,00)	98,13
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.996.600,00	511.821.351,00	(2.175.249,00)	99,58
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	513.996.600,00	511.821.351,00	(2.175.249,00)	99,58
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.996.600,00	511.821.351,00	(2.175.249,00)	99,58
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.400.000,00	333.205.000,00	(20.195.000,00)	94,29
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	98.400.000,00	98.290.000,00	(110.000,00)	99,89
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	98.400.000,00	98.290.000,00	(110.000,00)	99,89
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.400.000,00	98.290.000,00	(110.000,00)	99,89
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.000.000,00	234.915.000,00	(20.085.000,00)	92,12
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	255.000.000,00	234.915.000,00	(20.085.000,00)	92,12
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.000.000,00	234.915.000,00	(20.085.000,00)	92,12
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.370.000,00	370.955.513,00	(27.414.487,00)	93,12
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.550.000,00	25.898.513,00	(18.651.487,00)	58,13
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.550.000,00	25.898.513,00	(18.651.487,00)	58,13
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	25.898.513,00	(18.651.487,00)	58,13
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.960.000,00	331.197.000,00	(8.763.000,00)	97,42
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	339.960.000,00	331.197.000,00	(8.763.000,00)	97,42
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	100,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.200.000,00	280.437.000,00	(8.763.000,00)	96,97
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.200.000,00	198.077.140,00	(20.122.860,00)	90,78
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000,00	35.187.140,00	(19.812.860,00)	63,98
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	35.187.140,00	(19.812.860,00)	63,98
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	35.187.140,00	(19.812.860,00)	63,98
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.200.000,00	162.890.000,00	(310.000,00)	99,81
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	163.200.000,00	162.890.000,00	(310.000,00)	99,81
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	162.890.000,00	(310.000,00)	99,81

Kabupaten, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

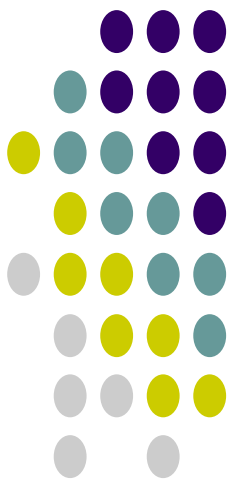
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.645.912.327,00	9.356.460.064,00	(289.452.263,00)	97,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	530.555.100,00	505.932.377,00	(24.622.723,00)	95,36
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	80.903.500,00	76.471.177,00	(4.432.323,00)	94,52
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003		Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	80.903.500,00	76.471.177,00	(4.432.323,00)	94,52
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.903.500,00	76.471.177,00	(4.432.323,00)	94,52
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.903.500,00	76.471.177,00	(4.432.323,00)	94,52
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	449.651.600,00	429.461.200,00	(20.190.400,00)	95,51
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	449.651.600,00	429.461.200,00	(20.190.400,00)	95,51
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	449.651.600,00	429.461.200,00	(20.190.400,00)	95,51
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.651.600,00	429.461.200,00	(20.190.400,00)	95,51
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	62.585.500,00	60.545.523,00	(2.039.977,00)	96,74
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.585.500,00	60.545.523,00	(2.039.977,00)	96,74
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	62.585.500,00	60.545.523,00	(2.039.977,00)	96,74
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.585.500,00	60.545.523,00	(2.039.977,00)	96,74
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.585.500,00	60.545.523,00	(2.039.977,00)	96,74
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.910.000,00	7.860.000,00	(50.000,00)	99,37
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.910.000,00	7.860.000,00	(50.000,00)	99,37
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0006		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	7.910.000,00	7.860.000,00	(50.000,00)	99,37
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.910.000,00	7.860.000,00	(50.000,00)	99,37
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	7.860.000,00	(50.000,00)	99,37
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	29.498.800,00	28.920.000,00	(578.800,00)	98,04
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	29.498.800,00	28.920.000,00	(578.800,00)	98,04
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	29.498.800,00	28.920.000,00	(578.800,00)	98,04
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.498.800,00	28.920.000,00	(578.800,00)	98,04
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.498.800,00	28.920.000,00	(578.800,00)	98,04
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.711.900,00	35.416.000,00	(295.900,00)	99,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.711.900,00	35.416.000,00	(295.900,00)	99,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.039.200,00	14.997.000,00	(42.200,00)	99,72
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.039.200,00	14.997.000,00	(42.200,00)	99,72
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.039.200,00	14.997.000,00	(42.200,00)	99,72

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.672.700,00	20.419.000,00	(253.700,00)	98,77
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.672.700,00	20.419.000,00	(253.700,00)	98,77
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.672.700,00	20.419.000,00	(253.700,00)	98,77
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	41.555.000,00	40.278.100,00	(1.276.900,00)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	41.555.000,00	40.278.100,00	(1.276.900,00)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	41.555.000,00	40.278.100,00	(1.276.900,00)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.555.000,00	40.278.100,00	(1.276.900,00)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.555.000,00	40.278.100,00	(1.276.900,00)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.408.400,00	20.020.400,00	(15.388.000,00)	56,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.408.400,00	20.020.400,00	(15.388.000,00)	56,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	35.408.400,00	20.020.400,00	(15.388.000,00)	56,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.408.400,00	20.020.400,00	(15.388.000,00)	56,54
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.408.400,00	20.020.400,00	(388.000,00)	98,10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	423.289.100,00	421.723.439,00	(1.565.661,00)	99,63
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	423.289.100,00	421.723.439,00	(1.565.661,00)	99,63
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	17.254.100,00	15.903.500,00	(1.350.600,00)	92,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.254.100,00	15.903.500,00	(1.350.600,00)	92,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.254.100,00	15.903.500,00	(1.350.600,00)	92,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	406.035.000,00	405.819.939,00	(215.061,00)	99,95
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	306.035.000,00	305.819.939,00	(215.061,00)	99,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.035.000,00	305.819.939,00	(215.061,00)	99,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.479.398.527,00	8.235.764.225,00	(243.634.302,00)	97,13
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.547.411.380,00	3.414.599.197,00	(132.812.183,00)	96,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.547.411.380,00	3.414.599.197,00	(132.812.183,00)	96,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.547.411.380,00	3.414.599.197,00	(132.812.183,00)	96,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.547.411.380,00	3.414.599.197,00	(132.812.183,00)	96,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.890.000,00	44.885.046,00	(4.954,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.890.000,00	44.885.046,00	(4.954,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.890.000,00	44.885.046,00	(4.954,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.890.000,00	44.885.046,00	(4.954,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.671.297,00	606.547.200,00	(124.097,00)	99,98
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.142.548,00	1.135.000,00	(7.548,00)	99,34
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.142.548,00	1.135.000,00	(7.548,00)	99,34
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.548,00	1.135.000,00	(7.548,00)	99,34
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.922.250,00	10.911.000,00	(11.250,00)	99,90
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.922.250,00	10.911.000,00	(11.250,00)	99,90
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.922.250,00	10.911.000,00	(11.250,00)	99,90
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.364.999,00	3.355.000,00	(9.999,00)	99,70
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.364.999,00	3.355.000,00	(9.999,00)	99,70
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.364.999,00	3.355.000,00	(9.999,00)	99,70

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.289.700,00	19.225.200,00	(64.500,00)	99,67
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.289.700,00	19.225.200,00	(64.500,00)	99,67
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.289.700,00	19.225.200,00	(64.500,00)	99,67
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571.951.800,00	571.921.000,00	(30.800,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	571.951.800,00	571.921.000,00	(30.800,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.951.800,00	571.921.000,00	(30.800,00)	99,99
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	873.000.000,00	872.690.100,00	(309.900,00)	99,96
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	681.000.000,00	681.000.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	681.000.000,00	681.000.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	681.000.000,00	681.000.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.000.000,00	191.690.100,00	(309.900,00)	99,84
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	192.000.000,00	191.690.100,00	(309.900,00)	99,84
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.000.000,00	191.690.100,00	(309.900,00)	99,84
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.703.984.400,00	2.597.822.793,00	(106.161.607,00)	96,07
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.900.000,00	23.917.000,00	(983.000,00)	96,05
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.900.000,00	23.917.000,00	(983.000,00)	96,05
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	23.917.000,00	(983.000,00)	96,05
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.679.084.400,00	2.573.905.793,00	(105.178.607,00)	96,07
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.679.084.400,00	2.573.905.793,00	(105.178.607,00)	96,07
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.611.284.400,00	2.506.105.793,00	(105.178.607,00)	95,97
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.441.450,00	699.219.889,00	(4.221.561,00)	99,40
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.500.000,00	29.308.513,00	(191.487,00)	99,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.500.000,00	29.308.513,00	(191.487,00)	99,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.308.513,00	(191.487,00)	99,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.401.450,00	596.509.316,00	(3.892.134,00)	99,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.401.450,00	596.509.316,00	(3.892.134,00)	99,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.401.450,00	596.509.316,00	(3.892.134,00)	99,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.540.000,00	73.402.060,00	(137.940,00)	99,81
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	73.540.000,00	73.402.060,00	(137.940,00)	99,81
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.540.000,00	73.402.060,00	(137.940,00)	99,81

Kelompok, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

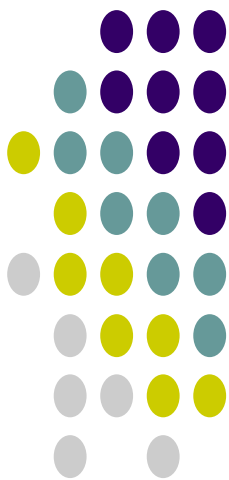


KODE REKENING					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.378.791.796,00	6.376.518.293,00	(2.002.273.503,00)	76,10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	554.730.000,00	548.049.472,00	(6.680.528,00)	98,80
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	129.816.000,00	129.449.050,00	(366.950,00)	99,72
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15.978.000,00	15.660.000,00	(318.000,00)	98,01
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.978.000,00	15.660.000,00	(318.000,00)	98,01
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.978.000,00	15.660.000,00	(318.000,00)	98,01
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	113.838.000,00	113.789.050,00	(48.950,00)	99,96
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.838.000,00	113.789.050,00	(48.950,00)	99,96
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.838.000,00	113.789.050,00	(48.950,00)	99,96
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	424.914.000,00	418.600.422,00	(6.313.578,00)	98,51
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	424.914.000,00	418.600.422,00	(6.313.578,00)	98,51
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	424.914.000,00	418.600.422,00	(6.313.578,00)	98,51
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.914.000,00	418.600.422,00	(6.313.578,00)	98,51
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	101.216.000,00	100.995.622,00	(220.378,00)	99,78
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	101.216.000,00	100.995.622,00	(220.378,00)	99,78
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	101.216.000,00	100.995.622,00	(220.378,00)	99,78
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.216.000,00	100.995.622,00	(220.378,00)	99,78
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.216.000,00	100.995.622,00	(220.378,00)	99,78
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	198.756.000,00	198.431.232,00	(324.768,00)	99,84
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.034.000,00	152.961.000,00	(73.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.034.000,00	152.961.000,00	(73.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	153.034.000,00	152.961.000,00	(73.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.034.000,00	152.961.000,00	(73.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.392.000,00	30.280.000,00	(112.000,00)	99,63
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.392.000,00	30.280.000,00	(112.000,00)	99,63
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.392.000,00	30.280.000,00	(112.000,00)	99,63
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.392.000,00	30.280.000,00	(112.000,00)	99,63
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.330.000,00	15.190.232,00	(139.768,00)	99,09
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.330.000,00	15.190.232,00	(139.768,00)	99,09
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.330.000,00	15.190.232,00	(139.768,00)	99,09
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.330.000,00	15.190.232,00	(139.768,00)	99,09
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.180.000,00	13.930.000,00	(250.000,00)	98,24

2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	14.180.000,00	13.930.000,00	(250.000,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	14.180.000,00	13.930.000,00	(250.000,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.180.000,00	13.930.000,00	(250.000,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	13.930.000,00	(250.000,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.509.909.796,00	5.515.111.967,00	(1.994.797.829,00)	73,44
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.855.341.795,00	3.580.653.288,00	(274.688.507,00)	92,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.855.341.795,00	3.580.653.288,00	(274.688.507,00)	92,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.855.341.795,00	3.580.653.288,00	(274.688.507,00)	92,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.855.341.795,00	3.580.653.288,00	(274.688.507,00)	92,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	701.159.650,00	700.764.202,00	(395.448,00)	99,94
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.015.650,00	247.779.842,00	(235.808,00)	99,90
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	233.015.650,00	232.779.842,00	(235.808,00)	99,90
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.015.650,00	232.779.842,00	(235.808,00)	99,90
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.453.000,00	11.437.500,00	(15.500,00)	99,86
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.453.000,00	11.437.500,00	(15.500,00)	99,86
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.453.000,00	11.437.500,00	(15.500,00)	99,86
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.691.000,00	441.546.860,00	(144.140,00)	99,97
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	441.691.000,00	441.546.860,00	(144.140,00)	99,97
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.691.000,00	441.546.860,00	(144.140,00)	99,97
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.229.950.000,00	528.250.000,00	(1.701.700.000,00)	23,69
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.171.200.000,00	469.500.000,00	(1.701.700.000,00)	21,62
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.171.200.000,00	469.500.000,00	(1.701.700.000,00)	21,62
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.171.200.000,00	469.500.000,00	(1.701.700.000,00)	21,62
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.218.351,00	568.442.775,00	(4.775.576,00)	99,17
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.387.351,00	71.180.775,00	(4.206.576,00)	94,42
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.387.351,00	71.180.775,00	(4.206.576,00)	94,42
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.387.351,00	71.180.775,00	(4.206.576,00)	94,42
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.128.000,00	16.120.000,00	(8.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.128.000,00	16.120.000,00	(8.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.128.000,00	16.120.000,00	(8.000,00)	99,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.703.000,00	481.142.000,00	(561.000,00)	99,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	481.703.000,00	481.142.000,00	(561.000,00)	99,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	45.960.000,00	45.960.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.743.000,00	435.182.000,00	(561.000,00)	99,87
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.240.000,00	137.001.702,00	(13.238.298,00)	91,19
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.000.000,00	97.507.702,00	(9.492.298,00)	91,13
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.000.000,00	97.507.702,00	(9.492.298,00)	91,13
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.000.000,00	97.507.702,00	(9.492.298,00)	91,13
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.240.000,00	39.494.000,00	(3.746.000,00)	91,34
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.240.000,00	39.494.000,00	(3.746.000,00)	91,34
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.240.000,00	39.494.000,00	(3.746.000,00)	91,34

Kotagede, 28 Agustus 2024

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JOLKARSON HEHI



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



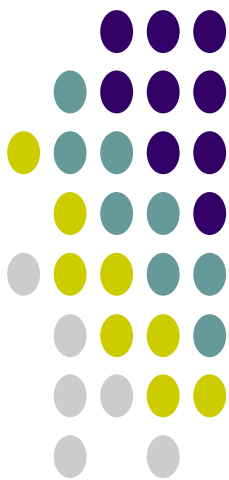
Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.212.264.322,00	13.610.404.183,00	(601.860.139,00)	95,77
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.337.114.320,00	2.293.618.941,00	(43.495.379,00)	98,14
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.337.114.320,00	2.293.618.941,00	(43.495.379,00)	98,14
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	182.180.000,00	180.555.424,00	(1.624.576,00)	99,11
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	182.180.000,00	180.555.424,00	(1.624.576,00)	99,11
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.180.000,00	180.555.424,00	(1.624.576,00)	99,11
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.042.014.000,00	2.039.608.517,00	(2.405.483,00)	99,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.042.014.000,00	2.039.608.517,00	(2.405.483,00)	99,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.042.014.000,00	2.039.608.517,00	(2.405.483,00)	99,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38.220.000,00	800.000,00	(37.420.000,00)	2,09
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.220.000,00	800.000,00	(37.420.000,00)	2,09
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.220.000,00	800.000,00	(37.420.000,00)	2,09
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	74.700.320,00	72.655.000,00	(2.045.320,00)	97,26
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	74.700.320,00	72.655.000,00	(2.045.320,00)	97,26
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.700.320,00	72.655.000,00	(2.045.320,00)	97,26
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.042.593.070,00	3.926.475.972,00	(116.117.098,00)	97,13
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.042.593.070,00	3.926.475.972,00	(116.117.098,00)	97,13
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	226.700.000,00	180.751.000,00	(45.949.000,00)	79,73
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	226.700.000,00	180.751.000,00	(45.949.000,00)	79,73
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.700.000,00	180.751.000,00	(45.949.000,00)	79,73
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.406.892.250,00	2.340.931.093,00	(65.961.157,00)	97,26
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.406.892.250,00	2.340.931.093,00	(65.961.157,00)	97,26
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.406.892.250,00	2.340.931.093,00	(65.961.157,00)	97,26
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	409.000.820,00	404.793.879,00	(4.206.941,00)	98,97
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	409.000.820,00	404.793.879,00	(4.206.941,00)	98,97
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.000.820,00	404.793.879,00	(4.206.941,00)	98,97
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00

2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.832.556.932,00	7.390.309.270,00	(442.247.662,00)	94,35
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.881.194.293,00	2.602.220.728,00	(278.973.565,00)	90,32
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.881.194.293,00	2.602.220.728,00	(278.973.565,00)	90,32
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.881.194.293,00	2.602.220.728,00	(278.973.565,00)	90,32
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.881.194.293,00	2.602.220.728,00	(278.973.565,00)	90,32
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	912.535.500,00	845.662.707,00	(66.872.793,00)	92,67
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.617.350,00	339.687.050,00	(930.300,00)	99,73
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.217.350,00	50.633.050,00	(584.300,00)	98,86
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.217.350,00	50.633.050,00	(584.300,00)	98,86
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	289.400.000,00	289.054.000,00	(346.000,00)	99,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.400.000,00	289.054.000,00	(346.000,00)	99,88
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.444.150,00	20.443.500,00	(650,00)	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.444.150,00	20.443.500,00	(650,00)	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.444.150,00	20.443.500,00	(650,00)	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.474.000,00	485.532.157,00	(65.941.843,00)	88,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	551.474.000,00	485.532.157,00	(65.941.843,00)	88,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.474.000,00	485.532.157,00	(65.941.843,00)	88,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.950.497.139,00	3.874.455.935,00	(76.041.204,00)	98,08
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.810.000,00	74.237.151,00	(7.572.849,00)	90,74
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.810.000,00	74.237.151,00	(7.572.849,00)	90,74
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.810.000,00	74.237.151,00	(7.572.849,00)	90,74
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.868.687.139,00	3.800.218.784,00	(68.468.355,00)	98,23
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.868.687.139,00	3.800.218.784,00	(68.468.355,00)	98,23
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.835.687.139,00	3.767.218.784,00	(68.468.355,00)	98,21
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.330.000,00	67.969.900,00	(20.360.100,00)	76,95
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	37.318.400,00	(681.600,00)	98,21
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	37.318.400,00	(681.600,00)	98,21
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.318.400,00	(681.600,00)	98,21
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.730.000,00	10.651.500,00	(6.078.500,00)	63,67
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.730.000,00	10.651.500,00	(6.078.500,00)	63,67
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.730.000,00	10.651.500,00	(6.078.500,00)	63,67
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.600.000,00	20.000.000,00	(13.600.000,00)	59,52
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	20.000.000,00	(13.600.000,00)	59,52
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	20.000.000,00	(13.600.000,00)	59,52

Kotabondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS YOLKARSON HEHI



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH**



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	14.405.959.881,00	13.642.558.257,00	(763.401.624,00)	94,70
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	49.999.850,00	47.453.350,00	(2.546.500,00)	94,91
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.850,00	47.453.350,00	(2.546.500,00)	94,91
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0002			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	49.999.850,00	47.453.350,00	(2.546.500,00)	94,91
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	49.999.850,00	47.453.350,00	(2.546.500,00)	94,91
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	49.999.850,00	47.453.350,00	(2.546.500,00)	94,91
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.993.875.600,00	6.598.787.100,00	(395.088.500,00)	94,35
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.810.729.650,00	4.512.919.050,00	(297.810.600,00)	93,81
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008			Pengendalian Program KKBPK	4.718.733.980,00	4.422.429.350,00	(296.304.630,00)	93,72
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1		BELANJA OPERASI	4.718.733.980,00	4.422.429.350,00	(296.304.630,00)	93,72
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.718.733.980,00	4.422.429.350,00	(296.304.630,00)	93,72
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	91.995.670,00	90.489.700,00	(1.505.970,00)	98,36
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1		BELANJA OPERASI	91.995.670,00	90.489.700,00	(1.505.970,00)	98,36
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	91.995.670,00	90.489.700,00	(1.505.970,00)	98,36
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.053.189.600,00	1.960.920.300,00	(92.269.300,00)	95,51
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.604.000.000,00	1.513.543.000,00	(90.457.000,00)	94,36
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	824.000.000,00	807.993.000,00	(16.007.000,00)	98,06
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	824.000.000,00	807.993.000,00	(16.007.000,00)	98,06
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.2		BELANJA MODAL	780.000.000,00	705.550.000,00	(74.450.000,00)	90,46
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.000.000,00	705.550.000,00	(74.450.000,00)	90,46
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	8.060.000,00	7.410.000,00	(650.000,00)	91,94
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1		BELANJA OPERASI	8.060.000,00	7.410.000,00	(650.000,00)	91,94
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	8.060.000,00	7.410.000,00	(650.000,00)	91,94
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	441.129.600,00	439.967.300,00	(1.162.300,00)	99,74
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1		BELANJA OPERASI	441.129.600,00	439.967.300,00	(1.162.300,00)	99,74
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	441.129.600,00	439.967.300,00	(1.162.300,00)	99,74
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	129.956.350,00	124.947.750,00	(5.008.600,00)	96,15
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.114.500,00	30.004.500,00	(110.000,00)	99,63
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1		BELANJA OPERASI	30.114.500,00	30.004.500,00	(110.000,00)	99,63
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	30.114.500,00	30.004.500,00	(110.000,00)	99,63
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	59.541.900,00	57.361.000,00	(2.180.900,00)	96,34
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1		BELANJA OPERASI	59.541.900,00	57.361.000,00	(2.180.900,00)	96,34
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	59.541.900,00	57.361.000,00	(2.180.900,00)	96,34

2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.299.950,00	37.582.250,00	(2.717.700,00)	93,26
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.299.950,00	37.582.250,00	(2.717.700,00)	93,26
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.299.950,00	37.582.250,00	(2.717.700,00)	93,26
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	454.999.490,00	451.524.600,00	(3.474.890,00)	99,24
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	454.999.490,00	451.524.600,00	(3.474.890,00)	99,24
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	34.999.850,00	34.273.000,00	(726.850,00)	97,92
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.999.850,00	34.273.000,00	(726.850,00)	97,92
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.850,00	34.273.000,00	(726.850,00)	97,92
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	394.999.740,00	392.355.600,00	(2.644.140,00)	99,33
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	394.999.740,00	392.355.600,00	(2.644.140,00)	99,33
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.999.740,00	392.355.600,00	(2.644.140,00)	99,33
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	24.999.900,00	24.896.000,00	(103.900,00)	99,58
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	24.999.900,00	24.896.000,00	(103.900,00)	99,58
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.900,00	24.896.000,00	(103.900,00)	99,58
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.907.084.941,00	6.544.793.207,00	(362.291.734,00)	94,75
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.156.519.561,00	4.904.932.842,00	(251.586.719,00)	95,12
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.156.519.561,00	4.904.932.842,00	(251.586.719,00)	95,12
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.156.519.561,00	4.904.932.842,00	(251.586.719,00)	95,12
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.156.519.561,00	4.904.932.842,00	(251.586.719,00)	95,12
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.522.150,00	523.065.565,00	(37.456.585,00)	93,32
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.538.200,00	56.536.900,00	(1.300,00)	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.538.200,00	56.536.900,00	(1.300,00)	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.538.200,00	56.536.900,00	(1.300,00)	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.267.750,00	42.267.750,00	0,00	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.267.750,00	42.267.750,00	0,00	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.267.750,00	42.267.750,00	0,00	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.716.200,00	424.260.915,00	(37.455.285,00)	91,89
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	461.716.200,00	424.260.915,00	(37.455.285,00)	91,89
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.716.200,00	424.260.915,00	(37.455.285,00)	91,89
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	113.724.600,00	(6.275.400,00)	94,77
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	113.724.600,00	(6.275.400,00)	94,77
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	113.724.600,00	(6.275.400,00)	94,77
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	113.724.600,00	(6.275.400,00)	94,77
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.223.230,00	863.947.600,00	(38.275.630,00)	95,76
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.310.000,00	8.300.000,00	(10.000,00)	99,88
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.310.000,00	8.300.000,00	(10.000,00)	99,88
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	8.300.000,00	(10.000,00)	99,88
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.213.230,00	42.541.600,00	(5.671.630,00)	88,24
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.213.230,00	42.541.600,00	(5.671.630,00)	88,24
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.213.230,00	42.541.600,00	(5.671.630,00)	88,24
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.700.000,00	813.106.000,00	(32.594.000,00)	96,15
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	845.700.000,00	813.106.000,00	(32.594.000,00)	96,15
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	36.000.000,00	(1.800.000,00)	95,24
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.900.000,00	777.106.000,00	(30.794.000,00)	96,19
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.820.000,00	139.122.600,00	(28.697.400,00)	82,90

2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000,00	127.280.100,00	(26.719.900,00)	82,65
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	154.000.000,00	127.280.100,00	(26.719.900,00)	82,65
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	127.280.100,00	(26.719.900,00)	82,65
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.820.000,00	11.842.500,00	(1.977.500,00)	85,69
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.820.000,00	11.842.500,00	(1.977.500,00)	85,69
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.820.000,00	11.842.500,00	(1.977.500,00)	85,69

Kotabondale, 28 Agustus 2025

 **BUPATI MOROWALI UTARA**
DELIS FOLKARSON HEHI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



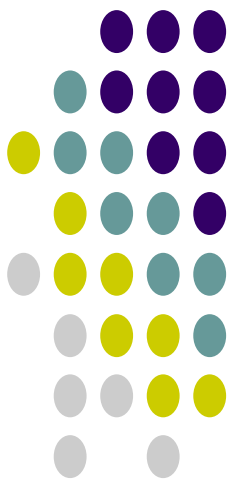
Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	1.035.793.000,00	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1		BELANJA OPERASI	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.05		Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	249.020.000,00	246.929.500,00	(2.090.500,00)	99,16
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.942.500,00	(57.500,00)	99,96
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.942.500,00	(57.500,00)	99,96
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.942.500,00	(57.500,00)	99,96
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.942.500,00	(57.500,00)	99,96
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.020.000,00	96.987.000,00	(2.033.000,00)	97,95
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.800.000,00	(1.200.000,00)	96,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1		BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.800.000,00	(1.200.000,00)	96,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.800.000,00	(1.200.000,00)	96,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.020.000,00	68.187.000,00	(833.000,00)	98,79
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1		BELANJA OPERASI	69.020.000,00	68.187.000,00	(833.000,00)	98,79
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	68.187.000,00	(833.000,00)	98,79
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	49.803.000,00	49.791.425,00	(11.575,00)	99,98
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49.803.000,00	49.791.425,00	(11.575,00)	99,98
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.803.000,00	49.791.425,00	(11.575,00)	99,98
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	49.803.000,00	49.791.425,00	(11.575,00)	99,98
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	49.803.000,00	49.791.425,00	(11.575,00)	99,98

2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	336.970.000,00	311.822.250,00	(25.147.750,00)	92,54
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.490.000,00	91.102.000,00	(10.388.000,00)	89,76
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	101.490.000,00	91.102.000,00	(10.388.000,00)	89,76
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.490.000,00	91.102.000,00	(10.388.000,00)	89,76
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.490.000,00	91.102.000,00	(10.388.000,00)	89,76
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.480.000,00	220.720.250,00	(14.759.750,00)	93,73
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	235.480.000,00	220.720.250,00	(14.759.750,00)	93,73
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	235.480.000,00	220.720.250,00	(14.759.750,00)	93,73
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.480.000,00	220.720.250,00	(14.759.750,00)	93,73

Kelondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS POLKARSON HEHI



DINAS PERHUBUNGAN DAERAH



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



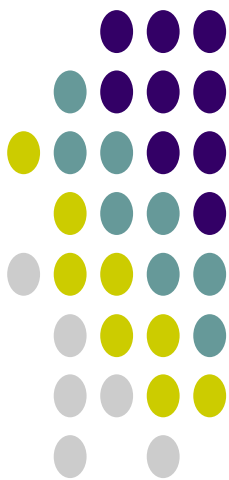
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.184.294.910,00	16.393.892.260,00	(790.402.650,00)	95,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.012.064.000,00	5.984.795.775,00	(27.268.225,00)	99,55
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.012.064.000,00	5.984.795.775,00	(27.268.225,00)	99,55
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.012.064.000,00	5.984.795.775,00	(27.268.225,00)	99,55
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	342.064.000,00	342.031.415,00	(32.585,00)	99,99
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.064.000,00	342.031.415,00	(32.585,00)	99,99
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.670.000.000,00	5.642.764.360,00	(27.235.640,00)	99,52
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.670.000.000,00	5.642.764.360,00	(27.235.640,00)	99,52
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.700.971.757,00	4.124.093.205,00	(576.878.552,00)	87,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	4.700.971.757,00	4.124.093.205,00	(576.878.552,00)	87,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	4.700.971.757,00	4.124.093.205,00	(576.878.552,00)	87,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.099.703.458,00	899.498.205,00	(200.205.253,00)	81,79
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.703.458,00	899.498.205,00	(200.205.253,00)	81,79
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.601.268.299,00	3.224.595.000,00	(376.673.299,00)	89,54
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.601.268.299,00	3.224.595.000,00	(376.673.299,00)	89,54
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.471.259.153,00	6.285.003.280,00	(186.255.873,00)	97,12
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.633.052.579,00	3.453.868.425,00	(179.184.154,00)	95,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.052.579,00	3.453.868.425,00	(179.184.154,00)	95,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.633.052.579,00	3.453.868.425,00	(179.184.154,00)	95,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.633.052.579,00	3.453.868.425,00	(179.184.154,00)	95,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.922.000,00	83.508.668,00	(413.332,00)	99,51
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.572.000,00	55.158.668,00	(413.332,00)	99,26
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	55.572.000,00	55.158.668,00	(413.332,00)	99,26
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.572.000,00	55.158.668,00	(413.332,00)	99,26
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.725.466,00	334.577.962,00	(1.147.504,00)	99,66
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.130.866,00	55.704.980,00	(425.886,00)	99,24
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.806.540,00	27.804.980,00	(1.560,00)	99,99
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.806.540,00	27.804.980,00	(1.560,00)	99,99
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	28.324.326,00	27.900.000,00	(424.326,00)	98,50
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.324.326,00	27.900.000,00	(424.326,00)	98,50
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.537.600,00	30.537.250,00	(350,00)	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.537.600,00	30.537.250,00	(350,00)	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.537.600,00	30.537.250,00	(350,00)	100,00

2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.057.000,00	248.335.732,00	(721.268,00)	99,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	249.057.000,00	248.335.732,00	(721.268,00)	99,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.057.000,00	248.335.732,00	(721.268,00)	99,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.286.158,00	1.902.852.225,00	(5.433.933,00)	99,72
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.860.286.158,00	1.854.852.225,00	(5.433.933,00)	99,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.860.286.158,00	1.854.852.225,00	(5.433.933,00)	99,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	67.560.000,00	62.760.000,00	(4.800.000,00)	92,90
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.792.726.158,00	1.792.092.225,00	(633.933,00)	99,96
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.272.950,00	510.196.000,00	(76.950,00)	99,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.972.950,00	399.896.000,00	(76.950,00)	99,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.999.950,00	199.941.000,00	(58.950,00)	99,97
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.950,00	199.941.000,00	(58.950,00)	99,97
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	199.973.000,00	199.955.000,00	(18.000,00)	99,99
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.973.000,00	199.955.000,00	(18.000,00)	99,99

Kelodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH



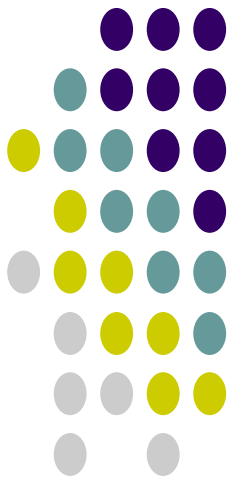
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan PemerintahanURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang UrusanURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
OrganisasiDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS VULKARSON HEHI



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH**



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.688.271.747,00	4.378.962.088,00	-309.309.659,00	93,40
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21.294.900,00	20.987.100,00	-307.800,00	98,55
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	21.294.900,00	20.987.100,00	-307.800,00	98,55
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	21.294.900,00	20.987.100,00	-307.800,00	98,55
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.294.900,00	20.987.100,00	-307.800,00	98,55
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.294.900,00	20.987.100,00	-307.800,00	98,55
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.959.700,00	20.850.700,00	-109.000,00	99,48
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.959.700,00	20.850.700,00	-109.000,00	99,48
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01.0001		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.959.700,00	20.850.700,00	-109.000,00	99,48
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.959.700,00	20.850.700,00	-109.000,00	99,48
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.959.700,00	20.850.700,00	-109.000,00	99,48
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	23.758.300,00	21.411.100,00	-2.347.200,00	90,12
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.758.300,00	21.411.100,00	-2.347.200,00	90,12
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	23.758.300,00	21.411.100,00	-2.347.200,00	90,12
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.758.300,00	21.411.100,00	-2.347.200,00	90,12
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.758.300,00	21.411.100,00	-2.347.200,00	90,12
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	12.535.300,00	12.392.500,00	-142.800,00	98,86
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.535.300,00	12.392.500,00	-142.800,00	98,86
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06.2.01.0009		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	12.535.300,00	12.392.500,00	-142.800,00	98,86
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.535.300,00	12.392.500,00	-142.800,00	98,86
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.535.300,00	12.392.500,00	-142.800,00	98,86
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	185.055.200,00	168.407.860,00	-16.647.340,00	91,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	185.055.200,00	168.407.860,00	-16.647.340,00	91,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0003		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19.319.000,00	17.469.000,00	-1.850.000,00	90,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.319.000,00	17.469.000,00	-1.850.000,00	90,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.319.000,00	17.469.000,00	-1.850.000,00	90,42
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	129.330.900,00	118.872.560,00	-10.458.340,00	91,91

2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	129.330.900,00	118.872.560,00	-10.458.340,00	91,91
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.330.900,00	118.872.560,00	-10.458.340,00	91,91
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	21.210.000,00	16.926.000,00	-4.284.000,00	79,80
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.210.000,00	16.926.000,00	-4.284.000,00	79,80
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	16.926.000,00	-4.284.000,00	79,80
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	15.195.300,00	15.140.300,00	-55.000,00	99,64
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	15.195.300,00	15.140.300,00	-55.000,00	99,64
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.195.300,00	15.140.300,00	-55.000,00	99,64
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	41.534.000,00	12.990.000,00	-28.544.000,00	31,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	41.534.000,00	12.990.000,00	-28.544.000,00	31,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08.2.01.0006		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	41.534.000,00	12.990.000,00	-28.544.000,00	31,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	41.534.000,00	12.990.000,00	-28.544.000,00	31,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.534.000,00	12.990.000,00	-28.544.000,00	31,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.383.134.347,00	4.121.922.828,00	-261.211.519,00	94,04
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.255.021.839,00	3.021.569.062,00	-233.452.777,00	92,83
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.255.021.839,00	3.021.569.062,00	-233.452.777,00	92,83
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.255.021.839,00	3.021.569.062,00	-233.452.777,00	92,83
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.255.021.839,00	3.021.569.062,00	-233.452.777,00	92,83
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.590.500,00	96.458.265,00	-132.235,00	99,86
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.012.500,00	37.012.500,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.012.500,00	37.012.500,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	59.578.000,00	59.445.765,00	-132.235,00	99,78
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	59.578.000,00	59.445.765,00	-132.235,00	99,78
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.578.000,00	59.445.765,00	-132.235,00	99,78
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.121.608,00	320.415.451,00	-4.706.157,00	98,55
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.836.800,00	101.835.950,00	(850,00)	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.476.800,00	16.475.950,00	(850,00)	99,99
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.476.800,00	16.475.950,00	(850,00)	99,99
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.458,00	2.499.000,00	-1.458,00	99,94
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.458,00	2.499.000,00	-1.458,00	99,94
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.458,00	2.499.000,00	-1.458,00	99,94
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.496.150,00	25.496.100,00	(50,00)	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.496.150,00	25.496.100,00	(50,00)	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.496.150,00	25.496.100,00	(50,00)	100,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.288.200,00	190.584.401,00	-4.703.799,00	97,59
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	195.288.200,00	190.584.401,00	-4.703.799,00	97,59
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.288.200,00	190.584.401,00	-4.703.799,00	97,59
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.994.000,00	605.077.250,00	-16.916.750,00	97,28
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.990.000,00	-10.000,00	99,67
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.990.000,00	-10.000,00	99,67
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.990.000,00	-10.000,00	99,67
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.720.000,00	18.773.000,00	-2.947.000,00	86,43
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.720.000,00	18.773.000,00	-2.947.000,00	86,43

2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.720.000,00	18.773.000,00	-2.947.000,00	86,43
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.680.000,00	750.000,00	-1.930.000,00	27,99
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.680.000,00	750.000,00	-1.930.000,00	27,99
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	750.000,00	-1.930.000,00	27,99
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.594.000,00	582.564.250,00	-12.029.750,00	97,98
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	594.594.000,00	582.564.250,00	-12.029.750,00	97,98
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	84.600.000,00	76.474.250,00	-8.125.750,00	90,40
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.994.000,00	506.090.000,00	-3.904.000,00	99,23
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.406.400,00	78.402.800,00	-6.003.600,00	92,89
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.500.000,00	54.547.800,00	-5.952.200,00	90,16
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.500.000,00	54.547.800,00	-5.952.200,00	90,16
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	54.547.800,00	-5.952.200,00	90,16
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.906.400,00	23.855.000,00	-51.400,00	99,78
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.906.400,00	23.855.000,00	-51.400,00	99,78
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.906.400,00	23.855.000,00	-51.400,00	99,78

Kelenodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS IGLKARSON HEHI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.635.847.429,00	4.604.378.610,00	-31.468.819,00	99,32
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.123.300,00	19.246.900,00	-876.400,00	95,64
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	20.123.300,00	19.246.900,00	-876.400,00	95,64
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.123.300,00	19.246.900,00	-876.400,00	95,64
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.123.300,00	19.246.900,00	-876.400,00	95,64
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.123.300,00	19.246.900,00	-876.400,00	95,64
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.396.169.529,00	1.392.520.550,00	-3.648.979,00	99,74
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.396.169.529,00	1.392.520.550,00	-3.648.979,00	99,74
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.396.169.529,00	1.392.520.550,00	-3.648.979,00	99,74
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.831.950,00	88.780.550,00	-51.400,00	99,94
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.831.950,00	88.780.550,00	-51.400,00	99,94
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.307.337.579,00	1.303.740.000,00	-3.597.579,00	99,72
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.104.337.579,00	1.103.890.000,00	-447.579,00	99,96
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.850.000,00	-150.000,00	99,93
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.142.459.800,00	3.116.190.194,00	-26.269.606,00	99,16
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	23.829.600,00	23.722.400,00	-107.200,00	99,55
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	23.829.600,00	23.722.400,00	-107.200,00	99,55
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.829.600,00	23.722.400,00	-107.200,00	99,55
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.829.600,00	23.722.400,00	-107.200,00	99,55
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.098.116.300,00	3.072.359.294,00	-25.757.006,00	99,17
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.406.600,00	23.307.204,00	-99.396,00	99,58
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.406.600,00	23.307.204,00	-99.396,00	99,58
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.406.600,00	23.307.204,00	-99.396,00	99,58
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.074.709.700,00	3.049.052.090,00	-25.657.610,00	99,17
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.074.709.700,00	3.049.052.090,00	-25.657.610,00	99,17
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.074.709.700,00	3.049.052.090,00	-25.657.610,00	99,17
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.513.900,00	20.108.500,00	-405.400,00	98,02
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.03.0002		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.513.900,00	20.108.500,00	-405.400,00	98,02

3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.513.900,00	20.108.500,00	-405.400,00	98,02
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.513.900,00	20.108.500,00	-405.400,00	98,02
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	56.644.150,00	56.347.716,00	-296.434,00	99,48
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	56.644.150,00	56.347.716,00	-296.434,00	99,48
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	56.644.150,00	56.347.716,00	-296.434,00	99,48
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.644.150,00	56.347.716,00	-296.434,00	99,48
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.644.150,00	56.347.716,00	-296.434,00	99,48
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	20.450.650,00	20.073.250,00	-377.400,00	98,15
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07.2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20.450.650,00	20.073.250,00	-377.400,00	98,15
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.450.650,00	20.073.250,00	-377.400,00	98,15
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.450.650,00	20.073.250,00	-377.400,00	98,15
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.450.650,00	20.073.250,00	-377.400,00	98,15

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

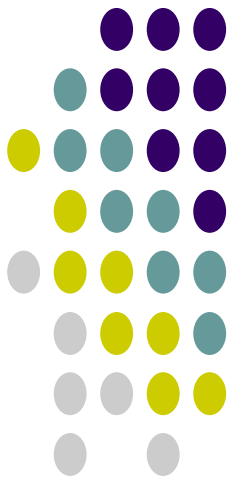


Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
	2.17.3.31.3.30.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	482.495.000,00	-117.505.000,00	80,42
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000		5	BELANJA DAERAH	534.999.850,00	511.256.750,00	-23.743.100,00	95,56
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	149.501.450,00	145.971.650,00	-3.529.800,00	97,64
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	149.501.450,00	145.971.650,00	-3.529.800,00	97,64
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	104.179.750,00	103.902.550,00	-277.200,00	99,73
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.179.750,00	103.902.550,00	-277.200,00	99,73
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.179.750,00	103.902.550,00	-277.200,00	99,73
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.289.700,00	17.309.300,00	-2.980.400,00	85,31
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.289.700,00	17.309.300,00	-2.980.400,00	85,31
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.289.700,00	17.309.300,00	-2.980.400,00	85,31
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25.032.000,00	24.759.800,00	-272.200,00	98,91
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.032.000,00	24.759.800,00	-272.200,00	98,91
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.032.000,00	24.759.800,00	-272.200,00	98,91
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	335.498.600,00	316.743.300,00	-18.755.300,00	94,41
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03.2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	335.498.600,00	316.743.300,00	-18.755.300,00	94,41
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03.2.01.0004		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	335.498.600,00	316.743.300,00	-18.755.300,00	94,41

3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	335.498.600,00	316.743.300,00	-18.755.300,00	94,41
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.498.600,00	316.743.300,00	-18.755.300,00	94,41
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	49.999.800,00	48.541.800,00	-1.458.000,00	97,08
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.800,00	48.541.800,00	-1.458.000,00	97,08
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0001		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24.999.850,00	24.266.250,00	-733.600,00	97,07
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.999.850,00	24.266.250,00	-733.600,00	97,07
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.850,00	24.266.250,00	-733.600,00	97,07
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0002		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	24.999.950,00	24.275.550,00	-724.400,00	97,10
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.999.950,00	24.275.550,00	-724.400,00	97,10
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.950,00	24.275.550,00	-724.400,00	97,10

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEKARSON HEHI



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH**



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000.000,00	355.910.213,00	-19.644.089.787,00	1,78
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000.000,00	355.910.213,00	-19.644.089.787,00	1,78
	2.18.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000.000,00	355.590.643,00	-19.644.409.357,00	1,78
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.393.372.553,00	17.973.849.493,18	-419.523.059,82	97,72
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	321.583.450,00	321.061.650,00	-521.800,00	99,84
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	110.375.600,00	109.944.000,00	-431.600,00	99,61
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	110.375.600,00	109.944.000,00	-431.600,00	99,61
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.375.600,00	109.944.000,00	-431.600,00	99,61
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.375.600,00	109.944.000,00	-431.600,00	99,61
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	211.207.850,00	211.117.650,00	-90.200,00	99,96
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	211.207.850,00	211.117.650,00	-90.200,00	99,96
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	211.207.850,00	211.117.650,00	-90.200,00	99,96
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.207.850,00	211.117.650,00	-90.200,00	99,96
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	432.233.400,00	428.748.400,00	-3.485.000,00	99,19
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	432.233.400,00	428.748.400,00	-3.485.000,00	99,19
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	358.743.400,00	358.113.400,00	-630.000,00	99,82
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	351.743.400,00	351.743.400,00	0,00	100,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.743.400,00	351.743.400,00	0,00	100,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.370.000,00	-630.000,00	91,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.370.000,00	-630.000,00	91,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	73.490.000,00	70.635.000,00	-2.855.000,00	96,12
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.490.000,00	39.275.000,00	-2.215.000,00	94,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.490.000,00	39.275.000,00	-2.215.000,00	94,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	31.360.000,00	-640.000,00	98,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	31.360.000,00	-640.000,00	98,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	261.598.900,00	180.059.300,00	-81.539.600,00	68,83
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	261.598.900,00	180.059.300,00	-81.539.600,00	68,83
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	111.895.800,00	106.192.800,00	-5.703.000,00	94,90
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.702.800,00	47.549.800,00	-5.153.000,00	90,22

2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.702.800,00	47.549.800,00	-5.153.000,00	90,22
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	59.193.000,00	58.643.000,00	-550.000,00	99,07
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.193.000,00	58.643.000,00	-550.000,00	99,07
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	149.703.100,00	73.866.500,00	-75.836.600,00	49,34
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	115.106.600,00	39.660.000,00	-75.446.600,00	34,46
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.106.600,00	39.660.000,00	-75.446.600,00	34,46
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	34.596.500,00	34.206.500,00	-390.000,00	98,87
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.596.500,00	34.206.500,00	-390.000,00	98,87
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	394.729.000,00	390.953.000,00	-3.776.000,00	99,04
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.729.000,00	390.953.000,00	-3.776.000,00	99,04
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	217.095.000,00	216.340.000,00	-755.000,00	99,65
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	217.095.000,00	216.340.000,00	-755.000,00	99,65
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.095.000,00	216.340.000,00	-755.000,00	99,65
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	177.634.000,00	174.613.000,00	-3.021.000,00	98,30
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	177.634.000,00	174.613.000,00	-3.021.000,00	98,30
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.634.000,00	174.613.000,00	-3.021.000,00	98,30
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	140.915.900,00	134.800.000,00	-6.115.900,00	95,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.915.900,00	134.800.000,00	-6.115.900,00	95,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	140.915.900,00	134.800.000,00	-6.115.900,00	95,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.002.400,00	49.630.000,00	-4.372.400,00	91,90
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.002.400,00	49.630.000,00	-4.372.400,00	91,90
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	86.913.500,00	85.170.000,00	-1.743.500,00	97,99
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.913.500,00	85.170.000,00	-1.743.500,00	97,99
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.842.311.903,00	16.518.227.143,18	-324.084.759,82	98,08
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.195.900.362,00	5.059.584.971,00	-136.315.391,00	97,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.195.900.362,00	5.059.584.971,00	-136.315.391,00	97,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.195.900.362,00	5.059.584.971,00	-136.315.391,00	97,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.195.900.362,00	5.059.584.971,00	-136.315.391,00	97,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.973.450,00	1.156.021.218,00	-130.952.232,00	89,82
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	778.599.250,00	655.662.150,00	-122.937.100,00	84,21
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.099.250,00	40.598.150,00	-4.501.100,00	90,02
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.099.250,00	40.598.150,00	-4.501.100,00	90,02
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	733.500.000,00	615.064.000,00	-118.436.000,00	83,85
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	733.500.000,00	615.064.000,00	-118.436.000,00	83,85
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.250.000,00	7.732.300,00	-5.517.700,00	58,36
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.250.000,00	7.732.300,00	-5.517.700,00	58,36
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	7.732.300,00	-5.517.700,00	58,36
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.124.200,00	492.626.768,00	-2.497.432,00	99,50
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	495.124.200,00	492.626.768,00	-2.497.432,00	99,50
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.124.200,00	492.626.768,00	-2.497.432,00	99,50
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.298.438.091,00	10.249.150.954,18	-49.287.136,82	99,52
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.962.541,00	28.606.890,00	-21.355.651,00	57,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.962.541,00	28.606.890,00	-21.355.651,00	57,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.962.541,00	28.606.890,00	-21.355.651,00	57,26

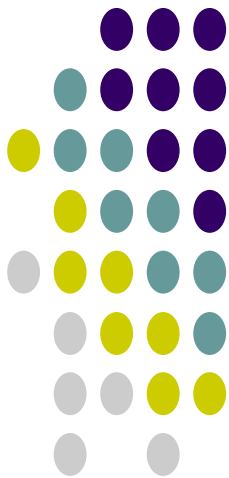
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.248.475.550,00	10.220.544.064,18	-27.931.485,82	99,73
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	653.654.000,00	638.026.000,00	-15.628.000,00	97,61
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	68.760.000,00	68.760.000,00	0,00	100,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.894.000,00	569.266.000,00	-15.628.000,00	97,33
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	9.594.821.550,00	9.582.518.064,18	-12.303.485,82	99,87
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.594.821.550,00	9.582.518.064,18	-12.303.485,82	99,87
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000,00	53.470.000,00	-7.530.000,00	87,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	61.000.000,00	53.470.000,00	-7.530.000,00	87,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.000.000,00	53.470.000,00	-7.530.000,00	87,66
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	53.470.000,00	-7.530.000,00	87,66

Kolenodale, 28 Agustus 2025



BUPATI MOROWALI UTARA

DEUS JULKARSON HEHI



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	183.527.200,00	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	183.527.200,00	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	88.917.500,00	88.867.500,00	(50.000,00)	99,94
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	21.462.700,00	21.462.700,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.462.700,00	21.462.700,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.462.700,00	21.462.700,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	61.864.800,00	61.814.800,00	(50.000,00)	99,92
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.864.800,00	61.814.800,00	(50.000,00)	99,92
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.864.800,00	61.814.800,00	(50.000,00)	99,92
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	51.836.500,00	51.739.666,00	(96.834,00)	99,81
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	51.836.500,00	51.739.666,00	(96.834,00)	99,81
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.836.500,00	51.739.666,00	(96.834,00)	99,81
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.836.500,00	51.739.666,00	(96.834,00)	99,81
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	42.773.200,00	42.612.350,00	(160.850,00)	99,62
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	42.773.200,00	42.612.350,00	(160.850,00)	99,62
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.773.200,00	42.612.350,00	(160.850,00)	99,62
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.773.200,00	42.612.350,00	(160.850,00)	99,62

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELISULKARSON HEHI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



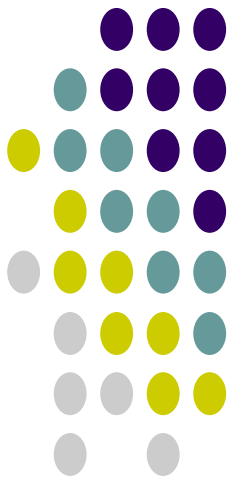
Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	16.951.830.064,00	14.625.543.104,00	(2.326.286.960,00)	86,28
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	13.669.586.053,00	11.644.060.515,00	(2.025.525.538,00)	85,18
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.514.597.573,00	11.491.212.935,00	(2.023.384.638,00)	85,03
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.072.206.273,00	11.049.924.150,00	(2.022.282.123,00)	84,53
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.016.304.449,00	943.435.650,00	(72.868.799,00)	92,83
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.304.449,00	943.435.650,00	(72.868.799,00)	92,83
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.055.901.824,00	10.106.488.500,00	(1.949.413.324,00)	83,83
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	754.281.600,00	754.166.000,00	(115.600,00)	99,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.100.000.000,00	8.150.722.500,00	(1.949.277.500,00)	80,70
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.201.620.224,00	1.201.600.000,00	(20.224,00)	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	106.185.600,00	105.477.950,00	(707.650,00)	99,33
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.185.600,00	105.477.950,00	(707.650,00)	99,33
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.185.600,00	105.477.950,00	(707.650,00)	99,33
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	336.205.700,00	335.810.835,00	(394.865,00)	99,88
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.205.700,00	81.196.135,00	(9.565,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.205.700,00	81.196.135,00	(9.565,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	255.000.000,00	254.614.700,00	(385.300,00)	99,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	(385.300,00)	99,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.988.480,00	152.847.580,00	(2.140.900,00)	98,62
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	72.867.440,00	71.969.190,00	(898.250,00)	98,77
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.867.440,00	71.969.190,00	(898.250,00)	98,77
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.867.440,00	71.969.190,00	(898.250,00)	98,77
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	82.121.040,00	80.878.390,00	(1.242.650,00)	98,49
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	82.121.040,00	80.878.390,00	(1.242.650,00)	98,49
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.121.040,00	80.878.390,00	(1.242.650,00)	98,49
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.282.244.011,00	2.981.482.589,00	(300.761.422,00)	90,84
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.957.500,00	30.951.500,00	(6.000,00)	99,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.957.500,00	30.951.500,00	(6.000,00)	99,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.957.500,00	30.951.500,00	(6.000,00)	99,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.957.500,00	30.951.500,00	(6.000,00)	99,98
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.151.658,00	1.949.850.615,00	(251.301.043,00)	88,58
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.201.151.658,00	1.949.850.615,00	(251.301.043,00)	88,58

2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.201.151.658,00	1.949.850.615,00	(251.301.043,00)	88,58
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.201.151.658,00	1.949.850.615,00	(251.301.043,00)	88,58
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.941.453,00	542.316.474,00	(16.624.979,00)	97,03
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.301.503,00	95.301.503,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.301.503,00	69.301.503,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.301.503,00	69.301.503,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.065.550,00	13.063.780,00	(1.770,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.065.550,00	13.063.780,00	(1.770,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.065.550,00	13.063.780,00	(1.770,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.574.400,00	433.951.191,00	(16.623.209,00)	96,31
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	450.574.400,00	433.951.191,00	(16.623.209,00)	96,31
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.574.400,00	433.951.191,00	(16.623.209,00)	96,31
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.546.000,00	354.923.000,00	(32.623.000,00)	91,58
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.570.000,00	24.569.000,00	(1.000,00)	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.570.000,00	24.569.000,00	(1.000,00)	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.570.000,00	24.569.000,00	(1.000,00)	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.536.000,00	325.914.000,00	(32.622.000,00)	90,90
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	358.536.000,00	325.914.000,00	(32.622.000,00)	90,90
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.576.000,00	258.954.000,00	(32.622.000,00)	88,81
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.647.400,00	103.441.000,00	(206.400,00)	99,80
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000,00	43.994.000,00	(6.000,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	43.994.000,00	(6.000,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	43.994.000,00	(6.000,00)	99,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.147.400,00	26.947.000,00	(200.400,00)	99,26
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.147.400,00	26.947.000,00	(200.400,00)	99,26
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.147.400,00	26.947.000,00	(200.400,00)	99,26

Konodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELISJULKARSON HEHI



DINAS PERIKANAN DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



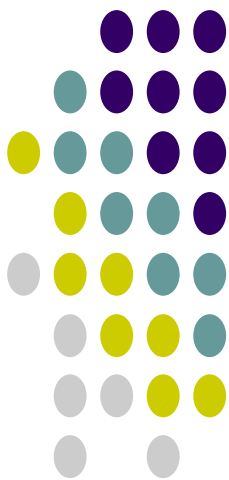
Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi DINAS PERIKANAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (PERUBAHAN)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.242.224.270,00	13.810.662.774,00	-431.561.496,00	96,97
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.979.551.700,00	4.945.329.600,00	-34.222.100,00	99,31
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.079.058.000,00	4.065.442.700,00	-13.615.300,00	99,67
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	475.261.000,00	475.248.000,00	-13.000,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	475.261.000,00	475.248.000,00	-13.000,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.261.000,00	475.248.000,00	-13.000,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.603.797.000,00	3.590.194.700,00	-13.602.300,00	99,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.603.797.000,00	3.590.194.700,00	-13.602.300,00	99,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.603.797.000,00	3.590.194.700,00	-13.602.300,00	99,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	900.493.700,00	879.886.900,00	-20.606.800,00	97,71
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	837.738.000,00	817.797.500,00	-19.940.500,00	97,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	837.738.000,00	817.797.500,00	-19.940.500,00	97,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.738.000,00	817.797.500,00	-19.940.500,00	97,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	62.755.700,00	62.089.400,00	-666.300,00	98,94
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.755.700,00	62.089.400,00	-666.300,00	98,94
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.755.700,00	62.089.400,00	-666.300,00	98,94
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.688.203.100,00	2.677.872.923,00	-10.330.177,00	99,62
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	704.237.100,00	696.322.923,00	-7.914.177,00	98,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	474.337.500,00	466.534.525,00	-7.802.975,00	98,35
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	277.161.500,00	276.545.525,00	-615.975,00	99,78
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.161.500,00	276.545.525,00	-615.975,00	99,78
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	197.176.000,00	189.989.000,00	-7.187.000,00	96,36
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.761.000,00	32.761.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.415.000,00	157.228.000,00	-7.187.000,00	95,63

3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	229.899.600,00	229.788.398,00	-111.202,00	99,95
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	229.899.600,00	229.788.398,00	-111.202,00	99,95
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.899.600,00	229.788.398,00	-111.202,00	99,95
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.983.966.000,00	1.981.550.000,00	-2.416.000,00	99,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.983.966.000,00	1.981.550.000,00	-2.416.000,00	99,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.983.966.000,00	1.981.550.000,00	-2.416.000,00	99,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.983.966.000,00	1.981.550.000,00	-2.416.000,00	99,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	827.746.200,00	827.437.500,00	-308.700,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	827.746.200,00	827.437.500,00	-308.700,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.870.100,00	227.775.500,00	-94.600,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	222.620.100,00	222.525.500,00	-94.600,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.620.100,00	222.525.500,00	-94.600,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	599.876.100,00	599.662.000,00	-214.100,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	599.876.100,00	599.662.000,00	-214.100,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.876.100,00	599.662.000,00	-214.100,00	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.746.723.270,00	5.360.022.751,00	-386.700.519,00	93,27
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.183.643.084,00	3.841.532.705,00	-342.110.379,00	91,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.183.643.084,00	3.841.532.705,00	-342.110.379,00	91,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.183.643.084,00	3.841.532.705,00	-342.110.379,00	91,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.183.643.084,00	3.841.532.705,00	-342.110.379,00	91,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.147.500,00	111.051.500,00	-96.000,00	99,91
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.147.500,00	111.051.500,00	-96.000,00	99,91
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.147.500,00	111.051.500,00	-96.000,00	99,91
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.147.500,00	111.051.500,00	-96.000,00	99,91
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.017.686,00	765.766.175,00	-14.251.511,00	98,17
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.093.550,00	228.701.000,00	-392.550,00	99,83
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.893.550,00	113.816.000,00	-77.550,00	99,93
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.893.550,00	113.816.000,00	-77.550,00	99,93
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	115.200.000,00	114.885.000,00	-315.000,00	99,73
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.200.000,00	114.885.000,00	-315.000,00	99,73
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.883.736,00	7.868.736,00	-15.000,00	99,81
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.883.736,00	7.868.736,00	-15.000,00	99,81
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.883.736,00	7.868.736,00	-15.000,00	99,81
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.072.400,00	41.069.550,00	-2.850,00	99,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.072.400,00	41.069.550,00	-2.850,00	99,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.072.400,00	41.069.550,00	-2.850,00	99,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.968.000,00	488.126.889,00	-13.841.111,00	97,24
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	501.968.000,00	488.126.889,00	-13.841.111,00	97,24
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.968.000,00	488.126.889,00	-13.841.111,00	97,24
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.150.000,00	578.915.556,00	-4.234.444,00	99,27
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00

3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.000,00	64.805.556,00	-4.234.444,00	93,87
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.040.000,00	64.805.556,00	-4.234.444,00	93,87
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.040.000,00	64.805.556,00	-4.234.444,00	93,87
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	512.610.000,00	512.610.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	72.360.000,00	72.360.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.250.000,00	440.250.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.765.000,00	62.756.815,00	-26.008.185,00	70,70
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	9.343.885,00	-8.156.115,00	53,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	9.343.885,00	-8.156.115,00	53,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	9.343.885,00	-8.156.115,00	53,39
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	37.147.930,00	-17.852.070,00	67,54
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	37.147.930,00	-17.852.070,00	67,54
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	37.147.930,00	-17.852.070,00	67,54
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.265.000,00	16.265.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.265.000,00	16.265.000,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELLS JULKARSON HEHI



DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	9.545.628.328,00	8.777.686.023,00	(767.942.305,00)	91,96
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	888.067.042,00	885.757.400,00	(2.309.642,00)	99,74
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	888.067.042,00	885.757.400,00	(2.309.642,00)	99,74
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	883.024.642,00	881.545.400,00	(1.479.242,00)	99,83
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1		BELANJA OPERASI	733.024.642,00	731.811.400,00	(1.213.242,00)	99,83
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	733.024.642,00	731.811.400,00	(1.213.242,00)	99,83
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2		BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.734.000,00	(266.000,00)	99,82
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.734.000,00	(266.000,00)	99,82
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.042.400,00	4.212.000,00	(830.400,00)	83,53
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010	5.1		BELANJA OPERASI	5.042.400,00	4.212.000,00	(830.400,00)	83,53
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.042.400,00	4.212.000,00	(830.400,00)	83,53
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	493.694.350,00	470.637.430,00	(23.056.920,00)	95,33
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	493.694.350,00	470.637.430,00	(23.056.920,00)	95,33
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9.895.000,00	9.870.000,00	(25.000,00)	99,75
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005	5.1		BELANJA OPERASI	9.895.000,00	9.870.000,00	(25.000,00)	99,75
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	9.895.000,00	9.870.000,00	(25.000,00)	99,75
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	483.799.350,00	460.767.430,00	(23.031.920,00)	95,24
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	483.799.350,00	460.767.430,00	(23.031.920,00)	95,24
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	468.799.350,00	445.767.430,00	(23.031.920,00)	95,09
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.05		Belanja Hibah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.258.470.960,00	986.856.550,00	(271.614.410,00)	78,42
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.258.470.960,00	986.856.550,00	(271.614.410,00)	78,42
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	718.999.950,00	497.397.950,00	(221.602.000,00)	69,18
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1		BELANJA OPERASI	718.999.950,00	497.397.950,00	(221.602.000,00)	69,18
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	718.999.950,00	497.397.950,00	(221.602.000,00)	69,18
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	525.472.810,00	476.671.000,00	(48.801.810,00)	90,71
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1		BELANJA OPERASI	525.472.810,00	476.671.000,00	(48.801.810,00)	90,71
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	525.472.810,00	476.671.000,00	(48.801.810,00)	90,71
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.998.200,00	12.787.600,00	(1.210.600,00)	91,35
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1		BELANJA OPERASI	13.998.200,00	12.787.600,00	(1.210.600,00)	91,35

3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.998.200,00	12.787.600,00	(1.210.600,00)	91,35
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.905.395.976,00	6.434.434.643,00	(470.961.333,00)	93,18
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.912.101.672,00	3.726.727.640,00	(185.374.032,00)	95,26
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.912.101.672,00	3.726.727.640,00	(185.374.032,00)	95,26
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.912.101.672,00	3.726.727.640,00	(185.374.032,00)	95,26
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.912.101.672,00	3.726.727.640,00	(185.374.032,00)	95,26
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.918.000,00	63.316.000,00	(602.000,00)	99,06
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63.918.000,00	63.316.000,00	(602.000,00)	99,06
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	63.918.000,00	63.316.000,00	(602.000,00)	99,06
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.918.000,00	63.316.000,00	(602.000,00)	99,06
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.383.794.304,00	2.124.689.853,00	(259.104.451,00)	89,13
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.484.619.804,00	1.239.129.160,00	(245.490.644,00)	83,46
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.984.263,00	232.951.660,00	(6.032.603,00)	97,48
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.984.263,00	232.951.660,00	(6.032.603,00)	97,48
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.245.635.541,00	1.006.177.500,00	(239.458.041,00)	80,78
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.635.541,00	441.240.000,00	(58.395.541,00)	88,31
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	706.000.000,00	525.068.500,00	(180.931.500,00)	74,37
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.000.000,00	39.869.000,00	(131.000,00)	99,67
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.156.500,00	56.630.200,00	(13.526.300,00)	80,72
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.156.500,00	56.630.200,00	(13.526.300,00)	80,72
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.156.500,00	56.630.200,00	(13.526.300,00)	80,72
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.018.000,00	828.930.493,00	(87.507,00)	99,99
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	829.018.000,00	828.930.493,00	(87.507,00)	99,99
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.018.000,00	828.930.493,00	(87.507,00)	99,99
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.960.000,00	26.800.000,00	(1.160.000,00)	95,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.960.000,00	26.800.000,00	(1.160.000,00)	95,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.960.000,00	26.800.000,00	(1.160.000,00)	95,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	26.800.000,00	(1.160.000,00)	95,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.942.000,00	430.976.680,00	(22.965.320,00)	94,94
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.492.000,00	44.966.500,00	(7.525.500,00)	85,66
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.492.000,00	44.966.500,00	(7.525.500,00)	85,66
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.492.000,00	44.966.500,00	(7.525.500,00)	85,66
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.450.000,00	386.010.180,00	(15.439.820,00)	96,15
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	401.450.000,00	386.010.180,00	(15.439.820,00)	96,15
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	71.960.000,00	65.460.000,00	(6.500.000,00)	90,97
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.490.000,00	320.550.180,00	(8.939.820,00)	97,29
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.680.000,00	61.924.470,00	(1.755.530,00)	97,24
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.000.000,00	42.073.970,00	(926.030,00)	97,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.000.000,00	42.073.970,00	(926.030,00)	97,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	42.073.970,00	(926.030,00)	97,85
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.680.000,00	19.850.500,00	(829.500,00)	95,99
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.680.000,00	19.850.500,00	(829.500,00)	95,99
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.680.000,00	19.850.500,00	(829.500,00)	95,99

Keprosesale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWAH UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



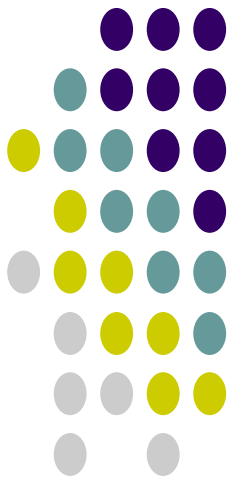
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.539.472.850,00	4.041.320.488,00	(498.152.362,00)	89,03
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.795.270.000,00	1.602.361.800,00	(192.908.200,00)	89,25
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.795.270.000,00	1.602.361.800,00	(192.908.200,00)	89,25
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.795.270.000,00	1.602.361.800,00	(192.908.200,00)	89,25
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.795.270.000,00	1.602.361.800,00	(192.908.200,00)	89,25
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.573.699.000,00	2.298.709.500,00	(274.989.500,00)	89,32
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.573.699.000,00	2.298.709.500,00	(274.989.500,00)	89,32
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.573.699.000,00	2.298.709.500,00	(274.989.500,00)	89,32
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.858.500,00	588.709.500,00	(4.149.000,00)	99,30
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.980.840.500,00	1.710.000.000,00	(270.840.500,00)	86,33
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	170.503.850,00	140.249.188,00	(30.254.662,00)	82,26
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001		Seleksi Atlet Daerah	14.990.000,00	14.745.000,00	(245.000,00)	98,37
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.990.000,00	14.745.000,00	(245.000,00)	98,37
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.990.000,00	14.745.000,00	(245.000,00)	98,37
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraagaan (Sport Science)	155.513.850,00	125.504.188,00	(30.009.662,00)	80,70
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.513.850,00	125.504.188,00	(30.009.662,00)	80,70
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.513.850,00	125.504.188,00	(30.009.662,00)	80,70
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00

Kabonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS FULKARSON HEHI



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	25.740.000,00	-24.260.000,00	51,48
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	25.740.000,00	-24.260.000,00	51,48
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	25.740.000,00	-24.260.000,00	51,48
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	432.907.250,00	399.448.500,00	-33.458.750,00	92,27
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	411.268.400,00	384.291.900,00	-26.976.500,00	93,44
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	70.779.000,00	52.142.900,00	-18.636.100,00	73,67
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7.471.000,00	7.458.500,00	-12.500,00	99,83
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.471.000,00	7.458.500,00	-12.500,00	99,83
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.471.000,00	7.458.500,00	-12.500,00	99,83
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	32.870.000,00	16.710.000,00	-16.160.000,00	50,84
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.870.000,00	16.710.000,00	-16.160.000,00	50,84
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.870.000,00	16.710.000,00	-16.160.000,00	50,84
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	30.438.000,00	27.974.400,00	-2.463.600,00	91,91
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	17.608.000,00	15.144.400,00	-2.463.600,00	86,01
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.608.000,00	15.144.400,00	-2.463.600,00	86,01
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	12.830.000,00	12.830.000,00	0,00	100,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.830.000,00	12.830.000,00	0,00	100,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	15.890.000,00	15.240.000,00	-650.000,00	95,91
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15.890.000,00	15.240.000,00	-650.000,00	95,91
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.890.000,00	15.240.000,00	-650.000,00	95,91
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.890.000,00	15.240.000,00	-650.000,00	95,91
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	324.599.400,00	316.909.000,00	-7.690.400,00	97,63
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	324.599.400,00	316.909.000,00	-7.690.400,00	97,63

2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	324.599.400,00	316.909.000,00	-7.690.400,00	97,63
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.599.400,00	316.909.000,00	-7.690.400,00	97,63
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.9.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	21.638.850,00	15.156.600,00	-6.482.250,00	70,04
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	21.638.850,00	15.156.600,00	-6.482.250,00	70,04
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21.638.850,00	15.156.600,00	-6.482.250,00	70,04
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.638.850,00	15.156.600,00	-6.482.250,00	70,04
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.638.850,00	15.156.600,00	-6.482.250,00	70,04

Kolonodale, 28 Agustus 2025



BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	25.740.000,00	-24.260.000,00	51,48
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	25.740.000,00	-24.260.000,00	51,48
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000,00	25.740.000,00	-24.260.000,00	51,48
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	51.886.776.102,00	49.442.659.456,89	-2.444.116.645,11	95,29
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.428.661.355,00	8.232.678.547,89	-195.982.807,11	97,67
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.777.917.955,00	1.658.228.750,00	-119.689.205,00	93,27
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.747.943.955,00	1.629.235.750,00	-118.708.205,00	93,21
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.736.288.455,00	1.623.808.250,00	-112.480.205,00	93,52
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.736.288.455,00	1.623.808.250,00	-112.480.205,00	93,52
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.655.500,00	5.427.500,00	-6.228.000,00	46,57
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.655.500,00	5.427.500,00	-6.228.000,00	46,57
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	29.974.000,00	28.993.000,00	-981.000,00	96,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.974.000,00	28.993.000,00	-981.000,00	96,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.974.000,00	28.993.000,00	-981.000,00	96,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.954.500.900,00	1.923.894.950,00	-30.605.950,00	98,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.954.500.900,00	1.923.894.950,00	-30.605.950,00	98,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.941.650.900,00	1.911.044.950,00	-30.605.950,00	98,42
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.941.650.900,00	1.911.044.950,00	-30.605.950,00	98,42
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.696.242.500,00	4.650.554.847,89	-45.687.652,11	99,03
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	232.837.550,00	203.062.600,00	-29.774.950,00	87,21
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	232.837.550,00	203.062.600,00	-29.774.950,00	87,21
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.837.550,00	203.062.600,00	-29.774.950,00	87,21
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.463.404.950,00	4.447.492.247,89	-15.912.702,11	99,64
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.437.223.050,00	4.422.165.997,89	-15.057.052,11	99,66
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.437.223.050,00	4.422.165.997,89	-15.057.052,11	99,66
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	26.181.900,00	25.326.250,00	-855.650,00	96,73

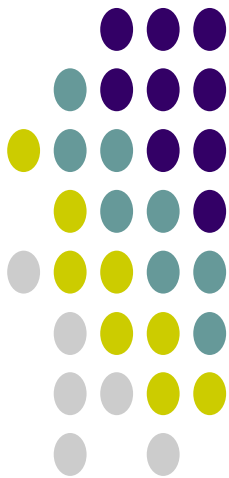
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.181.900,00	25.326.250,00	-855.650,00	96,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	18.390.574.663,00	18.122.578.406,00	-267.996.257,00	98,54
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	16.738.000,00	16.616.000,00	-122.000,00	99,27
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	16.738.000,00	16.616.000,00	-122.000,00	99,27
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	16.738.000,00	16.616.000,00	-122.000,00	99,27
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.738.000,00	16.616.000,00	-122.000,00	99,27
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	18.373.836.663,00	18.105.962.406,00	-267.874.257,00	98,54
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0002		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	249.998.400,00	249.622.000,00	-376.400,00	99,85
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	249.998.400,00	249.622.000,00	-376.400,00	99,85
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.998.400,00	249.622.000,00	-376.400,00	99,85
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.347.268.520,00	10.260.945.350,00	-86.323.170,00	99,17
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.347.268.520,00	10.260.945.350,00	-86.323.170,00	99,17
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.347.268.520,00	10.260.945.350,00	-86.323.170,00	99,17
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	399.516.108,00	398.808.000,00	-708.108,00	99,82
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	349.516.108,00	348.808.000,00	-708.108,00	99,80
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.516.108,00	348.808.000,00	-708.108,00	99,80
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	6.351.477.155,00	6.197.328.250,00	-154.148.905,00	97,57
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.284.929.750,00	6.130.817.250,00	-154.112.500,00	97,55
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.284.929.750,00	6.130.817.250,00	-154.112.500,00	97,55
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	66.547.405,00	66.511.000,00	-36.405,00	99,95
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.547.405,00	66.511.000,00	-36.405,00	99,95
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.025.576.480,00	999.258.806,00	-26.317.674,00	97,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.025.576.480,00	999.258.806,00	-26.317.674,00	97,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.576.480,00	999.258.806,00	-26.317.674,00	97,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	260.159.265,00	257.922.815,00	-2.236.450,00	99,14
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.159.265,00	257.922.815,00	-2.236.450,00	99,14
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	260.159.265,00	257.922.815,00	-2.236.450,00	99,14
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	256.056.245,00	253.819.795,00	-2.236.450,00	99,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.056.245,00	253.819.795,00	-2.236.450,00	99,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.103.020,00	4.103.020,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.103.020,00	4.103.020,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	39.814.400,00	35.884.000,00	-3.930.400,00	90,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	39.814.400,00	35.884.000,00	-3.930.400,00	90,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.806.000,00	8.298.000,00	-1.508.000,00	84,62
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.806.000,00	8.298.000,00	-1.508.000,00	84,62
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.806.000,00	8.298.000,00	-1.508.000,00	84,62
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.888.900,00	14.276.500,00	-1.612.400,00	89,85
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.888.900,00	14.276.500,00	-1.612.400,00	89,85
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.888.900,00	14.276.500,00	-1.612.400,00	89,85

3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0003		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	14.119.500,00	13.309.500,00	-810.000,00	94,26
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.119.500,00	13.309.500,00	-810.000,00	94,26
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.119.500,00	13.309.500,00	-810.000,00	94,26
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.291.948.800,00	1.663.602.685,00	-1.628.346.115,00	50,54
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.291.948.800,00	1.663.602.685,00	-1.628.346.115,00	50,54
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0001		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	58.513.350,00	57.797.185,00	-716.165,00	98,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.513.350,00	57.797.185,00	-716.165,00	98,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.513.350,00	57.797.185,00	-716.165,00	98,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0002		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.213.519.050,00	1.585.889.500,00	-1.627.629.550,00	49,35
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.213.519.050,00	1.585.889.500,00	-1.627.629.550,00	49,35
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.213.519.050,00	1.585.889.500,00	-1.627.629.550,00	49,35
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	19.916.400,00	19.916.000,00	(400,00)	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.916.400,00	19.916.000,00	(400,00)	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.916.400,00	19.916.000,00	(400,00)	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	736.218.330,00	729.448.985,00	-6.769.345,00	99,08
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	736.218.330,00	729.448.985,00	-6.769.345,00	99,08
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	635.508.850,00	630.518.216,00	-4.990.634,00	99,21
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	419.261.350,00	419.188.216,00	-73.134,00	99,98
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.261.350,00	419.188.216,00	-73.134,00	99,98
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	216.247.500,00	211.330.000,00	-4.917.500,00	97,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.247.500,00	211.330.000,00	-4.917.500,00	97,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.709.480,00	98.930.769,00	-1.778.711,00	98,23
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.709.480,00	98.930.769,00	-1.778.711,00	98,23
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.709.480,00	98.930.769,00	-1.778.711,00	98,23
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.739.399.289,00	20.400.544.018,00	-338.855.271,00	98,37
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.594.494.003,00	17.441.384.944,00	-153.109.059,00	99,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.594.494.003,00	17.441.384.944,00	-153.109.059,00	99,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.594.494.003,00	17.441.384.944,00	-153.109.059,00	99,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	17.594.494.003,00	17.441.384.944,00	-153.109.059,00	99,13
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.977.110,00	661.327.574,00	-4.649.536,00	99,30
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.009.000,00	85.417.250,00	-1.591.750,00	98,17
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.942.750,00	37.522.250,00	-420.500,00	98,89
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.942.750,00	37.522.250,00	-420.500,00	98,89
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	49.066.250,00	47.895.000,00	-1.171.250,00	97,61
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.066.250,00	47.895.000,00	-1.171.250,00	97,61
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.503.510,00	46.502.977,00	(533,00)	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.503.510,00	46.502.977,00	(533,00)	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.503.510,00	46.502.977,00	(533,00)	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.464.600,00	529.407.347,00	-3.057.253,00	99,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	532.464.600,00	529.407.347,00	-3.057.253,00	99,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.464.600,00	529.407.347,00	-3.057.253,00	99,43
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.353.728.176,00	2.174.155.500,00	-179.572.676,00	92,37
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.636.176,00	9.829.500,00	-33.806.676,00	22,53
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.636.176,00	9.829.500,00	-33.806.676,00	22,53
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.636.176,00	9.829.500,00	-33.806.676,00	22,53

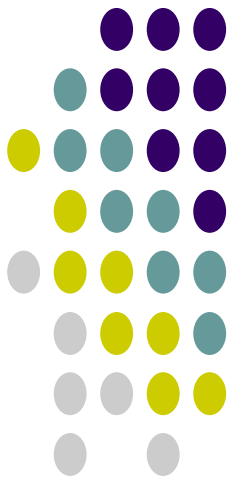
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.250.000,00	14.060.000,00	-2.190.000,00	86,52
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	14.060.000,00	-2.190.000,00	86,52
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	14.060.000,00	-2.190.000,00	86,52
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.293.842.000,00	2.150.266.000,00	-143.576.000,00	93,74
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.293.842.000,00	2.150.266.000,00	-143.576.000,00	93,74
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	117.960.000,00	117.960.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.882.000,00	2.032.306.000,00	-143.576.000,00	93,40
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.200.000,00	123.676.000,00	-1.524.000,00	98,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	98.732.000,00	-1.268.000,00	98,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.732.000,00	-1.268.000,00	98,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.732.000,00	-1.268.000,00	98,73
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000,00	24.944.000,00	-256.000,00	98,98
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	24.944.000,00	-256.000,00	98,98
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	24.944.000,00	-256.000,00	98,98

Kolodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DEKUS IULKARSON HEHI



SEKRETARIAT DAERAH



BAGIAN UMUM



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



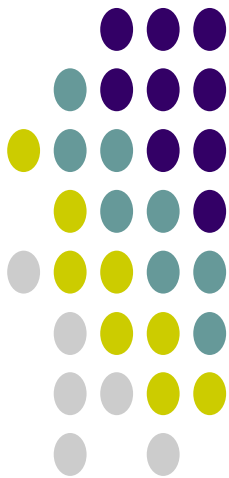
Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN UMUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	37.646.610.171,00	32.508.037.632,00	-5.138.572.539,00	86,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.646.610.171,00	32.508.037.632,00	-5.138.572.539,00	86,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.780.305.159,00	10.773.961.098,00	-2.006.344.061,00	84,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.780.305.159,00	10.773.961.098,00	-2.006.344.061,00	84,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.780.305.159,00	10.773.961.098,00	-2.006.344.061,00	84,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.780.305.159,00	10.773.961.098,00	-2.006.344.061,00	84,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.257.223.260,00	5.042.009.752,00	-1.215.213.508,00	80,58
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.993.810,00	96.993.101,00	(709,00)	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.993.810,00	96.993.101,00	(709,00)	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.993.810,00	96.993.101,00	(709,00)	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	781.120.000,00	771.179.898,00	-9.940.102,00	98,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.635.000,00	37.630.898,00	-4.102,00	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.635.000,00	37.630.898,00	-4.102,00	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	743.485.000,00	733.549.000,00	-9.936.000,00	98,66
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	743.485.000,00	733.549.000,00	-9.936.000,00	98,66
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.062.876.350,00	1.243.806.491,00	-819.069.859,00	60,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.062.876.350,00	1.243.806.491,00	-819.069.859,00	60,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.062.876.350,00	1.243.806.491,00	-819.069.859,00	60,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	241.397.100,00	202.143.100,00	-39.254.000,00	83,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	241.397.100,00	202.143.100,00	-39.254.000,00	83,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.397.100,00	202.143.100,00	-39.254.000,00	83,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.074.836.000,00	2.727.887.162,00	-346.948.838,00	88,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.074.836.000,00	2.727.887.162,00	-346.948.838,00	88,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.074.836.000,00	2.727.887.162,00	-346.948.838,00	88,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.900.000,00	24.825.000,00	-75.000,00	99,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.900.000,00	24.825.000,00	-75.000,00	99,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	24.900.000,00	24.825.000,00	-75.000,00	99,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.900.000,00	24.825.000,00	-75.000,00	99,70
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.147.434.616,00	10.928.582.780,00	-1.218.851.836,00	89,97

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.473.474.848,00	2.000.093.080,00	-473.381.768,00	80,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI		2.473.474.848,00	2.000.093.080,00	-473.381.768,00	80,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		2.473.474.848,00	2.000.093.080,00	-473.381.768,00	80,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.211.227.000,00	5.207.627.000,00	-3.600.000,00	99,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI		5.211.227.000,00	5.207.627.000,00	-3.600.000,00	99,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		5.211.227.000,00	5.207.627.000,00	-3.600.000,00	99,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.437.732.768,00	3.695.862.700,00	-741.870.068,00	83,28
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI		4.437.732.768,00	3.695.862.700,00	-741.870.068,00	83,28
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai		49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.387.932.768,00	3.646.062.700,00	-741.870.068,00	83,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		625.620.000,00	596.109.854,00	-29.510.146,00	95,28
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		451.820.000,00	441.671.061,00	-10.148.939,00	97,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI		451.820.000,00	441.671.061,00	-10.148.939,00	97,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		451.820.000,00	441.671.061,00	-10.148.939,00	97,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		42.600.000,00	42.298.595,00	-301.405,00	99,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI		42.600.000,00	42.298.595,00	-301.405,00	99,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		42.600.000,00	42.298.595,00	-301.405,00	99,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		131.200.000,00	112.140.198,00	-19.059.802,00	85,47
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI		131.200.000,00	112.140.198,00	-19.059.802,00	85,47
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		131.200.000,00	112.140.198,00	-19.059.802,00	85,47
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		5.811.127.136,00	5.142.549.148,00	-668.577.988,00	88,49
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		196.640.136,00	135.233.845,00	-61.406.291,00	68,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI		196.640.136,00	135.233.845,00	-61.406.291,00	68,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai		196.640.136,00	135.233.845,00	-61.406.291,00	68,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		72.800.000,00	72.500.000,00	-300.000,00	99,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI		72.800.000,00	72.500.000,00	-300.000,00	99,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		72.800.000,00	72.500.000,00	-300.000,00	99,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		66.000.000,00	65.993.482,00	-6.518,00	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI		66.000.000,00	65.993.482,00	-6.518,00	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		66.000.000,00	65.993.482,00	-6.518,00	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		5.475.687.000,00	4.868.821.821,00	-606.865.179,00	88,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI		5.475.687.000,00	4.868.821.821,00	-606.865.179,00	88,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai		618.000.000,00	410.000.000,00	-208.000.000,00	66,34
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.857.687.000,00	4.458.821.821,00	-398.865.179,00	91,79

Kelendale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	8.257.762.100,00	2.539.372.976,00	-5.718.389.124,00	30,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.366.953.750,00	1.835.730.848,00	-5.531.222.902,00	24,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	7.279.944.750,00	1.803.938.848,00	-5.476.005.902,00	24,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	7.027.256.550,00	1.653.119.848,00	-5.374.136.702,00	23,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.849.400,00	604.919.848,00	-851.929.552,00	41,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.849.400,00	604.919.848,00	-851.929.552,00	41,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.570.407.150,00	1.048.200.000,00	-4.522.207.150,00	18,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.048.200.000,00	-4.522.207.150,00	18,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	131.605.400,00	90.172.000,00	-41.433.400,00	68,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.605.400,00	90.172.000,00	-41.433.400,00	68,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.605.400,00	90.172.000,00	-41.433.400,00	68,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	121.082.800,00	60.647.000,00	-60.435.800,00	50,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.082.800,00	60.647.000,00	-60.435.800,00	50,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.082.800,00	60.647.000,00	-60.435.800,00	50,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	890.808.350,00	703.642.128,00	-187.166.222,00	78,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.452.800,00	414.924.100,00	-39.528.700,00	91,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	246.567.900,00	242.126.600,00	-4.441.300,00	98,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.767.900,00	63.476.600,00	-4.291.300,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.767.900,00	63.476.600,00	-4.291.300,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	178.800.000,00	178.650.000,00	-150.000,00	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.800.000,00	178.650.000,00	-150.000,00	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.232.500,00	19.281.500,00	-14.951.000,00	56,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.232.500,00	19.281.500,00	-14.951.000,00	56,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.232.500,00	19.281.500,00	-14.951.000,00	56,33

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.652.400,00	153.516.000,00	-20.136.400,00	88,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	173.652.400,00	153.516.000,00	-20.136.400,00	88,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.652.400,00	153.516.000,00	-20.136.400,00	88,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.900.000,00	141.360.000,00	-92.540.000,00	60,44
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.300.000,00	500.000,00	-3.800.000,00	11,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	500.000,00	-3.800.000,00	11,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	500.000,00	-3.800.000,00	11,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.600.000,00	140.860.000,00	-88.740.000,00	61,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	229.600.000,00	140.860.000,00	-88.740.000,00	61,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.800.000,00	118.060.000,00	-88.740.000,00	57,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.080.000,00	16.810.000,00	-19.270.000,00	46,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	10.715.000,00	-14.285.000,00	42,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	10.715.000,00	-14.285.000,00	42,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	10.715.000,00	-14.285.000,00	42,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000,00	6.095.000,00	-4.985.000,00	55,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.080.000,00	6.095.000,00	-4.985.000,00	55,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	6.095.000,00	-4.985.000,00	55,01

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIUS JULKARSON HEHI



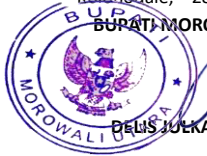
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

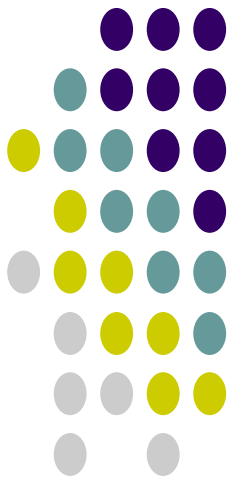


Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	1.079.999.950,00	934.462.428,00	-145.537.522,00	86,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	592.258.600,00	518.738.000,00	-73.520.600,00	87,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	592.258.600,00	518.738.000,00	-73.520.600,00	87,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	233.663.000,00	201.822.500,00	-31.840.500,00	86,37
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	233.663.000,00	201.822.500,00	-31.840.500,00	86,37
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.663.000,00	201.822.500,00	-31.840.500,00	86,37
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	358.595.600,00	316.915.500,00	-41.680.100,00	88,38
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	358.595.600,00	316.915.500,00	-41.680.100,00	88,38
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.595.600,00	316.915.500,00	-41.680.100,00	88,38
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	487.741.350,00	415.724.428,00	-72.016.922,00	85,23
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.751.350,00	264.644.428,00	-42.106.922,00	86,27
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.689.200,00	70.785.700,00	-5.903.500,00	92,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.489.200,00	21.615.700,00	-5.873.500,00	78,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.489.200,00	21.615.700,00	-5.873.500,00	78,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	49.200.000,00	49.170.000,00	-30.000,00	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.200.000,00	49.170.000,00	-30.000,00	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.350,00	9.920.000,00	-7.080.350,00	58,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.350,00	9.920.000,00	-7.080.350,00	58,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.350,00	9.920.000,00	-7.080.350,00	58,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.061.800,00	183.938.728,00	-29.123.072,00	86,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	213.061.800,00	183.938.728,00	-29.123.072,00	86,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.061.800,00	183.938.728,00	-29.123.072,00	86,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.800.000,00	126.500.000,00	-25.300.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.800.000,00	126.500.000,00	-25.300.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	151.800.000,00	126.500.000,00	-25.300.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.000.000,00	-3.800.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	107.500.000,00	-21.500.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.190.000,00	24.580.000,00	-4.610.000,00	84,21
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000,00	23.250.000,00	-3.750.000,00	86,11

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	23.250.000,00	-3.750.000,00	86,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	23.250.000,00	-3.750.000,00	86,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	1.330.000,00	-860.000,00	60,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	1.330.000,00	-860.000,00	60,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	1.330.000,00	-860.000,00	60,73

Kolonodale, 28 Agustus 2024
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

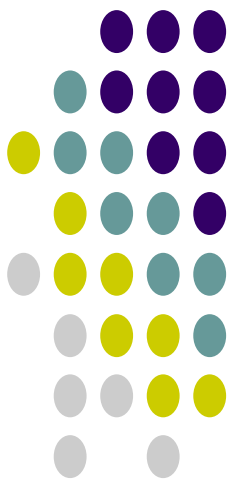


Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	8.257.762.100,00	2.539.372.976,00	-5.718.389.124,00	30,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.366.953.750,00	1.835.730.848,00	-5.531.222.902,00	24,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	7.279.944.750,00	1.803.938.848,00	-5.476.005.902,00	24,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	7.027.256.550,00	1.653.119.848,00	-5.374.136.702,00	23,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.849.400,00	604.919.848,00	-851.929.552,00	41,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.849.400,00	604.919.848,00	-851.929.552,00	41,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.570.407.150,00	1.048.200.000,00	-4.522.207.150,00	18,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.048.200.000,00	-4.522.207.150,00	18,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	131.605.400,00	90.172.000,00	-41.433.400,00	68,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.605.400,00	90.172.000,00	-41.433.400,00	68,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.605.400,00	90.172.000,00	-41.433.400,00	68,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	121.082.800,00	60.647.000,00	-60.435.800,00	50,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.082.800,00	60.647.000,00	-60.435.800,00	50,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.082.800,00	60.647.000,00	-60.435.800,00	50,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.009.000,00	31.792.000,00	-55.217.000,00	36,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	890.808.350,00	703.642.128,00	-187.166.222,00	78,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.015.550,00	64.470.028,00	-20.545.522,00	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.452.800,00	414.924.100,00	-39.528.700,00	91,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	246.567.900,00	242.126.600,00	-4.441.300,00	98,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.767.900,00	63.476.600,00	-4.291.300,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.767.900,00	63.476.600,00	-4.291.300,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	178.800.000,00	178.650.000,00	-150.000,00	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.800.000,00	178.650.000,00	-150.000,00	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.232.500,00	19.281.500,00	-14.951.000,00	56,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.232.500,00	19.281.500,00	-14.951.000,00	56,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.232.500,00	19.281.500,00	-14.951.000,00	56,33

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.652.400,00	153.516.000,00	-20.136.400,00	88,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	173.652.400,00	153.516.000,00	-20.136.400,00	88,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.652.400,00	153.516.000,00	-20.136.400,00	88,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.360.000,00	66.078.000,00	-15.282.000,00	81,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.900.000,00	141.360.000,00	-92.540.000,00	60,44
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.300.000,00	500.000,00	-3.800.000,00	11,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	500.000,00	-3.800.000,00	11,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	500.000,00	-3.800.000,00	11,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.600.000,00	140.860.000,00	-88.740.000,00	61,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	229.600.000,00	140.860.000,00	-88.740.000,00	61,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.800.000,00	118.060.000,00	-88.740.000,00	57,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.080.000,00	16.810.000,00	-19.270.000,00	46,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	10.715.000,00	-14.285.000,00	42,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	10.715.000,00	-14.285.000,00	42,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	10.715.000,00	-14.285.000,00	42,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000,00	6.095.000,00	-4.985.000,00	55,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.080.000,00	6.095.000,00	-4.985.000,00	55,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	6.095.000,00	-4.985.000,00	55,01

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPAT MOROWALI UTARA
DEUS JULKARSON HEHI



BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

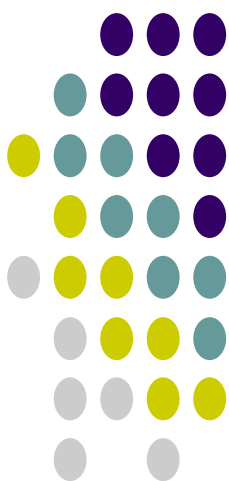
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	43.756.746.080,00	42.941.251.235,00	-815.494.845,00	98,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	42.851.942.780,00	42.135.202.021,00	-716.740.759,00	98,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	42.851.942.780,00	42.135.202.021,00	-716.740.759,00	98,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	42.851.942.780,00	42.135.202.021,00	-716.740.759,00	98,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.652.942.780,00	41.936.367.021,00	-716.575.759,00	98,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.702.833.760,00	6.027.398.021,00	-675.435.739,00	89,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	7.428.184.965,00	7.427.031.945,00	-1.153.020,00	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	-39.987.000,00	99,86
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	199.000.000,00	198.835.000,00	-165.000,00	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	198.835.000,00	-165.000,00	99,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	904.803.300,00	806.049.214,00	-98.754.086,00	89,09
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.993.300,00	419.112.214,00	-881.086,00	99,79
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.560.000,00	54.547.380,00	-12.620,00	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.560.000,00	54.547.380,00	-12.620,00	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.560.000,00	54.547.380,00	-12.620,00	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.146.500,00	54.634.000,00	-512.500,00	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.146.500,00	54.634.000,00	-512.500,00	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.146.500,00	54.634.000,00	-512.500,00	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.286.800,00	309.930.834,00	-355.966,00	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	310.286.800,00	309.930.834,00	-355.966,00	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.286.800,00	309.930.834,00	-355.966,00	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.400.000,00	36.363.000,00	-37.000,00	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.400.000,00	36.363.000,00	-37.000,00	99,90

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	36.400.000,00	36.363.000,00	-37.000,00	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.400.000,00	36.363.000,00	-37.000,00	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.410.000,00	321.574.000,00	-97.836.000,00	76,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.410.000,00	321.574.000,00	-97.836.000,00	76,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	419.410.000,00	321.574.000,00	-97.836.000,00	76,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	28.800.000,00	24.000.000,00	-4.800.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.610.000,00	297.574.000,00	-93.036.000,00	76,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS WILKARSON HEHI





BAGIAN HUKUM



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

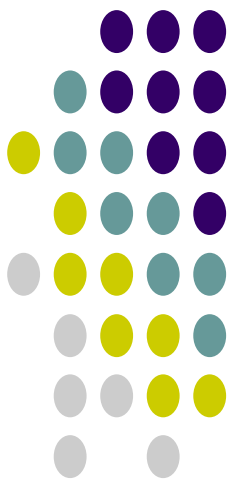


Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN HUKUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	1.378.000.000,00	1.134.654.292,00	-243.345.708,00	82,34
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	429.816.200,00	420.753.819,00	-9.062.381,00	97,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	429.816.200,00	420.753.819,00	-9.062.381,00	97,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	177.114.700,00	172.033.915,00	-5.080.785,00	97,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	177.114.700,00	172.033.915,00	-5.080.785,00	97,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.114.700,00	172.033.915,00	-5.080.785,00	97,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	177.335.100,00	175.006.204,00	-2.328.896,00	98,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	177.335.100,00	175.006.204,00	-2.328.896,00	98,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.335.100,00	175.006.204,00	-2.328.896,00	98,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	75.366.400,00	73.713.700,00	-1.652.700,00	97,81
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.366.400,00	73.713.700,00	-1.652.700,00	97,81
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.366.400,00	73.713.700,00	-1.652.700,00	97,81
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	948.183.800,00	713.900.473,00	-234.283.327,00	75,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.002.500,00	96.127.500,00	-6.875.000,00	93,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103.002.500,00	96.127.500,00	-6.875.000,00	93,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	103.002.500,00	96.127.500,00	-6.875.000,00	93,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.002.500,00	96.127.500,00	-6.875.000,00	93,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.460.950,00	412.464.973,00	-180.995.977,00	69,50
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.165.050,00	40.067.750,00	-2.097.300,00	95,03
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.165.050,00	40.067.750,00	-2.097.300,00	95,03
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.165.050,00	40.067.750,00	-2.097.300,00	95,03
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.319.900,00	35.049.050,00	-7.270.850,00	82,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.319.900,00	35.049.050,00	-7.270.850,00	82,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.319.900,00	35.049.050,00	-7.270.850,00	82,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.500.000,00	59.500.000,00	-8.000.000,00	88,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	59.500.000,00	-8.000.000,00	88,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	59.500.000,00	-8.000.000,00	88,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.476.000,00	277.848.173,00	-163.627.827,00	62,94

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	441.476.000,00	277.848.173,00	-163.627.827,00	62,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.476.000,00	277.848.173,00	-163.627.827,00	62,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.841.950,00	126.760.000,00	-81.950,00	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	38.015.000,00	37.980.000,00	-35.000,00	99,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	38.015.000,00	37.980.000,00	-35.000,00	99,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.015.000,00	37.980.000,00	-35.000,00	99,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.826.950,00	88.780.000,00	-46.950,00	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	88.826.950,00	88.780.000,00	-46.950,00	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.826.950,00	88.780.000,00	-46.950,00	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.050.000,00	66.500.000,00	-31.550.000,00	67,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.050.000,00	66.500.000,00	-31.550.000,00	67,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	98.050.000,00	66.500.000,00	-31.550.000,00	67,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.000.000,00	-3.800.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.250.000,00	47.500.000,00	-27.750.000,00	63,12
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.828.400,00	12.048.000,00	-14.780.400,00	44,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.418.400,00	8.608.000,00	-11.810.400,00	42,16
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.418.400,00	8.608.000,00	-11.810.400,00	42,16
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.418.400,00	8.608.000,00	-11.810.400,00	42,16
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.410.000,00	3.440.000,00	-2.970.000,00	53,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.410.000,00	3.440.000,00	-2.970.000,00	53,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.410.000,00	3.440.000,00	-2.970.000,00	53,67

Kelonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



BAGIAN ORGANISASI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



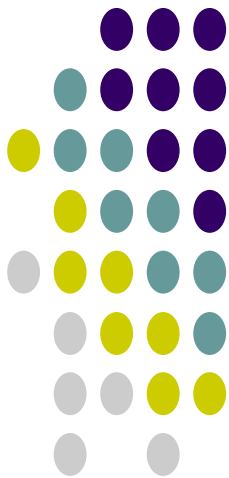
Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (PERUBAHAN)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	1.405.990.000,00	1.282.215.833,00	-123.774.167,00	91,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.405.990.000,00	1.282.215.833,00	-123.774.167,00	91,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.537.600,00	424.334.192,00	-34.203.408,00	92,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.186.350,00	33.064.300,00	-122.050,00	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.186.350,00	33.064.300,00	-122.050,00	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.186.350,00	33.064.300,00	-122.050,00	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.294.850,00	15.662.000,00	-9.632.850,00	61,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.294.850,00	15.662.000,00	-9.632.850,00	61,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.294.850,00	15.662.000,00	-9.632.850,00	61,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.056.400,00	375.607.892,00	-24.448.508,00	93,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.056.400,00	375.607.892,00	-24.448.508,00	93,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.056.400,00	375.607.892,00	-24.448.508,00	93,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.585.000,00	134.278.000,00	-307.000,00	99,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.585.000,00	134.278.000,00	-307.000,00	99,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	134.585.000,00	134.278.000,00	-307.000,00	99,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.585.000,00	34.500.000,00	-85.000,00	99,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.778.000,00	-222.000,00	99,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.622.000,00	119.312.000,00	-25.310.000,00	82,50
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.072.000,00	16.012.000,00	-2.060.000,00	88,60
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.072.000,00	16.012.000,00	-2.060.000,00	88,60
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.072.000,00	16.012.000,00	-2.060.000,00	88,60
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.550.000,00	103.300.000,00	-23.250.000,00	81,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	126.550.000,00	103.300.000,00	-23.250.000,00	81,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.750.000,00	80.500.000,00	-23.250.000,00	77,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.625.000,00	30.789.500,00	-4.835.500,00	86,43
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.545.000,00	23.282.100,00	-4.262.900,00	84,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.545.000,00	23.282.100,00	-4.262.900,00	84,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.545.000,00	23.282.100,00	-4.262.900,00	84,52
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.080.000,00	7.507.400,00	-572.600,00	92,91

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.080.000,00	7.507.400,00	-572.600,00	92,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	7.507.400,00	-572.600,00	92,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	632.620.400,00	573.502.141,00	-59.118.259,00	90,66
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	285.428.000,00	247.811.640,00	-37.616.360,00	86,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	285.428.000,00	247.811.640,00	-37.616.360,00	86,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.428.000,00	247.811.640,00	-37.616.360,00	86,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	162.854.000,00	141.625.081,00	-21.228.919,00	86,96
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.854.000,00	141.625.081,00	-21.228.919,00	86,96
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.854.000,00	141.625.081,00	-21.228.919,00	86,96
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	184.338.400,00	184.065.420,00	-272.980,00	99,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	184.338.400,00	184.065.420,00	-272.980,00	99,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.338.400,00	184.065.420,00	-272.980,00	99,85

Kelodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI





BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	4.304.455.000,00	3.897.356.922,00	-407.098.078,00	90,54
	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.312.700.000,00	1.116.500.000,00	-196.200.000,00	85,05
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.312.700.000,00	1.116.500.000,00	-196.200.000,00	85,05
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	838.700.000,00	705.500.000,00	-133.200.000,00	84,12
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	838.700.000,00	705.500.000,00	-133.200.000,00	84,12
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	838.700.000,00	705.500.000,00	-133.200.000,00	84,12
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	474.000.000,00	411.000.000,00	-63.000.000,00	86,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	474.000.000,00	411.000.000,00	-63.000.000,00	86,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.000.000,00	411.000.000,00	-63.000.000,00	86,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.991.755.000,00	2.780.856.922,00	-210.898.078,00	92,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.945.000,00	92.572.500,00	-3.372.500,00	96,48
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.127.000,00	58.040.000,00	-2.087.000,00	96,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	60.127.000,00	58.040.000,00	-2.087.000,00	96,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.127.000,00	58.040.000,00	-2.087.000,00	96,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.818.000,00	34.532.500,00	-1.285.500,00	96,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	35.818.000,00	34.532.500,00	-1.285.500,00	96,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.818.000,00	34.532.500,00	-1.285.500,00	96,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.044.510.000,00	1.885.762.422,00	-158.747.578,00	92,24
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.325.140.000,00	1.305.147.923,00	-19.992.077,00	98,49
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.890.000,00	38.550.300,00	-2.339.700,00	94,28
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.890.000,00	38.550.300,00	-2.339.700,00	94,28
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.284.250.000,00	1.266.597.623,00	-17.652.377,00	98,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.209.250.000,00	1.191.707.550,00	-17.542.450,00	98,55
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.890.073,00	-109.927,00	99,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	719.370.000,00	580.614.499,00	-138.755.501,00	80,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	719.370.000,00	580.614.499,00	-138.755.501,00	80,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.370.000,00	580.614.499,00	-138.755.501,00	80,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.300.000,00	787.522.000,00	-48.778.000,00	94,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000,00	35.550.000,00	-4.050.000,00	89,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	35.550.000,00	-4.050.000,00	89,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	35.550.000,00	-4.050.000,00	89,77

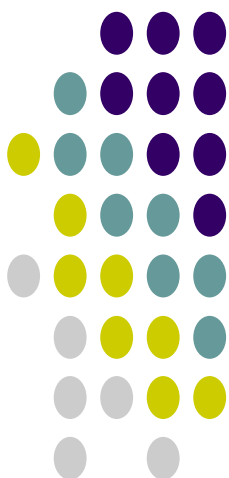
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.470.000,00	741.742.000,00	-44.728.000,00	94,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	786.470.000,00	741.742.000,00	-44.728.000,00	94,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.000.000,00	-3.800.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.670.000,00	722.742.000,00	-40.928.000,00	94,64
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 20245



BUPATI MOROWALI UTARA

DELLIS JULKARSON HEHI



BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	1.343.497.450,00	1.026.032.907,00	-317.464.543,00	76,37
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	384.750.450,00	235.627.450,00	-149.123.000,00	61,24
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	188.682.200,00	96.848.000,00	-91.834.200,00	51,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	29.742.500,00	4.150.500,00	-25.592.000,00	13,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.742.500,00	4.150.500,00	-25.592.000,00	13,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.742.500,00	4.150.500,00	-25.592.000,00	13,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	158.939.700,00	92.697.500,00	-66.242.200,00	58,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.939.700,00	92.697.500,00	-66.242.200,00	58,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.939.700,00	92.697.500,00	-66.242.200,00	58,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	196.068.250,00	138.779.450,00	-57.288.800,00	70,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	112.303.900,00	91.782.500,00	-20.521.400,00	81,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	112.303.900,00	91.782.500,00	-20.521.400,00	81,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.303.900,00	91.782.500,00	-20.521.400,00	81,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	83.764.350,00	46.996.950,00	-36.767.400,00	56,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.764.350,00	46.996.950,00	-36.767.400,00	56,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.764.350,00	46.996.950,00	-36.767.400,00	56,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	958.747.000,00	790.405.457,00	-168.341.543,00	82,44
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.797.000,00	459.095.457,00	-113.701.543,00	80,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.289.000,00	112.149.200,00	-15.139.800,00	88,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.469.000,00	35.369.200,00	-99.800,00	99,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.469.000,00	35.369.200,00	-99.800,00	99,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	91.820.000,00	76.780.000,00	-15.040.000,00	83,62
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.820.000,00	76.780.000,00	-15.040.000,00	83,62
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.048.600,00	28.145.800,00	-1.902.800,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.048.600,00	28.145.800,00	-1.902.800,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.048.600,00	28.145.800,00	-1.902.800,00	93,67
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.459.400,00	318.800.457,00	-96.658.943,00	76,73

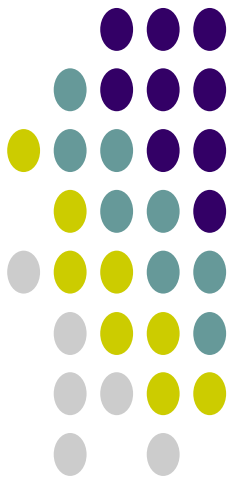
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	415.459.400,00	318.800.457,00	-96.658.943,00	76,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.459.400,00	318.800.457,00	-96.658.943,00	76,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.850.000,00	77.010.000,00	-840.000,00	98,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.850.000,00	77.010.000,00	-840.000,00	98,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	77.850.000,00	77.010.000,00	-840.000,00	98,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.850.000,00	77.010.000,00	-840.000,00	98,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.100.000,00	254.300.000,00	-53.800.000,00	82,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.100.000,00	254.300.000,00	-53.800.000,00	82,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	308.100.000,00	254.300.000,00	-53.800.000,00	82,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.000.000,00	-3.800.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.300.000,00	235.300.000,00	-50.000.000,00	82,47

Kolonodale, 28 Agustus 2025



BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	2.192.869.800,00	1.865.445.118,00	-327.424.682,00	85,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.192.869.800,00	1.865.445.118,00	-327.424.682,00	85,07
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.615.000,00	722.384.877,00	-98.230.123,00	88,03
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.601.900,00	20.601.900,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.601.900,00	20.601.900,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	42.308.750,00	42.308.750,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.308.750,00	42.308.750,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	215.651.350,00	185.666.350,00	-29.985.000,00	86,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	215.651.350,00	185.666.350,00	-29.985.000,00	86,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.651.350,00	185.666.350,00	-29.985.000,00	86,10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.053.000,00	473.807.877,00	-68.245.123,00	87,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	542.053.000,00	473.807.877,00	-68.245.123,00	87,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.053.000,00	473.807.877,00	-68.245.123,00	87,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.848.000,00	256.548.000,00	-77.300.000,00	76,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.548.000,00	215.248.000,00	-77.300.000,00	73,58
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	292.548.000,00	215.248.000,00	-77.300.000,00	73,58
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	22.800.000,00	19.000.000,00	-3.800.000,00	83,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.748.000,00	196.248.000,00	-73.500.000,00	72,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000,00	35.615.000,00	-385.000,00	98,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	35.615.000,00	-385.000,00	98,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.615.000,00	-385.000,00	98,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.615.000,00	-385.000,00	98,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.002.406.800,00	850.897.241,00	-151.509.559,00	84,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	283.936.400,00	216.708.544,00	-67.227.856,00	76,32

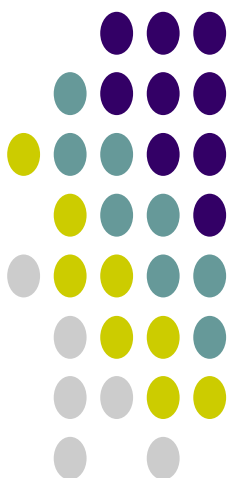
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	283.936.400,00	216.708.544,00	-67.227.856,00	76,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.936.400,00	216.708.544,00	-67.227.856,00	76,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	446.990.800,00	395.249.680,00	-51.741.120,00	88,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	446.990.800,00	395.249.680,00	-51.741.120,00	88,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.990.800,00	395.249.680,00	-51.741.120,00	88,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	271.479.600,00	238.939.017,00	-32.540.583,00	88,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	271.479.600,00	238.939.017,00	-32.540.583,00	88,01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.479.600,00	238.939.017,00	-32.540.583,00	88,01

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA



DELIS SULKARSON HEHI



SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan SEKRETARIAT DPRD
Organisasi SEKRETARIAT DPRD

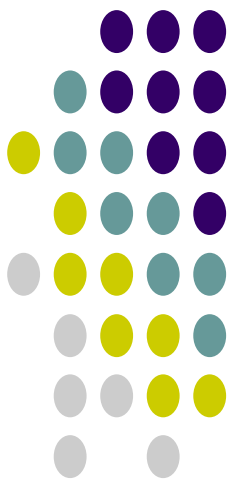
KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	44.251.658.661,00	41.505.992.211,00	(2.745.666.450,00)	93,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.878.701.350,00	14.153.569.737,00	(1.725.131.613,00)	89,14
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.008.819.000,00	910.108.670,00	(98.710.330,00)	90,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.008.819.000,00	910.108.670,00	(98.710.330,00)	90,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	1.008.819.000,00	910.108.670,00	(98.710.330,00)	90,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.008.819.000,00	910.108.670,00	(98.710.330,00)	90,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	984.823.750,00	942.755.874,00	(42.067.876,00)	95,73
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001			Pembahasan KUA dan PPAS	984.823.750,00	942.755.874,00	(42.067.876,00)	95,73
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	984.823.750,00	942.755.874,00	(42.067.876,00)	95,73
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	984.823.750,00	942.755.874,00	(42.067.876,00)	95,73
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	2.521.319.700,00	1.784.971.056,00	(736.348.644,00)	70,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001			Orientasi DPRD	601.262.100,00	406.900.424,00	(194.361.676,00)	67,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1		BELANJA OPERASI	601.262.100,00	406.900.424,00	(194.361.676,00)	67,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	601.262.100,00	406.900.424,00	(194.361.676,00)	67,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD	1.920.057.600,00	1.378.070.632,00	(541.986.968,00)	71,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1		BELANJA OPERASI	1.920.057.600,00	1.378.070.632,00	(541.986.968,00)	71,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.920.057.600,00	1.378.070.632,00	(541.986.968,00)	71,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.581.889.300,00	1.219.119.600,00	(362.769.700,00)	77,07
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah	586.468.600,00	301.282.200,00	(285.186.400,00)	51,37
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1		BELANJA OPERASI	586.468.600,00	301.282.200,00	(285.186.400,00)	51,37
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	586.468.600,00	301.282.200,00	(285.186.400,00)	51,37
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003			Pelaksanaan Reses	995.420.700,00	917.837.400,00	(77.583.300,00)	92,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1		BELANJA OPERASI	995.420.700,00	917.837.400,00	(77.583.300,00)	92,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	995.420.700,00	917.837.400,00	(77.583.300,00)	92,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	9.781.849.600,00	9.296.614.537,00	(485.235.063,00)	95,04
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.781.849.600,00	9.296.614.537,00	(485.235.063,00)	95,04
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1		BELANJA OPERASI	9.781.849.600,00	9.296.614.537,00	(485.235.063,00)	95,04
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	9.781.849.600,00	9.296.614.537,00	(485.235.063,00)	95,04
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.372.957.311,00	27.352.422.474,00	(1.020.534.837,00)	96,40
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.133.540,00	2.878.151.028,00	(110.982.512,00)	96,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.133.540,00	2.878.151.028,00	(110.982.512,00)	96,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.989.133.540,00	2.878.151.028,00	(110.982.512,00)	96,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.989.133.540,00	2.878.151.028,00	(110.982.512,00)	96,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	402.741.000,00	391.110.390,00	(11.630.610,00)	97,11
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	121.619.000,00	113.754.000,00	(7.865.000,00)	93,53
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010	5.1		BELANJA OPERASI	121.619.000,00	113.754.000,00	(7.865.000,00)	93,53

4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.619.000,00	113.754.000,00	(7.865.000,00)	93,53
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	281.122.000,00	277.356.390,00	(3.765.610,00)	98,66
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	281.122.000,00	277.356.390,00	(3.765.610,00)	98,66
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.122.000,00	277.356.390,00	(3.765.610,00)	98,66
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.114.276.390,00	4.800.120.626,00	(314.155.764,00)	93,86
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	240.548.120,00	240.064.048,00	(484.072,00)	99,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.548.120,00	40.504.048,00	(44.072,00)	99,89
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.548.120,00	40.504.048,00	(44.072,00)	99,89
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.560.000,00	(440.000,00)	99,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.560.000,00	(440.000,00)	99,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.976.566.720,00	2.837.143.163,00	(139.423.557,00)	95,32
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	167.066.720,00	143.293.163,00	(23.773.557,00)	85,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.066.720,00	143.293.163,00	(23.773.557,00)	85,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.809.500.000,00	2.693.850.000,00	(115.650.000,00)	95,88
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.809.500.000,00	2.693.850.000,00	(115.650.000,00)	95,88
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.755.500,00	196.301.900,00	(4.453.600,00)	97,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.755.500,00	196.301.900,00	(4.453.600,00)	97,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.755.500,00	196.301.900,00	(4.453.600,00)	97,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.128.950,00	84.100.000,00	(28.950,00)	99,97
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	84.128.950,00	84.100.000,00	(28.950,00)	99,97
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.128.950,00	84.100.000,00	(28.950,00)	99,97
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.554.500,00	52.765.300,00	(789.200,00)	98,53
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	53.554.500,00	52.765.300,00	(789.200,00)	98,53
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.554.500,00	52.765.300,00	(789.200,00)	98,53
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.558.722.600,00	1.389.746.215,00	(168.976.385,00)	89,16
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.558.722.600,00	1.389.746.215,00	(168.976.385,00)	89,16
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.722.600,00	1.389.746.215,00	(168.976.385,00)	89,16
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.300.000,00	175.565.000,00	(25.735.000,00)	87,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.300.000,00	175.565.000,00	(25.735.000,00)	87,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	201.300.000,00	175.565.000,00	(25.735.000,00)	87,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.300.000,00	175.565.000,00	(25.735.000,00)	87,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.464.106.600,00	3.272.180.116,00	(191.926.484,00)	94,46
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.250.000,00	542.057.008,00	(12.192.992,00)	97,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	554.250.000,00	542.057.008,00	(12.192.992,00)	97,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.250.000,00	542.057.008,00	(12.192.992,00)	97,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.588.600,00	495.736.000,00	(4.852.600,00)	99,03
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	500.588.600,00	495.736.000,00	(4.852.600,00)	99,03
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.588.600,00	495.736.000,00	(4.852.600,00)	99,03
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.409.268.000,00	2.234.387.108,00	(174.880.892,00)	92,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.409.268.000,00	2.234.387.108,00	(174.880.892,00)	92,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	77.160.000,00	69.960.000,00	(7.200.000,00)	90,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.332.108.000,00	2.164.427.108,00	(167.680.892,00)	92,81
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.575.598.250,00	2.571.428.093,00	(4.170.157,00)	99,84
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.700.000,00	84.637.929,00	(62.071,00)	99,93
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.700.000,00	84.637.929,00	(62.071,00)	99,93

4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	84.637.929,00	(62.071,00)	99,93
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.650.850,00	182.950.814,00	(700.036,00)	99,62
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.650.850,00	182.950.814,00	(700.036,00)	99,62
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.650.850,00	182.950.814,00	(700.036,00)	99,62
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.620.000,00	93.615.000,00	(5.000,00)	99,99
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	93.620.000,00	93.615.000,00	(5.000,00)	99,99
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.620.000,00	93.615.000,00	(5.000,00)	99,99
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.213.627.400,00	2.210.224.350,00	(3.403.050,00)	99,85
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.153.627.400,00	1.152.382.350,00	(1.245.050,00)	99,89
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.627.400,00	1.152.382.350,00	(1.245.050,00)	99,89
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.060.000.000,00	1.057.842.000,00	(2.158.000,00)	99,80
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	785.000.000,00	783.537.000,00	(1.463.000,00)	99,81
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	275.000.000,00	274.305.000,00	(695.000,00)	99,75
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.972.185.981,00	11.781.055.221,00	(191.130.760,00)	98,40
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.259.685.981,00	11.119.341.721,00	(140.344.260,00)	98,75
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.259.685.981,00	11.119.341.721,00	(140.344.260,00)	98,75
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.259.685.981,00	11.119.341.721,00	(140.344.260,00)	98,75
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	650.000.000,00	640.000.000,00	(10.000.000,00)	98,46
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000,00	640.000.000,00	(10.000.000,00)	98,46
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	640.000.000,00	(10.000.000,00)	98,46
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	62.500.000,00	21.713.500,00	(40.786.500,00)	34,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.500.000,00	21.713.500,00	(40.786.500,00)	34,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	21.713.500,00	(40.786.500,00)	34,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.653.615.550,00	1.482.812.000,00	(170.803.550,00)	89,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	608.615.550,00	532.812.000,00	(75.803.550,00)	87,54
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	608.615.550,00	532.812.000,00	(75.803.550,00)	87,54
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.615.550,00	532.812.000,00	(75.803.550,00)	87,54
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.045.000.000,00	950.000.000,00	(95.000.000,00)	90,91
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.045.000.000,00	950.000.000,00	(95.000.000,00)	90,91
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.000.000,00	950.000.000,00	(95.000.000,00)	90,91

Kelendale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELISULKARSON HEHI



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	473.524.290,00	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	473.524.290,00	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	53.474.630,00	53.474.630,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0004		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	53.474.630,00	53.474.630,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.474.630,00	53.474.630,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.474.630,00	53.474.630,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	35.749.360,00	35.685.860,00	(63.500,00)	99,82
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0006		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	35.749.360,00	35.685.860,00	(63.500,00)	99,82
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.749.360,00	35.685.860,00	(63.500,00)	99,82
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.749.360,00	35.685.860,00	(63.500,00)	99,82
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	384.300.300,00	384.087.900,00	(212.400,00)	99,94
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	287.376.400,00	287.164.000,00	(212.400,00)	99,93
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	287.376.400,00	287.164.000,00	(212.400,00)	99,93
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.376.400,00	287.164.000,00	(212.400,00)	99,93
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	96.923.900,00	96.923.900,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.923.900,00	96.923.900,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.923.900,00	96.923.900,00	0,00	100,00

Kelonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



Urusan Pemerintahan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan PERENCANAAN
Organisasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



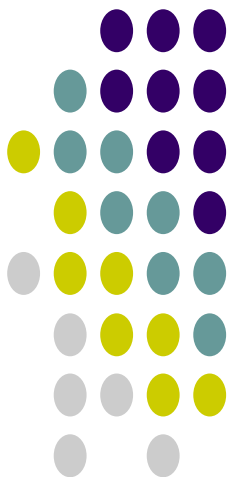
KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	9.283.872.097,00	8.918.155.495,00	(365.716.602,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.051.813.510,00	1.987.010.509,00	(64.803.001,00)	96,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.468.073.450,00	1.436.398.122,00	(31.675.328,00)	97,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	39.798.000,00	39.512.000,00	(286.000,00)	99,28
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1		BELANJA OPERASI	39.798.000,00	39.512.000,00	(286.000,00)	99,28
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	39.798.000,00	39.512.000,00	(286.000,00)	99,28
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	157.125.200,00	156.896.023,00	(229.177,00)	99,85
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1		BELANJA OPERASI	157.125.200,00	156.896.023,00	(229.177,00)	99,85
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	157.125.200,00	156.896.023,00	(229.177,00)	99,85
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.271.150.250,00	1.239.990.099,00	(31.160.151,00)	97,55
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	1.271.150.250,00	1.239.990.099,00	(31.160.151,00)	97,55
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.271.150.250,00	1.239.990.099,00	(31.160.151,00)	97,55
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.874.260,00	19.039.100,00	(15.835.160,00)	54,59
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.511.760,00	7.456.000,00	(4.055.760,00)	64,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	11.511.760,00	7.456.000,00	(4.055.760,00)	64,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	11.511.760,00	7.456.000,00	(4.055.760,00)	64,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11.832.500,00	7.920.000,00	(3.912.500,00)	66,93
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	11.832.500,00	7.920.000,00	(3.912.500,00)	66,93
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	11.832.500,00	7.920.000,00	(3.912.500,00)	66,93
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11.530.000,00	3.663.100,00	(7.866.900,00)	31,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1		BELANJA OPERASI	11.530.000,00	3.663.100,00	(7.866.900,00)	31,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	11.530.000,00	3.663.100,00	(7.866.900,00)	31,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	548.865.800,00	531.573.287,00	(17.292.513,00)	96,85
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	376.338.150,00	360.879.778,00	(15.458.372,00)	95,89
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1		BELANJA OPERASI	376.338.150,00	360.879.778,00	(15.458.372,00)	95,89
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	376.338.150,00	360.879.778,00	(15.458.372,00)	95,89
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002			Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	48.497.500,00	48.435.221,00	(62.279,00)	99,87
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1		BELANJA OPERASI	48.497.500,00	48.435.221,00	(62.279,00)	99,87
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	48.497.500,00	48.435.221,00	(62.279,00)	99,87
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	124.030.150,00	122.258.288,00	(1.771.862,00)	98,57
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1		BELANJA OPERASI	124.030.150,00	122.258.288,00	(1.771.862,00)	98,57
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	124.030.150,00	122.258.288,00	(1.771.862,00)	98,57
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	325.237.280,00	293.420.633,00	(31.816.647,00)	90,22
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	159.866.420,00	144.998.433,00	(14.867.987,00)	90,70

5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.299.950,00	20.004.300,00	(1.295.650,00)	93,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.299.950,00	20.004.300,00	(1.295.650,00)	93,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.299.950,00	20.004.300,00	(1.295.650,00)	93,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	138.566.470,00	124.994.133,00	(13.572.337,00)	90,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	138.566.470,00	124.994.133,00	(13.572.337,00)	90,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.566.470,00	124.994.133,00	(13.572.337,00)	90,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	83.396.760,00	75.119.100,00	(8.277.660,00)	90,07
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.105.920,00	36.044.600,00	(6.061.320,00)	85,60
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.105.920,00	36.044.600,00	(6.061.320,00)	85,60
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.105.920,00	36.044.600,00	(6.061.320,00)	85,60
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41.290.840,00	39.074.500,00	(2.216.340,00)	94,63
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.290.840,00	39.074.500,00	(2.216.340,00)	94,63
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.290.840,00	39.074.500,00	(2.216.340,00)	94,63
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	81.974.100,00	73.303.100,00	(8.671.000,00)	89,42
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.780.100,00	10.901.500,00	(878.600,00)	92,54
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.780.100,00	10.901.500,00	(878.600,00)	92,54
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.780.100,00	10.901.500,00	(878.600,00)	92,54
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	70.194.000,00	62.401.600,00	(7.792.400,00)	88,90
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.194.000,00	62.401.600,00	(7.792.400,00)	88,90
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.194.000,00	62.401.600,00	(7.792.400,00)	88,90
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.906.821.307,00	6.637.724.353,00	(269.096.954,00)	96,10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.102.943.379,00	3.919.546.570,00	(183.396.809,00)	95,53
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.102.943.379,00	3.919.546.570,00	(183.396.809,00)	95,53
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.102.943.379,00	3.919.546.570,00	(183.396.809,00)	95,53
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.102.943.379,00	3.919.546.570,00	(183.396.809,00)	95,53
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.305.500,00	123.520.124,00	(12.785.376,00)	90,62
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.947.500,00	41.947.500,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.947.500,00	41.947.500,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.947.500,00	41.947.500,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.358.000,00	81.572.624,00	(12.785.376,00)	86,45
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	94.358.000,00	81.572.624,00	(12.785.376,00)	86,45
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.358.000,00	81.572.624,00	(12.785.376,00)	86,45
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	982.422.544,00	972.992.440,00	(9.430.104,00)	99,04
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.294.000,00	19.329.500,00	(3.964.500,00)	82,98
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.294.000,00	19.329.500,00	(3.964.500,00)	82,98
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.294.000,00	19.329.500,00	(3.964.500,00)	82,98
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.139.372,00	87.136.040,00	(5.003.332,00)	94,57
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.632.728,00	74.636.040,00	(4.996.688,00)	93,73
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.632.728,00	74.636.040,00	(4.996.688,00)	93,73
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.506.644,00	12.500.000,00	(6.644,00)	99,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.506.644,00	12.500.000,00	(6.644,00)	99,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.363.172,00	68.334.400,00	(28.772,00)	99,96
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.363.172,00	68.334.400,00	(28.772,00)	99,96
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.363.172,00	68.334.400,00	(28.772,00)	99,96

5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	798.626.000,00	798.192.500,00	(433.500,00)	99,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	798.626.000,00	798.192.500,00	(433.500,00)	99,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.626.000,00	798.192.500,00	(433.500,00)	99,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.000.000,00	104.000.000,00	(10.000.000,00)	91,23
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.000.000,00	104.000.000,00	(10.000.000,00)	91,23
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	114.000.000,00	104.000.000,00	(10.000.000,00)	91,23
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.000.000,00	104.000.000,00	(10.000.000,00)	91,23
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.397.019.884,00	1.384.521.494,00	(12.498.390,00)	99,11
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.394.284,00	61.183.564,00	(210.720,00)	99,66
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.394.284,00	61.183.564,00	(210.720,00)	99,66
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.394.284,00	61.183.564,00	(210.720,00)	99,66
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.805.600,00	510.773.000,00	(10.032.600,00)	98,07
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	520.805.600,00	510.773.000,00	(10.032.600,00)	98,07
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.805.600,00	510.773.000,00	(10.032.600,00)	98,07
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	814.820.000,00	812.564.930,00	(2.255.070,00)	99,72
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	814.820.000,00	812.564.930,00	(2.255.070,00)	99,72
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.060.000,00	761.804.930,00	(2.255.070,00)	99,70
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.130.000,00	133.143.725,00	(40.986.275,00)	76,46
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	92.744.425,00	(17.255.575,00)	84,31
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	92.744.425,00	(17.255.575,00)	84,31
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	92.744.425,00	(17.255.575,00)	84,31
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.930.000,00	15.199.300,00	(23.730.700,00)	39,04
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.930.000,00	15.199.300,00	(23.730.700,00)	39,04
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.930.000,00	15.199.300,00	(23.730.700,00)	39,04
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00

Koronadale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELUSILKARSON HEHI



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.428.165.238.843,00	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.059.614.000,00	1.386.852.773.248,00	2.793.159.248,00	100,20
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	5.737.708.823,00	113,01
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	298.892.780.096,96	276.658.924.509,00	-22.233.855.587,96	92,56
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	246.217.295.728,00	240.654.154.999,00	-5.563.140.729,00	97,74
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.058.785.656,00	2.707.926.648,00	-1.350.859.008,00	66,72
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	507.746.656,00	170.492.862,00	-337.253.794,00	33,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	507.746.656,00	170.492.862,00	-337.253.794,00	33,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.746.656,00	170.492.862,00	-337.253.794,00	33,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	350.153.000,00	116.200.000,00	-233.953.000,00	33,19
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	269.153.000,00	86.500.000,00	-182.653.000,00	32,14
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.153.000,00	86.500.000,00	-182.653.000,00	32,14
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	81.000.000,00	29.700.000,00	-51.300.000,00	36,67
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	29.700.000,00	-51.300.000,00	36,67
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	439.559.900,00	86.590.000,00	-352.969.900,00	19,70
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	439.559.900,00	86.590.000,00	-352.969.900,00	19,70
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.559.900,00	86.590.000,00	-352.969.900,00	19,70
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.761.326.100,00	2.334.643.786,00	-426.682.314,00	84,55
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.761.326.100,00	2.334.643.786,00	-426.682.314,00	84,55
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.761.326.100,00	2.334.643.786,00	-426.682.314,00	84,55
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	809.792.370,00	751.963.405,00	-57.828.965,00	92,86
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	359.080.000,00	346.047.931,00	-13.032.069,00	96,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	334.080.000,00	321.547.931,00	-12.532.069,00	96,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.080.000,00	321.547.931,00	-12.532.069,00	96,25

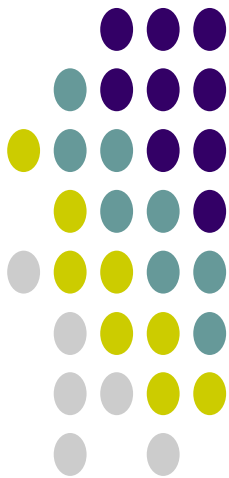
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.500.000,00	-500.000,00	98,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.500.000,00	-500.000,00	98,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	450.712.370,00	405.915.474,00	-44.796.896,00	90,06
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	408.712.370,00	393.915.474,00	-14.796.896,00	96,38
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.712.370,00	393.915.474,00	-14.796.896,00	96,38
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	42.000.000,00	12.000.000,00	-30.000.000,00	28,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	12.000.000,00	-30.000.000,00	28,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.124.250.890,00	812.242.114,00	-312.008.776,00	72,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	298.986.050,00	146.795.868,00	-152.190.182,00	49,10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	298.986.050,00	146.795.868,00	-152.190.182,00	49,10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.986.050,00	146.795.868,00	-152.190.182,00	49,10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	825.264.840,00	665.446.246,00	-159.818.594,00	80,63
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	750.498.190,00	622.946.246,00	-127.551.944,00	83,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.498.190,00	622.946.246,00	-127.551.944,00	83,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	74.766.650,00	42.500.000,00	-32.266.650,00	56,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.766.650,00	42.500.000,00	-32.266.650,00	56,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	240.054.065.612,00	236.232.343.033,00	-3.821.722.579,00	98,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0004		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	-218.339.489,00	97,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	-218.339.489,00	97,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0004	5.1.03	Belanja Bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	-218.339.489,00	97,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	231.212.860.952,00	227.609.477.862,00	-3.603.383.090,00	98,44
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	-1.992.114.000,00	36,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	-1.992.114.000,00	36,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	-1.611.269.090,00	99,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	-667.165.236,00	99,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	170.401.200,00	149.679.799,00	-20.721.401,00	87,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	170.401.200,00	149.679.799,00	-20.721.401,00	87,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	170.401.200,00	149.679.799,00	-20.721.401,00	87,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.401.200,00	149.679.799,00	-20.721.401,00	87,84
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.284.043.000,00	3.980.517.780,00	-1.303.525.220,00	75,33
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.284.043.000,00	3.980.517.780,00	-1.303.525.220,00	75,33
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.086.726.000,00	913.773.780,00	-172.952.220,00	84,09
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.086.726.000,00	913.773.780,00	-172.952.220,00	84,09
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.726.000,00	913.773.780,00	-172.952.220,00	84,09
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	4.197.317.000,00	3.066.744.000,00	-1.130.573.000,00	73,06
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	325.217.000,00	222.244.000,00	-102.973.000,00	68,34
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.217.000,00	222.244.000,00	-102.973.000,00	68,34

5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.872.100.000,00	2.844.500.000,00	-1.027.600.000,00	73,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.872.100.000,00	2.844.500.000,00	-1.027.600.000,00	73,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.391.441.368,96	32.024.251.730,00	-15.367.189.638,96	67,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.021.981.810,96	27.822.040.650,00	-14.199.941.160,96	66,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.820.230.127,96	27.723.155.650,00	-14.097.074.477,96	66,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.820.230.127,96	27.723.155.650,00	-14.097.074.477,96	66,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	41.820.230.127,96	27.723.155.650,00	-14.097.074.477,96	66,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	201.751.683,00	98.885.000,00	-102.866.683,00	49,01
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	201.751.683,00	98.885.000,00	-102.866.683,00	49,01
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.751.683,00	98.885.000,00	-102.866.683,00	49,01
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	413.827.500,00	187.659.000,00	-226.168.500,00	45,35
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.912.500,00	79.440.000,00	-472.500,00	99,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.912.500,00	79.440.000,00	-472.500,00	99,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.912.500,00	79.440.000,00	-472.500,00	99,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	333.915.000,00	108.219.000,00	-225.696.000,00	32,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	333.915.000,00	108.219.000,00	-225.696.000,00	32,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.915.000,00	108.219.000,00	-225.696.000,00	32,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.632.054.204,00	1.570.172.440,00	-61.881.764,00	96,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.902.354,00	790.466.042,00	-50.436.312,00	94,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.016.354,00	174.397.042,00	-29.619.312,00	85,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.016.354,00	174.397.042,00	-29.619.312,00	85,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	636.886.000,00	616.069.000,00	-20.817.000,00	96,73
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	439.090.000,00	418.490.000,00	-20.600.000,00	95,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.796.000,00	197.579.000,00	-217.000,00	99,89
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.866.850,00	76.633.400,00	-4.233.450,00	94,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	80.866.850,00	76.633.400,00	-4.233.450,00	94,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.866.850,00	76.633.400,00	-4.233.450,00	94,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.285.000,00	703.072.998,00	-7.212.002,00	98,98
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	710.285.000,00	703.072.998,00	-7.212.002,00	98,98
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.285.000,00	703.072.998,00	-7.212.002,00	98,98
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.047.787.854,00	2.194.220.015,00	-853.567.839,00	71,99
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.951.024,00	159.762.000,00	-2.189.024,00	98,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.951.024,00	159.762.000,00	-2.189.024,00	98,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.951.024,00	159.762.000,00	-2.189.024,00	98,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.453.500,00	227.502.015,00	-2.951.485,00	98,72
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	230.453.500,00	227.502.015,00	-2.951.485,00	98,72
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.453.500,00	227.502.015,00	-2.951.485,00	98,72
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.655.383.330,00	1.806.956.000,00	-848.427.330,00	68,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.655.383.330,00	1.806.956.000,00	-848.427.330,00	68,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	268.800.000,00	208.800.000,00	-60.000.000,00	77,68

5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.583.330,00	1.598.156.000,00	-788.427.330,00	66,96
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.790.000,00	250.159.625,00	-25.630.375,00	90,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.000.000,00	174.453.125,00	-19.546.875,00	89,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	194.000.000,00	174.453.125,00	-19.546.875,00	89,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	174.453.125,00	-19.546.875,00	89,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.790.000,00	75.706.500,00	-6.083.500,00	92,56
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	81.790.000,00	75.706.500,00	-6.083.500,00	92,56
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.790.000,00	75.706.500,00	-6.083.500,00	92,56
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	105.030.664.284,00	103.274.177.940,49	-1.756.486.343,51	98,33
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	-33.374.343,51	99,94
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	-33.374.343,51	99,94
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	-1.723.112.000,00	96,73
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	-1.723.112.000,00	55,38
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	0,00	100,00

Kelapaodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELISJILKARSON HEHI





BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan KEUANGAN
Organisasi BADAN PENDAPATAN DAERAH

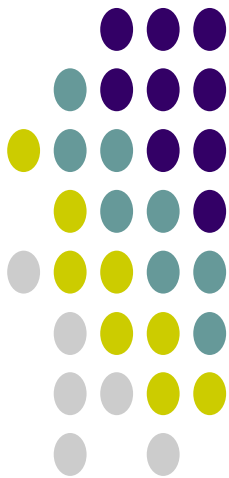
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	139.516.592.817,00	91.607.384.513,11	-47.909.208.303,89	65,66
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.516.592.817,00	91.607.384.513,11	-47.909.208.303,89	65,66
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.01	Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.520.072.718,00	-44.354.927.282,00	62,69
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	-632.407.834,00	89,21
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.780.036.817,00	11.858.163.629,11	-2.921.873.187,89	80,23
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	12.288.149.944,00	11.556.987.476,00	-731.162.468,00	94,05
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.753.683.892,00	1.738.851.912,00	-14.831.980,00	99,15
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.753.683.892,00	1.738.851.912,00	-14.831.980,00	99,15
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	74.999.600,00	74.028.240,00	-971.360,00	98,70
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.999.600,00	74.028.240,00	-971.360,00	98,70
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.600,00	74.028.240,00	-971.360,00	98,70
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	433.354.350,00	433.225.450,00	-128.900,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	433.354.350,00	433.225.450,00	-128.900,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.354.350,00	433.225.450,00	-128.900,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	99.739.500,00	99.727.650,00	-11.850,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.739.500,00	99.727.650,00	-11.850,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.739.500,00	99.727.650,00	-11.850,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	21.894.500,00	21.874.000,00	-20.500,00	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.894.500,00	21.874.000,00	-20.500,00	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.894.500,00	21.874.000,00	-20.500,00	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	91.540.650,00	91.301.250,00	-239.400,00	99,74
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	91.540.650,00	91.301.250,00	-239.400,00	99,74
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.540.650,00	91.301.250,00	-239.400,00	99,74
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	103.506.700,00	102.745.922,00	-760.778,00	99,26
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	103.506.700,00	102.745.922,00	-760.778,00	99,26
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.506.700,00	102.745.922,00	-760.778,00	99,26
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	123.234.800,00	122.388.000,00	-846.800,00	99,31
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	123.234.800,00	122.388.000,00	-846.800,00	99,31
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.234.800,00	122.388.000,00	-846.800,00	99,31
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	85.763.950,00	85.359.350,00	-404.600,00	99,53

5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI		85.763.950,00	85.359.350,00	-404.600,00	99,53
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		85.763.950,00	85.359.350,00	-404.600,00	99,53
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		104.643.100,00	104.187.480,00	-455.620,00	99,56
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI		104.643.100,00	104.187.480,00	-455.620,00	99,56
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		104.643.100,00	104.187.480,00	-455.620,00	99,56
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		103.370.442,00	92.636.310,00	-10.734.132,00	89,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI		103.370.442,00	92.636.310,00	-10.734.132,00	89,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		103.370.442,00	92.636.310,00	-10.734.132,00	89,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah		235.282.150,00	235.213.100,00	-69.050,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI		235.282.150,00	235.213.100,00	-69.050,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		235.282.150,00	235.213.100,00	-69.050,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		118.127.680,00	118.071.980,00	-55.700,00	99,95
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI		118.127.680,00	118.071.980,00	-55.700,00	99,95
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		118.127.680,00	118.071.980,00	-55.700,00	99,95
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		72.955.270,00	72.944.770,00	-10.500,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI		72.955.270,00	72.944.770,00	-10.500,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		72.955.270,00	72.944.770,00	-10.500,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		34.541.100,00	34.501.900,00	-39.200,00	99,89
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI		34.541.100,00	34.501.900,00	-39.200,00	99,89
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		34.541.100,00	34.501.900,00	-39.200,00	99,89
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		50.730.100,00	50.646.510,00	-83.590,00	99,84
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI		50.730.100,00	50.646.510,00	-83.590,00	99,84
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		50.730.100,00	50.646.510,00	-83.590,00	99,84
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.534.466.052,00	9.818.135.564,00	-716.330.488,00	93,20
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.633.325.811,00	6.962.452.447,00	-670.873.364,00	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.633.325.811,00	6.962.452.447,00	-670.873.364,00	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI		7.633.325.811,00	6.962.452.447,00	-670.873.364,00	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai		7.633.325.811,00	6.962.452.447,00	-670.873.364,00	91,21
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.879.593.013,00	1.877.656.158,00	-1.936.855,00	99,90
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.283.333,00	4.278.872,00	-4.461,00	99,90
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI		4.283.333,00	4.278.872,00	-4.461,00	99,90
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.283.333,00	4.278.872,00	-4.461,00	99,90
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		607.616.130,00	606.618.864,00	-997.266,00	99,84
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI		156.616.130,00	156.559.636,00	-56.494,00	99,96
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		156.616.130,00	156.559.636,00	-56.494,00	99,96
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL		451.000.000,00	450.059.228,00	-940.772,00	99,79
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		252.500.000,00	252.316.700,00	-183.300,00	99,93
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		198.500.000,00	197.742.528,00	-757.472,00	99,62
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		365.207.750,00	365.060.124,00	-147.626,00	99,96
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI		365.207.750,00	365.060.124,00	-147.626,00	99,96
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		365.207.750,00	365.060.124,00	-147.626,00	99,96
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		902.485.800,00	901.698.298,00	-787.502,00	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI		902.485.800,00	901.698.298,00	-787.502,00	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		902.485.800,00	901.698.298,00	-787.502,00	99,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00

5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.617.228,00	720.322.286,00	-36.294.942,00	95,20
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.577.228,00	82.708.286,00	-9.868.942,00	89,34
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.577.228,00	82.708.286,00	-9.868.942,00	89,34
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.577.228,00	82.708.286,00	-9.868.942,00	89,34
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000,00	16.142.000,00	-3.658.000,00	81,53
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000,00	16.142.000,00	-3.658.000,00	81,53
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	16.142.000,00	-3.658.000,00	81,53
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.240.000,00	621.472.000,00	-22.768.000,00	96,47
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	644.240.000,00	621.472.000,00	-22.768.000,00	96,47
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	74.760.000,00	74.760.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.480.000,00	546.712.000,00	-22.768.000,00	96,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.930.000,00	226.704.673,00	-7.225.327,00	96,91
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.500.000,00	46.495.923,00	-4.077,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.500.000,00	46.495.923,00	-4.077,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	46.495.923,00	-4.077,00	99,99
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.430.000,00	180.208.750,00	-7.221.250,00	96,15
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	187.430.000,00	180.208.750,00	-7.221.250,00	96,15
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.430.000,00	180.208.750,00	-7.221.250,00	96,15

Kelodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS FULKARSON HEHI



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan KEPEGAWAIAN
Organisasi BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.132.288.209,00	7.725.664.975,00	(406.623.234,00)	95,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.238.979.300,00	2.077.353.845,00	(161.625.455,00)	92,78
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	963.511.800,00	939.435.195,00	(24.076.605,00)	97,50
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	713.511.800,00	712.786.295,00	(725.505,00)	99,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	713.511.800,00	712.786.295,00	(725.505,00)	99,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.511.800,00	712.786.295,00	(725.505,00)	99,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	250.000.000,00	226.648.900,00	(23.351.100,00)	90,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	226.648.900,00	(23.351.100,00)	90,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	226.648.900,00	(23.351.100,00)	90,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	124.267.500,00	117.703.650,00	(6.563.850,00)	94,72
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	43.200.000,00	37.253.950,00	(5.946.050,00)	86,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	37.253.950,00	(5.946.050,00)	86,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	37.253.950,00	(5.946.050,00)	86,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	81.067.500,00	80.449.700,00	(617.800,00)	99,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.067.500,00	80.449.700,00	(617.800,00)	99,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.067.500,00	80.449.700,00	(617.800,00)	99,24
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.151.200.000,00	1.020.215.000,00	(130.985.000,00)	88,62
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		Pengelolaan Assessment Center	218.200.000,00	217.288.000,00	(912.000,00)	99,58
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	218.200.000,00	217.288.000,00	(912.000,00)	99,58
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.200.000,00	217.288.000,00	(912.000,00)	99,58
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	933.000.000,00	802.927.000,00	(130.073.000,00)	86,06
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	933.000.000,00	802.927.000,00	(130.073.000,00)	86,06
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.000.000,00	802.927.000,00	(130.073.000,00)	86,06
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.893.308.909,00	5.648.311.130,00	(244.997.779,00)	95,84
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.759.099.089,00	4.554.836.945,00	(204.262.144,00)	95,71
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.759.099.089,00	4.554.836.945,00	(204.262.144,00)	95,71
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.759.099.089,00	4.554.836.945,00	(204.262.144,00)	95,71
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.759.099.089,00	4.554.836.945,00	(204.262.144,00)	95,71
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.747.500,00	74.560.780,00	(2.186.720,00)	97,15
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.257.500,00	15.859.000,00	(1.398.500,00)	91,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.257.500,00	15.859.000,00	(1.398.500,00)	91,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.257.500,00	15.859.000,00	(1.398.500,00)	91,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.490.000,00	58.701.780,00	(788.220,00)	98,68
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	59.490.000,00	58.701.780,00	(788.220,00)	98,68
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.490.000,00	58.701.780,00	(788.220,00)	98,68
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.242.320,00	699.215.405,00	(18.026.915,00)	97,49

5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.312.320,00	292.180.449,00	(15.131.871,00)	95,08
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.992.320,00	93.931.649,00	(60.671,00)	99,94
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.992.320,00	93.931.649,00	(60.671,00)	99,94
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	213.320.000,00	198.248.800,00	(15.071.200,00)	92,93
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.320.000,00	198.248.800,00	(71.200,00)	99,96
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	11.670.000,00	(130.000,00)	98,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.670.000,00	(130.000,00)	98,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.670.000,00	(130.000,00)	98,90
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.530.000,00	367.783.956,00	(2.746.044,00)	99,26
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	370.530.000,00	367.783.956,00	(2.746.044,00)	99,26
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.530.000,00	367.783.956,00	(2.746.044,00)	99,26
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.600.000,00	27.581.000,00	(19.000,00)	99,93
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.581.000,00	(19.000,00)	99,93
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.581.000,00	(19.000,00)	99,93
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.480.000,00	275.042.000,00	(12.438.000,00)	95,67
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.320.000,00	267.882.000,00	(12.438.000,00)	95,56
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	280.320.000,00	267.882.000,00	(12.438.000,00)	95,56
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	65.160.000,00	53.160.000,00	(12.000.000,00)	81,58
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.160.000,00	214.722.000,00	(438.000,00)	99,80
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.740.000,00	44.656.000,00	(8.084.000,00)	84,67
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000,00	28.286.000,00	(3.714.000,00)	88,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	28.286.000,00	(3.714.000,00)	88,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	28.286.000,00	(3.714.000,00)	88,39
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.340.000,00	4.970.000,00	(4.370.000,00)	53,21
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.340.000,00	4.970.000,00	(4.370.000,00)	53,21
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.340.000,00	4.970.000,00	(4.370.000,00)	53,21
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00

Kelonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS IULKARSON HEHI



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

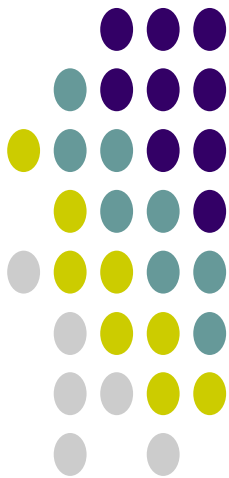
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	(59.279.492,00)	97,68

Kotabondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



INSPEKTORAT DAERAH



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

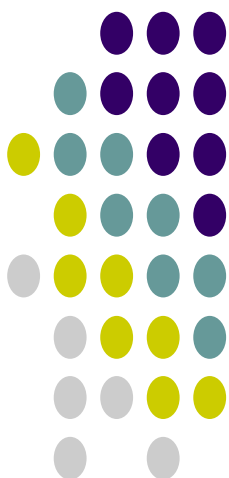
Urusan Pemerintahan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.271.516.550,00	4.515.136.193,00	(756.380.357,00)	85,65
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.271.516.550,00	4.515.136.193,00	(756.380.357,00)	85,65
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.288.539.250,00	1.136.144.104,00	(152.395.146,00)	88,17
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	1.288.539.250,00	1.136.144.104,00	(152.395.146,00)	88,17
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.288.539.250,00	1.136.144.104,00	(152.395.146,00)	88,17
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.379.326.000,00	2.860.175.950,00	(519.150.050,00)	84,64
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	3.379.326.000,00	2.860.175.950,00	(519.150.050,00)	84,64
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	3.379.326.000,00	2.860.175.950,00	(519.150.050,00)	84,64
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004			Reviu Laporan Keuangan	603.651.300,00	518.816.139,00	(84.835.161,00)	85,95
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1		BELANJA OPERASI	603.651.300,00	518.816.139,00	(84.835.161,00)	85,95
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	603.651.300,00	518.816.139,00	(84.835.161,00)	85,95
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.138.455.549,00	10.414.779.583,00	(723.675.966,00)	93,50
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.272.200,00	166.223.000,00	(5.049.200,00)	97,05
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.272.200,00	166.223.000,00	(5.049.200,00)	97,05
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	171.272.200,00	166.223.000,00	(5.049.200,00)	97,05
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	171.272.200,00	166.223.000,00	(5.049.200,00)	97,05
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.769.445.961,00	5.511.601.691,00	(257.844.270,00)	95,53
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.767.812.111,00	5.511.601.691,00	(256.210.420,00)	95,56
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	5.767.812.111,00	5.511.601.691,00	(256.210.420,00)	95,56
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	5.767.812.111,00	5.511.601.691,00	(256.210.420,00)	95,56
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.633.850,00	0,00	(1.633.850,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1		BELANJA OPERASI	1.633.850,00	0,00	(1.633.850,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.633.850,00	0,00	(1.633.850,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.138.576.250,00	1.112.589.242,00	(25.987.008,00)	97,72
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110.960.000,00	110.010.000,00	(950.000,00)	99,14
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1		BELANJA OPERASI	110.960.000,00	110.010.000,00	(950.000,00)	99,14
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	110.960.000,00	110.010.000,00	(950.000,00)	99,14
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.003.778.750,00	1.002.579.242,00	(1.199.508,00)	99,88
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1		BELANJA OPERASI	1.003.778.750,00	1.002.579.242,00	(1.199.508,00)	99,88
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.003.778.750,00	1.002.579.242,00	(1.199.508,00)	99,88
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.837.500,00	0,00	(23.837.500,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	5.1		BELANJA OPERASI	23.837.500,00	0,00	(23.837.500,00)	0,00

6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.837.500,00	0,00	(23.837.500,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.080.015.138,00	2.733.739.250,00	(346.275.888,00)	88,76
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.962.388,00	0,00	(7.962.388,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.962.388,00	0,00	(7.962.388,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.962.388,00	0,00	(7.962.388,00)	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.203.909.250,00	1.935.719.750,00	(268.189.500,00)	87,83
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.586.750,00	74.543.750,00	(71.043.000,00)	51,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.586.750,00	74.543.750,00	(71.043.000,00)	51,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.058.322.500,00	1.861.176.000,00	(197.146.500,00)	90,42
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.759.762.500,00	1.562.676.000,00	(197.086.500,00)	88,80
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.560.000,00	298.500.000,00	(60.000,00)	99,98
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.637.500,00	19.692.500,00	(10.945.000,00)	64,28
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.637.500,00	19.692.500,00	(10.945.000,00)	64,28
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.637.500,00	19.692.500,00	(10.945.000,00)	64,28
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	837.506.000,00	778.327.000,00	(59.179.000,00)	92,93
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	837.506.000,00	778.327.000,00	(59.179.000,00)	92,93
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.506.000,00	778.327.000,00	(59.179.000,00)	92,93
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.300.000,00	574.020.000,00	(65.280.000,00)	89,79
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.900.000,00	78.488.000,00	(13.412.000,00)	85,41
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.900.000,00	78.488.000,00	(13.412.000,00)	85,41
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.900.000,00	78.488.000,00	(13.412.000,00)	85,41
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.400.000,00	495.532.000,00	(51.868.000,00)	90,52
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	547.400.000,00	495.532.000,00	(51.868.000,00)	90,52
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	39.320.000,00	32.760.000,00	(6.560.000,00)	83,32
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.080.000,00	462.772.000,00	(45.308.000,00)	91,08
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.846.000,00	316.606.400,00	(23.239.600,00)	93,16
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.500.000,00	227.506.400,00	(8.993.600,00)	96,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	236.500.000,00	227.506.400,00	(8.993.600,00)	96,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.500.000,00	227.506.400,00	(8.993.600,00)	96,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.250.000,00	14.100.000,00	(14.150.000,00)	49,91
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.250.000,00	14.100.000,00	(14.150.000,00)	49,91
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.250.000,00	14.100.000,00	(14.150.000,00)	49,91
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.096.000,00	75.000.000,00	(96.000,00)	99,87
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.096.000,00	75.000.000,00	(96.000,00)	99,87
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.096.000,00	75.000.000,00	(96.000,00)	99,87

Kelapaadale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



KECAMATAN PETASIA



Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi KECAMATAN PETASIA

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

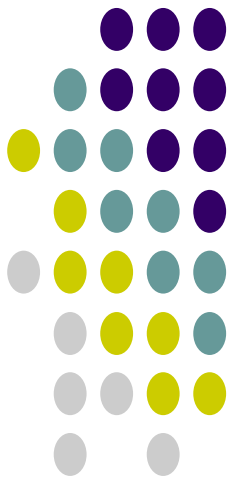


KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5		BELANJA DAERAH	8.997.786.886,00	8.830.469.649,00	(167.317.237,00)	98,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.997.786.886,00	8.830.469.649,00	(167.317.237,00)	98,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.670.393.205,00	4.550.940.429,00	(119.452.776,00)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.670.393.205,00	4.550.940.429,00	(119.452.776,00)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	4.670.393.205,00	4.550.940.429,00	(119.452.776,00)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	4.670.393.205,00	4.550.940.429,00	(119.452.776,00)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.044.247.681,00	3.030.436.220,00	(13.811.461,00)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.530.091.781,00	2.516.303.770,00	(13.788.011,00)	99,46
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	1.000.729.560,00	998.181.788,00	(2.547.772,00)	99,75
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.000.729.560,00	998.181.788,00	(2.547.772,00)	99,75
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2		BELANJA MODAL	1.529.362.221,00	1.518.121.982,00	(11.240.239,00)	99,27
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.226.250,00	264.023.732,00	(202.518,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	287.080.000,00	281.490.250,00	(5.589.750,00)	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	978.055.971,00	972.608.000,00	(5.447.971,00)	99,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.387.900,00	22.387.600,00	(300,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	22.387.900,00	22.387.600,00	(300,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	22.387.900,00	22.387.600,00	(300,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.768.000,00	491.744.850,00	(23.150,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	491.768.000,00	491.744.850,00	(23.150,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	491.768.000,00	491.744.850,00	(23.150,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.146.000,00	1.224.093.000,00	(34.053.000,00)	97,29
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1		BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.116.000,00	60.363.000,00	(753.000,00)	98,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1		BELANJA OPERASI	61.116.000,00	60.363.000,00	(753.000,00)	98,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	61.116.000,00	60.363.000,00	(753.000,00)	98,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.630.000,00	1.157.330.000,00	(33.300.000,00)	97,20

7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.190.630.000,00	1.157.330.000,00	(33.300.000,00)	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	41.160.000,00	41.160.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.149.470.000,00	1.116.170.000,00	(33.300.000,00)	97,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 2025





KECAMATAN PETASIA BARAT



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
KECAMATAN PETASIA BARAT

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

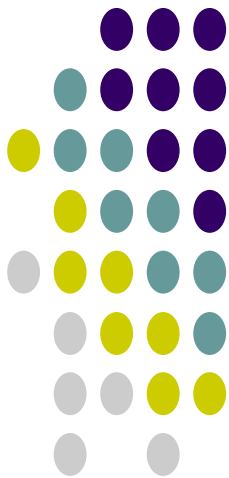


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.766.269.490,00	2.581.243.408,00	(185.026.082,00)	93,31
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.200.000,00	27.410.000,00	(1.790.000,00)	93,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.200.000,00	27.410.000,00	(1.790.000,00)	93,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.200.000,00	27.410.000,00	(1.790.000,00)	93,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	27.410.000,00	(1.790.000,00)	93,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	27.410.000,00	(1.790.000,00)	93,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.069.490,00	2.553.833.408,00	(183.236.082,00)	93,31
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.272.016,00	2.119.758.072,00	(160.513.944,00)	92,96
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.280.272.016,00	2.119.758.072,00	(160.513.944,00)	92,96
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.280.272.016,00	2.119.758.072,00	(160.513.944,00)	92,96
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.280.272.016,00	2.119.758.072,00	(160.513.944,00)	92,96
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.410.474,00	207.188.336,00	(13.222.138,00)	94,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.678.174,00	23.678.174,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.771.924,00	15.771.924,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.771.924,00	15.771.924,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.906.250,00	7.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.906.250,00	7.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.787.700,00	5.787.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.787.700,00	5.787.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.787.700,00	5.787.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.944.600,00	177.722.462,00	(13.222.138,00)	93,08
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	190.944.600,00	177.722.462,00	(13.222.138,00)	93,08
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.944.600,00	177.722.462,00	(13.222.138,00)	93,08
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.387.000,00	217.387.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.170.000,00	17.170.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.170.000,00	17.170.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.170.000,00	17.170.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.217.000,00	11.217.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.217.000,00	11.217.000,00	0,00	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.217.000,00	11.217.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000.000,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	50,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	50,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	50,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	50,00

Kotonedale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEUS JULI KARSON HEHI





KECAMATAN PETASIA TIMUR



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
KECAMATAN PETASIA TIMUR

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

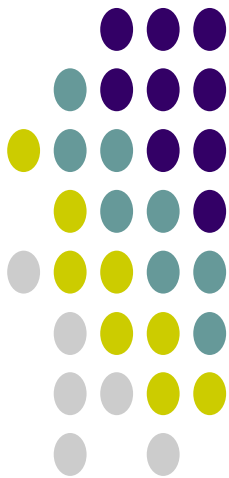


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	3.476.049.885,00	3.311.832.785,00	(164.217.100,00)	95,28
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	91.955.000,00	91.955.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	91.955.000,00	91.955.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.955.000,00	91.955.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	91.955.000,00	91.955.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.955.000,00	91.955.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.384.094.885,00	3.219.877.785,00	(164.217.100,00)	95,15
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.481.449.930,00	2.320.371.090,00	(161.078.840,00)	93,51
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.449.930,00	2.320.371.090,00	(161.078.840,00)	93,51
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.481.449.930,00	2.320.371.090,00	(161.078.840,00)	93,51
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.481.449.930,00	2.320.371.090,00	(161.078.840,00)	93,51
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.943.530,00	624.805.270,00	(3.138.260,00)	99,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507.448.580,00	504.310.320,00	(3.138.260,00)	99,38
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	194.448.580,00	193.999.320,00	(449.260,00)	99,77
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.448.580,00	193.999.320,00	(449.260,00)	99,77
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	313.000.000,00	310.311.000,00	(2.689.000,00)	99,14
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	298.000.000,00	295.311.000,00	(2.689.000,00)	99,10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.500.950,00	11.500.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.500.950,00	11.500.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.950,00	11.500.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.994.000,00	108.994.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	108.994.000,00	108.994.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.994.000,00	108.994.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.701.425,00	251.701.425,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.131.425,00	11.131.425,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.131.425,00	11.131.425,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.131.425,00	11.131.425,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DESI JULKARSON HEHI



KECAMATAN BUNGKU UTARA



Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi KECAMATAN BUNGKU UTARA

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

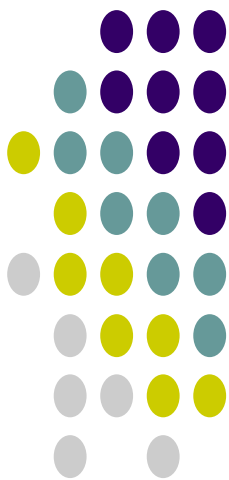


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	4.971.425.078,00	4.788.892.752,00	(182.532.326,00)	96,33
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.050.000,00	50.040.000,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.050.000,00	50.040.000,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50.050.000,00	50.040.000,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.050.000,00	50.040.000,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.050.000,00	50.040.000,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.921.375.078,00	4.738.852.752,00	(182.522.326,00)	96,29
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.033.425.178,00	3.851.235.245,00	(182.189.933,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.033.425.178,00	3.851.235.245,00	(182.189.933,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.033.425.178,00	3.851.235.245,00	(182.189.933,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.033.425.178,00	3.851.235.245,00	(182.189.933,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.465.100,00	300.367.178,00	(97.922,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.000.000,00	112.920.000,00	(80.000,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	113.000.000,00	112.920.000,00	(80.000,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.000.000,00	112.920.000,00	(80.000,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.687.100,00	10.685.000,00	(2.100,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.687.100,00	10.685.000,00	(2.100,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.687.100,00	10.685.000,00	(2.100,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.778.000,00	176.762.178,00	(15.822,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	176.778.000,00	176.762.178,00	(15.822,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.778.000,00	176.762.178,00	(15.822,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.624.800,00	364.570.329,00	(54.471,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.720.000,00	15.715.000,00	(5.000,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	15.715.000,00	(5.000,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.715.000,00	(5.000,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.394.000,00	146.371.329,00	(22.671,00)	99,98

7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.394.000,00	146.371.329,00	(22.671,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.394.000,00	146.371.329,00	(22.671,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.510.800,00	202.484.000,00	(26.800,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	202.510.800,00	202.484.000,00	(26.800,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.510.800,00	169.484.000,00	(26.800,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.560.000,00	182.380.000,00	(180.000,00)	99,90
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.560.000,00	182.380.000,00	(180.000,00)	99,90
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.560.000,00	32.555.000,00	(5.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.560.000,00	32.555.000,00	(5.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.825.000,00	(175.000,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.825.000,00	(175.000,00)	99,88

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



KECAMATAN MAMOSALATO



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
KECAMATAN MAMOSALATO

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

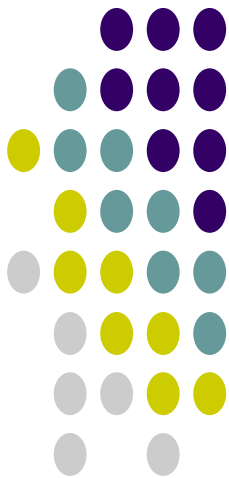


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	2.950.348.938,00	2.743.870.301,00	(206.478.637,00)	93,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	155.956.000,00	155.950.000,00	(6.000,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	155.956.000,00	155.950.000,00	(6.000,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.170.000,00	16.170.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	139.786.000,00	139.780.000,00	(6.000,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	139.786.000,00	139.780.000,00	(6.000,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.786.000,00	139.780.000,00	(6.000,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.794.392.938,00	2.587.920.301,00	(206.472.637,00)	92,61
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.330.348.938,00	2.125.873.747,00	(204.475.191,00)	91,23
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.348.938,00	2.125.873.747,00	(204.475.191,00)	91,23
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.330.348.938,00	2.125.873.747,00	(204.475.191,00)	91,23
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.330.348.938,00	2.125.873.747,00	(204.475.191,00)	91,23
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.262.500,00	201.010.054,00	(1.252.446,00)	99,38
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.190.750,00	25.190.750,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.284.500,00	17.284.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.284.500,00	17.284.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.906.250,00	7.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.906.250,00	7.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.046.750,00	3.046.750,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.046.750,00	3.046.750,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.046.750,00	3.046.750,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.025.000,00	172.772.554,00	(1.252.446,00)	99,28
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	174.025.000,00	172.772.554,00	(1.252.446,00)	99,28
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.025.000,00	172.772.554,00	(1.252.446,00)	99,28
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.080.000,00	208.335.000,00	(745.000,00)	99,64
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.160.000,00	18.425.000,00	(735.000,00)	96,16
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.160.000,00	18.425.000,00	(735.000,00)	96,16
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.160.000,00	18.425.000,00	(735.000,00)	96,16
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.120.000,00	189.110.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	189.120.000,00	189.110.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.920.000,00	160.910.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.981.500,00	18.981.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	18.981.500,00	18.981.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.981.500,00	18.981.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.981.500,00	18.981.500,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEUS JULKARSON HEHI





KECAMATAN SOYO JAYA



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
KECAMATAN SOYO JAYA

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

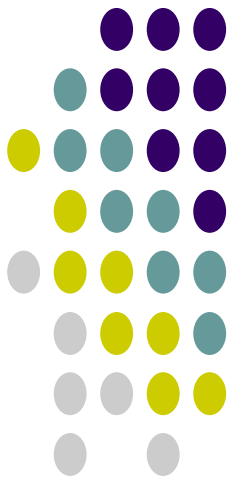


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	2.446.706.899,00	2.208.096.204,00	(238.610.695,00)	90,25
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.912.000,00	100.906.000,00	(6.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.912.000,00	100.906.000,00	(6.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.912.000,00	100.906.000,00	(6.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.912.000,00	100.906.000,00	(6.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.912.000,00	100.906.000,00	(6.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.345.794.899,00	2.107.190.204,00	(238.604.695,00)	89,83
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.938.706.899,00	1.701.236.648,00	(237.470.251,00)	87,75
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.938.706.899,00	1.701.236.648,00	(237.470.251,00)	87,75
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.938.706.899,00	1.701.236.648,00	(237.470.251,00)	87,75
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.938.706.899,00	1.701.236.648,00	(237.470.251,00)	87,75
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.439.100,00	192.367.350,00	(1.071.750,00)	99,45
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.698.750,00	56.688.750,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.406.600,00	27.396.600,00	(10.000,00)	99,96
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.406.600,00	27.396.600,00	(10.000,00)	99,96
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	29.292.150,00	29.292.150,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.292.150,00	29.292.150,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.548.950,00	10.515.250,00	(33.700,00)	99,68
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.548.950,00	10.515.250,00	(33.700,00)	99,68
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.548.950,00	10.515.250,00	(33.700,00)	99,68
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.191.400,00	125.163.350,00	(1.028.050,00)	99,19
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	126.191.400,00	125.163.350,00	(1.028.050,00)	99,19
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.191.400,00	125.163.350,00	(1.028.050,00)	99,19
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.000.000,00	173.938.000,00	(62.000,00)	99,96
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.938.000,00	(62.000,00)	99,48

7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.938.000,00	(62.000,00)	99,48
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.938.000,00	(62.000,00)	99,48
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.648.900,00	39.648.206,00	(694,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.612.500,00	37.611.806,00	(694,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.612.500,00	37.611.806,00	(694,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.612.500,00	37.611.806,00	(694,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.036.400,00	2.036.400,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.036.400,00	2.036.400,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.400,00	2.036.400,00	0,00	100,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DEKIS JULKARSON HEHI



KECAMATAN LEMBO



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
KECAMATAN LEMBO

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

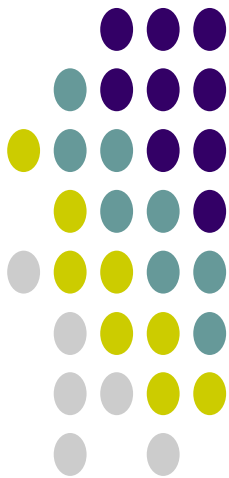
TAHUN ANGGARAN 2024



KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5		BELANJA DAERAH	3.665.007.082,00	3.493.148.248,00	(171.858.834,00)	95,31
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	445.103.000,00	444.783.900,00	(319.100,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	445.103.000,00	444.783.900,00	(319.100,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	445.103.000,00	444.783.900,00	(319.100,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI	445.103.000,00	444.783.900,00	(319.100,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	445.103.000,00	444.783.900,00	(319.100,00)	99,93
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.219.904.082,00	3.048.364.348,00	(171.539.734,00)	94,67
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.788.917.182,00	2.620.546.459,00	(168.370.723,00)	93,96
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.917.182,00	2.620.546.459,00	(168.370.723,00)	93,96
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.788.917.182,00	2.620.546.459,00	(168.370.723,00)	93,96
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.788.917.182,00	2.620.546.459,00	(168.370.723,00)	93,96
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.505.200,00	46.404.189,00	(3.101.011,00)	93,74
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.505.200,00	46.404.189,00	(3.101.011,00)	93,74
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1		BELANJA OPERASI	49.505.200,00	46.404.189,00	(3.101.011,00)	93,74
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	49.505.200,00	46.404.189,00	(3.101.011,00)	93,74
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.761.700,00	116.693.700,00	(68.000,00)	99,94
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.227.300,00	59.227.300,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	23.321.050,00	23.321.050,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	23.321.050,00	23.321.050,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2		BELANJA MODAL	35.906.250,00	35.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.906.250,00	35.906.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.284.400,00	52.216.400,00	(68.000,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	52.284.400,00	52.216.400,00	(68.000,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	52.284.400,00	52.216.400,00	(68.000,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2		BELANJA MODAL	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.300.000,00	216.300.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1		BELANJA OPERASI	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.100.000,00	176.100.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	176.100.000,00	176.100.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEKIS YULKARSON HEHI



KECAMATAN LEMBO RAYA



Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan KECAMATAN
 Organisasi KECAMATAN LEMBO RAYA



PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	2.669.233.771,00	2.573.230.150,00	(96.003.621,00)	96,40
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.662.693.771,00	2.566.690.150,00	(96.003.621,00)	96,39
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.052.002.276,00	1.966.078.066,00	(85.924.210,00)	95,81
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.052.002.276,00	1.966.078.066,00	(85.924.210,00)	95,81
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.052.002.276,00	1.966.078.066,00	(85.924.210,00)	95,81
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.052.002.276,00	1.966.078.066,00	(85.924.210,00)	95,81
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.721.495,00	346.642.084,00	(10.079.411,00)	97,17
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.274.295,00	180.118.295,00	(156.000,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	123.968.045,00	123.812.045,00	(156.000,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.968.045,00	123.812.045,00	(156.000,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	56.306.250,00	56.306.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.306.250,00	56.306.250,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.235.200,00	6.235.200,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.235.200,00	6.235.200,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.235.200,00	6.235.200,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.212.000,00	160.288.589,00	(9.923.411,00)	94,17
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	170.212.000,00	160.288.589,00	(9.923.411,00)	94,17
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.212.000,00	160.288.589,00	(9.923.411,00)	94,17
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.000,00	246.320.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00

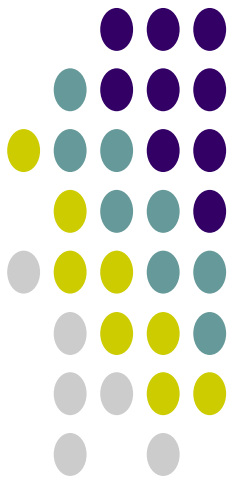
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.200.000,00	240.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	240.200.000,00	240.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelendale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA



DELISULKARSON HEHI



KECAMATAN MORI ATAS



Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan
 Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
 KECAMATAN
 KECAMATAN MORI ATAS

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

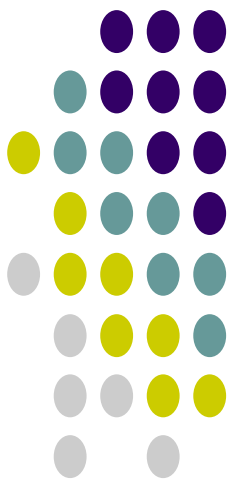


KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5		BELANJA DAERAH	3.551.285.625,00	3.392.351.208,00	(158.934.417,00)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188.500.000,00	188.327.000,00	(173.000,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	188.500.000,00	188.327.000,00	(173.000,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	188.500.000,00	188.327.000,00	(173.000,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2		BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.827.000,00	(173.000,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.827.000,00	(173.000,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.362.785.625,00	3.204.024.208,00	(158.761.417,00)	95,28
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.953.285.787,00	2.794.656.393,00	(158.629.394,00)	94,63
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.953.285.787,00	2.794.656.393,00	(158.629.394,00)	94,63
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.953.285.787,00	2.794.656.393,00	(158.629.394,00)	94,63
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.953.285.787,00	2.794.656.393,00	(158.629.394,00)	94,63
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1		BELANJA OPERASI	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.804.838,00	153.672.815,00	(132.023,00)	99,91
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.229.838,00	40.229.838,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	19.229.838,00	19.229.838,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	19.229.838,00	19.229.838,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2		BELANJA MODAL	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.490.000,00	108.357.977,00	(132.023,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	108.490.000,00	108.357.977,00	(132.023,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	108.490.000,00	108.357.977,00	(132.023,00)	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.320.000,00	230.320.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1		BELANJA OPERASI	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.180.000,00	210.180.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	210.180.000,00	210.180.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.780.000,00	186.780.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



KECAMATAN MORI UTARA



Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Organisasi

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
KECAMATAN MORI UTARA

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

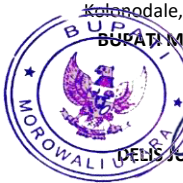
TAHUN ANGGARAN 2024

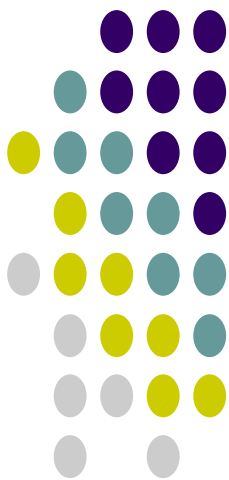


KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	3.122.565.161,00	2.700.496.756,00	(422.068.405,00)	86,48
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.085.565.161,00	2.663.496.756,00	(422.068.405,00)	86,32
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.568.211,00	2.280.515.806,00	(422.052.405,00)	84,38
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.702.568.211,00	2.280.515.806,00	(422.052.405,00)	84,38
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.702.568.211,00	2.280.515.806,00	(422.052.405,00)	84,38
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.702.568.211,00	2.280.515.806,00	(422.052.405,00)	84,38
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.609.950,00	123.609.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.980.950,00	5.980.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.980.950,00	5.980.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.950,00	5.980.950,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.004.000,00	115.004.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	115.004.000,00	115.004.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.004.000,00	115.004.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.387.000,00	244.371.000,00	(16.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.633.000,00	7.633.000,00	0,00	100,00

7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.633.000,00	7.633.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.633.000,00	7.633.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.754.000,00	50.738.000,00	(16.000,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.754.000,00	50.738.000,00	(16.000,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.754.000,00	50.738.000,00	(16.000,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025

 **BUPATI MOROWALI UTARA**
DELIS JULKARSON HEHI



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH



Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	51.757.784.062,00	50.955.687.468,99	(802.096.593,01)	98,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.251.571.500,00	1.248.684.500,00	(2.887.000,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.251.571.500,00	1.248.684.500,00	(2.887.000,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka	1.251.571.500,00	1.248.684.500,00	(2.887.000,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.251.571.500,00	1.248.684.500,00	(2.887.000,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.571.500,00	1.248.684.500,00	(2.887.000,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	44.067.766.663,00	43.866.920.876,99	(200.845.786,01)	99,54
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	44.067.766.663,00	43.866.920.876,99	(200.845.786,01)	99,54
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	43.892.026.663,00	43.692.026.662,99	(200.000.000,01)	99,54
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.892.026.663,00	43.692.026.662,99	(200.000.000,01)	99,54
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	43.892.026.663,00	43.692.026.662,99	(200.000.000,01)	99,54
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	152.890.000,00	152.044.214,00	(845.786,00)	99,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	152.890.000,00	152.044.214,00	(845.786,00)	99,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.890.000,00	152.044.214,00	(845.786,00)	99,45
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.357.340.000,00	1.157.340.000,00	(200.000.000,00)	85,27
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.357.340.000,00	1.157.340.000,00	(200.000.000,00)	85,27
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.355.000.000,00	1.155.000.000,00	(200.000.000,00)	85,24

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.355.000.000,00	1.155.000.000,00	(200.000.000,00)	85,24
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.355.000.000,00	1.155.000.000,00	(200.000.000,00)	85,24
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	229.800.000,00	79.100.000,00	(150.700.000,00)	34,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	229.800.000,00	79.100.000,00	(150.700.000,00)	34,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	229.800.000,00	79.100.000,00	(150.700.000,00)	34,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	229.800.000,00	79.100.000,00	(150.700.000,00)	34,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.800.000,00	79.100.000,00	(150.700.000,00)	34,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	616.976.000,00	582.270.000,00	(34.706.000,00)	94,37
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	616.976.000,00	582.270.000,00	(34.706.000,00)	94,37
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	609.720.000,00	575.020.000,00	(34.700.000,00)	94,31
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	609.720.000,00	575.020.000,00	(34.700.000,00)	94,31
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.720.000,00	575.020.000,00	(34.700.000,00)	94,31
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.256.000,00	7.250.000,00	(6.000,00)	99,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.256.000,00	7.250.000,00	(6.000,00)	99,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.256.000,00	7.250.000,00	(6.000,00)	99,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.234.329.899,00	4.021.372.092,00	(212.957.807,00)	94,97
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.268.864.285,00	2.084.563.620,00	(184.300.665,00)	91,88
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.268.864.285,00	2.084.563.620,00	(184.300.665,00)	91,88
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.268.864.285,00	2.084.563.620,00	(184.300.665,00)	91,88
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.268.864.285,00	2.084.563.620,00	(184.300.665,00)	91,88
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.439.301.614,00	1.438.446.050,00	(855.564,00)	99,94
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.944.814,00	474.568.070,00	(376.744,00)	99,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.944.814,00	72.898.070,00	(46.744,00)	99,94
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.944.814,00	72.898.070,00	(46.744,00)	99,94
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	402.000.000,00	401.670.000,00	(330.000,00)	99,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.000.000,00	201.820.000,00	(180.000,00)	99,91
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.850.000,00	(150.000,00)	99,93
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	296.458.800,00	296.084.300,00	(374.500,00)	99,87
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	296.458.800,00	296.084.300,00	(374.500,00)	99,87
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.458.800,00	296.084.300,00	(374.500,00)	99,87
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	667.898.000,00	667.793.680,00	(104.320,00)	99,98
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	667.898.000,00	667.793.680,00	(104.320,00)	99,98
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.898.000,00	667.793.680,00	(104.320,00)	99,98

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.004.000,00	470.962.422,00	(27.041.578,00)	94,57
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.420.000,00	36.953.000,00	(467.000,00)	98,75
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.420.000,00	36.953.000,00	(467.000,00)	98,75
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.420.000,00	36.953.000,00	(467.000,00)	98,75
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.000.000,00	332.750.000,00	(6.250.000,00)	98,16
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	339.000.000,00	332.750.000,00	(6.250.000,00)	98,16
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.000.000,00	332.750.000,00	(6.250.000,00)	98,16
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.584.000,00	101.259.422,00	(20.324.578,00)	83,28
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	121.584.000,00	101.259.422,00	(20.324.578,00)	83,28
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	48.960.000,00	44.880.000,00	(4.080.000,00)	91,67
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.624.000,00	56.379.422,00	(16.244.578,00)	77,63
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.160.000,00	27.400.000,00	(760.000,00)	97,30
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000,00	7.400.000,00	(760.000,00)	90,69
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	7.400.000,00	(760.000,00)	90,69
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	7.400.000,00	(760.000,00)	90,69

Kronodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELISULUKARSON HEHI

REKAPITULASI BELANJA MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN





KAB. MOROWALI UTARA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	597.821.561.970	551.234.844.394,60	270.733.681.844	250.071.486.426,00	0	0,00	0	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	258.557.393.871	219.253.510.655,00	32.499.580.945	30.951.615.789,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	258.557.393.871	219.253.510.655,00	32.499.580.945	30.951.615.789,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	216.690.839.298	185.621.551.625,00	97.925.000	97.925.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.882.750	90.777.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.882.750	90.777.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	204.311.779.771	173.428.849.844,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	204.311.779.771	173.428.849.844,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.323.122.770	1.173.648.131,00	97.925.000	97.925.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	134.163.250	3.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	518.090.000	501.890.000,00	97.925.000	97.925.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.804.400	58.103.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.065.120	610.554.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.864.334.007	10.827.556.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.731.154	106.650.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.669.100	148.669.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.601.933.753	10.572.237.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.720.000	100.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.720.000	15.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	39.470.321.603	31.350.661.607,00	32.351.655.945	30.806.830.789,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.981.661.127	22.143.184.486,00	16.058.573.645	14.520.925.224,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	243.000.000	242.640.000,00	1.381.000.000	1.378.999.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000	249.600.000,00	2.499.825.000	2.473.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25.000.000	0,00	2.172.750.000	2.172.140.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	18.622.466.669	15.999.302.369,00	5.604.362.245	4.097.032.824,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	445.189.960	443.024.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	334.328.498	300.716.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.427.481.370	1.416.684.599,00	4.400.636.400	4.399.403.400,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	347.864.430	345.157.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.286.330.200	3.146.058.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.348.249.150	6.408.232.574,00	16.285.082.300	16.277.905.565,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.897.196.100	4.961.544.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0,00	1.350.140.000	1.346.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0,00	666.403.750	666.320.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	278.154.150	276.495.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	296.457.400	293.814.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	876.441.500	876.377.510,00	14.268.538.550	14.265.335.565,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.351.027.876	2.446.201.097,00	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	20.999.964	20.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	69.795.763	20.264.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.977.393.800	136.212.293,00	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.629.999.692	1.627.527.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.633.000	130.692.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	299.484.400	292.853.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.721.257	217.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	789.383.450	353.043.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	124.266.970	123.526.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	665.116.480	229.516.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	516.778.490	513.099.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	174.946.000	172.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	174.946.000	172.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	341.832.490	340.854.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	341.832.490	340.854.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.879.454.480	1.768.198.333,00	50.000.000	46.860.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.879.454.480	1.768.198.333,00	50.000.000	46.860.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.879.454.480	1.768.198.333,00	50.000.000	46.860.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	258.317.375.359	254.529.258.796,60	66.429.282.071	65.858.274.006,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN DAERAH	165.771.996.394	162.638.825.110,00	20.402.304.327	20.084.802.968,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.648.648.107	118.060.334.647,00	270.180.000	269.444.357,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.664.750	190.953.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.452.000	93.001.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.212.750	97.952.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.455.835.843	103.565.812.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.455.835.843	103.565.812.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	219.060.949,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	219.060.949,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.525.515	1.078.147.409,00	41.180.000	40.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.174.080	8.295.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	41.180.000	40.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.982.635	101.821.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.480.200	169.613.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	772.888.600	798.418.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	39.000.000	39.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	39.000.000	39.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.354.292.000	12.597.902.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.500.000	193.671.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.192.000	239.378.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.840.600.000	12.164.852.573,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.329.999	408.458.669,00	190.000.000	189.694.357,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.000.000	147.113.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.330.000	12.173.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.999.999	249.171.724,00	190.000.000	189.694.357,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.085.669.387	43.637.628.395,00	20.132.124.327	19.815.358.611,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.180.359.125	8.096.183.976,00	20.009.383.427	19.694.913.011,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	747.613.000	709.620.000,00	4.932.640.501	4.892.760.820,00	0	0,00	0	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.600.328.000	1.597.444.599,00	6.055.602.576	5.906.462.391,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	932.409.080	930.939.080,00	9.021.140.350	8.895.689.800,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.818.100	29.852.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.865.190.945	4.828.327.947,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.589.922.012	35.241.268.019,00	116.355.000	115.728.200,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.980.000	19.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.990.400	19.985.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.257.200	9.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.728.400	40.728.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.500.800	15.066.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.405.500	12.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.991.200	17.871.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.991.200	18.031.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	9.934.000	7.471.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	269.006.150	266.843.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.993.600	19.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.997.700	24.251.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.014.700	19.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	829.689.600	829.057.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	50.143.500	48.710.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19.840.000	18.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.331.259.200	20.008.450.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	19.999.750	19.999.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.841.774.015	1.381.160.400,00	116.355.000	115.728.200,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.858.448.200	10.331.735.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.129.976.897	2.111.132.146,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	50.099.200	48.897.200,00	6.385.900	4.717.400,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.099.200	48.897.200,00	6.385.900	4.717.400,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.289.050	251.279.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.999.800	9.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	255.289.250	241.439.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	24.976.400	24.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	24.976.400	24.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.976.400	24.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	336.542.400	247.192.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	316.544.700	227.577.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	316.544.700	227.577.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19.997.700	19.615.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19.997.700	19.615.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	676.160.100	668.706.168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.969.600	22.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.969.600	22.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	651.190.500	645.886.168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	651.190.500	645.886.168,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	78.853.486.735	79.071.569.087,60	44.883.065.444	44.751.673.838,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.647.063.662	69.548.089.290,60	8.792.330.900	8.681.084.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.240.000	253.639.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.240.000	253.639.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.129.900	718.479.729,00	3.107.270.000	3.082.040.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.529.300	82.170.000,00	3.107.270.000	3.082.040.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	417.918.600	407.701.375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.682.000	228.608.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	3.345.285.300	3.342.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	3.345.285.300	3.342.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.718.929.000	17.673.389.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.718.929.000	17.673.389.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	47.628.764.762	50.902.580.875,60	2.339.775.600	2.257.043.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47.628.764.762	50.902.580.875,60	2.339.775.600	2.257.043.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.206.423.073	9.523.479.797,00	36.090.734.544	36.070.589.838,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.206.423.073	9.523.479.797,00	36.090.734.544	36.070.589.838,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.023.752.000	3.746.705.426,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	0	0,00	27.231.650.821	27.229.208.691,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	974.000.000	572.450.000,00	8.859.083.723	8.841.381.147,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.208.671.073	5.204.324.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS LEE	399.767.332	394.684.013,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.458.929	208.421.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.260.929	40.257.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.038.680	1.038.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.136.399	22.136.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.469.850	2.469.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.616.000	14.613.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.000.000	141.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.000.000	141.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.198.000	27.163.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000	21.965.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.198.000	5.198.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	191.308.403	186.262.577,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.308.403	186.262.577,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	191.308.403	186.262.577,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS TOMATA	1.372.059.036	1.323.736.758,00	25.024.500	33.677.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	554.010.114	547.941.041,00	5.427.500	5.427.500,00	0	0,00	0	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.358.114	82.295.614,00	5.427.500	5.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.617.464	3.617.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	5.427.500	5.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.907.450	51.848.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.833.200	26.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.652.000	425.652.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.440.000	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	429.212.000	423.212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	39.993.427,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	39.993.427,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	818.048.922	775.795.717,00	19.597.000	28.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	818.048.922	775.795.717,00	19.597.000	28.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	818.048.922	775.795.717,00	19.597.000	28.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS BETELEME	1.525.360.094	1.431.620.122,00	208.725.000	207.550.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.738.934	607.463.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.738.934	157.463.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.238.934	147.963.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	917.621.160	824.156.607,00	208.725.000	207.550.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	917.621.160	824.156.607,00	208.725.000	207.550.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	917.621.160	824.156.607,00	208.725.000	207.550.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS PETUMBEA	884.196.697	839.433.001,00	127.198.000	127.198.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	335.108.368	335.108.368,00	54.598.000	54.598.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.932.368	140.932.368,00	54.598.000	54.598.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.318.150	89.318.150,00	54.598.000	54.598.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.814.218	10.814.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.800.000	40.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.176.000	194.176.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.240.000	24.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.736.000	29.736.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.200.000	140.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	549.088.329	504.324.633,00	72.600.000	72.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	549.088.329	504.324.633,00	72.600.000	72.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	549.088.329	504.324.633,00	72.600.000	72.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS MOLINO	1.262.337.023	1.155.485.582,00	212.142.500	189.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	213.578.280	180.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.578.280	180.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.578.280	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.000.000	165.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.048.758.743	974.735.582,00	212.142.500	189.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.048.758.743	974.735.582,00	212.142.500	189.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.048.758.743	974.735.582,00	212.142.500	189.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS KOLONODALE	1.770.223.294	1.659.836.332,00	71.682.850	74.602.850,00	0	0,00	0	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	711.370.000	628.332.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.370.000	628.332.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.730.000	90.692.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.640.000	537.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.058.853.294	1.031.504.332,00	71.682.850	74.602.850,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.853.294	1.031.504.332,00	71.682.850	74.602.850,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.058.853.294	1.031.504.332,00	71.682.850	74.602.850,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS BATURUBE	1.872.941.036	1.703.726.579,00	187.300.000	162.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	921.460.000	921.062.000,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.515.600	139.144.000,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.664.500	20.296.500,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.395.000	9.393.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.056.100	19.054.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.400.000	90.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.944.400	751.918.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.240.000	24.227.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.954.400	145.941.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.750.000	581.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	951.481.036	782.664.579,00	162.300.000	137.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	951.481.036	782.664.579,00	162.300.000	137.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	951.481.036	782.664.579,00	162.300.000	137.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS PANCAMAKMUR	755.309.125	695.368.121,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.408.000	262.408.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.408.000	262.408.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.408.000	262.408.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	492.901.125	432.960.121,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	492.901.125	432.960.121,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	492.901.125	432.960.121,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS PANDAUKE	1.063.854.223	999.769.975,00	25.000.000	3.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	352.342.100	348.000.000,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.342.100	28.000.000,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.342.100	28.000.000,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.000.000	320.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.000.000	320.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	711.512.123	651.769.975,00	15.000.000	3.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	711.512.123	651.769.975,00	15.000.000	3.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	711.512.123	651.769.975,00	15.000.000	3.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		PUSKESMAS WONGKO NDAYA	431.603.533	414.818.688,00	24.387.000	24.380.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.853.533	300.160.000,00	24.387.000	24.380.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.940.783	56.925.000,00	24.387.000	24.380.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.295.183	2.292.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.099.100	12.091.500,00	24.387.000	24.380.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.776.500	9.771.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.770.000	32.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.912.750	218.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.060.000	2.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.312.750	19.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.540.000	196.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	24.465.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	24.465.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.750.000	114.658.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.750.000	114.658.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	130.750.000	114.658.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		PUSKESMAS TAMBAYOLI	387.271.748	370.983.292,00	29.427.500	17.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.258.630	161.307.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.821.600	31.878.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.644.050	19.642.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.088.550	1.088.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.089.000	11.147.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.000.000	129.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.000	129.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.030	429.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.030	429.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	224.013.118	209.675.979,00	29.427.500	17.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	224.013.118	209.675.979,00	29.427.500	17.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	224.013.118	209.675.979,00	29.427.500	17.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		PUSKESMAS ANUTOLUWU	697.510.425	649.114.864,00	109.868.700	64.592.100,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.672.150	134.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.672.150	3.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.535.000	2.535.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	448.350	390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.688.800	420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000	131.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.000.000	131.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	561.838.275	514.769.864,00	109.868.700	64.592.100,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	561.838.275	514.769.864,00	109.868.700	64.592.100,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	561.838.275	514.769.864,00	109.868.700	64.592.100,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	363.258.817	352.326.125,00	7.906.250	7.906.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.911.750	223.400.000,00	7.906.250	7.906.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.081.750	56.070.000,00	7.906.250	7.906.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.681.750	30.670.000,00	7.906.250	7.906.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.400.000	25.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.830.000	167.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.830.000	167.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.347.067	128.926.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.347.067	128.926.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.347.067	128.926.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		PUSKESMAS MAYUMBA	906.199.847	827.961.147,00	85.250.000	79.110.750,00	0	0,00	0	0,00

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	393.723.850	386.265.506,00	22.000.000	15.860.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.381.850	92.425.146,00	7.000.000	6.860.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.720.000	4.603.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.350.000	28.350.000,00	7.000.000	6.860.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.891.850	25.891.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.420.000	33.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.750.000	282.250.000,00	15.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	15.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.750.000	282.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.592.000	11.590.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.592.000	11.590.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	512.475.997	441.695.641,00	63.250.000	63.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.475.997	441.695.641,00	63.250.000	63.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	512.475.997	441.695.641,00	63.250.000	63.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44.178.770.928	42.082.746.170,00	134.589.025.413	117.394.464.769,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	44.178.770.928	42.082.746.170,00	134.589.025.413	117.394.464.769,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.298.424.056	10.969.851.077,00	529.170.000	528.840.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.253.915.481	6.992.557.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.253.915.481	6.992.557.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	339.098.400	336.174.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	339.098.400	336.174.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.335.376	676.924.983,00	529.170.000	528.840.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.761.770	88.619.000,00	529.170.000	528.840.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.797.256	7.797.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.113.750	50.112.263,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531.662.600	530.396.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.925.524.799	2.866.106.411,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.556.799	116.476.427,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.801.968.000	2.749.629.984,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.550.000	98.087.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	35.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000	47.567.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.550.000	15.195.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.237.076.800	3.231.375.337,00	10.255.870.215	10.036.717.060,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.077.536.400	2.071.977.167,00	7.675.874.900	7.460.861.560,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.019.732.000	2.014.213.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater	17.166.400	17.165.500,00	350.000.000	349.166.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan	6.922.000	6.920.000,00	350.000.000	348.914.260,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	28.708.000	28.708.000,00	6.625.874.900	6.413.475.100,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.008.000	4.970.000,00	350.000.000	349.306.200,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.159.540.400	1.159.398.170,00	2.579.995.315	2.575.855.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	234.458.000	234.445.170,00	850.000.000	847.942.200,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	95.148.800	95.023.000,00	290.000.000	289.359.700,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	8.933.600	8.930.000,00	1.439.995.315	1.438.553.600,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	821.000.000	821.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.325.572.800	2.276.911.400,00	13.146.537.931	10.557.381.519,00	0	0,00	0	0,00

1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.325.572.800	2.276.911.400,00	13.146.537.931	10.557.381.519,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0,00	300.000.000	199.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.465.496.400	1.422.093.900,00	870.000.000	828.821.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	304.971.200	304.860.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	555.105.200	549.956.700,00	11.976.537.931	9.528.730.519,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	538.288.400	532.282.443,00	12.000.000	11.137.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	538.288.400	532.282.443,00	12.000.000	11.137.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	538.288.400	532.282.443,00	12.000.000	11.137.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	270.105.600	268.155.526,00	4.092.834.041	4.085.420.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.105.600	268.155.526,00	4.092.834.041	4.085.420.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	270.105.600	268.155.526,00	4.092.834.041	4.085.420.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.593.802.869	11.134.447.720,00	20.841.469.072	15.444.961.181,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12.593.802.869	11.134.447.720,00	20.841.469.072	15.444.961.181,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.323.513.800	6.204.577.459,00	200.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.270.289.069	4.929.870.261,00	20.641.469.072	15.444.961.181,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.362.553.423	12.233.471.238,00	85.711.144.154	76.730.007.509,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.362.553.423	12.233.471.238,00	85.711.144.154	76.730.007.509,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	675.000.000	621.768.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	0	0,00	950.000.675	948.561.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	585.040.000	584.390.000,00	16.092.883.089	14.128.151.156,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	1.615.901.568	1.608.779.300,00	55.386.396.940	51.694.230.657,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.799.611.855	7.776.117.438,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	70.000.000	69.939.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	150.000.000	149.819.000,00	13.131.863.448	9.863.129.696,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	842.000.000	797.658.000,00	150.000.000	95.935.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	625.000.000	625.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	168.364.960	51.717.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	168.364.960	51.717.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	168.364.960	51.717.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.384.582.020	1.384.533.729,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	653.837.020	653.837.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	74.767.020	74.767.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	579.070.000	579.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	380.745.000	380.696.709,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	380.745.000	380.696.709,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.559.102.660	3.547.740.283,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	3.559.102.660	3.547.740.283,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.718.828.660	2.718.039.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.718.828.660	2.718.039.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.718.828.660	2.718.039.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	840.274.000	829.700.600,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	840.274.000	829.700.600,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	840.274.000	829.700.600,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.771.481.534	25.080.231.768,00	12.536.982.895	11.372.367.254,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	15.767.282.587	15.477.590.334,00	457.951.200	457.911.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.959.526.937	14.670.634.310,00	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.266.513.939	5.039.318.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.266.513.939	5.039.318.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.483.300	108.023.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.483.300	108.023.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.194.200	411.665.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.603.250	31.518.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.159.750	20.946.956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.431.200	359.200.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.797.070.648	8.744.931.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.516.648	12.499.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.254.000	24.882.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.737.800.000	8.704.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.264.850	366.695.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.800.000	57.945.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.464.850	308.750.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	574.037.600	573.287.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	281.245.500	281.148.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	215.857.500	215.779.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	65.388.000	65.369.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	292.792.100	292.139.474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	115.857.500	115.796.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	176.934.600	176.342.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	233.718.050	233.668.050,00	429.951.200	429.911.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	217.206.650	217.156.650,00	429.951.200	429.911.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.373.350	97.373.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	27.943.800	27.895.800,00	429.951.200	429.911.000,00	0	0,00	0	0,00

1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	91.889.500	91.887.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	16.511.400	16.511.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.511.400	16.511.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.004.198.947	9.602.641.434,00	12.079.031.695	10.914.456.254,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.011.338.798	4.703.216.795,00	2.514.318.335	2.513.544.688,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.069.944.148	2.924.536.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.069.944.148	2.924.536.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.950.000	44.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.950.000	44.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.684.650	478.803.320,00	2.390.568.335	2.389.794.688,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.439.100	82.404.950,00	2.390.568.335	2.389.794.688,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.120.550	13.800.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.125.000	382.598.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.010.000	534.208.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.870.000	25.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	546.140.000	508.963.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.750.000	720.718.250,00	123.750.000	123.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	731.750.000	720.718.250,00	123.750.000	123.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.992.860.149	4.899.424.639,00	9.564.713.360	8.400.911.566,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	158.410.700	129.725.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	45.773.800	42.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	112.636.900	87.295.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	429.911.840	411.746.004,00	200.000.000	199.395.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	173.999.340	168.850.000,00	200.000.000	199.395.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	39.264.300	34.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	125.862.400	124.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	56.918.800	51.396.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	33.867.000	32.975.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	464.553.250	458.178.200,00	1.664.713.360	1.664.710.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	20.899.600	19.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	298.286.400	295.905.000,00	1.580.000.000	1.580.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	93.616.400	93.014.200,00	84.713.360	84.710.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.750.850	49.294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3.939.984.359	3.899.775.035,00	7.700.000.000	6.536.806.566,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67.592.000	56.565.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.872.392.359	3.843.209.590,00	7.700.000.000	6.536.806.566,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.437.437.616	6.741.356.722,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL DAERAH	7.437.437.616	6.741.356.722,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.429.416.338	4.199.359.056,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.909.885.798	2.745.639.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.909.885.798	2.745.639.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.325.540	448.586.603,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.730.740	2.752.247,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.277.050	76.938.700,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.468.750	20.327.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.849.000	348.567.706,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.755.000	727.589.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.620.000	24.304.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.845.000	36.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.290.000	660.685.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.450.000	277.543.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.610.000	81.939.372,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.840.000	195.603.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	527.234.648	499.404.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	53.747.048	49.634.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	53.747.048	49.634.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.370.000	15.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.370.000	15.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	458.117.600	434.550.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	316.007.000	315.126.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.483.600	32.709.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.740.000	20.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72.887.000	65.884.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	635.223.800	596.923.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	427.644.400	400.377.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	124.909.600	119.435.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	155.437.600	135.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000	8.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200	137.092.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	207.579.400	196.546.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	76.224.800	74.972.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	34.147.600	32.534.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	97.207.000	89.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.305.022.000	908.739.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.305.022.000	908.739.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.890.000	81.543.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.898.000	418.483.573,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	782.234.000	408.713.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	502.810.830	499.199.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	348.729.030	347.565.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	263.388.030	262.977.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	85.341.000	84.588.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	154.081.800	151.634.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	72.935.000	72.444.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	81.146.800	79.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.730.000	37.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.730.000	37.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.730.000	37.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	89.092.900.017	84.170.683.138,00	37.644.758.999	33.222.727.824,18	0	0,00	0	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.323.120.972	5.119.934.925,00	543.400.000	457.660.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.323.120.972	5.119.934.925,00	543.400.000	457.660.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.369.317.472	4.203.511.482,00	353.400.000	333.205.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.148.545.677	3.032.982.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.148.545.677	3.032.982.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.201.795	601.496.351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.185.500	77.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.593.295	2.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.426.400	9.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.996.600	511.821.351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	353.400.000	333.205.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	98.400.000	98.290.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	255.000.000	234.915.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.370.000	370.955.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.550.000	25.898.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.860.000	13.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.960.000	331.197.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.200.000	198.077.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	35.187.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.200.000	162.890.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	339.228.000	338.153.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	339.228.000	338.153.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	339.228.000	338.153.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	156.053.100	155.154.304,00	190.000.000	124.455.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	156.053.100	155.154.304,00	190.000.000	124.455.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	156.053.100	155.154.304,00	190.000.000	124.455.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	458.522.400	423.115.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	288.757.900	253.556.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	288.757.900	253.556.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	169.764.500	169.558.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	169.764.500	169.558.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.035.793.000	1.008.543.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	1.035.793.000	1.008.543.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	249.020.000	246.929.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	149.942.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	149.942.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.020.000	96.987.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	28.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.020.000	68.187.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	49.803.000	49.791.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49.803.000	49.791.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.803.000	49.791.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	336.970.000	311.822.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.490.000	91.102.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	101.490.000	91.102.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.480.000	220.720.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	235.480.000	220.720.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	426.777.250	386.618.500,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	426.777.250	386.618.500,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	405.138.400	371.461.900,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.649.000	39.312.900,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7.471.000	7.458.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	32.870.000	16.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	6.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	17.608.000	15.144.400,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	15.890.000	15.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15.890.000	15.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	324.599.400	316.909.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	324.599.400	316.909.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	21.638.850	15.156.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	21.638.850	15.156.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21.638.850	15.156.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.672.912.327	8.383.769.964,00	973.000.000	972.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	8.672.912.327	8.383.769.964,00	973.000.000	972.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.606.398.527	7.363.074.125,00	873.000.000	872.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.547.411.380	3.414.599.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.547.411.380	3.414.599.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.890.000	44.885.046,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.890.000	44.885.046,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.671.297	606.547.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.142.548	1.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.922.250	10.911.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.364.999	3.355.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.289.700	19.225.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571.951.800	571.921.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	873.000.000	872.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	681.000.000	681.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	192.000.000	191.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.703.984.400	2.597.822.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.900.000	23.917.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.679.084.400	2.573.905.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.441.450	699.219.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.500.000	29.308.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.401.450	596.509.316,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.540.000	73.402.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	530.555.100	505.932.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	80.903.500	76.471.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	80.903.500	76.471.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	449.651.600	429.461.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	449.651.600	429.461.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	62.585.500	60.545.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.585.500	60.545.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	62.585.500	60.545.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.910.000	7.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.910.000	7.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	7.910.000	7.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	29.498.800	28.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	29.498.800	28.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	29.498.800	28.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.711.900	35.416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.711.900	35.416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.039.200	14.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.672.700	20.419.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	41.555.000	40.278.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	41.555.000	40.278.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	41.555.000	40.278.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.408.400	20.020.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.408.400	20.020.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	35.408.400	20.020.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	323.289.100	321.723.439,00	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	323.289.100	321.723.439,00	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	17.254.100	15.903.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	306.035.000	305.819.939,00	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.133.841.796	5.833.268.293,00	2.244.950.000	543.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	6.133.841.796	5.833.268.293,00	2.244.950.000	543.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.264.959.796	4.971.861.967,00	2.244.950.000	543.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.855.341.795	3.580.653.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.855.341.795	3.580.653.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.159.650	685.764.202,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.015.650	232.779.842,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.453.000	11.437.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.691.000	441.546.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	2.229.950.000	528.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	58.750.000	58.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	2.171.200.000	469.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.218.351	568.442.775,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.387.351	71.180.775,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.128.000	16.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.703.000	481.142.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.240.000	137.001.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.000.000	97.507.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.240.000	39.494.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	554.730.000	548.049.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	129.816.000	129.449.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15.978.000	15.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	113.838.000	113.789.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	424.914.000	418.600.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	424.914.000	418.600.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	101.216.000	100.995.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	101.216.000	100.995.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	101.216.000	100.995.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	198.756.000	198.431.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.034.000	152.961.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.034.000	152.961.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.392.000	30.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.392.000	30.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.330.000	15.190.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.330.000	15.190.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.180.000	13.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	14.180.000	13.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	14.180.000	13.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.922.864.322	13.321.350.183,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	13.922.864.322	13.321.350.183,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.543.156.932	7.101.255.270,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.881.194.293	2.602.220.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.881.194.293	2.602.220.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.135.500	556.608.707,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.217.350	50.633.050,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.444.150	20.443.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.474.000	485.532.157,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.950.497.139	3.874.455.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.810.000	74.237.151,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.868.687.139	3.800.218.784,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.330.000	67.969.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	37.318.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.730.000	10.651.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.600.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.337.114.320	2.293.618.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.337.114.320	2.293.618.941,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	182.180.000	180.555.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.042.014.000	2.039.608.517,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	38.220.000	800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	74.700.320	72.655.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.042.593.070	3.926.475.972,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.042.593.070	3.926.475.972,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	226.700.000	180.751.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.406.892.250	2.340.931.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	409.000.820	404.793.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.505.959.881	12.823.283.657,00	900.000.000	819.274.600,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	13.505.959.881	12.823.283.657,00	900.000.000	819.274.600,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.787.084.941	6.431.068.607,00	120.000.000	113.724.600,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.156.519.561	4.904.932.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.156.519.561	4.904.932.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.522.150	523.065.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.538.200	56.536.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.267.750	42.267.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.716.200	424.260.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	120.000.000	113.724.600,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	120.000.000	113.724.600,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.223.230	863.947.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.310.000	8.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.213.230	42.541.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.700.000	813.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.820.000	139.122.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000	127.280.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.820.000	11.842.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	49.999.850	47.453.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.850	47.453.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	49.999.850	47.453.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.213.875.600	5.893.237.100,00	780.000.000	705.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.810.729.650	4.512.919.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	4.718.733.980	4.422.429.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	91.995.670	90.489.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.273.189.600	1.255.370.300,00	780.000.000	705.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	824.000.000	807.993.000,00	780.000.000	705.550.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	8.060.000	7.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	441.129.600	439.967.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	129.956.350	124.947.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.114.500	30.004.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	59.541.900	57.361.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.299.950	37.582.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	454.999.490	451.524.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	454.999.490	451.524.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	34.999.850	34.273.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	394.999.740	392.355.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	24.999.900	24.896.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.684.729.285	7.298.677.900,00	9.499.565.625	9.095.214.360,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	7.684.729.285	7.298.677.900,00	9.499.565.625	9.095.214.360,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.242.961.827	6.057.148.280,00	228.297.326	227.855.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.633.052.579	3.453.868.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.052.579	3.453.868.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.922.000	83.508.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.350.000	28.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.572.000	55.158.668,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.401.140	306.677.962,00	28.324.326	27.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.806.540	27.804.980,00	28.324.326	27.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.537.600	30.537.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.057.000	248.335.732,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.286.158	1.902.852.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.860.286.158	1.854.852.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.299.950	310.241.000,00	199.973.000	199.955.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.240.000	60.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.060.000	12.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.999.950	199.941.000,00	199.973.000	199.955.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	342.064.000	342.031.415,00	5.670.000.000	5.642.764.360,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	342.064.000	342.031.415,00	5.670.000.000	5.642.764.360,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	342.064.000	342.031.415,00	5.670.000.000	5.642.764.360,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.099.703.458	899.498.205,00	3.601.268.299	3.224.595.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.099.703.458	899.498.205,00	3.601.268.299	3.224.595.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.099.703.458	899.498.205,00	3.601.268.299	3.224.595.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.717.602.444	8.086.766.495,00	205.737.000	141.370.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	8.717.602.444	8.086.766.495,00	205.737.000	141.370.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.917.606.344	4.532.837.041,00	118.432.000	74.955.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.570.210.944	3.364.679.903,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.570.210.944	3.364.679.903,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.720.000	43.401.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.720.000	43.401.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.860.400	606.207.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.265.200	47.435.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568.595.200	558.772.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	118.432.000	74.955.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	118.432.000	74.955.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.475.000	484.496.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.764.000	16.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.711.000	467.821.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.340.000	34.051.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000	24.007.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.340.000	10.043.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	663.440.000	593.600.531,00	50.305.000	48.335.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	663.440.000	593.600.531,00	50.305.000	48.335.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	355.100.000	340.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	40.280.000	29.218.159,00	50.305.000	48.335.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	93.977.500	80.262.772,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	174.082.500	144.119.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.136.556.100	2.960.328.923,00	37.000.000	18.080.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.136.556.100	2.960.328.923,00	37.000.000	18.080.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108.238.100	99.919.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.385.233.000	2.292.192.000,00	37.000.000	18.080.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	25.210.000	12.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	327.185.000	302.006.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	97.000.000	80.139.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	193.690.000	173.271.073,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.602.911.747	4.293.602.088,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00

2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	4.602.911.747	4.293.602.088,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.297.774.347	4.036.562.828,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.255.021.839	3.021.569.062,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.255.021.839	3.021.569.062,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.590.500	96.458.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.012.500	37.012.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.578.000	59.445.765,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.761.608	235.055.451,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.476.800	16.475.950,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.458	2.499.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.496.150	25.496.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.288.200	190.584.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.934.000	605.077.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.720.000	18.773.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.680.000	750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.594.000	582.564.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.406.400	78.402.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.500.000	54.547.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.906.400	23.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21.294.900	20.987.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	21.294.900	20.987.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	21.294.900	20.987.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.959.700	20.850.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.959.700	20.850.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.959.700	20.850.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	23.758.300	21.411.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.758.300	21.411.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	23.758.300	21.411.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	12.535.300	12.392.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.535.300	12.392.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	12.535.300	12.392.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	185.055.200	168.407.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	185.055.200	168.407.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19.319.000	17.469.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	129.330.900	118.872.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	21.210.000	16.926.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	15.195.300	15.140.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	41.534.000	12.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	41.534.000	12.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	41.534.000	12.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.845.348.003	7.560.517.929,00	10.548.024.550	10.413.331.564,18	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	7.845.348.003	7.560.517.929,00	10.548.024.550	10.413.331.564,18	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.513.990.353	6.320.645.079,00	10.328.321.550	10.197.582.064,18	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.195.900.362	5.059.584.971,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.195.900.362	5.059.584.971,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.473.450	540.957.218,00	733.500.000	615.064.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.099.250	40.598.150,00	733.500.000	615.064.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.250.000	7.732.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.124.200	492.626.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.616.541	666.632.890,00	9.594.821.550	9.582.518.064,18	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.962.541	28.606.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.654.000	638.026.000,00	9.594.821.550	9.582.518.064,18	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000	53.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.000.000	53.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	321.583.450	321.061.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	110.375.600	109.944.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	110.375.600	109.944.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	211.207.850	211.117.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	211.207.850	211.117.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	393.233.400	391.018.400,00	39.000.000	37.730.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.233.400	391.018.400,00	39.000.000	37.730.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	351.743.400	351.743.400,00	7.000.000	6.370.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	41.490.000	39.275.000,00	32.000.000	31.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	167.809.400	87.209.800,00	93.789.500	92.849.500,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	167.809.400	87.209.800,00	93.789.500	92.849.500,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	52.702.800	47.549.800,00	59.193.000	58.643.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	115.106.600	39.660.000,00	34.596.500	34.206.500,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	394.729.000	390.953.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.729.000	390.953.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	217.095.000	216.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	177.634.000	174.613.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	54.002.400	49.630.000,00	86.913.500	85.170.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.002.400	49.630.000,00	86.913.500	85.170.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	54.002.400	49.630.000,00	86.913.500	85.170.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.739.472.850	4.241.320.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	4.739.472.850	4.241.320.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.539.472.850	4.041.320.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.795.270.000	1.602.361.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.795.270.000	1.602.361.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.573.699.000	2.298.709.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.573.699.000	2.298.709.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	170.503.850	140.249.188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	14.990.000	14.745.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	155.513.850	125.504.188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175.145.000	128.451.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	175.145.000	128.451.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	175.145.000	128.451.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	175.145.000	128.451.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	125.637.500	109.351.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	49.507.500	19.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.464.829.700	1.223.125.213,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.464.829.700	1.223.125.213,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	549.086.100	517.946.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	549.086.100	517.946.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	149.087.000	148.416.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	399.999.100	369.530.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	601.613.600	395.984.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	601.613.600	395.984.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	509.824.450	308.853.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	91.789.150	87.131.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	314.130.000	309.194.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	314.130.000	309.194.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	314.130.000	309.194.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.614.928.240	4.238.439.904,00	12.336.901.824	10.387.103.200,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	4.614.928.240	4.238.439.904,00	12.336.901.824	10.387.103.200,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.256.244.011	2.955.482.589,00	26.000.000	26.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.957.500	30.951.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.957.500	30.951.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.151.658	1.949.850.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.201.151.658	1.949.850.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.941.453	516.316.474,00	26.000.000	26.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.301.503	69.301.503,00	26.000.000	26.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.065.550	13.063.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.574.400	433.951.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.546.000	354.923.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.440.000	4.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.570.000	24.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.536.000	325.914.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.647.400	103.441.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.500.000	32.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.000.000	43.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.147.400	26.947.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.358.684.229	1.282.957.315,00	12.310.901.824	10.361.103.200,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.203.695.749	1.130.109.735,00	12.310.901.824	10.361.103.200,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.016.304.449	943.435.650,00	12.055.901.824	10.106.488.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	106.185.600	105.477.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	81.205.700	81.196.135,00	255.000.000	254.614.700,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.988.480	152.847.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	72.867.440	71.969.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	82.121.040	80.878.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	177.937.200	177.629.516,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	177.937.200	177.629.516,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	177.937.200	177.629.516,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	83.327.500	83.277.500,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	21.462.700	21.462.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	0	0,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	61.864.800	61.814.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	51.836.500	51.739.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	51.836.500	51.739.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	42.773.200	42.612.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	42.773.200	42.612.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	78.944.733.576	75.487.870.195,89	6.815.766.803	6.396.025.270,00	0	0,00	0	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.924.598.270	13.500.538.774,00	317.626.000	310.124.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN DAERAH	13.924.598.270	13.500.538.774,00	317.626.000	310.124.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.631.523.270	5.245.137.751,00	115.200.000	114.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.183.643.084	3.841.532.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.183.643.084	3.841.532.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.147.500	111.051.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.147.500	111.051.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.817.686	650.881.175,00	115.200.000	114.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.893.550	113.816.000,00	115.200.000	114.885.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.883.736	7.868.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.072.400	41.069.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.968.000	488.126.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.150.000	578.915.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.000	64.805.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.610.000	512.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.765.000	62.756.815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	9.343.885,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	37.147.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.265.000	16.265.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.979.551.700	4.945.329.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.079.058.000	4.065.442.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	475.261.000	475.248.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.603.797.000	3.590.194.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	900.493.700	879.886.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	837.738.000	817.797.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	62.755.700	62.089.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.491.027.100	2.487.883.923,00	197.176.000	189.989.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	507.061.100	506.333.923,00	197.176.000	189.989.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	277.161.500	276.545.525,00	197.176.000	189.989.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	229.899.600	229.788.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.983.966.000	1.981.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.983.966.000	1.981.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	822.496.200	822.187.500,00	5.250.000	5.250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	822.496.200	822.187.500,00	5.250.000	5.250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	222.620.100	222.525.500,00	5.250.000	5.250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	599.876.100	599.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.149.992.787	7.621.774.523,00	1.395.635.541	1.155.911.500,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	8.149.992.787	7.621.774.523,00	1.395.635.541	1.155.911.500,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.659.760.435	5.428.257.143,00	1.245.635.541	1.006.177.500,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.912.101.672	3.726.727.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.912.101.672	3.726.727.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.918.000	63.316.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63.918.000	63.316.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.138.158.763	1.118.512.353,00	1.245.635.541	1.006.177.500,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.984.263	232.951.660,00	1.245.635.541	1.006.177.500,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.156.500	56.630.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.018.000	828.930.493,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.960.000	26.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.960.000	26.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.942.000	430.976.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.492.000	44.966.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.450.000	386.010.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.680.000	61.924.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.000.000	42.073.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.680.000	19.850.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	738.067.042	736.023.400,00	150.000.000	149.734.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	738.067.042	736.023.400,00	150.000.000	149.734.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	733.024.642	731.811.400,00	150.000.000	149.734.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.042.400	4.212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	493.694.350	470.637.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	493.694.350	470.637.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	9.895.000	9.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	483.799.350	460.767.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.258.470.960	986.856.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.258.470.960	986.856.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	718.999.950	497.397.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	525.472.810	476.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.998.200	12.787.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.150.608.419	48.720.408.686,89	736.167.683	722.250.770,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	51.150.608.419	48.720.408.686,89	736.167.683	722.250.770,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.690.333.039	20.352.649.018,00	49.066.250	47.895.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.594.494.003	17.441.384.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.594.494.003	17.441.384.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.910.860	613.432.574,00	49.066.250	47.895.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.942.750	37.522.250,00	49.066.250	47.895.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.503.510	46.502.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.464.600	529.407.347,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.353.728.176	2.174.155.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.636.176	9.829.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.250.000	14.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.293.462.000	2.150.266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.200.000	123.676.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	98.732.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000	24.944.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.377.973.955	8.189.074.797,89	50.687.400	43.603.750,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.766.262.455	1.652.801.250,00	11.655.500	5.427.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.736.288.455	1.623.808.250,00	11.655.500	5.427.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	29.974.000	28.993.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.941.650.900	1.911.044.950,00	12.850.000	12.850.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.941.650.900	1.911.044.950,00	12.850.000	12.850.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.670.060.600	4.625.228.597,89	26.181.900	25.326.250,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	232.837.550	203.062.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.437.223.050	4.422.165.997,89	26.181.900	25.326.250,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	17.974.511.150	17.707.259.406,00	416.063.513	415.319.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	16.738.000	16.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	16.738.000	16.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	17.957.773.150	17.690.643.406,00	416.063.513	415.319.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	249.998.400	249.622.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.347.268.520	10.260.945.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	50.000.000	50.000.000,00	349.516.108	348.808.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	6.284.929.750	6.130.817.250,00	66.547.405	66.511.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.025.576.480	999.258.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	256.056.245	253.819.795,00	4.103.020	4.103.020,00	0	0,00	0	0,00

3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	256.056.245	253.819.795,00	4.103.020	4.103.020,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	256.056.245	253.819.795,00	4.103.020	4.103.020,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	39.814.400	35.884.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	39.814.400	35.884.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.806.000	8.298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.888.900	14.276.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	14.119.500	13.309.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.291.948.800	1.663.602.685,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.291.948.800	1.663.602.685,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	58.513.350	57.797.185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.213.519.050	1.585.889.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	19.916.400	19.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	519.970.830	518.118.985,00	216.247.500	211.330.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	519.970.830	518.118.985,00	216.247.500	211.330.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	419.261.350	419.188.216,00	216.247.500	211.330.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.709.480	98.930.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.328.509.850	3.300.638.610,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	3.328.509.850	3.300.638.610,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.123.300	19.246.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	20.123.300	19.246.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.123.300	19.246.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	88.831.950	88.780.550,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	88.831.950	88.780.550,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	88.831.950	88.780.550,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.142.459.800	3.116.190.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	23.829.600	23.722.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	23.829.600	23.722.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.098.116.300	3.072.359.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.406.600	23.307.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.074.709.700	3.049.052.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.513.900	20.108.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.513.900	20.108.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	56.644.150	56.347.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	56.644.150	56.347.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	56.644.150	56.347.716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	20.450.650	20.073.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20.450.650	20.073.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.450.650	20.073.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	534.999.850	511.256.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	534.999.850	511.256.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	149.501.450	145.971.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	149.501.450	145.971.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	104.179.750	103.902.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.289.700	17.309.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25.032.000	24.759.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	335.498.600	316.743.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	335.498.600	316.743.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	335.498.600	316.743.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	49.999.800	48.541.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.800	48.541.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24.999.850	24.266.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	24.999.950	24.275.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	132.873.281.362	125.833.329.641,00	12.995.647.850	9.035.203.373,00	0	0,00	0	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	92.892.422.701	88.454.154.430,00	8.724.847.850	4.908.386.373,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	0	4.318.651.460,00	0	915.060.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.046.205.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	1.807.916.087,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	1.807.916.087,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	73.301.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	73.301.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	863.388.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	2.097.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	155.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	30.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	675.741.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	1.036.095.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	421.415.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	614.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	3.086.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	3.086.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	205.272.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	37.272.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	168.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	0	25.117.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0	7.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	17.407.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	29.787.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	0	7.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0	10.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0	11.827.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	55.596.000,00	0	915.060.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	0	55.396.000,00	0	915.060.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	0	52.492.000,00	0	915.060.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0	2.904.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	0	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	0	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	216.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	0	7.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	7.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	0	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	195.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	132.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	63.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	0	5.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0	2.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BAGIAN UMUM	36.878.225.171	31.749.663.632,00	768.385.000	758.374.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.878.225.171	31.749.663.632,00	768.385.000	758.374.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.780.305.159	10.773.961.098,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.780.305.159	10.773.961.098,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.513.738.260	4.308.460.752,00	743.485.000	733.549.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.993.810	96.993.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.635.000	37.630.898,00	743.485.000	733.549.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.062.876.350	1.243.806.491,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	241.397.100	202.143.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.074.836.000	2.727.887.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	24.900.000	24.825.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	24.900.000	24.825.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.147.434.616	10.928.582.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.473.474.848	2.000.093.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.211.227.000	5.207.627.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.437.732.768	3.695.862.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.620.000	596.109.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	451.820.000	441.671.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.600.000	42.298.595,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.200.000	112.140.198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.811.127.136	5.142.549.148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	196.640.136	135.233.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72.800.000	72.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	66.000.000	65.993.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.475.687.000	4.868.821.821,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.030.799.950	885.292.428,00	49.200.000	49.170.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	438.541.350	366.554.428,00	49.200.000	49.170.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.551.350	215.474.428,00	49.200.000	49.170.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.489.200	21.615.700,00	49.200.000	49.170.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.350	9.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.061.800	183.938.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.800.000	126.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.800.000	126.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.190.000	24.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000	23.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	1.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	592.258.600	518.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	592.258.600	518.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	233.663.000	201.822.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	358.595.600	316.915.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN PEMERINTAHAN	2.554.584.950	1.312.522.976,00	5.914.207.150	1.226.850.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	758.038.350	524.992.128,00	343.800.000	178.650.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.015.550	64.470.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.015.550	64.470.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.030.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.030.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.652.800	236.274.100,00	178.800.000	178.650.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.767.900	63.476.600,00	178.800.000	178.650.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.232.500	19.281.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.652.400	153.516.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.360.000	66.078.000,00	165.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.360.000	66.078.000,00	165.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.900.000	141.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.300.000	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.600.000	140.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.080.000	16.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	10.715.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000	6.095.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.796.546.600	787.530.848,00	5.570.407.150	1.048.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.709.537.600	755.738.848,00	5.570.407.150	1.048.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.456.849.400	604.919.848,00	5.570.407.150	1.048.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	131.605.400	90.172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	121.082.800	60.647.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	87.009.000	31.792.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	87.009.000	31.792.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.521.346.080	42.706.053.235,00	235.400.000	235.198.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	868.403.300	769.686.214,00	36.400.000	36.363.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.993.300	419.112.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.560.000	54.547.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.146.500	54.634.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.286.800	309.930.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	36.400.000	36.363.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	36.400.000	36.363.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.410.000	321.574.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.410.000	321.574.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.000.000	29.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.000.000	29.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	42.652.942.780	41.936.367.021,00	199.000.000	198.835.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	42.652.942.780	41.936.367.021,00	199.000.000	198.835.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	42.652.942.780	41.936.367.021,00	199.000.000	198.835.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN HUKUM	1.251.158.050	1.007.894.292,00	126.841.950	126.760.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	821.341.850	587.140.473,00	126.841.950	126.760.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.002.500	96.127.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103.002.500	96.127.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.460.950	412.464.973,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.165.050	40.067.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.319.900	35.049.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.500.000	59.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.476.000	277.848.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	126.841.950	126.760.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	38.015.000	37.980.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	88.826.950	88.780.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.050.000	66.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.050.000	66.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.828.400	12.048.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.418.400	8.608.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.410.000	3.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	429.816.200	420.753.819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	429.816.200	420.753.819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	177.114.700	172.033.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	177.335.100	175.006.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	75.366.400	73.713.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN ORGANISASI	1.303.415.000	1.147.937.833,00	134.585.000	134.278.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.303.415.000	1.147.937.833,00	134.585.000	134.278.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.760.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.760.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.537.600	424.334.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.186.350	33.064.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.294.850	15.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.056.400	375.607.892,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	134.585.000	134.278.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	134.585.000	134.278.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.872.000	119.312.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.072.000	16.012.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.550.000	103.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.625.000	30.789.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.545.000	23.282.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.080.000	7.507.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	632.620.400	573.502.141,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	285.428.000	247.811.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	162.854.000	141.625.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	184.338.400	184.065.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.020.205.000	2.630.759.299,00	1.284.250.000	1.266.597.623,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.707.505.000	1.514.259.299,00	1.284.250.000	1.266.597.623,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.945.000	92.572.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.127.000	58.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.818.000	34.532.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.260.000	619.164.799,00	1.284.250.000	1.266.597.623,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.890.000	38.550.300,00	1.284.250.000	1.266.597.623,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	719.370.000	580.614.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.300.000	787.522.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	35.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.230.000	10.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.470.000	741.742.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.312.700.000	1.116.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.312.700.000	1.116.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	838.700.000	705.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	474.000.000	411.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.182.127.450	872.242.907,00	169.670.000	153.790.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	797.377.000	636.615.457,00	169.670.000	153.790.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.977.000	382.315.457,00	91.820.000	76.780.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.469.000	35.369.200,00	91.820.000	76.780.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.048.600	28.145.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.459.400	318.800.457,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	77.850.000	77.010.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	77.850.000	77.010.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.100.000	254.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.100.000	254.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	384.750.450	235.627.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	188.682.200	96.848.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	29.742.500	4.150.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	158.939.700	92.697.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	196.068.250	138.779.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	112.303.900	91.782.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	83.764.350	46.996.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.150.561.050	1.823.136.368,00	42.308.750	42.308.750,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.150.561.050	1.823.136.368,00	42.308.750	42.308.750,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.306.250	680.076.127,00	42.308.750	42.308.750,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.601.900	20.601.900,00	42.308.750	42.308.750,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.651.350	185.666.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.053.000	473.807.877,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.848.000	256.548.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.300.000	41.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.548.000	215.248.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000	35.615.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	35.615.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.002.406.800	850.897.241,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	283.936.400	216.708.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	446.990.800	395.249.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	271.479.600	238.939.017,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	39.980.858.661	37.379.175.211,00	4.270.800.000	4.126.817.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	39.980.858.661	37.379.175.211,00	4.270.800.000	4.126.817.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.102.157.311	23.225.605.474,00	4.270.800.000	4.126.817.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.133.540	2.878.151.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.133.540	2.878.151.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	402.741.000	391.110.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	121.619.000	113.754.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	281.122.000	277.356.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.104.776.390	1.906.710.626,00	3.009.500.000	2.893.410.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.548.120	40.504.048,00	200.000.000	199.560.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.066.720	143.293.163,00	2.809.500.000	2.693.850.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.755.500	196.301.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.128.950	84.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.554.500	52.765.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.558.722.600	1.389.746.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	201.300.000	175.565.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	201.300.000	175.565.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.464.106.600	3.272.180.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.250.000	542.057.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.588.600	495.736.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.409.268.000	2.234.387.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.515.598.250	1.513.586.093,00	1.060.000.000	1.057.842.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.700.000	84.637.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.650.850	182.950.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.620.000	93.615.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.153.627.400	1.152.382.350,00	1.060.000.000	1.057.842.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.972.185.981	11.781.055.221,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.259.685.981	11.119.341.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	650.000.000	640.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	62.500.000	21.713.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.653.615.550	1.482.812.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	608.615.550	532.812.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.045.000.000	950.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.878.701.350	14.153.569.737,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.008.819.000	910.108.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.008.819.000	910.108.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	984.823.750	942.755.874,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	984.823.750	942.755.874,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.521.319.700	1.784.971.056,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	601.262.100	406.900.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.920.057.600	1.378.070.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.581.889.300	1.219.119.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	586.468.600	301.282.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	995.420.700	917.837.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	9.781.849.600	9.296.614.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.781.849.600	9.296.614.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	94.854.985.190	75.849.957.263,00	5.717.579.294	4.365.077.028,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.01			PERENCANAAN	9.157.365.453	8.801.655.495,00	126.506.644	116.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.157.365.453	8.801.655.495,00	126.506.644	116.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.780.314.663	6.521.224.353,00	126.506.644	116.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.102.943.379	3.919.546.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.102.943.379	3.919.546.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.305.500	123.520.124,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.947.500	41.947.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.358.000	81.572.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	969.915.900	960.492.440,00	12.506.644	12.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.294.000	19.329.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.632.728	74.636.040,00	12.506.644	12.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.363.172	68.334.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	798.626.000	798.192.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	114.000.000	104.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	114.000.000	104.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.397.019.884	1.384.521.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.394.284	61.183.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.805.600	510.773.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	814.820.000	812.564.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.130.000	133.143.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000	92.744.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.930.000	15.199.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.200.000	25.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.051.813.510	1.987.010.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.468.073.450	1.436.398.122,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	39.798.000	39.512.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	157.125.200	156.896.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.271.150.250	1.239.990.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.874.260	19.039.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.511.760	7.456.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11.832.500	7.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11.530.000	3.663.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	548.865.800	531.573.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	376.338.150	360.879.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	48.497.500	48.435.221,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	124.030.150	122.258.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	325.237.280	293.420.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	159.866.420	144.998.433,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.299.950	20.004.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	138.566.470	124.994.133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	83.396.760	75.119.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.105.920	36.044.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	41.290.840	39.074.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	81.974.100	73.303.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.780.100	10.901.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	70.194.000	62.401.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	74.754.316.438	56.556.105.895,00	5.377.752.650	4.050.328.228,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.948.166.494	45.480.177.647,00	4.895.752.650	3.569.269.000,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.754.555.368	31.408.182.730,00	636.886.000	616.069.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.021.981.810	27.822.040.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.820.230.127	27.723.155.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	201.751.683	98.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	413.827.500	187.659.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.912.500	79.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	333.915.000	108.219.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995.168.204	954.103.440,00	636.886.000	616.069.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.016.354	174.397.042,00	636.886.000	616.069.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.866.850	76.633.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.285.000	703.072.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.047.787.854	2.194.220.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.951.024	159.762.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.453.500	227.502.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.655.383.330	1.806.956.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.790.000	250.159.625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.000.000	174.453.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.790.000	75.706.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.781.668.126	12.935.977.137,00	322.766.650	108.700.000,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.977.785.656	2.678.226.648,00	181.000.000	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	507.746.656	170.492.862,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	269.153.000	86.500.000,00	81.000.000	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	439.559.900	86.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.761.326.100	2.334.643.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	742.792.370	715.463.405,00	67.000.000	36.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	334.080.000	321.547.931,00	25.000.000	24.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	408.712.370	393.915.474,00	42.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.049.484.240	769.742.114,00	74.766.650	42.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	298.986.050	146.795.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	750.498.190	622.946.246,00	74.766.650	42.500.000,00	0	0,00	0	0,00

5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.841.204.660	8.622.865.171,00	0	0,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.841.204.660	8.622.865.171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0,00	0	0,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	170.401.200	149.679.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	170.401.200	149.679.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.411.943.000	1.136.017.780,00	3.936.100.000	2.844.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.411.943.000	1.136.017.780,00	3.936.100.000	2.844.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.086.726.000	913.773.780,00	64.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	325.217.000	222.244.000,00	3.872.100.000	2.844.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.806.149.944	11.075.928.248,00	482.000.000	481.059.228,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.052.466.052	9.337.076.336,00	482.000.000	481.059.228,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.633.325.811	6.962.452.447,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.633.325.811	6.962.452.447,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.428.593.013	1.427.596.930,00	451.000.000	450.059.228,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.283.333	4.278.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.616.130	156.559.636,00	451.000.000	450.059.228,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	365.207.750	365.060.124,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	902.485.800	901.698.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	31.000.000	31.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	31.000.000	31.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.617.228	720.322.286,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.577.228	82.708.286,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.800.000	16.142.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.240.000	621.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.930.000	226.704.673,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.500.000	46.495.923,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.430.000	180.208.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.753.683.892	1.738.851.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.753.683.892	1.738.851.912,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	74.999.600	74.028.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	433.354.350	433.225.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	99.739.500	99.727.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	21.894.500	21.874.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	91.540.650	91.301.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	103.506.700	102.745.922,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	123.234.800	122.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	85.763.950	85.359.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	104.643.100	104.187.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	103.370.442	92.636.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	235.282.150	235.213.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	118.127.680	118.071.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.955.270	72.944.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	34.541.100	34.501.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.730.100	50.646.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	7.918.968.209	7.527.416.175,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.918.968.209	7.527.416.175,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.679.988.909	5.450.062.330,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00

5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.759.099.089	4.554.836.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.759.099.089	4.554.836.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.747.500	74.560.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.257.500	15.859.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.490.000	58.701.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.922.320	500.966.605,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.992.320	93.931.649,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.800.000	11.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.530.000	367.783.956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.600.000	27.581.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.480.000	275.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.160.000	7.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.320.000	267.882.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.740.000	44.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000	28.286.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.340.000	4.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.400.000	11.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.238.979.300	2.077.353.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	963.511.800	939.435.195,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	713.511.800	712.786.295,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	250.000.000	226.648.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	124.267.500	117.703.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	43.200.000	37.253.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	81.067.500	80.449.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.151.200.000	1.020.215.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	218.200.000	217.288.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	933.000.000	802.927.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	473.524.290	473.248.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	473.524.290	473.248.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	473.524.290	473.248.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	53.474.630	53.474.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	53.474.630	53.474.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	35.749.360	35.685.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	35.749.360	35.685.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	384.300.300	384.087.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	287.376.400	287.164.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	96.923.900	96.923.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.351.649.599	13.068.739.776,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	14.351.649.599	13.068.739.776,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	14.351.649.599	13.068.739.776,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.080.133.049	8.553.603.583,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.272.200	166.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.272.200	166.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.769.445.961	5.511.601.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.767.812.111	5.511.601.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.633.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.138.576.250	1.112.589.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110.960.000	110.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.003.778.750	1.002.579.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23.837.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.021.692.638	872.563.250,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.962.388	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.586.750	74.543.750,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.637.500	19.692.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	837.506.000	778.327.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.300.000	574.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.900.000	78.488.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.400.000	495.532.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.846.000	316.606.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.500.000	227.506.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.250.000	14.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.096.000	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.271.516.550	4.515.136.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.271.516.550	4.515.136.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.288.539.250	1.136.144.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.379.326.000	2.860.175.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	603.651.300	518.816.139,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	36.118.049.444	34.139.359.329,00	2.498.629.371	2.484.272.132,00	0	0,00	0	0,00
7.01			KECAMATAN	36.118.049.444	34.139.359.329,00	2.498.629.371	2.484.272.132,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN PETASIA	7.468.424.665	7.312.347.667,00	1.529.362.221	1.518.121.982,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.468.424.665	7.312.347.667,00	1.529.362.221	1.518.121.982,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.670.393.205	4.550.940.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.670.393.205	4.550.940.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.514.885.460	1.512.314.238,00	1.529.362.221	1.518.121.982,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.729.560	998.181.788,00	1.529.362.221	1.518.121.982,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.387.900	22.387.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.768.000	491.744.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.146.000	1.224.093.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.116.000	60.363.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.630.000	1.157.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PETASIA BARAT	2.758.363.240	2.573.337.158,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.729.163.240	2.545.927.158,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.272.016	2.119.758.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.280.272.016	2.119.758.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.504.224	199.282.086,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.771.924	15.771.924,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.787.700	5.787.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.944.600	177.722.462,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.387.000	217.387.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.170.000	17.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.217.000	11.217.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.000.000	189.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000.000	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.200.000	27.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.200.000	27.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.200.000	27.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN PETASIA TIMUR	3.163.049.885	3.001.521.785,00	313.000.000	310.311.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.071.094.885	2.909.566.785,00	313.000.000	310.311.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.481.449.930	2.320.371.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.449.930	2.320.371.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.943.530	314.494.270,00	313.000.000	310.311.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.448.580	193.999.320,00	313.000.000	310.311.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.500.950	11.500.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.994.000	108.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.701.425	251.701.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.131.425	11.131.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.570.000	3.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.000.000	237.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	91.955.000	91.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	91.955.000	91.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.955.000	91.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN BUNGKU UTARA	4.668.125.078	4.485.847.752,00	303.300.000	303.045.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.618.075.078	4.435.807.752,00	303.300.000	303.045.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.033.425.178	3.851.235.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.033.425.178	3.851.235.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.465.100	187.447.178,00	113.000.000	112.920.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	113.000.000	112.920.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.687.100	10.685.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.778.000	176.762.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	40.300.000	40.300.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	40.300.000	40.300.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.624.800	364.570.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.720.000	15.715.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.394.000	146.371.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.510.800	202.484.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.560.000	32.555.000,00	150.000.000	149.825.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.560.000	32.555.000,00	150.000.000	149.825.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.050.000	50.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.050.000	50.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50.050.000	50.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN MAMOSALATO	2.917.442.688	2.710.964.051,00	32.906.250	32.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.761.486.688	2.555.014.051,00	32.906.250	32.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.330.348.938	2.125.873.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.348.938	2.125.873.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.720.000	8.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.720.000	8.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.356.250	193.103.804,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.284.500	17.284.500,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.046.750	3.046.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.025.000	172.772.554,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.080.000	208.335.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.160.000	18.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.120.000	189.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.981.500	18.981.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.981.500	18.981.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	155.956.000	155.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	155.956.000	155.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.170.000	16.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	139.786.000	139.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN SOYO JAYA	2.417.414.749	2.178.804.054,00	29.292.150	29.292.150,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.316.502.749	2.077.898.054,00	29.292.150	29.292.150,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.938.706.899	1.701.236.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.938.706.899	1.701.236.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.146.950	163.075.200,00	29.292.150	29.292.150,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.406.600	27.396.600,00	29.292.150	29.292.150,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.548.950	10.515.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.191.400	125.163.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.000.000	173.938.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	11.938.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000	162.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.648.900	39.648.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.612.500	37.611.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.036.400	2.036.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.912.000	100.906.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.912.000	100.906.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.912.000	100.906.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN LEMBO	3.609.450.832	3.437.591.998,00	55.556.250	55.556.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.164.347.832	2.992.808.098,00	55.556.250	55.556.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.788.917.182	2.620.546.459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.917.182	2.620.546.459,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.505.200	46.404.189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.505.200	46.404.189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.855.450	80.787.450,00	35.906.250	35.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.321.050	23.321.050,00	35.906.250	35.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.250.000	5.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.284.400	52.216.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	19.650.000	19.650.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	19.650.000	19.650.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.300.000	216.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000	17.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000	22.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.100.000	176.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.770.000	28.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.770.000	7.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	445.103.000	444.783.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	445.103.000	444.783.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	445.103.000	444.783.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		KECAMATAN LEMBO RAYA	2.612.927.521	2.516.923.900,00	56.306.250	56.306.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.606.387.521	2.510.383.900,00	56.306.250	56.306.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.052.002.276	1.966.078.066,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.052.002.276	1.966.078.066,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.650.000	7.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.650.000	7.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.415.245	290.335.834,00	56.306.250	56.306.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.968.045	123.812.045,00	56.306.250	56.306.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.235.200	6.235.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.212.000	160.288.589,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.320.000	246.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.120.000	6.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.200.000	240.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.540.000	6.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.540.000	6.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.540.000	6.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		KECAMATAN MORI ATAS	3.380.285.625	3.221.524.208,00	171.000.000	170.827.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.341.785.625	3.183.024.208,00	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.953.285.787	2.794.656.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.953.285.787	2.794.656.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.375.000	4.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.375.000	4.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.804.838	132.672.815,00	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.229.838	19.229.838,00	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.085.000	5.085.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.490.000	108.357.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.320.000	230.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.960.000	4.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000	15.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.180.000	210.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.500.000	38.500.000,00	150.000.000	149.827.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.500.000	38.500.000,00	150.000.000	149.827.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.500.000	38.500.000,00	150.000.000	149.827.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		KECAMATAN MORI UTARA	3.122.565.161	2.700.496.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.085.565.161	2.663.496.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.568.211	2.280.515.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.702.568.211	2.280.515.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.609.950	123.609.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.980.950	5.980.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.625.000	2.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.004.000	115.004.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.387.000	244.371.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.633.000	7.633.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.000.000	186.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.754.000	50.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.000.000	37.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.000.000	37.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.000.000	37.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	51.355.784.062	50.554.017.468,99	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.355.784.062	50.554.017.468,99	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	51.355.784.062	50.554.017.468,99	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.832.329.899	3.619.702.092,00	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.268.864.285	2.084.563.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.268.864.285	2.084.563.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.037.301.614	1.036.776.050,00	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.944.814	72.898.070,00	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	296.458.800	296.084.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	667.898.000	667.793.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.004.000	470.962.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.420.000	36.953.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.000.000	332.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.584.000	101.259.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.160.000	27.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000	7.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.251.571.500	1.248.684.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.251.571.500	1.248.684.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.251.571.500	1.248.684.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	44.067.766.663	43.866.920.876,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	44.067.766.663	43.866.920.876,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	43.892.026.663	43.692.026.662,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.850.000	22.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	152.890.000	152.044.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.357.340.000	1.157.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.357.340.000	1.157.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.355.000.000	1.155.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.340.000	2.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	229.800.000	79.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	229.800.000	79.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	229.800.000	79.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	616.976.000	582.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	616.976.000	582.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	609.720.000	575.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.256.000	7.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	1.095.412.945.221	1.010.338.801.206,48	338.866.386.661	307.837.638.053,18	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00

Konodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELISJULKARSON HEHI

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	52.332.702.992,53	190.974.549.361,64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	52.299.328.048,49	190.873.934.975,64
3	Sub Total (1-2)		33.374.944,04	100.614.386,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	67.722.190.412,82	52.332.702.992,53
5	Sub Total (3+4)		67.755.565.356,86	52.433.317.378,53
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(33.374.944,04)	(100.614.386,00)
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.4	67.722.190.412,82	52.332.702.992,53

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,



DELIS SULKARSON HEHI

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	74.038.595.779,00	80.559.929.792,20	(6.521.334.013,20)	(8,10)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	22.004.929.269,00	33.910.237.686,00	(11.905.308.417,00)	(35,11)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5.229.148.166,00	3.864.163.872,00	1.364.984.294,00	35,32
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	64.143.014.238,99	59.514.298.734,42	4.628.715.504,57	7,78
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO (3 s/d 6)	5.4.1.1	165.415.687.452,99	177.848.630.084,62	(12.432.942.631,63)	(6,99)
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	1.131.717.230.248,00	1.109.428.785.683,00	22.288.444.565,00	2,01
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	55.132.104.364,00	43.848.667.931,00	11.283.436.433,00	25,73
11	Jumlah Pendapatan Transfer - LO (9 s/d 10)	5.4.1.2	1.186.849.334.612,00	1.153.277.453.614,00	33.571.880.998,00	2,91
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	36.395.000,00	798.122.902,00	(761.727.902,00)	(95,44)
14	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan - LO	5.4.1.3.2	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00	
15	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO (13 s/d 14)	5.4.1.3	8.313.490.762,00	798.122.902,00	7.515.367.860,00	941,63
16	Jumlah Pendapatan - LO (7+11+15)	5.4.1	1.360.578.512.826,99	1.331.924.206.600,62	28.654.306.226,37	2,15
17	BEBAN - LO					
18	Beban Pegawai	5.4.2.1	497.582.380.767,00	425.231.570.909,00	72.350.809.858,00	17,01
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	382.061.489.250,82	350.755.548.972,15	31.305.940.278,67	8,93
20	Beban Bunga	5.4.2.3	8.532.517.820,00	11.065.804.150,00	(2.533.286.330,00)	(22,89)
21	Beban Hibah	5.4.2.4	58.682.833.607,99	25.369.825.466,00	33.313.008.141,99	131,31
22	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	28.282.087.055,00	31.965.226.788,26	(3.683.139.733,26)	(11,52)
23	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	6.682.168.494,80	1.110.246.240,42	5.571.922.254,38	501,86
24	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	149.648.534.546,18	136.930.964.996,64	12.717.569.549,54	9,29
25	Beban Bagi Hasil	5.4.3.1	0,00	933.454.571,00	(933.454.571,00)	(100,00)
26	Beban Bantuan Keuangan	5.4.3.2	116.869.929.862,00	103.583.030.310,00	13.286.899.552,00	12,83
27	Beban Tidak Terduga	5.4.3.2	407.476.000,00	-	407.476.000,00	0,00
28	Jumlah Beban (18 s/d 27)	5.4.2	1.248.749.417.403,79	1.086.945.672.403,47	161.803.745.000,32	14,89
29	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (16 - 28)		111.829.095.423,20	244.978.534.197,15	(133.149.438.773,95)	(54,35)
30	KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO					
31	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.5	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00	147,90
32	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.5	209.250,00	639.580,00	(430.330,00)	(67,28)
33	Jumlah Kegiatan Non Operasional (31 s/d 32)	5.4.5	2.860.672.850,00	1.154.534.780,00	1.706.138.070,00	147,78
34	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO					
35	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.6	667.936.548,00	0,00	667.936.548,00	
36	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	3.240.225,00	(3.240.225,00)	(100,00)
37	Jumlah Defisit Non Operasional (35 s/d 36)	5.4.6	667.936.548,00	3.240.225,00	664.696.323,00	20.513,89
38	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (33 - 37)	5.4.6	2.192.736.302,00	1.151.294.555,00	1.041.441.747,00	90,46
39	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (29 + 38)	5.4.6	114.021.831.725,20	246.129.828.752,15	(132.107.997.026,95)	(53,67)
40	POS LUAR BIASA - LO					
41	Beban Luar Biasa	5.4.6	0,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)	(100,00)
42	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	-	(140.000.000,00)	140.000.000,00	(100,00)
43	SURPLUS/DEFISIT - LO (39 + 42)	5.4.7	114.021.831.725,20	245.989.828.752,15	(131.967.997.026,95)	(53,65)

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA,
DELS. ULKARSON HEHI

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.270.452.390.192,32	2.024.706.773.521,61
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	114.021.831.725,20	245.989.828.752,15
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
4	Koreksi ekuitas/ Lain-lain	5.6.3	2.277.232.656,90	(244.212.081,44)
5	EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.386.751.454.574,42	2.270.452.390.192,32

Kelenodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JUL KARSON HEHI

LAMPIRAN V

NERACA





NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas Di Kas Daerah	5.3.1.1.1	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94
4	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	249.377.625,00	17.202.000,00
5	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	6.698.555,00	435.276.242,00
6	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.4	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	337.855.207,59	220.597.113,59
8	Kas Di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	30.106.373,00	213.513.606,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	81.152.868,67	186.448.697,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	77.685.331.624,50	78.202.695.663,50
11	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	41.247.825,00	82.047.825,00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	70.098.601,97	70.098.601,97
13	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	11.560.625.860,00	6.271.855.162,00
14	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(15.016.692.782,53)	(8.334.733.537,73)
15	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.13	2.605.789.625,00	2.467.220.984,87
16	Persediaan	5.3.1.1.14	8.763.392.194,00	10.708.889.707,33
17	JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 16)	5.3.1.1	153.513.136.229,43	141.987.226.096,47
18	INVESTASI JANGKA PANJANG			
19	Investasi Jangka Panjang Permanen			
20	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2	25.074.641.963,00	22.936.197.963,00
21	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (20)	5.3.1.2	25.074.641.963,00	22.936.197.963,00
22	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (21)	5.3.1.2	25.074.641.963,00	22.936.197.963,00
23	ASET TETAP			
24	Tanah	5.3.1.3.1	104.788.561.428,00	99.870.808.551,00
25	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	510.842.336.803,99	443.916.784.251,99
26	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	936.554.676.961,87	817.801.391.584,60
27	Jalan, irigasi dan jaringan	5.3.1.3.4	1.711.908.144.151,70	1.569.798.060.994,76
28	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	15.436.098.446,00	14.227.864.046,00
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	82.807.703.692,84	82.046.969.848,86
30	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.181.366.544.726,19)	(1.043.371.858.449,94)
31	JUMLAH ASET TETAP (24 s/d 30)	5.3.1.3	2.180.970.976.758,21	1.984.290.020.827,27
32	ASET LAINNYA			
33	Tuntutan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	482.006.633,00	482.006.633,00
34	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	2.830.422.650,00	2.651.052.950,00
35	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	105.509.932.425,26	102.457.734.497,26
36	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(2.313.182.478,33)	(2.125.623.083,34)
37	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.5	(10.249.568.425,28)	(10.249.143.425,28)
38	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	50.615.809.000,00	196.206.290.000,00
39	JUMLAH ASET LAINNYA (33 s/d 38)	5.3.1.4	146.875.419.804,65	289.422.317.571,64
40	JUMLAH ASET (17+22+31+39)	5.3.1	2.506.434.174.755,29	2.438.635.762.458,38
41	KEWAJIBAN			
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	81.146.123,67	147.384.772,00
44	Utang Bunga	5.3.2.2	218.339.489,00	308.686.840,00
45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.3	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00
46	Utang Belanja	5.3.2.4	1.361.889.071,20	398.005.698,06
47	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	471.543.567,00
48	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (42 s/d 47)	5.3.2	50.497.780.575,87	50.162.026.769,06
49	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
50	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.5	69.184.939.605,00	118.021.345.497,00
51	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (50)	5.3.2	69.184.939.605,00	118.021.345.497,00
52	JUMLAH KEWAJIBAN (48+51)	5.3.2	119.682.720.180,87	168.183.372.266,06
53	EKUITAS			
54	Ekuitas	5.3.3	2.386.751.454.574,42	2.270.452.390.192,32
55	JUMLAH EKUITAS (54)	5.3.3	2.386.751.454.574,42	2.270.452.390.192,32
56	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (52+55)	5.3.3	2.506.434.174.755,29	2.438.635.762.458,38

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS





Lampiran VI Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	74.555.959.818,00	35.305.535.224,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	22.045.729.269,00	34.769.349.686,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.5.1.1	5.229.148.166,00	3.864.163.872,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	64.143.014.238,99	59.514.298.734,42
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1	1.386.889.373.248,00	1.031.790.449.328,00
8	Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah	5.5.1.1	49.843.333.666,00	42.411.481.100,00
9	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1	8.277.095.762,00	0,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 9)	5.5.1.1	1.610.983.654.167,99	1.207.655.277.944,42
11	ARUS KELUAR KAS			
12	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	497.246.280.767,00	425.231.570.909,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	418.957.792.995,49	376.440.314.339,00
14	Pembayaran Bunga	5.5.1.2	8.622.865.171,00	10.757.117.310,00
15	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	58.682.833.607,99	22.516.369.666,00
16	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	28.481.937.055,00	33.215.227.288,26
17	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	1.157.886.000,00	140.000.000,00
18	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2	0,00	933.454.571,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2	226.451.591.862,00	214.140.316.018,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s/d 19)	5.5.1.2	1.239.601.187.458,48	1.083.374.370.101,26
21	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10-20)	5.5.1	371.382.466.709,51	124.280.907.843,16
22	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
23	ARUS MASUK KAS			
24	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00
25	Jumlah Arus Masuk Kas (24)	5.5.2.1	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00
26	ARUS KELUAR KAS			
27	Perolehan Tanah	5.5.2.2	1.963.260.000,00	1.110.890.900,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	76.216.049.055,00	36.930.658.470,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	88.382.929.824,18	80.182.171.788,27
30	Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	141.028.364.474,00	113.670.285.431,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	254.614.700,00	94.125.000,00
32	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2	2.138.444.000,00	3.500.000.000,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (27 s/d 32)	5.5.2.2	309.983.662.053,18	235.488.131.589,27
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (25-33)	5.5.2	(307.123.198.453,18)	(234.334.236.389,27)
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
36	ARUS MASUK KAS			
37	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
38	Jumlah Arus Masuk Kas (37)		0,00	0,00
39	ARUS KELUAR KAS			
40	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	5.5.3.1	48.836.405.892,00	28.487.903.437,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas (40)	5.5.3.1	48.836.405.892,00	28.487.903.437,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (38 - 41)	5.5.3	(48.836.405.892,00)	(28.487.903.437,00)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
44	ARUS MASUK KAS			
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	5.5.4.1	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90
46	Jumlah Arus Masuk Kas (45)	5.5.4.1	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90
47	ARUS KELUAR KAS			
48	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	5.5.4.2	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90
49	Jumlah Arus Keluar Kas (48)	5.5.4.2	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (46 - 49)	5.5.4	-	-
51	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (21+34+42+50)	5.5.5	15.422.862.364,33	(138.541.231.983,11)
52	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (53 s/d 58)	5.5.6	52.332.702.992,53	190.974.549.361,64
53	Saldo Awal Kas di BUD	5.5.6	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05
54	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6	17.202.000,00	578.627.154,00
55	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	435.276.242,00	2.669.709,00
56	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.6	7.968.540.362,00	0,00
57	Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	5.5.6	220.597.113,59	1.429.903.790,59
58	Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	5.5.6	213.513.606,00	301.125.197,00
59	Koreksi SILPA	5.5.6	(33.374.944,04)	(100.614.386,00)
60	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7	67.722.190.412,82	52.332.702.992,53
61	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.7	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94
62	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7	249.377.625,00	17.202.000,00
63	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	6.698.555,00	435.276.242,00
64	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.7	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00
65	Kas Di Bendahara BOS	5.5.7	337.855.207,59	220.597.113,59
66	Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	5.5.7	30.106.373,00	213.513.606,00
67	Saldo Akhir Kas (61 s/d 66)	5.5.7	67.722.190.412,82	52.332.702.992,53

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JUL KARSON HEHI

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN





BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi tersebut bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan amanat otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan Pembangunan jangka menengah yang tertuang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera”** dan Misi Kabupaten Morowali Utara yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan Infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara.

Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Pembagian Kewenangan (*power sharing*) dan Pembagian Keuangan (*financial sharing*)

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan Pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik *“Good Governance”* salah satunya adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Azas tersebut juga merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disebutkan dalam Visi dan Misi yaitu terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah diantaranya dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat diwujudkan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual Tahun 2024 adalah:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara terutama digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal tata Kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu juga untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yang mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Tingkat Kemiskinan
- 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka
- 2.4. Kebijakan Keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 2.5. Kebijakan Keuangan
- 2.6. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.13. Laporan Operasional
- 4.14. Koreksi Kesalahan
- 4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu

BAB V : PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP- SAL)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7. Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
- 5.8. Dana Tugas Pembantuan
- 5.9. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 5.10. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- 5.11. Aset Tetap Fisik yang tidak ditemukan
- 5.12. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)

BAB VI: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas
- 6.3. Pemimpin Lembaga Legislatif
- 6.4. Pemimpin Lembaga Eksekutif
- 6.5. Tugas Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 6.6. Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 6.7. Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

BAB VII : PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan sebagai alat Pemerintah untuk menganalisis cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi, membuat neraca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak lagi hanya tergantung pada peranan pasar sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai ukuran pencapaian Visi dan Misi Daerah yang terdiri atas beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani, Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tanggap darurat bencana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kemajuan perekonomian adalah suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai baik selama jangka waktu tertentu. Kemajuan perekonomian di Kabupaten Morowali Utara secara makro dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu meminimalisir tingginya pengangguran yang akan membawa dampak buruk bagi perekonomian suatu negara.
2. Menciptakan kemampuan produksi dan penghasilan Masyarakat untuk menunjang perekonomian rumah tangga.
3. Pemerataan pendapatan terhadap hasil olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli Masyarakat.

2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu dasar penentuan Tingkat kesejahteraan masyarakat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan (*demand*) terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi makanan.

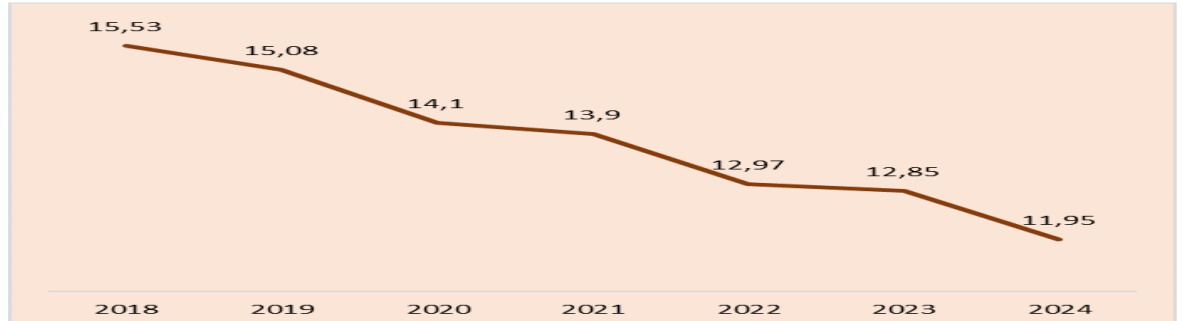
Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin yaitu pada angka 556.204 atau 12,85 % dengan jumlah jiwa 17.660 jiwa. Dan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan berada pada angka 594.137. Adapun persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 11,95 % dari seluruh penduduk Kabupaten Morowali Utara.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Prosentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Morowali Utara 2018 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara

Hal ini disebabkan karena pendapatan ekonomi rakyat semakin meningkat yang didukung sektor pertambangan sehingga membantu masyarakat dibidang usaha kecil, menengah sehingga membuka lapangan pekerjaan. Penurunan tingkat kemiskinan dari Tahun 2018 - 2024 dapat di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara, 2018-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (jiwa)	Penduduk Miskin (jiwa)	
		Jumlah (jiwa)	Persentase
2018	412.942	91.401	15,53
2019	441.554	19.250	15,08
2020	474.170	18.380	14,1
2021	486.511	18.400	13,9
2022	507.523	17.490	12,58
2023	556.204	17.660	12,85
2024	594.137	16.740	11,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (ribu) 2023 - 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		Presentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Banggai Kepulauan	15.50	18.86	12.90	12.32
Banggai	27.38	26.21	6.94	6.56
Morowali	15.75	14.99	12.31	11.55
Poso	41.48	39.63	15.16	14.23
Donggala	50.37	47.68	16.25	15.30
Toli – Toli	31.13	30.39	12.85	12.45
Buol	23.13	23.05	13.36	13.08
Parigi Moutong	77.18	74.57	14.91	14.20
Tojo Una – Una	26.51	26.12	16.74	16.36



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		Presentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Sigi	31.47	29.80	12.83	12.06
Banggai Laut	11.27	11.16	14.15	13.78
Morowali Utara	17.66	16.74	12.85	11.95
Palu	26.83	24.57	6.56	5.94
Sulawesi Tengah	395.66	379.76	12.41	11.77

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah

2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja yang ada di daerah atau karena pengaruh faktor lain.

Pada tahun 2024 tercatat penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 64.838 orang, pengangguran sebanyak 1.578 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 27.986 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kegiatan di
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

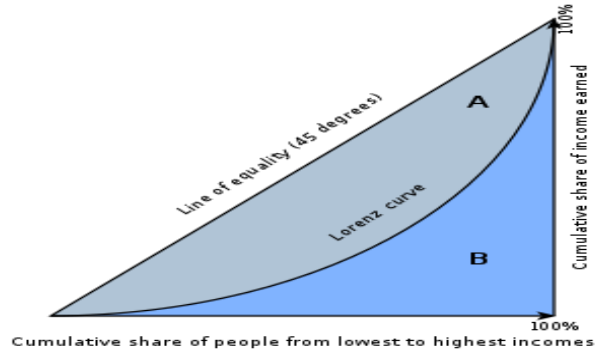
Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	41.960	24.456	66.416
Bekerja	40.981	23.857	64.838
Pengangguran Terbuka	979	599	1.578
Bukan Angkatan Kerja	7.567	20.419	27.986
Sekolah	4.172	4.307	8.479
Mengurus Rumah Tangga	1.638	15.168	16.806
Lainnya	1.757	944	2.701
Jumlah	49.527	44.857	94.402

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Morowali Utara

2.3.1 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *Kurva Lorenz* yaitu kurva yang menggambarkan gabungan antara titik-titik pendapatan seseorang dengan total populasi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kurva Lorenz



Untuk menghitung ratio gini menggunakan metode *Kurva Lorenz*, dengan rumus : $G = A / (A + B)$.

Nilai *Indeks Gini* berada diantara 0 sampai dengan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Meskipun mengukur ketimpangan pendapatan, namun perlu diingat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan (*wealth*) secara keseluruhan. Hal ini mengingat indikator kesejahteraan relatif lebih susah dihitung dibandingkan dengan pendapatan.

Tabel 2.4
Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Kabupaten / Kota	Gini Ratio	
	2023	2024
Sulawesi Tengah	0.304	0,301
Banggai Kepulauan	0.272	0,276
Banggai	0.283	0,316
Morowali	0.281	0,275
Poso	0.265	0,247
Donggala	0.237	0,251
Toli – Toli	0.345	0,277
Buol	0.258	0,266
Parigi Moutong	0.298	0,25
Tojo Una – Una	0.262	0,244
Sigi	0.281	0,246
Banggai Laut	0.244	0,221
Morowali Utara	0.284	0,245
Kota Palu	0.324	0,337

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Tahun 2024, Indeks Gini Ratio tertinggi di Kota Palu 0,337. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan ke-11 yaitu 0,245 serta beberapa daerah dengan indeks Gini Ratio terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Laut yaitu 0,221.

2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu Indeks Komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sumber Daya Manusia berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

Peningkatan IPM Tahun 2024, Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Morowali terbesar 74,36 dan Kabupaten Morowali Utara berada di urutan ke-empat sebesar 71,64 sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 67,65.

Tabel 2.5
Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	65.61	65.82	66.30	67.05	67.65
Banggai	71.01	71.09	71.58	72.19	72.86
Morowali	73.06	73.12	73.39	73.82	74.36
Poso	72.10	72.27	72.25	73.25	73.65
Donggala	66.80	66.96	67.49	68.17	68.71
Toli-Toli	67.70	68.31	68.77	69.68	70.38
Buol	68.49	68.92	69.37	70.18	70.89
Parigi Moutong	67.46	67.84	68.29	69.06	69.48
Tojo Una-una	66.67	66.81	67.62	68.47	69.04
Sigi	68.48	68.84	69.40	70.28	70.90
Bangai Laut	67.60	67.82	68.40	69.12	69.65
Morowali Utara	69.42	69.52	70.02	70.74	71.64
Kota Palu	82.74	82.96	83.26	83.71	74.12
Sulawesi Tengah	70.31	70.54	71.01	71.66	72.24

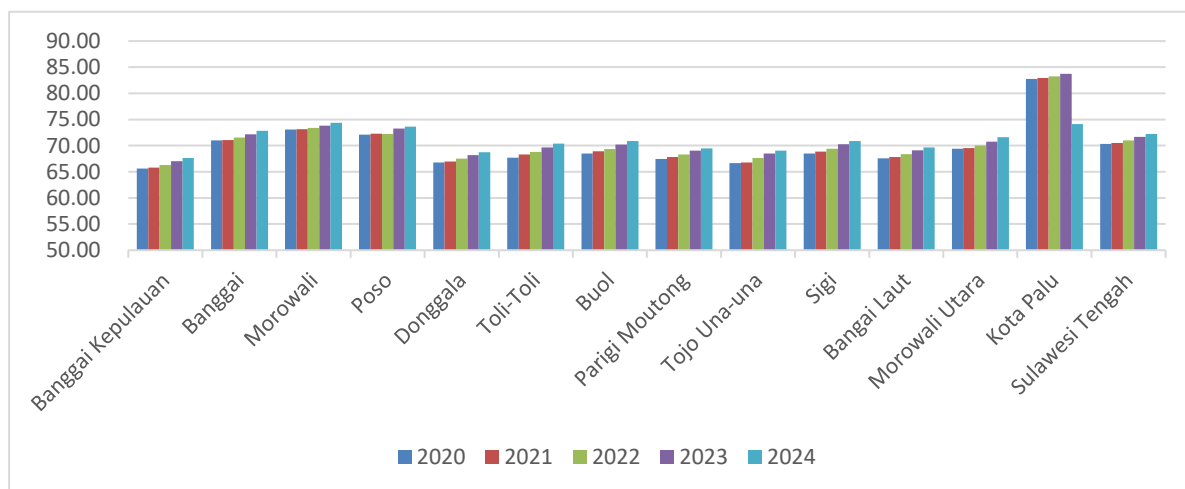
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari tingkatannya, ternyata Indeks Pembangunan Manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan. Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Grafik 2.2
Posisi Peringkat IPM Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi pencapaian IPM kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 mencapai 71,64 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,74 mengalami kenaikan sebesar 0,9. Namun demikian capaian IPM Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah pada angka 72,24.

2.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah normal. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Distribusi terbesar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 33.76%

Tabel 2.6
Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Morowali Utara (Persen), 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	31,52	29,55	20,17	16,99	17,1
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	32,85	33,55	43,91	38,61	33,76
Industri Pengolahan/ Manufacturing	2,51	4,6	12,57	24,22	29,79
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03
Konstruksi/Construction	16,08	16,46	10,66	9,11	8,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,79	6,39	5,74	5,03	5,09



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,24	0,32	0,69	0,59	0,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,22	0,21	0,17	0,16	0,16
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	2,19	2,02	1,4	1,18	1,1
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,49	0,47	0,36	0,29	0,29
Real Estat/Real Estate Activities	1,67	1,52	1,08	1,05	1,03
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,42	2,21	1,45	1,23	1,16
Jasa Pendidikan/Education	1,39	1,21	0,79	0,68	0,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,91	0,84	0,57	0,49	0,46
Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,65	0,59	0,4	0,34	0,33
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100	100	100	100	100

Sumber:: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

2.3.4 Inflasi

Inflasi adalah situasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Perkembangan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) perbulan yaitu indeks rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tidak didata dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	Ket.
Tingkat Inflasi Kabupaten	*	*	*	*	(* belum dirilis)
Tingkat Inflasi Provinsi (%)	*	*	*	*	(* belum dirilis)
Tingkat inflasi Nasional (%)	*	*	*	*	(* belum dirilis)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara belum melakukan perhitungan untuk menghitung angka inflasi sebagaimana tahun sebelumnya. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

2.3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB -ADHB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Barga Berlaku (PDRB-ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Ada dua cara penilaian yang dilakukan dalam perhitungan PDRB yaitu atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan.

PDRB-ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB-ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Untuk Menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya sedangkan menurut pengeluaran terdiri atas tujuh komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa.

Tabel 2.8
Produk Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2024

Pengeluaran	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,43	10,57	2,03	4,05
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,17	6,95	4,32	12,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,57	0,88	2,84	5,02
Pembentukan Modal Tetap Bruto	95,97	444,61	1,32	3,31
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	10,56	36,37	23,04	14,03

Sumber : BPS Kabupaten Morowali Utara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.9

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1.12	4.32	3.57	2.02	3.64
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.69	10.28	56.73	13.30	7.88
C	Industri Pengolahan	3.89	91.32	264.21	173.48	45.27
D	Pengadaaan Listrik dan Gas	7.16	4.27	5.77	5.03	4.50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah Daur Ulang	-0.10	5.15	2.81	1.74	4.59
F	Konstruksi	-3.74	18.73	1.97	2.19	1.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6.19	7.51	37.21	6.19	9.50
H	Transportasi dan Pergudangan	-27.92	46.02	221.10	2.97	16.17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10.17	10.52	26.33	11.11	16.14
J	Informasi dan Komunikasi	8.96	7.74	11.07	6.22	5.76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.49	10.55	12.72	0.44	12.37
L	Real Estate	0.17	3.10	12.62	12.40	11.92
M	Jasa Perusahaan	-1.98	7.57	12.39	5.02	4.11
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.52	5.23	2.03	1.84	3.97
O	Jasa Pendidikan	-0.11	1.27	2.91	3.64	5.61
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.74	3.61	3.30	2.87	5.65
Q	Jasa Lainnya	-0.28	4.12	6.32	5.12	8.35
Produk Domestik Regional Bruto		-23	10.56	36.37	23.04	14.03

Sumber : BPS Pusat Statistik Kab. Morowali Utara
Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 45.27%, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,17%. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB menurut harga berlaku. Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan.

2.4 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Program dan kegiatan yang diimplementasikan harus secara tegas berorientasi kepada layanan. Perencanaan dan pelaksanaan harus mengutamakan pelayanan dengan memastikan bahwa belanja untuk program dan kegiatan harus senyatanya berorientasi layanan kepada masyarakat. Mandatory spending yang besarnya telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

1. Belanja Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan);
2. Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa., dan belanja pegawai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

(Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);

3. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
 4. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
 5. Belanja Pengawasan pada pemerintah kabupaten/kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024):
 - a. sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - b. diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - c. diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Hasil perhitungan mandatory spending pada kabupaten morowali utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Mandatory Spending

Bidang	Anggaran		Realisasi		Kriteria	Kesimpulan
	Nilai (Rp)	Persentase	Nilai (Rp)	Persentase		
Pendidikan	320.009.547.430,00	19,21%	270.295.115.249,00	17,47%	20,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
Infrastruktur	381.806.719.880,82	37,18%	347.655.940.030,00	33,32%	40,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
Transfer Desa	944.103.854,00	0,60%	0	0,00%	10,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
ADD	92.307.586.898,00	8,25%	80.602.288.885,00	7,17%	10,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
Pengawasan	16.409.972.099,00	0,99%	14.929.915.776,00	0,96%	0,75%	Memenuhi Mandatory Spending

Sumber: SIPD 2024

Diperjelaskan bahwa belum tercapainya realisasi *mandatory spending* secara umum dapat dijelaskan karena adanya perencanaan dan pengawasan lemah, akibatnya anggaran yang di alokasikan tidak memberikan manfaat maksimal terhadap peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, maupun infrastruktur,

Untuk itu kedepannya pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan efisiensi belanja melalui strategi "*spending better*" yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dengan focus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada Masyarakat.

2.5 Kebijakan Keuangan

Pokok-pokok Kebijakan Keuangan yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah serta kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



2.5.1 Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus diperhatikan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp 168.834.315.091,99. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp134.607.242.716,00 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami kenaikan sebesar Rp34.227.072.375,57 atau 25,43%. Sedangkan Pendapatan Daerah dari sektor Non PAD Tahun 2024 adalah jumlah Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.436.732.706.914,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.277.095.762,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.074.201.930.428,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.807.872.248,00 atau 34,19%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 desember 2024 bertumbuh dengan baik. Dari sektor Pajak daerah dan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar PAD di Tahun 2024 dengan porsi mencapai 91,14%. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan. Seluruh Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan dan rincian obyek penerimaan.
- b) Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD, Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar Retribusi Daerah serta peningkatan pengendalian intern.
- c) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pemungutan PAD Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. Sedangkan khusus untuk alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas Penyertaan Modal atau Investasi Daerah Lainnya ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai Penyertaan Modal (investasi daerah).
 - e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer
- Adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum Penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a) Dana Darurat yang diterima dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - b) Hibah yang diterima uang harus dianggarkan dalam APBD didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemberi Hibah.
 - c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam Peraturan Daerah.
 - d) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - e) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - f) Penganggaran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Hibah, Dana Darurat dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.5.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi Belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintah. Dalam penggunaannya, Belanja Daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penggunaan Dana Perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 - d) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 6) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.
 - a) Belanja Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang diatur sebagai berikut:
 - (1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan PNS Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
 - (2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNS Daerah, khususnya bagi PNS Daerah yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional atau yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- (4) Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS;
 - (5) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
 - (6) Dalam merencanakan Belanja Pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
 - (7) Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kepada PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - (8) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;
 - (9) Untuk meningkatkan disiplin kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan meningkatkan kesejahteraan PNS maka diberikan tambahan penghasilan PNS sesuai Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188-45/KEP-B.MU/0067/III/2024 Tentang Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara menurut kelas jabatan Tahun Anggaran 2024.
- b) Belanja Barang dan Jasa, adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan dengan kebijakan sebagai berikut:
- (1) Penyediaan anggaran untuk Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
 - (2) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
 - (3) Dalam merencanakan kebutuhan barang, Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan Daftar Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Standar Penggunaan Barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- (4) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
 - (5) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa mempedomani ketentuan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
 - (6) Belanja Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa;
 - (7) Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - (8) Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
 - (9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi Pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani Belanja Perjalanan Dinas;
 - (10) Standar Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah memedomani Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c) Belanja Bunga, merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d) Belanja Subsidi, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- e) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan kebijakan sebagai berikut:
- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (2) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam



penyelenggaraan pembangunan daerah.

- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan

f) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Bantuan Sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap Tahun Anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- (2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standarpelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk itu diharapkan pengalokasian bantuan sosial Tahun demi Tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu
- (4) Penyediaan anggaran untuk Bantuan kepada Partai Politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ketentuan pasal 5 sebagai berikut:
 - *Ayat 5:*
Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara.
 - *Ayat 6:*
Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) persuara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun anggaran berjalan
 - Ayat 7 :*
Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

7) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk Perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan Aset ditambah seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan Aset sampai Aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan:
- b) Merupakan objek pemeliharaan:
- c) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
- d) Pengadaan *software* dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemendianggarkan pada Belanja Modal.

8) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

9) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

10) Belanja DPRD

- a) Penganggaran Belanja DPRD, agar memedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
- b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan Belanja Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.
- c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada Objek Belanja Tunjangan Khusus PPh Pasal 21.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- d) Untuk penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 11) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota "harus dibaca" Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".
 - d) Belanja Rumah Tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.
 - e) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 12) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
 - c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada DPRD.
 - d) Untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, penganggaran dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:
 - a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran Berjalan; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- 13) Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten tertentu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 14) Belanja Bantuan Keuangan
- a) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.
 - c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar memedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
 - e) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) disalurkan ke Kas Daerah/Desa yang bersangkutan.

2.5.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi.

Sedangkan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target Pendapatan Daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, Penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan Pembentukan Dana Cadangan.

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam Tahun Anggaran 2024 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari Rekening Kas umum Daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada Perusahaan Daerah.

c) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

d) Investasi (penyertaan modal) Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

2.5.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit APBD Tahun Berjalan dengan Pembiayaan Netto. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang harus dapat menutup Defisit Anggaran yang direncanakan.

2.6 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.6.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.613.844.117.767,99 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.665.857.452.335,00 sehingga capaian target Pendapatan Daerah mencapai 96,88%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.208.809.173.144,42 mengalami kenaikan sebesar Rp405.034.944.623,57 atau 33,51%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.227.072.375,57 atau 25,43%, dan pada Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp370.807.872.248,00 atau 34,19%.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.11
Pendapatan daerah

Uraian	Tahun 2024		% capaian	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4 =3:2x100)	(5)
Pendapatan Asli Daerah	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
Pendapatan Transfer	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
Jumlah	1.665.857.452.335,00	1.613.844.117.767,99	96,88	1.208.809.173.144,42

Sumber: SIPD 2024

2.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.547.409.805.511,66 atau 92,91% dari anggaran sebesar Rp1.665.492.192.835,00. Pencapaian anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Belanja daerah

Uraian	Tahun 2024		% capaian	Tahun 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4 =3:2x100)	(5)
Belanja Operasi	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26
Belanja Modal	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27
Belanja Tak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
Belanja Transfer	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
Jumlah	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53

Sumber: SIPD RI 2024

2.6.3 Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan di anggarakan sebesar Rp52.332.702.392,53 dan terealisasi sebesar Rp52.332.702.992,00 atau 100,00%, dan di dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp190.873.934.975,64 mengalami penurunan sebesar Rp138.541.231.983,11 atau 72,58%. Untuk Pengeluaran Pembiayaan di anggarakan sebesar Rp52.697.961.892,00 dan terealisasi sebesar Rp50.974.849.892,00 atau 96,73%. Dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp41.085.896.256,00.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Salah satu alat menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang bertujuan untuk:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber Pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan Pendapatan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun, APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menganut anggaran surplus/defisit.

a. Pendapatan Daerah Menurut Organisasi

Pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Menurut Organisasi

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah	0,00	196.438.321,00	196.438.321,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
2	Dinas Kesehatan Daerah	12.082.080.312,00	11.505.509.160,00	(576.571.152,00)	95,23
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	54.948.934.858,00	54.898.934.858,00	109897,87
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale	49.968.540.363,00	22.000.000,00	(49.946.540.363,00)	0,04
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah	15.000.000.000,00	17.525.861.100,00	2.525.861.100,00	116,84
6	Dinas Perhubungan	375.000.000,00	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	600.000.000,00	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.000.000.000,00	355.910.213,00	(19.644.089.787,00)	1,78
9	Dinas Perikanan	50.000.000,00	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
10	Dinas Pertanian	50.000.000,00	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
11	Sekretariat Daerah	0,00	25.770.025,00	25.770.025,00	0,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.428.165.238.843,00	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
13	Badan Pendapatan Daerah	139.516.592.817,00	91.607.384.513,00	(47.909.208.304,00)	65,66
Jumlah		1.665.857.452.335,00	1.613.842.600.595,00	(52.014.851.740,00)	96,85

Sumber: SIPD 2024

b. Belanja Daerah Menurut Organisasi

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 anggarannya sebesar Rp1.665.492.192.835,00 dan terealisasi sebesar Rp1.547.446.405.511,66 atau 92,91%.

c. Target Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.547.446.405.511,66 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp1.011.991.709.596,48. Belanja Modal sebesar Rp307.845.218.053,18, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.157.886.000,00 dan Belanja Transfer Rp226.451.591.862,00.

d. Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Target Pencapaian Kinerja APBD menurut Urusan Pemerintahan dapat disajikan pada tabel berikut:

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.2
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Bidang Pendidikan	291.056.974.816,00	250.205.126.444,00	(40.851.848.372,00)	85,96
2	Bidang Kesehatan	324.746.657.431,00	320.387.532.802,00	(4.359.124.629,00)	98,66
3	Bidang Pekerjaan Umum Dan	206.956.909.520,00	159.477.210.939,00	(47.479.698.581,00)	77,06



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
Penataan Ruang					
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.308.464.430,00	36.452.599.022,00	(1.855.865.408,00)	95,16
6	Bidang Sosial	7.486.237.616,00	6.789.756.722,00	(696.480.894,00)	90,70
Jumlah		868.555.243.813,00	773.312.225.929,00	(95.243.017.884,00)	89,03

Sumber: SIPD 2024

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.3
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Bidang Tenaga Kerja	5.866.520.972,00	5.577.594.925,00	(288.926.047,00)	95,08
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.035.793.000,00	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
3	Bidang Pangan	439.607.250,00	399.448.500,00	(40.158.750,00)	90,86
4	Bidang Lingkungan Hidup	9.645.912.327,00	9.356.460.064,00	(289.452.263,00)	97,00
5	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.378.791.796,00	6.376.518.293,00	(2.002.273.503,00)	76,10
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.212.264.322,00	13.610.404.183,00	(601.860.139,00)	95,77
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.405.959.881,00	13.642.558.257,00	(763.401.624,00)	94,70
8	Bidang Perhubungan	17.184.294.910,00	16.393.892.260,00	(790.402.650,00)	95,40
9	Bidang Komunikasi dan Informatika	8.923.339.444,00	8.228.136.495,00	(695.202.949,00)	92,21
10	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.688.271.747,00	4.378.962.088,00	(309.309.659,00)	93,40
11	Bidang Penanaman Modal	18.393.372.553,00	17.973.849.493,00	(419.523.060,00)	97,72
12	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
13	Bidang Statistik	175.145.000,00	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34
14	Bidang Persandian	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
15	Bidang Kebudayaan	1.464.829.700,00	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
16	Bidang Perpustakaan	16.951.830.064,00	14.625.543.104,00	(2.326.286.960,00)	86,28
17	Bidang Kearsipan	183.527.200,00	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
Jumlah		126.737.659.016,00	117.393.410.962,00	(9.344.248.054,00)	92,63

Sumber : SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 3.4
Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	14.242.224.270,00	13.810.662.774,00	(431.561.496,00)	96,97
2	Bidang Pariwisata	9.545.628.328,00	8.777.686.023,00	(767.942.305,00)	95,29
3	Bidang Pertanian	51.886.776.102,00	49.442.659.456,00	(2.444.116.646,00)	95,29
4	Bidang Perdagangan	4.635.847.429,00	4.604.378.610,00	(31.468.819,00)	99,32
5	Bidang Perindustrian	534.999.850,00	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
6	Bidang Transmigrasi	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
Jumlah		85.760.500.379,00	81.883.895.465,00	(3.876.604.914,00)	95,48

Sumber: SIPD 2024

4) Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan

Tabel 3.5
Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Sekretariat Daerah	101.617.270.551,00	93.362.540.803,00	(8.254.729.748,00)	91,88
2	Sekretariat DPRD	44.251.658.661,00	41.505.992.211,00	(2.745.666.450,00)	93,80
3	Perencanaan	9.283.872.097,00	8.918.155.495,00	(365.716.602,00)	96,06
4	Keuangan	311.344.930.040,00	288.215.911.985,00	(23.129.018.055,00)	92,57
5	Kepegawaian	8.132.288.209,00	7.725.664.975,00	(406.623.234,00)	95,00
7	Pendidikan dan Pelatihan	2.550.810.800,00	32.146.124.591,66	29.595.313.791,66	1260,23
8	Penelitian dan Pengembangan	473.524.290,00	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
9	Inspektorat Daerah	16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
10	Kecamatan	38.616.678.815,00	36.623.631.461,00	(1.993.047.354,00)	94,84
11	Kesatuan Bangsa dan Politik	51.757.784.062,00	50.955.687.468,00	(802.096.594,00)	98,45
Jumlah		584.438.789.624,00	574.856.873.155,66	(9.581.916.468,34)	98,36
Total Jumlah		1.665.492.192.832,00	1.547.446.405.511,66	118.045.787.320,34	92,91

Sumber: SIPD 2024

- e. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 3.6
Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Pendidikan	291.056.974.816,00	250.205.126.444,00	85,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Bidang Kesehatan	324.746.657.431,00	320.387.532.802,00	98,66
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.767.796.341,00	159.477.210.939,00	89,21
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.189.113.179,00	27.994.104.891,00	99,31
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.308.464.430,00	36.452.599.022,00	95,16
6	Bidang Sosial	7.486.237.616,00	6.789.756.722,00	90,70
7	Bidng Tenaga Kerja	5.866.520.972,00	5.577.594.925,00	95,08
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.035.793.000,00	1.008.543.175,00	97,37
9	Bidang Pangan	439.607.250,00	399.448.500,00	90,86
10	Bidang Lingkungan Hidup	9.645.912.327,00	9.356.460.064,00	97,00
11	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	8.378.791.796,00	6.376.518.293,00	76,10
12	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.212.264.322,00	13.610.404.183,00	95,77
12	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.405.959.881,00	13.642.558.257,00	94,70
13	Bidang Perhubungan	17.184.294.910,00	16.393.892.260,00	95,40
14	Bidang Komunikasi dan Informatika	8.923.339.444,00	8.228.136.495,00	92,21
15	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.688.271.747,00	4.378.962.088,00	93,40
16	Bidang Penanaman Modal	18.393.372.553,00	17.973.849.493,00	97,72
17	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	89,49
18	Bidang Statistik	175.145.000,00	128.451.992,00	73,34
19	Bidang Persandian	48.726.000,00	45.382.916,00	93,14
20	Bidang Kebudayaan	1.464.829.700,00	1.223.125.213,00	83,50
21	Bidang Perpustakaan	16.951.830.064,00	14.625.543.104,00	86,28
22	Bidang Kearsipan	183.527.200,00	183.219.516,00	99,83
23	Bidang Kelautan dan Perikanan	14.242.224.270,00	13.810.662.774	96,97
24	Bidang Pariwisata	9.545.628.328,00	8.777.686.023,00	91,96
25	Bidang Pertanian	51.886.776.102,00	49.442.659.456,00	95,29
26	Bidang Perdagangan	4.635.847.429,00	4.604.378.610,00	99,32
27	Bidang Perindustrian	534.999.850,00	511.256.750,00	95,56
28	Bidang Transmigrasi	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	96,38
29	Sekretariat Daerah	101.617.270.551,00	93.362.540.803,00	91,88
30	Sekretariat DPRD	44.251.658.661,00	41.505.992.211,00	93,80
31	Perencanaan	9.283.872.097,00	8.918.155.495,00	96,06
32	Keuangan	311.344.930.040,00	276.659.182.899,00	88,86



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
33	Kepegawaian	8.132.288.209,00	7.725.664.975,00	95,00
34	Pendidikan dan Pelatihan	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	97,68
35	Penelitian dan Pengembangan	473.524.290,00	473.248.390,00	99,94
36	Inspektorat	16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	90,98
37	Kecamatan	38.616.678.815,00	36.623.631.461,00	94,84
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	51.757.784.062,00	50.955.687.468,00	98,45
JUMLAH		1.665.492.192.832,00	1.534.229.188.033,00	92,11

Sumber: SIPD 2024

3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan Perkiraan Terukur yang dapat dicapai untuk setiap Pos Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi Pendapatan maupun Belanja Daerah pada Tahun 2024 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

a. Pendapatan Daerah

Permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan serta kondisi kesehatan global. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit Pengelola Pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum Pendapatan Daerah, tetapi juga dapat menjadi permasalahan utama terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal menunjang pemutakhiran data pajak dan retribusi yang di kelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan Pajak/Retribusi
- 3) Kurangnya penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar hukum
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak/Retribusi
- 5) Penanganan Pajak dan Retribusi belum dilaksanakan satu pintu dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi
- 6) Pendistribusian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang kurang tepat waktu.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan dalam pencapaian target Belanja Daerah adalah:

- 1) Jumlah penduduk miskin masih cukup besar
Program-program untuk menurunkan persentase penduduk miskin mencakup penanganan berbagai persoalan lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri rumah tangga/industri kecil, pertanian, infrastruktur (air bersih dan pengairan, transportasi, ketenagalistrikan).
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan antara lain kurangnya aplikasi teknologi informasi, rendahnya kompetensi dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

profesionalisme aparatur Pemerintah, belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan aset, dan sarana prasarana pendukung kerja yang kurang memadai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus Kebijakan Akuntansi adalah memberikan acuan bagi :

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai SAP; dan
3. Pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Lingkungan akuntansi;
2. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
3. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
4. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
5. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
6. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
7. Jenis laporan keuangan; dan
8. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Berdasarkan hal tersebut dibuat Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Sistem Akuntansi pemerintah Daerah dan.
3. Bagan Akun Standar.

Dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Perangkat Daerah;
2. Sistem Akuntansi PPKD.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414), domisili kantor Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berada di Kolonodale Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Pada Tahun 2024 dalam menjalankan fungsi Pemerintahan umum dan pembangunan, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki unit organisasi yang meliputi :

1. Tujuh belas Dinas : (1) Dinas Pendidikan Kebudayaan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, (4) Dinas Sosial Daerah, (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Dinas Lingkungan Hidup, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (9) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (10) Dinas Perhubungan Daerah, (11) Dinas Komunikasi dan Informatika, (12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, (13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, (15) Dinas Perikanan Daerah, (16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta (17) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
2. Empat belas Puskesmas: (1) Puskesmas Petumbea, (2) Puskesmas Mayumba, (3) Puskesmas Pandauke, (4) Puskesmas Baturube, (5) Puskesmas Tambayoli, (6) Puskesmas Panca Makmur, (7) Puskesmas Lee, (8) Puskesmas Tomata, (9) Puskesmas Beteleme, (10) Puskesmas Kolonodale, (11) Puskesmas Molino, (12) Puskesmas Anutoluwu, serta (13) Puskesmas Potowe Indo Lijo (14) Puskesmas Wongko Ndaya
3. Sekretariat Daerah dengan Sembilan Bagian : (1) Bagian Umum dan Perlengkapan, (2) Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, (3) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (4) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, (5) Bagian Hukum, (6) Bagian Organisasi, (7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, (8) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta (9) Bagian Administrasi Perekonomian.
4. Sepuluh Kecamatan : (1) Kecamatan Petasia, (2) Kecamatan Petasia Barat, (3) Kecamatan Petasia Timur, (4) Kecamatan Lembo, (5) Kecamatan Lembo Raya, (6) Kecamatan Mori Atas, (7) Kecamatan Mori Utara, (8) Kecamatan Soyo Jaya, (9) Kecamatan Bungku Utara, dan (10) Kecamatan Mamosalato;
5. Enam Badan : (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (5) Badan Pendapatan Daerah, dan (6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretariat DPRD;
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Badan Layanan Umum Daerah; dan
10. Inspektorat Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh Penyelenggara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara:

a) Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Basis Akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis Kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun Kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan basis Kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA harus disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.

b) Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi Kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar Aset atau Kewajiban terkait.

c) Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, Pendapatan basis Kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis Kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi Kas.

Prinsip Layak Temu Biaya-Pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

e) Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f) Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau Pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau Pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat Kewajiban atau Belanja yang terlampau tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan LO

1) Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a) Pendapatan Pajak Asli Daerah - LRA
- b) Pendapatan Transfer - LRA
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2) Pendapatan -LO

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas selama Tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak Pendapatan Daerah dan penerimaan Kas daerah atau pada saat diterimanya Kas/Aset Non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) /Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres

/Permenkeu/Pergub/Perbup dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kastelah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya Kas dari Rekening Kas Umum Daerah(RKUD). Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap sangat handal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3. Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal;

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan Aktiva Tetap yang dialokasikan ke Penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan akun kontra Aset Tetap yang berhubungan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat Aset dengan masa pinjaman/sewa.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari Aset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2024

Untuk perhitungan penyusutan, waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan Aset Tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan demikian waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat Aset tersebut digunakan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tabel 4.2
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak Bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Selain angkutan Darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak	Harga per satuan barang	Rp500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
	bermotor		
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian/kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/ tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/ atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		Tidak dibatasi

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap diatas akan diperlakukan sebagai *ekstrakompabel*. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan) dan Kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan Aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

- e. Termasuk dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit Pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangkaian pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.
- Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari:

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain

- a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- c. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- g. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu.
- h. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- i. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- j. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- l. Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban.

4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.

Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagaipiutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan Naskah Perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir Tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar)

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian-pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;

d. Pemberian fasilitas/jasa.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusan bukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- Kualitas Piutang Diragukan; dan
- Kualitas Piutang Macet.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 12 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:

- 1) Umur Piutang 12 bulan sampai dengan 24 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

c. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 24 bulan sampai dengan 36 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

d. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 36 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak ditetapkan sebesar:
 - Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Umur Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	12 Bulan	0,5
B	Kurang Lancar	12 - 24 Bulan	10
C	Diragukan	24 - 36 Bulan	50
D	Macet	36 Bulan Keatas	100

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi

Adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok Aset Lancar dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/ mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan Kas;
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok Aset non lancar.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali;
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

- 1) Metode Biaya
Dengan menggunakan Metode Biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 2) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan Metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.
- 3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas Nilai Bersih Investasi yang Dapat Direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan presentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 4.4

Presentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 - 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 - 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempok pada periode 3 - 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagaiberikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan, dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, Penyertaan Modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.13. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas Pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.14. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih Laporan Keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang;
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (*normal*) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Contohnya adalah Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak yang memerlukan koreksisehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran Kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dianggap perlu untuk menyusun suatu Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Hal ini dalam rangka untuk mendukung Program Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual agar sukses dalam penerapannya di daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan Kebijakan Akuntansi di daerah adalah murni kewenangan daerah dimana Kepala Daerah adalah pemutus persetujuan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang telah melewati prosedur berupa koreksi hingga akhirnya diparaf oleh pejabat berwenang dan mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya dilimpahkan ke bagian terkait untuk dilaksanakan.



4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan Akuntansi Tertentu diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi, atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Pemerintah Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

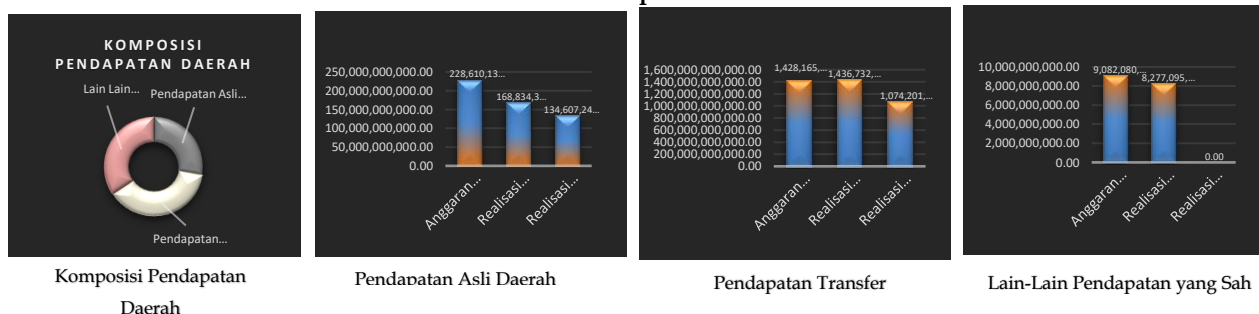
Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
Pendapatan Transfer	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
Jumlah	1.665.857.452.335,00	1.613.844.117.767,99	96,88	1.208.809.173.144,42

Sumber: SIPD 2024

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Grafik 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah



Sumber : BPKAD Morowali Utara Tahun 2024

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.555.959.818,00	62,72	35.305.535.224,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.125.000.000,00	22.045.729.269,00	56,35	34.769.349.686,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.748.577.180,00	67.003.477.838,99	103,48	60.668.193.934,42
Jumlah	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,84	134.607.242.716,42

Sumber: SIPD 2024

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Pajak Daerah Menurut Objek

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	200.000.000,00	196.054.950,00	98,03	182.041.100,00
Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	156,52	2.121.715.078,00
Pajak Hiburan	25.000.000,00	11.800.000,00	47,20	8.920.000,00
Pajak Reklame	100.000.000,00	337.875.945,00	337,88	99.493.191,00
Pajak Penerangan Jalan	78.020.000.000,00	41.769.100.617,00	53,54	16.899.697.283,00
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Gol.C	25.000.000.000,00	18.254.572.618,00	73,02	5.872.137.110,00
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	10.000.000.000,00	6.812.038.018,00	68,12	5.646.019.379,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.826.723.929,00	120,67	4.475.512.083,00
Jumlah	118.875.000.000,00	74.555.959.818,00	62,72	35.305.535.224,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 merupakan Realisasi dari Pajak Hotel/Cottage sebesar Rp196.054.950,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 98,03%, Jika



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

dibandingkan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp182.041.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.013.850,00.

2. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 adalah realisasi dari Pajak Rumah Makan sebesar Rp2.347.793.741,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 156,52%. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.121.715.078,00 mengalami kenaikan sebesar Rp226.078.663,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi meningkat sesuai target yang direncanakan berdasarkan wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar sebelumnya.
3. Realisasi Pajak hiburan Tahun 2024 merupakan realisasi dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana sebesar Rp11.800.000,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp25.000.000,00 atau 47,20%, Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.920.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.880.000,00.
4. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 merupakan realisasi dari reklame papan/*billboard/videotron/megatron* sebesar Rp337.875.945,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 337,88%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp99.493.191,00 mengalami kenaikan sebesar Rp238.382.754,00.
5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 merupakan realisasi dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp41.769.100.617,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.020.000.000,00 atau 53,54%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp16.899.697.283,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.869.403.334,00.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C, realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.254.572.618,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 73,02% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.872.137.110,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.382.435.508,00, terjadinya peningkatan disebabkan karena terjadi peningkatan aktivitas pengambilan/pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) baik untuk keperluan komersial (jual/beli) maupun untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan daerah, sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 merupakan realisasi dari PBB sektor Pedesaan-Perkotaan sebesar Rp6.812.038.018,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 68,12%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.646.019.379,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.166.018.639,00.
8. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2024 merupakan realisasi dari BPHTB atas Perolehan Pemindahan Hak sebesar Rp4.826.723.929,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 120,67%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.475.512.083,00 mengalami kenaikan sebesar Rp351.211.846,00, disebabkan karena terjadi peningkatan transaksi perolehan hak atas tanah baik hak perolehan baru maupun peralihan hak sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan BPHTB Tahun 2024.

Pemungutan Pajak Daerah diatas telah dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.4
Pendapatan Retribusi Daerah menurut Objek

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	3.600.000.000,00	3.666.087.035,00	101,84	6.824.553.030,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.183.592.035,00	106,12	6.313.053.030,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	482.495.000,00	80,42	511.500.000,00
Retribusi Jasa Usaha	525.000.000,00	498.190.491,00	94,89	312.512.204,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	53.632.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	175.000.000,00	72.750.000,00	41,57	68.868.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	25.740.000,00	51,48	35.020.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000,00	314.699.491,00	157,35	122.662.204,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	63.001.000,00	126,00	32.330.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	35.000.000.000,00	17.881.451.743,00	51,09	27.632.284.452,00
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	17.771.530.832,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	355.590.643,00	1,78	0,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	15.000.000.000,00	17.525.861.100,00	116,84	9.860.753.620,00
Jumlah	39.125.000.000,00	22.045.729.269,00	56,35	34.769.349.686,00

Sumber: SIPD 2024

Penyebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2024 adanya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang berada di 14 Puskesmas Se-Kabupaten Morowali Utara sehingga masyarakat yang berobat merasa puas dengan layanan Kesehatan yang diberikan.
- Retribusi Pelayanan Pasar realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target retribusi daerah yaitu fasilitas belum memadai, kurangnya pelayanan SDM yang belum memadai, dan kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun atas kendala tersebut OPD terkait terus melakukan pembenahan dengan menganggarkan dana untuk meningkatkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

atau memperbaiki fasilitas, meningkatkan pelayanan, memberikan pelatihan, dan memaksimalkan sosialisasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya retribusi daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha sewa alat kendaraan bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Daerah terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 44%.
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terelisasi sebesar Rp72.750.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00 atau 41,57% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir tahun anggaran 2024 masih sangat rendah hal ini disebabkan karena tarif yang ditetapkan masih sangat rendah dalam Peraturan Kepala Daerah terkait dengan penetapan retribusi parkir, kemudian lahan-lahan parkir yang tersedia masih sangat kurang dan belum memadai serta tidak dikelola dengan baik. Namun kedepan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi dan perubahan Perkada tentang tarif baru yang mengatur tentang retribusi parkir.
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp25.740.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 51,48% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi pemotongan hewan Tahun Anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena ketersediaan infrastruktur RPH yang memenuhi standar teknis kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan kehalalan masih sangat terbatas sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Rumah Potong Hewan.
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp314.699.491,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 157,35% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan tahun anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi kepelabuhanan sehingga menyebabkan belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari retribusi kepelabuhanan tersebut.
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp63.001.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 126% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya daya beli



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

masyarakat yang memanfaatkan penjualan hasil produksi usaha daerah baik itu dari bibit benih ikan maupun bibit benih tanaman.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait untuk pembangunan atau perubahan suatu bangunan. PBG diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan atau renovasi suatu gedung sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti peraturan tata ruang, keselamatan bangunan, dan lingkungan.

Proses PBG mencakup pemeriksaan dokumen perencanaan bangunan, desain, struktur, dan aspek keselamatan, serta ketaatan terhadap peraturan zonasi, tata kota, dan lingkungan. Tanpa PBG, pembangunan atau perubahan pada bangunan tidak sah menurut hukum dan bisa dikenakan sanksi.

Pada tahun 2024 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp355.910.213,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 1,78%. Dapat dijelaskan bahwa realisasi PBG tahun anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak dan minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurus pembayaran PBG.

- b. Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp17.525.861.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 116,84%.

Pemungutan Pajak Daerah diatas telah dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan sebesar Rp5.861.556.000,00 dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.229.148.166,00, persentase capaian realisasinya 89,21% dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.864.163.872,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.364.984.294,00. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sehingga hal ini dapat meningkatkan kepemilikan saham yang berujung pada peningkatan porsi dividen yang diterima Pemerintah Daerah.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut Objek

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	2.860.463.600,00	0,00	1.153.895.200,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	25.750.000,00	0,00	0,00
Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.232.544.021,00	74,42	4.143.819.084,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.000.000,00	1.608.177.761,59	76,58	1.760.001.994,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	319.570,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	8.050.036.817,00	5.327.288.027,52	66,18	6.775.150.413,42
Pendapatan BLUD	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	109,97	38.673.695.152,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	8.161.632.091,00
Jumlah	64.748.577.180,00	67.003.477.838,99	103,48	60.668.193.934,42

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.860.463.600,00 yang merupakan hasil penjualan alat angkutan darat dari hasil Lelang penjualan kendaraan dinas. Lelang Nomor: 393/16.03/2024-01 tanggal 28 Agustus 2024.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp25.750.000,00 yang merupakan hasil sewa BMD berdasarkan SK Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan Gedung sewa morokoa.

3. Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 terdiri dari:

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp2.232.544.021,00 yang merupakan realisasi Jasa Giro Kas Daerah, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 74,42% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.143.819.084,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.911.275.063,00. Jasa giro pada kasda sebesar Rp2.228.979.159,00 dan jasa giro pada kas bendahara pengeluaran sebesar Rp3.564.862,00.

4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 sebesar Rp1.608.177.761,59 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.100.000.000,00 atau 76,58%. Dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.760.001.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.217.632,41.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.6
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Denda Keterlambatan Pekerjaan pembuatan WC pelataran kantor bupati CV Boanerges	363.300,00
2	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan bagi CV. Marchelino Perkasa atas pekerjaan pembuatan tambangan penyeberangan desa mayumba Kec. Mori Utara	4.325.507,00
3	pembayaran denda keterlambatan pek. Bagi CV ARKA BISATA ENGINEERING atas pek. Pelebaran jalan SP3 jalan provonsi (Depot Pertamina Tahun 2023}	9.928.215,15
4	Setoran Tunai CV. Indah Sarana Denda Keterlamabatan Pekerjaan	150.000.000,00
5	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP3 Desa Peonea Kec. Mori Atas TA 2024 CV Lima Dua	31.762.553,39
6	Denda Keterlambatan atas pekerjaan CV Hanan Berjaya	4.946.156,38
7	Denda Keterlambatan atas pekerjaan CV Hanan Berjaya	9.291.156,48
8	Denda Keterlambatan Pekerjaan CV. Hosana	2.282.000,00
9	Denda Keterlambatan Pekerjaan CV. Hosana	693.000,00
10	Denda Keterlambatan atas penyaluran kegiatan pengadaan sembako bersubsidi	871.720,00
11	Setoran Tunai CV. Indah Sarana Denda Keterlamabatan Pekerjaan	150.000.000,00
12	Denda Kekuranga Volume pekerjaan rekonstruksi SP3 jalan provinsi - Taronggo Tahun 2022 an. Fita Bungku Persada	523.803.000,00
13	Denda Keterlambatan Pekerjaan peningkatan jalan ensa - lanumor (DAK) Tahun 2024 PT. Timur Putra Celebes	291.618.498,59
14	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan jembatan puawu tahap II desa wawopada kec. Lembo TA 2024 CV Putra Bintang Pratama	8.142.829,00
15	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan atas pelaksanaan Bronjong Desa Opo Dusun II Kec. Bungku Utara TA 2024 CV Ryzky Abadi	5.087.297,60
16	Setoran Tunai CV Indah Sarana	400.000.000,00
17	Denda Keterlambatan Pekerjaan CV CV. Bayu Dita Nugraha	10.669.128,00
18	Kor31 - Reklasifikasi pendapatan yang salah dicatat pada Pendapatan dari pengembalian BAPENDA Rp 4.393.400	4.393.400,00
JUMLAH		1.608.177.761,59

Sumber: SIPD 2024

5. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 sebesar Rp5.327.288.027,52 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.050.036.817,00 atau sebesar 66,18%. Merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp5.167.449.706,52 dan pengembalian belanja BOS sebesar Rp159.838.321,00. Rincian pendapatan dari pengembalian dapat dilihat pada lampiran I.

6. Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp54.948.934.858,88 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.968.540.363,00 atau 109,97%. Dengan rincian pendapatan jasa layanan umum sebesar Rp54.721.960.864,00 dan Pendapatan lain-lain BLUD sebesar Rp226.973.994,88.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.059.614.000	1.386.889.373.248,00	100,20	1.031.790.449.328
-Dana Perimbangan	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	921.236.099.328,00
Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	110.554.350.000,00
Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	42.411.481.00
Pendapatan Bagi Hasil	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	40.134.041.100,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.277.440.000,00
Jumlah	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428

Sumber: SIPD 2024

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka LRA untuk pendapatan dana perimbangan Tahun 2024 dan 2023, yaitu rincian atas saldo pendapatan dana perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024. Persentase pencapaian realisasi, dan nilai yang direalisasikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.8
Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi(Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	522.391.471.000,00	528.688.970.555,00	101,21	248.076.707.621,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	555.056.781.671,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.782.277.000,00	62.110.361.172,00	97,38	42.255.915.242,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.718.290.000,00	78.784.991.456,00	93,00	75.846.694.794,00
Jumlah	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	921.236.099.328,00

Sumber:SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian saldo Dana Perimbangan diuraikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Tabel 5.9
Dana Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.621.760.000,00	82.256.909.150,00	334,08	23.498.960.621,00
DBH PPh Pasal 21	7.926.052.000,00	5.066.779.000,00	63,93	4.702.988.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	66.626.000,00	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.220.000,00	7.825.000,00	45,44	1.208.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	109.574.610.000,00	12.093.218.000,00	11,04	12.740.860.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	31.383.780.000,00	94.842.760.000,00	302,20	54.169.631.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.210.905.000,00	1.652.138.000,00	26,60	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	332.698.763.000,00	322.859.438.405,00	97,04	141.682.131.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	430.182.000,00	315.078.000,00	73,24	9.023.533.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.002.581.000,00	2.002.581.000,00	100,00	2.257.396.000,00
DBH Sawit	7.525.618.000,00	7.525.618.000,00	100,00	0,00
Jumlah	522.391.471.000,00	528.688.970.555,00	101,21	248.076.707.621,00

Sumber: SIPD 2024

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp528.688.970.555,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	554.456.781.671,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Jumlah	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	555.056.781.671,00

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dana Alokasi Umum yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp595.195.257.065,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tabel 5.11
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	498.076.000,00	498.076.000,00	100,00	566.116.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.672.152.000,00	6.672.152.000,00	100,00	11.477.140.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.928.672.000,00	14.928.672.000,00	100,00	10.839.466.100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	10.908.566.000,00	99,17	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	99.963.000,00	99.950.000,00	99,99	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.404.053.000,00	9.209.487.893,00	97,93	18.836.177.242,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.639.959.000,00	1.581.432.000,00	96,43	237.165.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00		299.850.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.539.402.000,00	18.212.025.279,00	93,21	0,00
Jumlah	63.782.277.000,00	62.110.361.172,00	97,38	42.255.915.242,00

Sumber: SIPD 2024

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.110.361.172,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK No. 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Tabel 5.12
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.948.780.000,00	16.789.684.944,00	88,61	16.871.648.350,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.070.000.000,00	897.500.000,00	83,88	1.005.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.780.156.000,00	36.266.234.800,00	101,36	32.386.533.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.645.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.799.250.000,00	6.047.225.200,00	0,00	3.926.468.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	5.536.011.481,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	11.447.076.935,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	394.744.000,00	232.076.500,00	58,79	450.927.200,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.682.775.000,00	4.619.468.000,00	98,65	1.734.241.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	200.920.900,00	49,49	438.800.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	404.488.828,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.795.400.000,00	36.600.000,00	1,31	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.328.327.000,00	3.363.545.999,00	101,06	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	316.631.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.731.227.000,00	10.331.735.113,00	88,07	0,00
Jumlah	84.718.290.000,00	78.784.991.456,00	93,00	75.846.694.794,00

Sumber: SIPD 2024

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.784.991.456,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Rincian Pendapatan Dana BOS dapat dilihat dalam lampiran II.

5.1.1.2.2 Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.581.662.000,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Rincian Dana Desa dapat dilihat dalam lampiran III.

5.1.1.2.3 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.528.131.000,00, dengan rincian Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.850.125.000,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan sebesar Rp6.678.006.000,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.078.666.714,00	6.895.774.080,00	97,42	6.718.905.427,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.296.953.566,00	8.019.832.291,00	96,66	7.205.161.489,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.473.367.484,00	22.719.078.806,00	146,83	14.909.457.838,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.262.848.077,00	3.465.855.075,00	81,30	2.905.626.373,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.993.789.002,00	8.742.793.414,00	97,21	8.394.889.973,00
Jumlah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	40.134.041.100,00

Sumber: SIPD 2024

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor
Semakin banyak kendaraan baru yang didaftarkan, sehingga semakin meningkat pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Kenaikan harga bahan bakar
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan persentase dari harga jual bahan bakar, maka kenaikan harga BBM dapat meningkatkan penerimaan PBBKB di tahun 2024.
3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
4. Penegakan Hukum dan Razia Pajak
Razia kendaraan yang dilaksanakan oleh BAPENDA bekerjasama dengan SAMSAT dalam hal menertibkan kendaraan yang menunggak pajak dapat mendorong wajib pajak melunasi kewajiban mereka.
5. Pertumbuhan Ekonomi Regional
Dengan ekonomi yang lebih baik, daya beli masyarakat meningkat, termasuk pembelian kendaraan baru dan konsumsi BBM.
6. Kenaikan tarif cukai rokok
Pemerintah secara berkala menaikkan tarif cukai rokok, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pajak rokok, termasuk bagian yang dibagi hasil ke daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.14.3/11/BAPENDA-G.ST/2024 Tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dan SK Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak daerah tahun anggaran 2023 Nomor: 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IV.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00

Sumber: SIPD 2024

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023. Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Nama Puskesmas	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2024 (Rp)	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2023 (Rp)
PKM Petumbea	576.824.666,00	575.005.364,00
PKM Mayumba	488.372.736,00	544.697.379,00
PKM Pandauke	637.486.454,00	694.062.374,00
PKM Baturube	911.773.027,00	1.003.283.153,00
PKM Tambayoli	230.040.014,00	238.468.139,00
PKM Pancamakmur	419.375.096,00	393.821.634,00
PKM Lee	209.201.762,00	223.270.316,00
PKM Tomata	796.221.935,00	702.168.219,00
PKM Beteleme	985.436.837,00	1.019.377.971,00
PKM Kolonodale	1.102.769.387,00	1.015.911.218,00
PKM Molino	1.149.946.201,00	1.100.492.305,00
PKM Anutuluwu	528.160.431,00	546.782.315,00
PKM Lijo	126.729.558,00	104.291.704,00
PKM Wongko Ndaya	114.757.658,00	0,00
Jumlah	8.277.095.762,00	8.161.632.091,00

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bertambahnya jumlah dokter berpengaruh bertambahnya jumlah kapitasi
 - b. Bertambahnya kepesertaan anggota BPJS.

5.1.2 Belanja Daerah

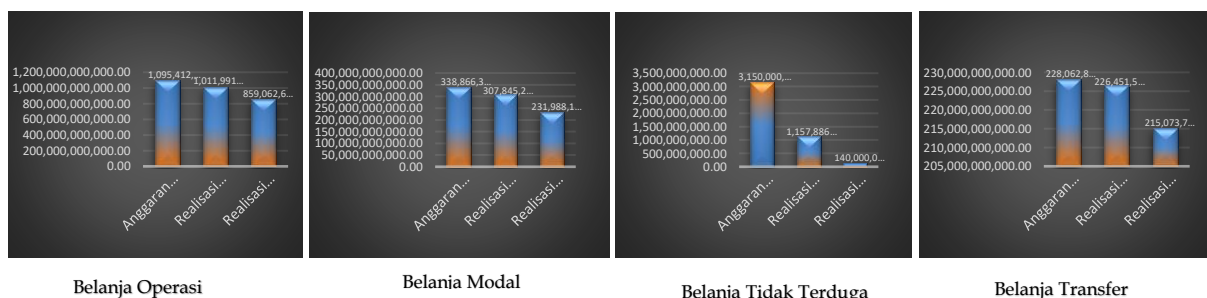
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16
Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26
Belanja Modal	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27
Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
Belanja Transfer	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
Jumlah	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53

Sumber: SIPD 2024

Grafik 5.2
Realisasi Belanja Operasi



5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.17
Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja pegawai	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93	425.231.570.909,00
Belanja barang dan jasa	451.830.016.908,82	418.957.792.995,49	92,72	376.440.314.339,00
Belanja bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
Belanja hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83	22.516.369.666,00
Belanja bantuan sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86	33.215.227.288,26
Jumlah	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26

Sumber: SIPD 2024

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.18
Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.403.752.186,96	289.868.847.673,00	88,54	246.704.342.115,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.568.582.264,00	109.791.307.469,00	88,14	95.457.476.468,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.812.818.766,40	56.367.126.065,00	97,50	55.055.678.452,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.049.685.981,00	10.951.341.721,00	99,11	10.835.454.019,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	196.640.136,00	172.506.157,00	87,73	173.075.819,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	828.000.000,00	746.000.000,00	90,10	1.080.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117,47	15.924.944.036,00
Jumlah	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93	425.231.570.909,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Jika melihat tabel tersebut diatas, pada tahun anggaran 2024 realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN, belanja Tambahan Penghasilan ASN, belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN serta belanja gaji dan tunjangan DPRD jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai yang pembiayaannya bersumber dari PPP3K serta adanya penyesuaian tunjangan pada Aparatur Sipil Negara.
 - b. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD jika dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 40% hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan bagi Kepala daerah dan Wakil kepala daerah beserta Pimpinan DPRD sehingga menyebabkan terjadinya penurunan angka realisasi.
 - c. Belanja Pegawai BLUD mengalami kenaikan, karena terjadi kenaikan pendapatan BLUD pada RSUD Kolonodale dan juga karena bertambahnya jumlah Pegawai RSUD Kolonodale.
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 di masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran V.a.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	104.549.758.439,84	97.796.917.133,89	93,54	86.155.198.379,00
Belanja Jasa	166.022.331.469,00	154.942.886.592,00	93,33	143.177.571.679,00
Belanja Pemeliharaan	42.940.333.219,98	39.790.645.977,00	92,66	43.001.431.073,00
Belanja Perjalanan Dinas	93.851.421.731,00	87.341.007.680,00	93,06	72.551.707.887,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	677.500.000,00	620.298.000,00	91,56	1.619.484.980,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	20.679.177.468,00	16.912.608.419,00	81,79	17.284.204.955,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	465.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	95,18	12.650.715.386,00
Jumlah	451.830.016.908,82	418.957.792.995,49	92,72	376.440.314.339,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Tahun anggaran 2024 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp451.830.016.908,82 direalisasikan sebesar Rp418.957.792.995,49 atau 92,72%. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi anggaran pada belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 dan dibandingkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan 11,29%. Secara umum dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

a. Keterlambatan Proses Pengadaan

Proses pengadaan barang/jasa pada tahun berkenaan terkesan lambat dilaksanakan hal ini karena adanya kendala administrasi, teknis, dan lelang yang gagal, sehingga menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran.

b. Perubahan Prioritas atau Kebijakan

Adanya pergeseran kebijakan atau perubahan kegiatan mendadak, seperti pergeseran anggaran, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan belanja barang dan jasa.

c. Kendala Teknis atau Alam

Adanya proyek pengadaan yang bergantung pada kondisi cuaca atau beberapa faktor geografis sehingga hal ini menyebabkan realisasi belanja rendah.

2. Rincian belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat pada lampiran VI.
3. Rincian belanja barang BOS dapat dilihat pada lampiran VII.
4. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.b.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Belanja bunga

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.840.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, karena Tahun Anggaran 2024 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp8.840.204.660,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.622.865.171,00 atau 97,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan hal ini merupakan Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman dalam rangka mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Januari s.d Desember 2024.
2. Rincian saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.c.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	9.666.957.000,00
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	9.666.957.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.850.637.218,00	14.358.626.945,00	96,69	12.197.632.666,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	726.784.965,00	570.631.945,00	78,51	2.742.713.800,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.957.452.253,00	6.636.595.000,00	95,39	3.589.918.950,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.716.400.000,00	6.701.400.000,00	99,78	5.764.999.916,00
• Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	0,00
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.663,00	692.026.662,99	99,99	651.780.000,00
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.662,00	692.026.662,99	99,99	651.780.000,00
Jumlah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83	22.516.369.666,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp33.533.043.000,00, atau 77,62% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran bagi:

- 1) TNI/POLRI sebesar Rp10.200.000.000,00, berdasarkan NPDH Nomor : 032/0256/KESBANGPOL/X/2024, Nomor : 8/508/X/2024,
- 2) BAWASLU sebesar Rp7.875.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor : 032/0396/KESBANGPOL/XI/2023, Nomor : 011/KU.00.00/K.ST.07/11/2023; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 3) KPU sebesar Rp25.125.000.000,00, berdasarkan NPHD Nomor : 180/0381/hkm/XI/2023, Nomor : 315/KU.07-NK/7212/2023 untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami kenaikan sebesar Rp2.160.994.279,00, atau 15,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan bantuan kepada Masyarakat/Lembaga, pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah disesuaikan dengan alokasi anggaran berdasarkan usulan dan kebutuhan yang masuk. Yang terdiri dari:
- 1) Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan SK Bupati No:188.45/KEP-B.MU/0196/IIX/2024 Peningkatan Rumah Ibadah,
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, berdasarkan SK Bupati Nomor : 19/NPHD/KESRA/IX/2024, Permintaan Pembayaran Bantuan Hibah Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama,
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, berdasarkan NPHD Nomor : 43/NPHD/KESRA/XII/2024, Kepada Lembaga Keagamaan, dan
 - 4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan SK Bupati No.NPHD Ta.a Wana Raya, Nomor :032/022/umum/IX/2024, Nomor:06/BPH-AMAN/TW/IX/2024, No. NPHD kerukunan Keluarga Toraja Tahap II, Nomor :032/0230/umum/IX/2024, Nomor:005/KKT-MORUT/IX/2024, No. NPHD Kerukunan Keluarga Mori Toongku, Nomor:032/0229/umum/IX/2024, Nomor:13/KKMTT-PUSAT/IX/2024, No. NPHD Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur, Nomor : 032/0226/umum/IX/2024, Nomor:03/KKNTT/IX/2024.
- c. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada:
- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2024 yang didasarkan pada pada Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0179/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Hibah Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD dan SMP Swasta Kabupaten Morowali Utara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22
Belanja Hibah Dana BOSP

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
SD ALESINTOWE	14.400.000,00
SD ANUGRAH	14.400.000,00
SD GKST TARONGGO	10.800.000,00
SD SALIANO	14.400.000,00
SD Woonsa	14.400.000,00
SEKOLAH DASAR FATUMARANDO TERPADU	14.400.000,00
SMP-ISLAM AL-MADINAH	10.800.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
SD GKST BETELEME	10.800.000,00
SMP GKST BETELEME	12.600.000,00
SD GKST RONTA	13.140.000,00
SD GKST SEA	14.400.000,00
SD Islam Terpadu AL-MUHAJIRIN	14.400.000,00
SD GKST ENSA	10.800.000,00
SD GKST GONTARA	10.800.000,00
SD Tunas Lestari Korola	30.060.000,00
SMP KRISTEN GKST ENSA	18.360.000,00
SD ALKHAIRAAT KOLONODALE	48.600.000,00
SD GKST KOLONODALE	37.080.000,00
SD IT WALADUN SHALIH KOROLAKI	10.800.000,00
SD GKST TIU	14.760.000,00
SD KRISTEN GKST SAMPALOWO	10.800.000,00
SMP KRISTEN GKST TIU	15.840.000,00
SD ALKHAERAAT BUNGINTIMBE	30.420.000,00
SMP ALKHAIRAAT BUNGINTIMBE	34.920.000,00
Jumlah	432.180.000,00

Sumber: SIPD 2024

- d. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0033/II/2024 dan telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/KEP-B.MU/0226/IX/2024 Tahun Anggaran 2024. Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik mengalami kenaikan sebesar Rp36.166.463.941,99 atau 61,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari jumlah perolehan suara sehingga hal ini sangat mempengaruhi bertambahnya realisasi maupun pagu anggaran. Dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
Hibah Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (GOLKAR)	199.493.333,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (PERINDO)	35.166.666,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (HANURA)	76.286.666,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (NASDEM)	100.489.999,33
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (DEMOKRAT)	52.250.000,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PDIP)	46.720.000,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (GERINDRA)	57.703.333,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PKB)	72.693.333,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PKS)	27.843.332,66
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PBB)	23.380.000,00
Jumlah	692.026.662,99

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Rincian saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada masing-masing OPD pada lampiran V.d.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100	11.875.008.400,00
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100	11.875.008.400,00
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat	18.524.640.005,00	18.484.653.005,00	99,78	21.340.218.888,26
• Belanja Bantuan Sosial Uang kepada kelompok masyarakat	18.524.640.005,00	18.484.653.005,00	99,78	21.340.218.888,26
Jumlah	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86	33.215.227.288,26

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Pada tahun anggaran 2024 untuk Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu dan kepada Masyarakat dibandingkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah yang pada tahun berkenaan pemerintah lebih memprioritaskan pengeluaran belanja disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/KEPB.MU/0080/III/2024 tentang pemberian bantuan hibah bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- Rincian saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada masing-masing OPD pada lampiran V.e.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.25
Belanja Modal

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	1.110.890.900,00
Belanja Peralatan Dan Mesin	82.070.107.453,00	76.216.049.055,00	92,87	36.930.658.470,00
Belanja Bangunan Dan Gedung	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26	80.182.171.788,27
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50	113.670.285.431,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	94.125.000,00
Jumlah	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan Belanja Modal:

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dianggarkan sebesar Rp338.866.386.661,82 dan terealisasi sebesar Rp307.845.218.053,18 atau 90,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 32,70%. Persentase kenaikan ini disebabkan antara lain:

- Peningkatan kebutuhan infrastruktur

Pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, Gedung sekolah dan fasilitas Kesehatan.

- Program Prioritas Daerah

Pemerintah daerah kabupaten morowali utara menganggarkan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk menunjang operasional pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas Se Kabupaten Morowali Utara.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar Rp1.963.260.000,00 atau 35,24% dari anggaran sebesar Rp5.570.407.150,00, jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.110.890.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp852.369.100,00, disebabkan karena adanya kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk pembangunan, dibutuhkan adanya pembebasan lahan. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.963.260.000,00 merupakan realisasi dari belanja modal lapangan yang digunakan sebagai tanah untuk jalan.

Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.f.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	224.293.351,00	219.385.000,00	97,81	35.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	17.656.242.700,00	14.642.085.300,00	82,93	3.496.981.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.887.405,00	44.881.000,00	99,99	52.848.600,00
Belanja Modal Alat Pertanian	35.742.000,00	29.514.000,00	82,58	1.727.590.520,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.034.901.134,00	9.699.253.688,00	96,66	15.355.110.317,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.725.339.517,00	1.664.039.500,00	96,45	2.863.690.885,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.547.601.141,00	33.411.169.861,00	99,59	2.197.267.554,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.195.153.750,00	1.194.800.000,00	99,97	1.352.625.863,00
Belanja Modal Komputer	9.640.645.250,00	8.924.884.382,00	92,58	9.095.377.779,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	2.101.176,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	213.163.360,00	213.160.000,00	100,00	106.373.348,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	599.089.200,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	46.102.128,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.604.362.245,00	4.107.532.824,00	73,29	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	96,15	0,00
Jumlah	82.070.107.453,00	76.216.049.055,00	92,87	36.930.658.470,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Karena banyaknya fasilitas instansi kantor yang tidak layak digunakan, sehingga banyak kebutuhan peralatan dan mesin.
 - Karena Gedung dan bangunan baru yang memerlukan banyak peralatan dan mesin.
 - Terjadi inflasi harga peralatan dan mesin.
- Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.g.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.27
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	94.132.372.787,51	85.886.267.524,18	91,24	77.451.712.195,27
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.510.296.900,00	2.296.962.300,00	91,50	2.730.459.593,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
Jumlah	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26	80.182.171.788,27

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya karena adanya pembangunan gedung kantor yang baru.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.h.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	106.524.179.989,20	97.440.430.969,00	91,47	86.057.885.870,00
Belanja Modal Bangunan Air	30.167.484.451,01	28.607.837.525,00	94,83	19.355.718.711,00
Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00	49.425.000,00	98,85	87.536.000,00
Belanja Modal Jaringan	17.386.537.931,10	14.930.670.980,00	85,87	8.169.144.850,00
Jumlah	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50	113.670.285.431,00

Sumber: SIPD 2024

Berdasarkan rincian objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas:

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Karena adanya peningkatan atau pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Morowali Utara;
 - b. Adanya Pembangunan perpipaan air bersih;
 - c. Adanya Pembangunan tanggul;
 - d. Adanya pengadaan pemasangan lampu jalan.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.i.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	255.000.000,00	254.614.700,00	99.85	94.125.000,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya karena adanya permintaan penambahan buku untuk Perpustakaan yang baru.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.j

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.157.886.000,00 atau 36,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 87,91%. Persentase kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan penanganan keadaan darurat dan kejadian-kejadian tak terduga yang memerlukan alokasi dana tambahan di antaranya bencana alam. Pengeluaran atas belanja tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0159/VII/2024 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Morowali Utara.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31
Belanja Transfer

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil	944.103.854,00	0,00	0,00	933.454.571,00
Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	214.140.316.018,00
Jumlah	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00

Sumber: SIPD 2024

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024. Realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar tagihan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32
Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	214.140.316.018,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp227.118.757.098,00 dan terealisasi sebesar Rp226.451.591.862,00 atau 99,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,44%. Persentase kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan Pembangunan infrastruktur, penambahan program prioritas daerah, serta penyesuaian terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan pelayanan public juga turut mendorong peningkatan alokasi anggaran tersebut.

Pengeluaran atas belanja tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 19 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana desa setiap desa Tahun Anggaran 2024 Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada lampiran VIII.

5.1.3 Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.33
Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	190.873.934.975,64
Pengeluaran Pembiayaan	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00
Jumlah	(365.259.500,00)	1.324.478.156,49	362,61	149.788.038.719,64

Sumber: SIPD 2024

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.34

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	190.873.934.975,64

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp52.332.702.392,00 dan terealisasi sebesar Rp52.299.328.048,49 atau 99,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 264,73%. Persentase penurunan SILPA ini disebabkan antara lain adanya peningkatan penyerapan anggaran sehingga belanja daerah lebih terealisasi sesuai rencana.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
Jumlah	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari Penyertaan Modal Daerah dianggarkan sebesar Rp3.861.556.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.138.444.000,00 atau 55,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 63,67%. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dianggarkan sebesar Rp48.836.405.892,00 dan terealisasi sebesar Rp48.836.405.892,00 atau 100% mengalami penurunan sebesar 23,04% Persentase penurunan ini disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran daerah sehingga pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti Pembangunan bidang infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.36
Penyertaan Modal Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD):

• PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
---	------------------	------------------	-------	------------------

Sumber: SIPD 2024

Tabel 5.37
Daftar Konversi Dana Setoran Modal dari BPD Capem Morowali

No	TGL SETOR	DANA SETORAN MODAL (DSM)	KONVERSI			TOTAL SAHAM	SISA
			NOMINAL	LEMBAR SAHAM	AGIO SAHAM		
			100,000		58,459		Belum cukup 1 lembar saham
1	23 Desember 2015	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
2	19 April 2016	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
3	AKUM,SISA DSM	-	100.000,00	1,00	58.459,00	100.000,00	(158.459,00)
4	31 Agustus 2017	3.500.000.000,00	2.208.700.000,00	22.087,00	1.291.183.933,00	2.208.700.000,00	116.067,00
5	09 Agustus 2018	5.100.000.000,00	3.218.400.000,00	32.184,00	1.881.444.456,00	3.218.400.000,00	155.544,00
6	03 Juli 2019	5.086.197.963,00	3.209.700.000,00	32.097,00	1.876.358.523,00	3.209.700.000,00	139.440,00
7	30 Desember 2022	1.750.000.000,00	1.104.300.000,00	11.043,00	645.562.737	1.104.300.000,00	137.263,00
8	29 Desember 2023	3.500.000.000,00	2.208.700.000,00	22.087,00	1.291.183.933,00	2.208.700.000,00	116.067,00
9	31 Desember 2024	2.138.444.000,00					
Total		22.936.197.963,00	14.474.100.000,00	144.741	8.461.414.119,00	14.474.100.000,00	683.844,00

Sumber: Bank Sulteng

Penjelasan:

- Harga saham atas dana setoran modal Pemda sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp100.000 per lembar saham.
- Harga saham atas dana setoran Pemda tahun 2013 sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp158.459 per lembar saham dengan rincian Rp100.000 dibukukan sebagai nominal saham dan Rp58.459 dibukukan sebagai Agio saham berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa penilai Publik 'Miduk Totok' yang telah diputuskan pada RUPS-LB tanggal 12 April 2013 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT.Bank Pembangunan Daerah Sulteng No.69 tanggal 21 Juni 2013.
- Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2023 total Modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tercatat sebesar Rp22.936.197.963,00
Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0287/XII/2024 tentang persetujuan pemberian dana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2024.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
Jumlah	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari BUMN yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sebesar Rp.48.836.405.892,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp195.345.654.826,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp118.021.345.497,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada *poin 5.3*

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Tahun Anggraan 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
➤ Pendapatan Daerah	1.665.857.452.335,00	1.613.844.117.767,99	96,88	1.208.809.173.144,42
✓ Pendapatan Asli Daerah	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
✓ Pendapatan Transfer	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
➤ Belanja Daerah	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	1.306.264.508.871,53
✓ Belanja Operasi	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26
✓ Belanja Modal	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27
✓ Belanja Tak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
➤ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	190.873.934.975,64
✓ Pengeluaran Pembiayaan	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	41.085.896.256,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(365.259.500,00)	67.722.190.412,82	0,00	52.332.702.992,53

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp67.722.190.412,82 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terikat dan nonterikat

Uraian	Nilai (Rp)
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	9.709.774.829,24
✓ Dana pada Kas Dana BOS	337.855.207,59
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.106.373,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	6.698.555,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Pelampauan Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	57.388.377.822,99
Jumlah	67.722.190.412,82

Sumber: SIPD 2024

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.41
Keberadaan SiLPA

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00
Kas di BLUD	9.709.774.829,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.106.373,00
Jumlah	67.722.190.412,82

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada **Poin 5.5** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kabupaten Morowali Utara (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.42
Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05	(145.184.649.842,11)
Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00	(561.425.154,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00	432.606.533,00
Kas di BLUD	7.968.540.362,00	0,00	7.968.540.362,00
Kas Dana BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59	(1.209.306.677,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00	(87.611.591,00)
Jumlah	52.332.702.992,53	190.974.549.361,64	(138.641.846.369,11)

Sumber: SIPD 2024

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.43
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	52.299.328.048,49	190.873.934.975,64	(138.574.606.927,15)

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA Tahun Anggaran 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA Tahun Anggaran 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *poin* 5.2.3 di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.44
SiLPA/SiKPA

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	67.722.190.412,81	52.332.702.992,53	15.389.487.420,28

Sumber: SIPD 2024

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *poin* 5.1. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *poin* 5.2.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.45
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Koreksi atas rekonsiliasi Kas Daerah	0,00	(2.126.686,00)	2.126.686,00
Koreksi atas saldo Kas di Bendahara BLUD	(48.076.016,04)	0,00	(48.076.016,04)
Koreksi kesalahan Kas di Bendahara BOS	14.701.072,00	102.741.072,00	(88.040.000,00)
Jumlah	(33.374.944,04)	100.614.386,00	(133.989.330,04)

Sumber: SIPD 2024

Rincian dari koreksi SiLPA sebesar Rp33.374.944,04 adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan setoran untuk pembukaan rekening Bank Mandiri oleh direktur RSUD sebesar Rp775.000,00
2. Pengembalian kas tekor SDN 2 Korowou sebesar Rp14.585.072,00
3. Kas bos sebesar pada SDN 1 Kolaka dan SDN 3 Baturube sebesar Rp116.000,00,
4. Kurang catat belanja BLUD dari kelebihan setor pajak Tahun Anggaran 2023 serta biaya pajak dan administrasi rekening sebesar (Rp48.851.016,04).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah abupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.46
Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00	435.276.242,00	(428.577.687,00)
Kas di BLUD	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.106.373,00	213.513.606,00	(183.407.233,00)
Jumlah	67.722.190.412,82	52.332.702.992,53	15.389.487.420,29

Sumber: SIPD 2024

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point* di atas.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47
Neraca

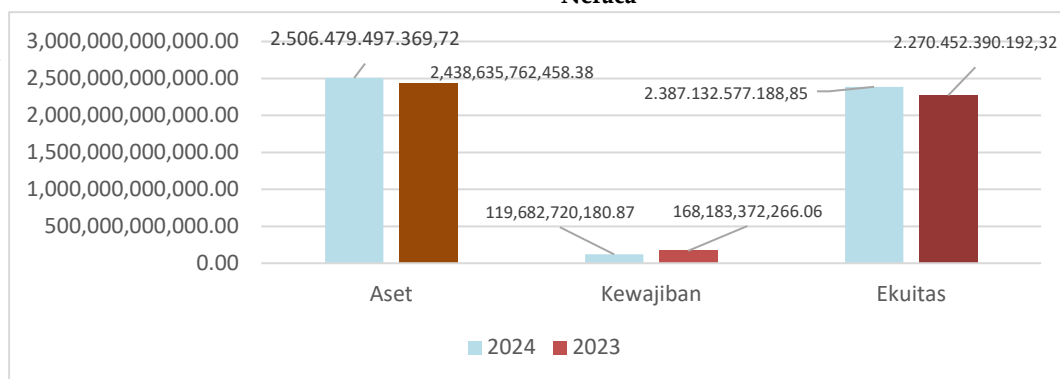
Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/penurunan
Aset	2.506.434.174.755,29	2.438.635.762.458,38	67.798.412.296,91
Kewajiban	119.682.720.180,87	168.183.372.266,06	(48.500.652.085,19)
Ekuitas	2.386.751.454.574,42	2.270.452.390.192,32	116.299.064.382,10

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Grafik 5.3
Neraca



Rincian Neraca Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.3.2 ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.506.434.174.755,29 atau mengalami kenaikan sebesar Rp67.798.412.296,21 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.438.635.762.458,38.

Tabel 5.48
Aset

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Aset Lancar	153.513.136.229,43	141.987.226.096,47	11.525.910.132,96
Investasi Jangka Panjang	25.074.641.963,00	22.936.197.963,00	2.138.444.000,00
Aset Tetap	2.180.970.976.758,21	1.984.290.020.827,27	196.680.955.930,94
Aset Lainnya	146.875.419.804,65	289.422.317.571,64	(142.546.897.766,99)
Jumlah	2.506.434.174.755,29	2.438.635.762.458,38	67.798.412.296,91

Sumber: SIPD 2024

5.3.2.2 Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp153.513.136.229,43 mengalami kenaikan sebesar Rp11.525.910.132,96 dibandingkan Aset Lancar per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp141.987.226.096,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Aset Lancar

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00	435.276.242,00	(428.577.687,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00
Kas Di Bendahara FKTP	30.106.373,00	213.513.606,00	(183.407.233,00)
Kas Lainnya	81.152.868,67	186.448.697,00	(105.295.828,33)
Piutang Pajak Daerah	77.685.331.624,50	78.202.695.663,50	(517.364.039,00)
Piutang Retribusi Daerah	41.247.825,00	82.047.825,00	(40.800.000,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	70.098.601,97	70.098.601,97	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	11.560.625.860,00	6.271.855.162,00	5.288.770.698,00
Penyisihan Piutang	(15.016.692.782,53)	(8.334.733.537,73)	(6.681.959.244,80)
Beban Dibayar Dimuka	2.605.789.625,00	2.467.220.984,87	138.568.640,13
Persediaan	8.763.392.194,00	10.708.889.707,33	(1.945.497.513,33)
Persediaan	153.513.136.229,43	141.987.226.096,47	11.525.910.132,96

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp57.388.377.822,99 merupakan saldo Kas Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
PT.Bank Sulteng (BPD) Cabang Pembantu Morowali Nomor Rekening : 401-01-03-20682-2	46.704.312.910,60	32.732.854.900,75	13.971.458.009,85
Bank Rakyat Indonesia(BRI) Wita Mori Poso Nomor Rekening : 00003634-01-000096-30-2	129.403.064,80	128.369.498,80	1.033.566,00
Bank Negara Indonesia (BNI)	8.491.705.288,00	8.332.193.748,00	159.511.540,00
GIRO HIT BUNGA (IMTA)	9.607.618.308,00	9.860.753.620,00	(253.135.312,00)
PT.Bank Sulteng (BPD) Cabang Kolonodale (CSR) Nomor Rekening : 401-01-03-03030-3	317.334.883,00	316.065.009,00	1.269.874,00
Selisih tambah	301.277.254,00	301.277.254,00	0,00
Selisih kurang	8.163.273.885,41	8.193.940.361,61	(30.666.476,20)
Jumlah Kas di Kas daerah seharusnya	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2024 dengan saldo menurut Rekening Koran pada Bank BPD Capem Morowali, Bank BPD Cabang Kolonodale (CSR), Bank BRI Witamori, Bank BNI dan GIRO HIT BUNGA (IMTA).

Pemblokiran saldo di Bank BNI disebabkan karena adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan kantor DPRD Tahap I tahun anggaran 2016. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp8.163.169.616,00 merupakan Dana Rekening BNI yang di Blokir KPK tahun 2022. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/09/DIK.01.05/23/01/2023 pada tanggal 5 Januari 2023. Secara rinci Kas di Kas Daerah dapat dilihat dalam lampiran IX.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp249.377.625,00 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan, yang berasal dari Penerimaan Pendapatan Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rincian dari kas di bendahara penerimaan di tiap OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51
Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Diskumperindag	45.010.000,00	0,00	45.010.000,00
Dinas Perikanan	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Bapenda	195.467.625,00	0,00	195.467.625,00
Dinas Pertanian	800.000,00	0,00	800.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	17.202.000,00	(17.202.000,00)
Jumlah	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran Tahun 2024 adalah Aset Lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah sebesar Rp6.698.555,00 yang sampai dengan 31 desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah. Jika dibandingkan dengan kas dibendahara pengeluaran Tahun 2023 sebesar Rp435.276.242,00 terjadi penurunan sebesar Rp428.577.687,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.52
Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Sisa Belanja Rp	Jasa Giro Rp	Jumlah Rp	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.155.000,00	0,00	5.155.000,00	Sisa TU dikbud BOSDA Rp5.100.000 + 55.000
Puskesmas Wongko Ndaya	0,00	6.358,00	6.358,00	Jasa giro 2024 Rp5.290,00 + 2023 Rp1.068,00
Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	28.498,00	28.498,00	Jasa Giro 2024
Bagian Hukum	0,00	3.711,00	3.711,00	Jasa Giro 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Sisa Belanja Rp	Jasa Giro Rp	Jumlah Rp	Keterangan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.409.410,00	1.409.410,00	Jasa Giro 2024
Bagian Organisasi	0,00	3.916,00	3.916,00	Jasa Giro 2024
Bagian Pemerintahan	0,00	2.200,00	2.200,00	Jasa Giro 2024
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	53.332,00	53.332,00	Jasa Giro 2024
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00	7.327,00	7.327,00	Jasa Giro 2024
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	8.778,00	8.778,00	Jasa Giro 2024
Bagian Umum	0,00	20.025,00	20.025,00	Jasa Giro 2024
Jumlah	5.155.000,00	1.543.555,00	6.698.555,00	

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kera pada Satuan Kera Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale ditetapkan sebagai BLUD sejak tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/KEB-B-MU/0054/II/2023 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum Dearah Kolonodale. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 saldo Kas Dibendahara BLUD sebesar Rp9.709.774.829,24 dengan rincian berikut:

Tabel 5.53
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Bank Mandiri	9.593.677.057,24	725.000,00	9.592.952.057,24
Bank BPD	80.540.072,00	7.556.564.647,00	(7.476.024.575,00)
Tunai Bendahara Penerimaan	25.035.000,00	0,00	25.035.000,00
Tunai Bendahara Pengeluaran	10.522.700,00	411.250.715,00	(400.728.015,00)
Jumlah	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp337.855.207,59 mengalami kenaikan sebesar Rp117.258.094,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp220.597.113,59. Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 yang merupakan sisa saldo Dana BOS pada 174 SD dan SMP Negeri yang akan digunakan untuk operasional sekolah pada tahun anggaran berikutnya. Rincian kas di Bendaharan Dana BOS dapat dilihat pada tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.54
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Dana Bos Reguler	285.883.488,59	171.987.675,59	113.895.813,00
Dana Bos Kinerja	48.362.281,00	45.000.000,00	3.362.281,00
Dana Bos Afirmasi	3.599.438,00	3.599.438,00	0,00
Dana Bos Daerah	10.000,00	10.000,00	0,00
Jumlah	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00

Sumber: SIPD 2024

Secara rinci kas di Bendahara Bos dapat dilihat pada lampiran X.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saldo Kas di Bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.106.373,00, jika dibandingkan dengan kas di bendahara FKTP Tahun 2023 sebesar Rp213.513.606,00 terjadi penurunan sebesar Rp183.407.233,00. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara FKTP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.55
Kas di Bendahara FKTP

Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi		Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
	Rekening (Rp)	Tunai (Rp)		
PKM LEE	6.539.074,00	2.379.421,00	0,00	8.918.495,00
PKM TOMATA	474.326,00	2.663.735,00	105.684,00	3.243.745,00
PKM MAYUMBA	838.667,00	1.082.061,00	137.954,00	2.058.682,00
PKM BETELEME	193.859,00	0,00	236.986,00	430.845,00
PKM PETUMBEA	2.176.428,00	68.189,00	0,00	2.244.617,00
PKM MOLINO	1.438.919,00	0,00	335.793,00	1.774.712,00
PKM KOLONODALE	6.164.133,00	0,00	379.471,00	6.543.604,00
PKM ANUTOLUWU	66.026,00	0,00	176.291,00	242.317,00
PKM TAMBAYOLI	3.218.804,00	76.475,00	0,00	3.295.279,00
PKM PANCAMAKMUR	178.772,00	0,00	115.388,00	294.160,00
PKM BATURUBE	76,00	0,00	309.952,00	310.028,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi		Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
	Rekening (Rp)	Tunai (Rp)		
PKM PANDAUKE	0,00	0,00	224.856,00	224.856,00
PKM LIJO	3.449,00	422.614,00	0,00	426.063,00
PKM WONGKO NDAYA	11.694,00	87.276,00	0,00	98.970,00
Jumlah	21.304.227,00	6.779.771,00	2.022.375,00	30.106.373,00

Sumber: Masing-masing Puskesmas

Secara rinci kas Di Bendahara FKTP dapat dilihat pada lampiran XI.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp81.152.868,67, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp186.448.697,00 mengalami penurunan sebesar Rp105.295.828,33. Adapun rincian dari kas lainnya terdiri dari Utang PFK FKTP sebesar Rp81.146.123,67 dan kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran Inspektorat sebesar Rp6.745,00 yang merupakan kurang salur belanja pada Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.56
Kas Lainnya

Uraian	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Puskesmas Tomata	28.253.487,00	1.259.656,00	132.000,00	2.634.848,00	32.279.991,00
Puskesmas Baturube	0,00	810.811,00	0,0	12.169.369,00	12.980.180,00
Puskesmas Beteleme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Pandauke	9.476.000,00	1.196.756,00	0,0	5.109.549,00	15.782.305,00
Puskesmas Mayumba	7.879.586,00	1.272.459,00	57.000,00	9.331.369,67	18.540.414,67
Puskesmas Petumbea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Pancamakmur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Potowe Indolijo	0,0	0,0	66.120,00	0,0	66.120,00
Puskesmas Lee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Molino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Anuntoluwu	0,0	798.917,00	0,0	0,0	798.917,00
Puskesmas WongkoNdaya	0,0	83.784,00	0,0	614.412,00	698.196,00
Puskesmas Tambayoli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Kolonodale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inspektorat Daerah					6.745,00
Jumlah	45.609.073,00	5.422.383,00	255.120,00	29.859.547,67	81.152.868,67

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp77.685.331.624,50 mengalami penurunan sebesar Rp517.364.039,00 dibandingkan Piutang pajak per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp78.202.695.663,50 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.57
Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	118.072.981,00	97.446.981,00	20.626.000,00
Piutang Pajak Penerangan Dikeluarkan Sendiri	48.032.583.025,20	43.352.136.352,20	4.680.446.673,00
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.480.280.196,60	18.890.009.322,60	(10.409.729.126,00)
Piutang PBBP2	21.017.541.671,70	15.825.199.257,70	5.192.342.414,00
Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	36.853.750,00	36.853.750,00	0,00
Jumlah	77.685.331.624,50	78.202.695.663,50	(517.364.039,00)

Sumber: SIPD 2024

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa umur piutang Pajak Daerah Piutang Pajak Rumah Makan, Piutang Pajak Reklame, Piutang Penerangan Jalan dan BPHTB Tahun Anggaran 2024 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan, sedangkan untuk Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan PBB-P2 tergolong dalam kualitas diragukan karena umur piutang sudah mencapai 36 Bulan. Secara rinci piutang pajak dapat dilihat pada lampiran XII.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp41.247.825,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.58
Piutang Retribusi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	36.125.000,00	36.125.000,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	40.800.000,00	(40.800.000,00)
Piutang Retribusi Terminal	5.122.825,00	5.122.825,00	0,00
Jumlah	41.247.825,00	82.047.825,00	(40.800.000,00)

Sumber: SIPD 2024

Dapat di jelaskan bahwa Piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp41.247.825,00 merupakan piutang yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang nilainya sebesar Rp36.125.000,00 tergolong dalam kualitas kurang lancar karena umur



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

piutang masih diatas 12 bulan sedangkan piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang nilainya sebesar Rp5.122.825,00 tergolong dalam kualitas macet karena umur piutang telah lebih dari 36 bulan. Untuk Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2024 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan. Secara rinci piutang retribusi dapat dilihat pada lampiran XIII.

5.3.1.1.10 Piutang Lain Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp70.098.601,97 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar 68.155.059,39 sampai dengan 31 Desember 2024 belum tertagih dan Piutang transfer renumerasi dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp1.943.542,58. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari Tahun 2023 ke 2024.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah dalam hal ini TGR tergolong dalam kualitas macet karena umur piutang melebihi dari 36 bulan. Secara rinci piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada lampiran XIV.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo piutang transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.560.625.860,00 terdiri atas piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp11.555.454.850,00 dan Piutang Bantuan Keuangan yang merupakan lebih Salur Alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp5.171.010,00. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi merupakan Kurang Salur dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Kurang Salur atas Penerimaan Pajak Daerah Nomor 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025 tanggal 31 Januari 2025. Pembayaran akan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi menganggarkan Piutang tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.

Tabel 5.59
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.117.343.076,00	1.554.428.480,00	562.914.596,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.048.227.584,00	1.319.136.814,00	729.090.770,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	6.677.782.729,00	2.912.282.868,00	3.765.499.861,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	712.101.461,00	480.835.990,00	231.265.471,00
Jumlah	11.555.454.850,00	6.266.684.152,00	5.288.770.698,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IV.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual, dilakukan Penyisihan Piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang Penyisihan Piutang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebesar Rp15.016.692.782,53 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp8.334.733.537,73 terjadi kenaikan sebesar Rp6.681.959.244,80.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.60
Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
Piutang Pajak	77.685.331.624,50	14.881.313.668,62	78.202.695.663,50	8.229.125.506,58
• Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	1.050.000,00	5.250,00
• Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	118.072.981,00	9.627.713,10	97.446.981,00	6.263.803,10
• Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.480.280.196,60	3.538.289.760,44	18.890.009.322,60	1.970.668.102,19
• Piutang PBBP2	21.017.541.671,70	6.526.452.517,57	15.825.199.257,70	6.035.243.400,78
• Piutang BPHTB	36.853.750,00	3.685.375,00	36.853.750,00	184.268,75
• Piutang PPJ	48.032.583.025,20	4.803.258.302,52	43.352.136.352,20	216.760.681,76
Piutang Retribusi	41.247.825,00	8.735.325,00	82.047.825,00	5.408.095,74
• Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	40.800.000,00	204.000,00
• Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	41.247.825,00	8.735.325,00	41.247.825,00	5.204.095,74
Piutang Dana Bagi Hasil	11.555.454.850,00	57.777.274,25	6.266.684.152,00	31.333.420,76
• PKB	2.117.343.076,00	10.586.715,38	1.554.428.480,00	7.772.142,40
• BBN-KB	2.048.227.584,00	10.241.137,92	1.319.136.814,00	6.595.684,07
• PBB-KB	6.677.782.729,00	33.388.913,65	2.912.282.868,00	14.561.414,34
• PAP	712.101.461,00	3.560.507,31	480.835.990,00	2.404.179,95
Piutang Lain-lain	68.155.059,39	68.155.059,39	68.155.059,39	68.155.059,39
• TP-TGR	68.155.059,39	68.155.059,39	63.414.759,39	63.414.759,39
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.171.010,00	517.101,00	4.740.300,00	4.740.300,00
Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.943.542,58	194.354,26	7.114.552,58	711.455,26
• Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00	5.171.010,00	517.101,00
• Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (Tdf)-2022	1.943.542,58	194.354,26	1.943.542,58	194.354,26
Jumlah	89.357.303.911,47	15.016.692.782,52	84.626.697.252,47	8.334.733.537,73

Sumber: Bidang Akuntansi, BPKAD

Penjelasan Secara rinci penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran XV.

5.3.1.1.13 Beban di bayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp2.605.789.625,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.467.220.84,87 mengalami kenaikan sebesar Rp138.568.640,13. Saldo beban dibayar dimuka merupakan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada Bagian Umum sebesar Rp2.557.789.625,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp48.000.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.1.1.14 Persediaan

Saldo Persediaan Operasional per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.763.392.194,00 merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan merupakan persediaan akhir seluruh OPD sesuai hasil Stok opname yang dilakukan oleh masing-masing pengurus barang OPD tanggal neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.61

Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bahan	4.864.696.336,00	4.566.928.125,53	297.768.210,47
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	424.490.500,00	324.973.278,00	99.517.222,00
Obat-obatan	3.461.688.158,00	5.816.988.303,80	(2.355.300.145,80)
Komponen	12.517.200,00	0,00	12.517.200,00
Jumlah	8.763.392.194,00	10.708.889.707,33	(1.945.497.513,33)

Sumber: SIPD 2024

Secara rinci persediaan dapat dilihat pada lampiran XVI.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.074.641.963,00 adalah nilai investasi jangka panjang permanen. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali.

Investasi jangka panjang pada pemerintah daerah menggunakan metode biaya (cost method). Metode ini digunakan ketika pemerintah daerah memiliki kepemilikan kurang dari 20% pada suatu entitas dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal, dan pendapatan dari investasi diakui hanya ketika dividen atau hasil lainnya diterima, tanpa mempengaruhi nilai tercatat investasi.

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.074.641.963,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp22.936.197.963,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.138.444.000,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Capem Morowali pada:

Tabel 5.62

Investasi Jangka Panjang

Tahun	Nilai (Rp)	Nomor SP2D	Nomor SK
2015	2.000.000.000,00	3877/SP2D-LS/BNT/BPKAD/2015	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2016	2.000.000.000,00	434/SP2D-LS/BY/DPPKAD/2016	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tahun	Nilai (Rp)	Nomor SP2D	Nomor SK
			Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2017	3.500.000.000,00	3712/SP2D-LS/BY/BPKAD/2017	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2018	5.100.000.000,00	3065/SP2D-LS/BY/BPKAD/2018	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2019	5.086.197.963,00	2609/SP2D-LS/BY/BPKAD/2019	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2022	1.750.000.000,00	09419/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/III/2022	Perda Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perseroan Terbatas Bank Sulteng
2023	3.500.000.000.000	09591/SP2D/LS/5-02.0-00.0-00.1.1.1/XII/2023	Perda Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perseroan Terbatas Bank Sulteng
2024	2.138.444.000,00	72.12/04.0/000013/Pembiayaan/5.02.02.0 0.0.00.01.0000/M/12/2024	Perda Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perseroan Terbatas Bank Sulteng
Jumlah	25.074.641.963,00		

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.180.970.976.758,21 atau meningkat sebesar Rp196.680.955.930,94 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp1.984.290.020.827,27.

Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.63
Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang
Tanah	104.788.561.428,00	99.870.808.551,00	4.917.752.877,00
Peralatan Mesin	510.842.336.803,99	443.916.784.251,99	66.925.552.552,00
Gedung dan Bangunan	936.554.676.961,87	817.801.391.584,60	118.753.285.377,27
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.711.908.144.151,70	1.569.798.060.994,76	142.110.083.156,94
Aset Tetap Lainnya	15.436.098.446,00	14.227.864.046,00	1.208.234.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.807.703.692,84	82.046.969.848,86	760.733.843,98
Akumulasi Penyusutan	(1.181.366.544.726,19)	(1.043.371.858.449,94)	(137.994.686.276,25)
Jumlah	2.180.970.976.758,21	1.984.290.020.827,27	196.680.955.930,94

Sumber: Simda BMB 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Data rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam Neraca Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari KIB A untuk Aset Tanah, KIB B untuk Aset Peralatan dan Mesin, KIB C untuk Aset Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk Aset Tetap Lainnya dan KIB F untuk Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penjelasan lebih lanjut atas Nilai Aset tetap Tahun 2024 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Nilai aset tanah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 menurut rincian objek sebesar Rp104.788.561.428,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.872.953.877,00 dibandingkan nilai Aset Tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp99.870.808.551,00.

Tabel 5.64
Aset Tetap-Tanah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	11.560.664.089,00	11.560.664.089,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	4.814.142.000,00	4.814.142.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	51.167.536.892,00	51.167.536.892,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	41.260.000,00	41.260.000,00	0,00
Tanah Perkebunan	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00
Tanah Hutan	588.700.000,00	588.700.000,00	0,00
Tanah Lapangan Olah Raga	639.639.000,00	639.639.000,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.449.629.200,00	1.449.629.200,00	0,00
Tanah Untuk Jalan	22.357.790.000,00	20.349.731.000,00	2.008.059.000,00
Tanah Untuk Bangunan Air	2.191.179.570,00	2.191.179.570,00	0,00
Tanah Untuk Makam	805.000.000,00	805.000.000,00	0,00
Tanah Untuk Taman	35.035.000,00	35.035.000,00	0,00
Tanah Kampung	823.468.800,00	823.468.800,00	0,00
Tanah Hasil Reklamasi	8.254.666.877,00	5.344.973.000,00	2.909.693.877,00
Jumlah	104.788.561.428,00	99.870.808.551,00	4.917.752.877,00

Sumber: Simda BMD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Ringkasan mutasi Aset Tanah selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.65
Mutasi Aset Tanah

Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2023	Rp	99.870.808.551,00
Penambahan:		
1. Realisasi Belanja modal aset tanah	Rp	1.963.260.000,00
2. Reklas dari KIB C	Rp	2.719.362.177,00
3. Kapitalisasi Aset dari barang dan jasa	Rp	235.130.700,00
Jumlah Penambah	Rp	4.917.752.877,00
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tanah Tahun 2024	Rp	4.917.752.877,00
Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2024	Rp	104.788.561.428,00

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

- Penambahan Aset Tetap Tanah berasal dari realisasi Belanja Modal Aset Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.963.260.000,00
- Penambahan Reklas Aset Tanah 2024 berasal dari KIB C sebesar Rp2.719.362.177,00, wujud dari bangunan tersebut adalah Penimbunan atau Reklamasi pantai.
- Penambahan Kapitalisasi aset dari barang dan jasa sebesar Rp235.130.700,00, wujud dari Barang dan Jasa adalah Pembebasan, Perencanaan, dan Pengawasan Penimbunan

Sehingga Total Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp4.917.752.877,00

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.788.561.428,00, secara rinci aset tetap tanah dapat dilihat pada lampiran XVII.a.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp510.842.336.803,99 atau mengalami peningkatan sebesar Rp66.925.552.552,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp443.916.784.251,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Alat Besar	6.366.076.211,00	6.351.824.911,00	14.251.300,00
Alat Angkutan	100.205.083.731,00	95.051.728.413,00	5.153.355.318,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.129.411.931,00	5.044.994.931,00	84.417.000,00
Alat Pertanian	5.807.758.220,00	5.783.723.220,00	24.035.000,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	106.640.941.637,19	93.416.168.770,19	13.224.772.867,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15.149.422.034,00	12.717.506.734,00	2.431.915.300,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.953.363.936,80	92.729.383.245,80	34.223.980.691,00
Alat Laboratorium	55.730.693.553,00	54.774.353.453,00	956.340.100,00
Alat Persenjataan	422.915.638,00	410.423.744,00	12.491.894,00
Komputer	78.815.052.488,00	68.471.789.306,00	10.343.263.182,00
Alat-alat Eksplorasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	4.722.152.025,00	4.430.576.025,00	291.576.000,00
Alat Peraga	950.000,00	950.000,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	3.300.002,00	3.300.002,00	0,00
Rambu-Rambu	3.028.258.390,00	3.028.258.390,00	0,00
Peralatan Olah Raga	1.824.457.007,00	1.659.303.107,00	165.153.900,00
Jumlah	510.842.336.803,99	443.916.784.251,99	66.925.552.552,00

Sumber: Simda BMD 2023

Perhitungan Mutasi Nilai Aset Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023	Rp	443.916.784.251,99
Penambahan:		
1. Realisasi Belanja modal aset Peralatan dan Mesin	Rp	76.216.049.055,00
2. Kapitalisasi Aset dari Barang Jasa	Rp	2.509.748.670,00
3. Kapitalisasi Aset dari Barang Jasa (BTT)	Rp	750.410.000,00
4. Hibah	Rp	36.395.000,00
5. Reklasifikasi Antar KIB	Rp	621.213.000,00
6. Mutasi antar SKPD	Rp	3.291.712.000,00
Jumlah Penambah	Rp	83.425.527.725,00
Pengurang:		
1. Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2024 (-)	Rp	11.561.998.500,00
2. Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	3.291.712.000,00
3. Reklas Antar KIB (-)	Rp	1.034.644.400,00
4. Reklas ATB (-)	Rp	124.455.000,00
5. Belanja Modal yang tidak Menjadi Aset Tetap (-)	Rp	10.211.020,00
6. Ekstrakompatabel 2024 (-)	Rp	248.586.613,00
7. Belanja yang diserahkan kepada masyarakat (-)	Rp	219.867.640,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

8. Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	8.500.000,00
Jumlah Pengurang	Rp	16.499.975.173,00
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024	Rp	66.925.552.552,00
Saldo akhir aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	Rp	510.842.336.803,99

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp76.216.049.055,00
- Penambahan Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.509.748.670,00, Wujud Aset dari Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Alat Angkutan dan Alat Kantor
- Penambahan Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp750.410.000 Wujud Aset dari Belanja Tidak Terduga adalah Laptop, Peralatan Personal Komputer dan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- Penambahan Hibah pada Satuan Pamong Praja dan Kebakaran sebesar Rp36.395.000,00, Wujud dari Hibah Aset tersebut adalah Tenda Peleton.
- Penambahan reklas antar KIB sebesar Rp621.213.000,00 Wujud Aset dari penambahan reklas antar KIB adalah alat kantor dan rumah tangga.
- Penambahan Mutasi antar SKPD Rp3.291.712.000,00 Wujud Aset dari penambahan mutasi antar SKPD adalah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan alat angkutan apung bermotor.

Sehingga total mutasi tambah Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp83.425.527.725,00.

2. Mutasi kurang :

- Pengurangan penghentian penggunaan/penghapusan 2024 Rp11.561.998.500,00 Wujud Aset dari Penghapusan Aset adalah Kendaraan Dinas Roda Empat. Dengan Nomor Penghapusan Aset : 188.45/KEP-B.MU/0263/XII/2024 dan Nomor Risalah Lelang: 393/16.03/2024-01 tgl 28 Agustus 2024
- Pengurangan Reklas Antar KIB sebesar Rp1.034.644.400,00 Wujud Aset dari Pengurangan Reklas Antar KIB adalah Buku Pelajaran
- Pengurangan Reklas ATB sebesar Rp124.455.000,00 Wujud dari Pengurangan Reklas ATB adalah Aplikasi SITAMU (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah)
- Pengurangan Barang diserahkan Kepada Masyarakat/Pakai Habis sebesar Rp219.867.640,00 Wujud Aset dari Pengurangan Barang di serahkan Kepada Masyarakat adalah Peralatan Kantor dan Alat Praktek Bidang Studi IPA yang di serahkan ke Sekolah Swasta.
- Pengurangan Ekstrakompatabel 2024 sebesar Rp248.586.613,00 Wujud dari Aset Ekstrakompatabel adalah Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Kedokteran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- f. Pengurangan Reklasifikasi Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp10.211.020,00. Wujud Aset Pengurangan Reklasifikasi Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap adalah Barang Pakai Habis dan alat pemeriksaan hewan.
- g. Pengurangan Mutasi antar SKPD Rp3.291.712.000,00 Wujud Aset dari Pengurangan Mutasi antar SKPD adalah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan alat angkutan apung bermotor
- h. Pengurangan Reklas lain-lain sebesar Rp8.500.000,00 Wujud dari Pengurangan Reklas lain-lain adalah Laptop pada SDN Undoro.

Sehingga total mutasi kurang Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp16.505.475.173,00

Pada Tahun 2024 dilakukan lelang barang milik daerah untuk kendaraan dinas perorangan, jabatan dan operasional. Dan telah dilakukan proses penghapusan dari daftar aset tetap peralatan dan mesin dengan total nilai Rp11.561.998.500,00. Pada Tahun 2024 ada Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Tidak Terduga dengan nilai Rp750.410.000,00 akibat terjadi nya Kebakaran pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp510.842.336.803,99, secara rinci aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran XVII.b

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp936.554.676.961,87 Dibandingkan Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp817.801.391.584,60. atau mengalami peningkatan sebesar Rp118.753.285.377,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bangunan Gedung Tempat Kerja	925.554.676.961,87	809.000.215.084,60	116.554.461.877,27
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.263.377.633,00	2.263.377.633,00	0,00
Tugu/Tanda Batas	8.705.888.167,00	6.537.798.867,00	2.168.089.300,00
Jumlah	936.554.676.961,87	817.801.391.584,60	118.753.285.377,27

Sumber: Simda BMD2024

Ringkasan Mutasi Aset Gedung Dan Bangunan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.69
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023	Rp	817.801.391.584,60
Penambahan:		
1. Realisasi Belanja modal aset gedung dan bangunan	Rp	88.382.929.824,18
2. Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa	Rp	21.316.099.278,00
3. Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa (Bansos)	Rp	199.850.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

4. Reklas dari KIB B	Rp	12.260.000,00	
5. Reklas dari KIB D	Rp	1.013.645.460,00	
5. Reklas dari KDP	Rp	42.294.069.034,44	
6. Utang belanja modal	Rp	839.712.587,00	
7. Mutasi antar OPD	Rp	5.798.822.323,00	
8. Beban Bayar di Muka	Rp	1.560.779.209,83	
Jumlah penambah	Rp	161.418.167.716,45	
Pengurang:			
1. Penghapusan Aset	Rp	635.225.250,00	
2. Reklas ke KIB A	Rp	2.719.362.177,00	
3. Reklas ke KIB B	Rp	621.213.000,00	
4. Reklas ke KIB D	Rp	7.474.608.500,00	
5. Pembayaran Hutang	Rp	4.822.931,00	
6. Diserahkan kepada Masyarakat/Hibah	Rp	1.672.657.602,00	
7. Direklas ke asset lainnya	Rp	669.667.000,00	
7. Reklas KDP	Rp	23.068.503.556,18	
8. Mutasi antar OPD	Rp	5.798.822.323,00	
Jumlah pengurang	Rp	(42.664.882.339,18)	
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset gedung dan bangunan Tahun 2024	Rp		118.753.285.377,27
Saldo akhir aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024	Rp		936.554.676.961,87

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp88.382.929.824,18
- Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp21.316.099.278,00, Wujud dari Aset Barang dan Jasa adalah bangunan Tempat Pendidikan dan Bangunan Kantor, dan Bangunan Rumah Sakit
- Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa (Bansos) Sebesar Rp199.850.000,00 Wujud dari Aset Bansos adalah Pemasangan Tegel Pelataran Mushollah Kantor Bupati.
- Penambahan Reklas dari KIB B sebesar Rp12.260.000,00 Wujud Reklas Aset Antar KIB adalah Bangunan Rumah Sakit Umum
- Penambahan Reklas dari KIB D sebesar Rp1.013.645.460,00 Wujud Reklas Aset Antar KIB adalah Bangunan Gedung Kantor.
- Penambahan Reklas dari KDP sebesar Rp42.294.069.034,44, Wujud Reklas dari KDP adalah Bangunan Tempat Ibadah yang direklas dari KDP.
- Penambahan Utang Belanja Modal Rp839.712.587,00 Wujud dari Utang Belanja Modal adalah Bangunan Tempat Ibadah (Islamic Center Morowali Utara) dikarenakan fisik sudah 100%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

h. Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp5.798.822.323,00 wujud dari mutasi antar SKPD adalah Bangunan Gedung Kantor Permanen.

i. Penambahan Beban Bayar di muka sebesar Rp1.560.779.209,83 Wujud dari Beban Bayar di muka adalah Bangunan Rumah Sakit

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp161.418.167.716,45.

2. Mutasi kurang :

a. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Penghapusan Aset sebesar Rp635.225.250,00 Wujud Aset dari Penghapusan Aset tersebut adalah Bangunan Gedung VIP RSUD Kolonodale dengan Nomor Penghapusan Aset: 188.45/KEP-B.MU/0026.4/I/2023

b. Pengurangan Reklas Aset Antar KIB sebesar Rp10.815.183.677,00 Wujud Aset dari Reklas antar KIB adalah Penimbunan Reklamasi Pantai, Tanggul dan Bangunan Dermaga

c. Pengurangan Pembayaran Utang sebesar Rp4.822.931,00 Wujud Aset dari Pembayaran Utang adalah pekerjaan yang telah di akui pada tahun 2023

d. Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.672.657.602,00 Wujud Aset dari Barang yang di serahkan kepada Masyarakat adalah Bangunan Tempat Pendidikan.

e. Pengurangan reklas ke aset lainnya sebesar Rp669.667.000,00 yang merupakan Pembangunan kantor KPU.

f. Koreksi pekerjaan menjadi KDP Rp23.068.503.556,18 Wujud aset dari Reklas KDP adalah Bangunan Gedung kantor permanen dan Bangunan Klinik/puskesmas.

g. Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp5.798.822.323,00 Wujud Aset dari Mutasi antar SKPD adalah Bangunan Gedung kantor Permanen

Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.664.882.339,18.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp936.554.676.961,87. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVII.c.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.711.908.144.151,70 atau mengalami peningkatan sebesar Rp142.110.083.156,94 dibandingkan dengan Nilai Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.569.798.060.994,76 berdasarkan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 5.70
Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Jalan	991.177.192.754,33	896.523.916.707,39	94.653.276.046,94
Jembatan	127.906.899.489,59	121.169.436.273,59	6.737.463.216,00
Bangunan Air Irigasi	224.512.803.558,42	217.391.437.998,42	7.121.365.560,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.829.624.613,00	1.829.624.613,00	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.190.967.383,00	2.041.448.056,00	149.519.327,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	145.944.873.487,99	125.706.836.837,99	20.238.036.650,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	9.149.686.500,00	8.124.460.000,00	1.025.226.500,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	71.231.907.274,00	69.485.939.676,00	1.745.967.598,00
Bangunan Air Kotor	12.558.666.120,90	11.065.771.120,90	1.492.895.000,00
Instalasi Air Bersih / Air Baku	16.458.862.172,46	14.132.062.172,46	2.326.800.000,00
Instalasi Air Kotor	10.512.459.044,00	10.452.459.044,00	60.000.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	8.814.032.100,00	8.814.032.100,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	4.170.386.258,00	4.170.386.258,00	0,00
Instalasi Pertahanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Instalasi Gas	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00
Instalasi Pengaman	29.930.000,00	29.930.000,00	0,00
Jaringan Air Minum	20.324.918.139,00	19.819.683.240,00	505.234.899,00
Jaringan Listrik	65.051.985.257,00	58.997.686.897,00	6.054.298.360,00
Jaringan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Jumlah	1.711.908.144.151,70	1.569.798.060.994,76	142.110.083.156,94

Sumber: Simda BMD 2024

Ringkasan Mutasi Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.71
Mutasi Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan

Saldo aset jalan. irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023	Rp	1.569.798.060.994,76
Penambahan:		
1. Realisasi Belanja modal aset jalan. irigasi dan jaringan	Rp	141.028.364.474,00
2. Kapitalisasi aset dari barang dan jasa	Rp	11.367.926.990,00
3. Reklas dari KIB B	Rp	13.850.000,00
4. Reklas dari KIB C	Rp	7.474.608.500,00
5. Reklas dari KDP	Rp	6.972.249.819,50
6. Utang belanja modal	Rp	72.699.100,00
7. Mutasi antar OPD	Rp	728.978.000,00
8. Beban Bayar di muka	Rp	906.441.775,04
Jumlah penambah	Rp	168.565.118.658,54
Pengurang:		
1. Reklas ke KIB C	Rp	1.013.645.460,00
2. Diserahkan kepada masyarakat	Rp	1.402.185.000,00
3. Pembayaran Hutang	Rp	433.846.316,60
4. Mutasi antar OPD	Rp	728.978.000,00
5. Reklas KDP	Rp	22.876.380.725,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah Pengurang	Rp	(26.455.035.501,60)
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024	Rp	142.110.083.156,94
Saldo akhir aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024	Rp	1.711.908.144.151,70

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

- Penambahan Aset Tetap berasal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp141.028.364.474,00
- Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp11.367.926.990,00 Wujud dari Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa adalah Jalan dan Jembatan.
- Penambahan Reklas Aset Antar KIB sebesar Rp14.360.807.319,50 Wujud dari Penambahan Reklas Aset antar KIB adalah Jalan, Jembatan dan Tanggul.
- Penambahan Utang Belanja Modal sebesar Rp72.699.100,00 Wujud dari Penambahan utang belanja modal adalah Saluran Pembuang
- Penambahan Reklas KDP atas pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp99.901.000,00 Wujud dari Penambahan Reklas KDP adalah Bangunan Penguat tebing
- Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp728.978.000,00 Wujud dari Penambahan mutasi antar SKPD adalah Jalan dan tanggul
- Penambahan Beban bayar dimuka sebesar Rp906.441.775,04 Wujud dari Penambahan Beban bayar dimuka adalah Jalan Kabupaten

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp168.565.118.658.54.

2. Mutasi kurang :

- Pengurangan Reklas ke KIB C sebesar Rp1.013.645.460,00 Wujud dari Pengurangan reklas ke KIB C adalah Bangunan Gedung kantor lain-lain
- Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.402.185.000,00 Wujud dari Pengurangan Barang diserahkan kepada Masyarakat adalah jalan usaha tani
- Pengurangan Pembayaran Hutang sebesar Rp433.846.316,00 Wujud dari Pengurangan Pembayaran Hutang adalah Saluran pembuang
- Pengurangan Reklas KDP Sebesar Rp22.876.380.725,00 Wujud dari Pengurangan Reklas KDP adalah Jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pembawa air bersih lain-lain
- Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp728.978.000,00 Wujud dari Pengurangan mutase antar SKPD adalah Bangunan kantor lain-lain, jalan kabupaten dan tanggul

Sehingga Total mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp26.455.035.501,60

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.711.908.144.151,70

Berdasarkan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan Jalan Desa di



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten Morowali Utara dan terakhir di ubah dengan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0022/I/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut diketahui panjang ruas jalan di Kabupaten Morowali Utara adalah 784.96 Km. Secara rinci dapat dilihat dalam lampiran XVII.d.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.436.098.446,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.208.234.400,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp14.227.864.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan Tercetak	11.509.817.485,00	10.302.683.085,00	1.207.134.400,00
Kartografi. Naskah dan Lukisan	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00
Musik	76.100.000,00	75.000.000,00	1.100.000,00
Barang Bercorak Kesenian	1.261.344.961,00	1.261.344.961,00	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00
Ternak	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00
Tanaman	655.654.000,00	655.654.000,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.770.072.000,00	1.770.072.000,00	0,00
Jumlah	15.436.098.446,00	14.227.864.046,00	1.208.234.400,00

Sumber: Simda BMD 2024

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.73
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023	Rp	14.227.864.046,00
Penambahan:		
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	254.614.700,00
2. Reklas Aset Antar KIB	Rp	1.008.534.400,00
Jumlah Penambah	Rp	1.263.149.100,00
Pengurang:		
1. Reklas ATB	Rp	54.914.700,00
Jumlah Penambah	Rp	54.914.700,00
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tetap lainnya Tahun 2024	Rp	1.208.234.400,00
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024	Rp	15.436.098.446,00

Sumber: Bidang Aset



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

a. Penambahan Realisasi Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp254.614.700,00

b. Penambahan Reklas Aset Antar KIB Sebesar Rp1.008.534.400,00 Wujud dari Penambahan Reklas aset antar KIB adalah Buku

Sehingga total mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp1.263.149.100,00

2. Mutasi kurang :

a. Pengurangan Reklas Aset ATB Sebesar Rp54.914.700,00 Wujud dari Pengurangan Reklas Aset ATB adalah Aplikasi / software BASAOMO Dinas Perpustakaan Daerah.

Sehingga total mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp54.914.700,00.

Sehingga jumlah saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.436.098.446,00. Secara rinci dapat dilihat dalam lampiran XVII.e.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap Berwujud. yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan. yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam Aset Tetap bersangkutan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.807.703.692,84 atau mengalami peningkatan sebesar Rp760.733.843,98 dibandingkan dengan Nilai konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.046.969.848,86.

Berdasarkan Realisasi Fisik Dan Keuangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.74
Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	73.499.000,00	73.499.000,00	0,00
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	41.120.000,00	41.120.000,00	0,00
Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	835.065.000,00	835.065.000,00	0,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	285.392.000,00	486.307.000,00	(200.915.000,00)
Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-Lain (Dst)	55.856.700,00	55.856.700,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	263.858.000,00	19.965.000,00	243.893.000,00
Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain (Dst)	0,00	8.755.996.081,49	(8.755.996.081,49)
Asrama Permanen	992.487.600,00	992.487.600,00	0,00
Pagar Permanen	129.720.000,00	99.750.000,00	29.970.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	32.225.412.317,38	10.911.193.237,20	21.314.219.080,18
Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	108.436.000,00	49.630.000,00	58.806.000,00
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0,00	49.280.000,00	(49.280.000,00)
Bangunan Fasilitas Umum lainnya	121.380.000,00	49.966.000,00	71.414.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	198.722.500,00	198.722.500,00	0,00
Bangunan Rumah Sakit Umum	129.252.750,00	30.956.308.953,95	(30.827.056.203,95)
Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain Dst	118.999.100,00	118.999.100,00	0,00
Bangunan Klinik/Puskesmas	7.827.521.746,00	7.446.358.749,00	381.162.997,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Sumur Resapan	199.550.000,00	199.550.000,00	0,00
Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain	9.241.604.320,00	99.824.000,00	9.141.780.320,00
Saluran Drainage	144.646.700,00	144.646.700,00	0,00
Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-Lain	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00
Bendung	0,00	99.800.000,00	(99.800.000,00)
Bangunan Pembawa Irigasi Lain-Lain	3.076.909.199,40	3.106.692.199,40	(29.783.000,00)
Jembatan Khusus Lain-Lain	126.012.100,00	49.900.000,00	76.112.100,00
Jembatan Desa Lain-Lain	1.001.547.842,00	448.557.200,00	552.990.642,00
Jembatan Pada Jalan Desa	4.778.459.481,06	1.872.604.378,26	2.905.855.102,80
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	0,00	688.093.616,60	(688.093.616,60)
Jembatan Gantung	1.479.972.932,00	327.614.000,00	1.152.358.932,00
Jembatan Penyebrangan Lain-lain	119.911.150,00	46.411.500,00	73.499.650,00
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	194.704.000,00	0,00	194.704.000,00
Jalan Khusus Lain-Lain	180.502.950,00	180.502.950,00	0,00
Jalan Khusus Lainnya	438.139.800,00	320.416.800,00	117.723.000,00
Jalan Khusus Kompleks	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00
Jalan Desa	3.449.020.566,00	216.830.278,00	3.232.190.288,00
Jalan Kabupaten Lain-Lain	199.525.000,00	274.429.500,00	(74.904.500,00)
Jalan Kabupaten Lokal	7.701.683.710,00	7.240.652.569,96	461.031.140,04
Jalan Kabupaten Kolektor	95.480.000,00	95.480.000,00	0,00
Jalan Kabupaten Arteri	4.523.024.582,00	1.466.806.950,00	3.056.217.632,00
Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trottoar)	0,00	3.385.360.155,00	(3.385.360.155,00)
Jaringan Distribusi Lain-Lain	24.462.130,00	24.462.130,00	0,00
Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai)	189.110.000,00	189.110.000,00	0,00
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lain-lain (dst)	0,00	59.896.000,00	(59.896.000,00)
tugu lainnya (dst)	64.774.000,00	39.778.000,00	24.996.000,00
alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	59.895.000,00	59.895.000,00	0,00
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	0,00	99.901.000,00	(99.901.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	
Lemari Kayu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Papan Tulis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Meja Sekolah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
Bangku Sekolah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	149.737.000,00	0,00	149.737.000,00
Jalan Kabupaten Bernilai Strategis Kabupaten	342.111.517,00	0,00	342.111.517,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain	957.097.500,00	0,00	957.097.500,00
Bangunan Penampung Sampah Lain-lain	393.994.500,00	0,00	393.994.500,00
Jaringan Pembawa Lain-lain	99.855.000,00	0,00	99.855.000,00
Jumlah	82.807.703.692,84	82.046.969.848,86	760.733.843,98

Sumber: Simda BMD

Dan berdasarkan SKPD nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp82.807.703.692,84 dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.75
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per	Rp	82.807.703.692,84
31 Desember 2023		
Penambahan:		
1. Reklas dari KIB C	Rp	23.068.503.556,18
2. Reklas dari KIB D	Rp	22.876.380.725,00
3. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp	4.239.163.870,00
Jumlah Penambah	Rp	50.184.048.151,18
Pengurang:		
1. Reklas ke KIB C	Rp	42.294.069.034,44
2. Reklas ke KIB D	Rp	6.972.249.819,50
2. Pembayaran Utang	Rp	156.995.453,26
Jumlah Pengurang	Rp	49.423.314.307,20
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024	Rp	760.733.843,98
Saldo akhir aset Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024	Rp	82.807.703.692,84

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Mutasi tambah :

- a. Reklas dari KIB C ke KDP Rp23.068.503.556,18 Wujud aset dari dari KIB C ke KDP adalah Bangunan Gedung kantor permanen dan Bangunan Klinik/puskesmas
- b. Reklas dari KIB D ke KDP Sebesar Rp22.876.380.725,00 Wujud dari Pengurangan Reklas dari KIB D ke KDP adalah Jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pembawa air bersih lain-lain
- c. Penambahan Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp4.239.163.870,00 Wujud dari Penambahan Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa adalah Bangunan Kantor Permanen, Jalan Desa, Jembatan, Bangunan klinik/puskesmas dan bangunan pembawa air bersih lain - lain

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp50.184.048.151,18.

2. Mutasi kurang :

- a. Reklas dari KDP ke KIB C sebesar Rp42.294.069.034,44, Wujud Reklas dari Reklas dari KDP ke KIB C adalah Bangunan Tempat Ibadah yang direklas dari KDP.
- b. Reklas dari KDP ke KIB D sebesar Rp6.972.249.819,50 Wujud dari Penambahan Reklas dari KDP ke KIB D adalah Jalan dan Jembatan.
- c. Pengurangan Pembayaran Utang Rp156.995.453 Wujud dari Pengurangan Pembayaran utang adalah Jembatan.

Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp49.423.314.307,94. Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.807.703.692,84. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XVII.f dan XVIII.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan Penyusutan pada Aset Milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal Neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain Tanah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp1.181.366.544.726,19 dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.043.371.858.449,94.

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024. Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggunakan metode garis lurus bulanan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 masing-masing berdasarkan rincian objek Aset sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.76
Aset Tetap-Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	355.200.244.267,19	320.145.688.162,34	35.054.556.104,85	27.905.245.330,00
Alat-alat Besar	5.600.789.747,00	5.122.841.240,00	477.948.507,00	765.286.464,00
Alat-alat Angkutan	72.055.565.324,00	76.718.936.576,00	(4.663.371.252,00)	28.149.518.407,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.743.017.471,00	2.095.280.337,00	647.737.134,00	2.386.394.460,00
Alat Pertanian	5.613.498.984,00	5.217.427.584,33	396.071.399,67	194.259.236,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	78.929.955.543,19	70.551.795.241,67	8.378.160.301,52	27.710.986.094,00
Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar	9.629.297.086,00	8.140.207.718,67	1.489.089.367,33	5.520.124.948,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.598.726.414,00	73.076.455.777,00	12.522.270.637,00	41.354.637.522,80
Alat Laboratorium	36.849.286.626,00	31.398.169.209,00	5.451.117.417,00	18.881.406.927,00
Alat Persenjataan	355.274.154,00	281.533.102,00	73.741.052,00	67.641.484,00
Komputer	52.526.407.816,00	42.901.410.180,67	9.624.997.635,33	26.297.144.672,00
Alat Eksplorasi	5.200.000,00	400.000,00	4.800.000,00	18.800.000,00
Alat Produksi.Pengolahan Dan Pemurnian	3.195.833,00	1.345.833,00	1.850.000,00	15.304.167,00
Alat Keselamatan Kerja	4.322.886.827,00	4.004.549.100,00	318.337.727,00	399.265.198,00
Alat Peraga	261.250,00	166.250,00	95.000,00	688.750,00
Peralatan Proses/Produksi	543.749,00	131.249,00	412.500,00	2.756.253,00
Rambu-rambu	571.099.466,00	396.458.407,00	174.641.059,00	2.457.158.924,00
Peralatan Olahraga	395.237.977,00	238.580.357,00	156.657.620,00	1.429.219.030,00
Gedung dan Bangunan	140.367.064.979,00	123.743.841.431,60	16.623.223.547,40	786.037.954.562,87
Bangunan Gedung	139.547.456.599,00	123.107.947.978,60	16.439.508.620,40	786.037.954.562,87
Monumen	319.499.026,00	274.744.159,00	44.754.867,00	1.943.878.607,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.109.354,00	361.149.294,00	138.960.060,00	8.205.778.813,00
Jalan dan Jembatan dan Irigasi	685.761.034.246,00	599.447.825.123,00	86.313.209.123,00	1.026.147.109.905,69
Jalan dan Jembatan	516.080.973.436,00	450.497.625.868,00	65.583.347.568,00	603.003.118.807,92
Bangunan Air	145.313.313.711,00	127.927.985.735,00	17.385.327.976,00	322.105.215.226,31
Instalasi	7.003.831.696,00	5.835.955.476,00	1.167.876.220,00	33.021.787.878,46
Jaringan	17.362.915.403,00	15.186.258.044,00	2.176.657.359,00	68.016.987.993,00
Aset Tetap Lainnya	38.626.233,00	34.503.733,00	4.122.500,00	15.397.472.213,00
Bahan Perpustakaan	29.699.780,00	29.699.780,00	0,00	11.630.577.705,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.926.453,00	4.803.953,00	4.122.500,00	1.258.008.508,00
Hewan	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00	655.654.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Nilai Buku
Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	1.770.072.000,00
Jumlah	1.181.366.969.725,19	1.043.435.281.789,00	137.931.687.936,19	2.180.934.252.759,21

Sumber: Simda BMD

5.3.1.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.893.890.631,08. Rincian Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.77
Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	482.006.633,00	482.006.633,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.830.422.650,00	2.651.052.950,00	179.369.700,00
Aset Lain-Lain	105.509.932.425,26	102.457.734.497,26	3.052.197.928,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.313.182.478,33)	(2.125.623.083,34)	(187.559.394,99)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(10.249.568.425,28)	(10.249.143.425,28)	(425.000,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	196.206.290.000,00	(196.206.290.000,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	50.615.809.000,00	0,00	50.615.809.000,00
Jumlah	146.875.419.804,65	289.422.317.571,64	(142.546.897.766,99)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Dapat dijelaskan bahwa Saldo Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp482.006.633,00 merupakan koreksi pengakuan temuan atas kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Daerah atas penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp275.470.913,00 berdasarkan Berita Acara Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor : 045/MP TP-TGR/MU/XII/2020 dan atas pengakuan temuan kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di bendahara penerimaan RSUD Kolonodale atas Penerimaan Klaim Ambulans sebesar Rp207.535.720.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Nilai yang tertera pada Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.830.422.650,00. Nilai tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2024, terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 yang merupakan perangkat lunak (*Software*) sebesar Rp100.000.000,00 dari Inspektorat, dan sebesar Rp24.950.000,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024 perangkat lunak (*Software*) sebesar Rp124.455.000,00 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sebesar Rp54.914.700,00 dari Dinas Perpustakaan Daerah. Dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.651.052.950,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Selengkapnya mengenai Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.78
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	2.830.422.650,00	2.651.052.950,00	179.369.700,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(2.313.182.478,33)	(2.125.623.083,34)	(187.559.394,99)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	517.240.171,67	525.429.866,66	(8.189.694,99)

Sumber: SIPD 2024

Tabel 5.79
Kenaikan/Penurunan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023	Rp	2.651.052.950,00
Penambahan:		
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00
2. Reklas Aset Antar KIB	Rp	179.369.700,00
Jumlah Penambah	Rp	179.369.700,00
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tetap lainnya Tahun 2024	Rp	179.369.700,00
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024	Rp	2.830.422.650,00

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

- Penambahan Reklas Aset Antar KIB Sebesar Rp179.369.700,00 Wujud dari Penambahan Reklas aset antar KIB adalah Aplikasi BASAOMO (Dinas Perpustakaan Daerah) dan SITAMU (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah)

Sehingga total mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp179.369.700,00.

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.509.932.425,26 Aset Lain-Lain tersebut terdiri dari:

Tabel 5.80
Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Aset Rusak Berat/Usang	97.346.762.809,26	94.294.564.881,26	3.052.197.928,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	8.163.169.616,00	8.163.169.616,00	0,00
Jumlah	105.509.932.425,26	102.457.734.497,26	3.052.197.928,00

Sumber: Simda BMD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

1. Dapat dijelaskan bahwa Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp97.346.762.809,26 berasal dari:
 - a. Reklas Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp636.948.427,00 yang merupakan kekurangan kas pada Dinas Kesehatan, Puskesmas Pandauke dan Puskesmas Anutotoluwu Tahun Anggaran 2017.
 - b. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Pendidikan yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp8.500.000,00.
 - c. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Sosial yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp14.380.050,00 Tahun Anggaran 2023.
 - d. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari DPUPRDPPD yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp3.022.500,00 Tahun Anggaran 2023.
 - e. Aset Rusak Berat sebesar Rp93.625.628.832,26. Saldo awal sebesar Rp93.445.753.832,26 dan terdapat penambahan Aset Rusak Berat Roda Dua sebesar Rp179.875.000,00 yang terdapat pada Bagian Umum sebesar Rp35.600.000,00, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp43.425.000,00, Kecamatan Lembo sebesar Rp17.300.000,00, Kecamatan Mori Utara sebesar Rp15.850.000, Kecamatan Petasia sebesar Rp16.800.000, Kecamatan Petasia Barat sebesar Rp50.900.000,00.
 - f. Pembangunan kantor KPU sebesar Rp3.058.283.000,00 yang akan diserahkan Tahun 2025.
- Secara rinci aset tetap rusak berat dapat dilihat pada lampiran XIX.
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp8.163.169.616,00 merupakan Dana Rekening BNI yang di Blokir KPK tahun 2022. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/ 09/DIK.01.05/23/01/2023 pada tanggal 5 Januari 2023.

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.313.182.478,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.125.623.083,34 terjadi penurunan sebesar Rp187.559.394,99, hal ini disebabkan karena adanya Perubahan Estimasi Masa Manfaat Aset sehingga beban amortisasi tahunan akan berkurang. Hal ini yang menyebabkan penurunan dalam akumulasi amortisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan dari software sebesar Rp2.313.182.478,33. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XX.

5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp10.249.568.425,28 terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor beroda dua yang direklasifikasi ke akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang sebesar Rp172.964.287,00, koreksi atas kesalahan pencatatan akumulasi aset tetap rusak berat Rp10.076.179.138,28, dan koreksi ketekoran kas bos akibat belanja tanpa disertai SPJ pada enam sekolah sebesar Rp425.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp10.249.143.425,28 terjadi kenaikan sebesar Rp425.000,00, hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya koreksi Aset dari sekolah terkait pembelian barang yang menambah aset sehingga penambahan aset ini secara langsung meningkatkan total akumulasi penyusutan karena beban penyusutan tahunan bertambah. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXI.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Dana Bagi Hasil yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada rekening lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah sebesar Rp50.615.809.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp196.206.290.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp145.590.481.000,00, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan fiskal atau pengelolaan keuangan negara, seperti penyesuaian alokasi dana transfer pusat ataupun perubahan dalam mekanisme penyaluran dana ke daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah dana yang ditempatkan di TDF tersebut.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp119.682.720.180,87 mengalami penurunan sebesar Rp48.500.652.085,19 jika dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.183.372.266,06 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

Tabel 5.81
Kewajiban

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Kewajiban Jangka Pendek	50.497.780.575,87	50.162.026.769,06	335.753.806,81
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	81.146.123,67	147.384.772,00	(66.238.648,33)
Utang Bunga	218.339.489,00	308.686.840,00	(90.347.351,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	0,00
Utang Belanja	1.361.889.071,20	398.005.698,06	963.883.373,14
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	471.543.567,00	(471.543.567,00)
Kewajiban Jangka Panjang	69.184.939.605,00	118.021.345.497,00	(48.836.405.892,00)
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	69.184.939.605,00	118.021.345.497,00	(48.836.405.892,00)
Jumlah	119.682.720.180,87	168.183.372.266,06	(48.500.652.085,19)

Sumber: SIPD 2024

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp81.446.123,67 merupakan utang PFK pada bendahara JKN sebesar Rp81.146.123,67. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Utang PPh 21	45.609.073,00	8.658.025,00	36.951.048,00
Utang PPh 22	5.422.383,00	1.914.786,00	3.507.597,00
Utang PPh 23	255.120,00	13.399.848,00	(13.144.728,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Utang PPN Pusat	29.859.547,67	123.412.113,00	(93.552.565,33)
Jumlah	81.146.123,67	147.384.772,00	(66.238.648,33)

Sumber: SIPD 2024

5.3.2.2 Utang Bunga

Utang Bunga (Accrued Interest) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang Bunga sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp218.339.489,00 merupakan biaya pengelolaan pinjaman PEN Tahun Anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp308.686.840,00 terjadi penurunan sebesar Rp90.347.351,00.

5.3.2.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp48.836.405.892,00 dengan rincian pembayaran per bulan sebesar Rp4.069.700.491,00 merupakan Pokok Pinjaman Dana PEN yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021. Pada Tahun 2023 sebesar Rp48.836.405.892,00 sehingga tidak terdapat penambahan pada bagian lancar utang jangka panjang.

5.3.2.4 Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati atas perjanjian komitmen yang telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak perjanjian komitmen tersebut. Utang Belanja pada saldo akhir Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.361.889.071,20 merupakan utang belanja yang belum yang sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 belum terealisasi karena tagihan atas utang tersebut belum ada. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83
Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	336.100.000,00	600,00	336.099.400,00
Utang Belanja Jasa	121.345,00	134.563.325,00	(134.441.980,00)
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	940.875.626,20	60.507.003,20	880.368.623,00
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	0,00	190.841.769,86	(190.841.769,86)
Utang Belanja Modal Bangunan Air	72.699.100,00	0,00	72.699.100,00
Utang Belanja Modal Instalasi	4.093.000,00	4.093.000,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Jumlah	1.361.889.071,20	398.005.698,06	963.883.373,14

Sumber: SIPD 2024

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXII.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.3.2.5 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Tahun 2024 sebesar Rp69.184.939.605,00. Merupakan sisa utang/kewajiban Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan dilunasi sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp118.021.345.497,00 terjadi penurunan sebesar Rp48.836.405.892,00.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan selisih antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.386.751.454.574,42 mengalami kenaikan sebesar Rp116.299.064.382,10 jika dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.270.452.390.192,32.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.84
Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Asli Daerah – LO	165.415.687.452,99	177.848.630.084,62	(12.432.942.631,63)
Pendapatan Transfer – LO	1.186.849.334.612,00	1.153.277.453.614,00	33.571.880.998,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	8.313.490.762,00	798.122.902,00	7.515.367.860,00
Jumlah	1.360.578.512.826,99	1.331.924.206.600,62	28.654.306.226,37

Sumber: SIPD 2024

5.4.2.2 Pendapatan Asli Daerah – Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.85
Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pajak Daerah – LO	74.038.595.779,00	80.559.929.792,20	(6.521.334.013,20)
Retribusi Daerah – LO	22.004.929.269,00	33.910.237.686,00	(11.905.308.417,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.229.148.166,00	3.864.163.872,00	1.364.984.294,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	64.143.014.238,99	59.514.298.734,42	4.628.715.504,57
Jumlah	165.415.687.452,99	177.848.630.084,62	(12.432.942.631,63)

Sumber: SIPD 2024

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.86
Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pajak Hotel-LO	196.054.950,00	182.041.100,00	14.013.850,00
Pajak Restoran-LO	2.346.743.741,00	2.122.765.078,00	223.978.663,00
Pajak Hiburan-LO	11.800.000,00	8.920.000,00	2.880.000,00
Pajak Reklame-LO	358.501.945,00	136.134.191,00	222.367.754,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	46.449.547.290,00	60.251.833.635,20	(13.802.286.345,20)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.844.843.492,00	4.663.530.536,00	3.181.312.956,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	12.004.380.432,00	8.682.339.419,00	3.322.041.013,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.826.723.929,00	4.512.365.833,00	314.358.096,00
Jumlah	74.038.595.779,00	80.559.929.792,20	(6.521.334.013,20)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya tunggakan piutang pajak pajak daerah yang dibayarkan atau dilunasi.
 - Tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat
- Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp517.364.039,00 (Rp74.038.595.779,00 - Rp74.555.959.818,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.87
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA		Rp	74.555.959.818,00
<u>Penambah :</u>			
1. Realisasi Piutang Pajak Reklame di thn 2024 Rp2.317.000 – tambahan piutang Pajak Reklame Thn 2024 Rp22.943.000	Rp	20.626.000,00	
2. Tambahan Piutang PPJ Thn 2024	Rp	4.680.446.673,00	
3. Realiasi Piutang PBB-P2 Thn 2024 Rp906.808.585 – tambahan Piutang PBB-P2 Thn 2024 Rp.6.099.150.999	Rp	5.192.342.414,00	
Jumlah Penambah	Rp	9.893.415.087,00	
<u>Pengurang :</u>			
1. Pelunasan Piutang Pajak Restoran Thn 2023	Rp	(1.050.000,00)	
2. Pelunasan Piutang Pajak Gal C Thn 2024 Rp11.709.960.733 dan Tambahan Piutang Gal C Thn 2024 Rp.1.300.231.607	Rp	(10.409.729.126,00)	
Jumlah Pengurang	Rp	(10.410.779.126,00)	
Total Tambah/(Kurang)	Rp	(517.364.039,00)	
Saldo Pendapatan Pajak Daerah– LO	Rp	74.038.595.779,00	

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.88
Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.183.592.035,00	5.378.016.030,00	(2.194.423.995,00)
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	482.495.000,00	546.625.000,00	(64.130.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	22.000.000,00	53.632.000,00	(31.632.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	72.750.000,00	68.868.000,00	3.882.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	25.740.000,00	35.020.000,00	(9.280.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	273.899.491,00	163.462.204,00	110.437.287,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	63.001.000,00	32.330.000,00	30.671.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	17.771.530.832,00	(17.771.530.832,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	355.590.643,00	0,00	355.590.643,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	17.525.861.100,00	9.860.753.620,00	7.665.107.480,00
Jumlah	22.004.929.269,00	33.910.237.686,00	(11.905.308.417,00)

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Perubahan Jumlah Wajib Retribusi anataranya retribusi pasar,parkir, layanan kesehatan, IMTA, dan PBG.
 - Adanya Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan dalam system pemungutan retribusi belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.800.000,00 (Rp22.004.929.269,00 - Rp22.045.729.269,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.89
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA		Rp	22.045.729.269,00
<u>Pengurang :</u>			
1. Piutang retribusi pelayanan kepelabuhan yang telah dilunasi	Rp	40.800.000,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	40.800.000,00
Total Tambah/(Kurang)		Rp	(40.800.000,00)
Saldo Pendapatan Retribusi Daerah– LO		Rp	22.004.929.269,00

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 sebesar Rp5.229.148.166,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.864.163.872,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.364.984.294,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 antara lain disebabkan karena Kinerja Keuangan Perusahaan meningkat sehingga deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah meningkat.
- Pengakuan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun Anggaran 2024 (Rp5.229.148.166,00 - Rp5.229.148.166,00).

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.90
Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Hasil Sewa BMD-LO	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.228.979.159,00	4.143.818.016,00	(1.914.838.857,00)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	3.564.862,00	1.068,00	3.565.930,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.608.177.761,59	1.760.001.994,00	(151.824.232,41)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	319.570,00	0,00	319.570,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	27.961.434,00	(27.961.434,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	5.167.449.706,52	6.747.188.979,42	(1.579.739.272,90)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	159.838.321,00	0,00	159.838.321,00
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	38.673.695.152,00	(38.673.695.152,00)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	54.923.899.858,88	0,00	54.923.899.858,88
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	25.035.000,00	0,00	25.035.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	8.161.632.091,00	(8.161.632.091,00)
Jumlah	64.143.014.238,99	59.514.298.734,42	4.628.715.504,57

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Pendapatan dari denda,sanksi administrasi dari temuan-temuan pemeriksaan oleh APIP maupun BPK telah ditindak lanjuti sehingga mempengaruhi pendapatan daerah meningkat.
 - Pendapatan dari layanan BLUD pada Rumah Sakit Umum meningkat.
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.860.463.600,00 (Rp64.143.014.238,99 - Rp67.003.477.838,99). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.91

Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	Rp	67.003.477.838,99
Pengurang :		
1.hasil lelang kendaraan roda 4	Rp	2.860.463.600,00
Jumlah Pengurang	Rp	2.860.463.600,00
Total Tambah/(Kurang)	Rp	(2.860.463.600,00)
Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	Rp	64.143.014.238,99

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92
Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.131.717.230.248,00	1.109.428.785.683,00	(2.241.146.015.931,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO	55.132.104.364,00	43.848.667.931,00	(98.980.772.295,00)
Jumlah	1.186.849.334.612,00	1.153.277.453.614,00	(2.340.126.788.226,00)

Sumber: SIPD 2024

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
• Dana Perimbangan			
-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	383.098.489.555,00	436.269.393.976,00	(53.170.904.421,00)
-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	595.195.257.065,00	555.056.781.671,00	40.138.475.394,00
-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	62.110.361.172,00	42.255.915.242,00	19.854.445.930,00
-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	78.784.991.456,00	75.846.694.794,00	2.938.296.662,00
• Insentif Fiskal-LO			
-Insentif Fiskal-LO	12.528.131.000,00	0,00	12.528.131.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	1.131.717.230.248,00	1.109.428.785.683,00	22.288.444.565,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penyesuaian alokasi Dana Umum (DAU), alokasi Dana Khusus (DAK) dan Dana transfer lainnya akibat perubahan prioritas nasional
 - Kinerja Daerah dalam memenuhi pendapatan transfer yang memerlukan pemenuhan indikator tertentu.
 - Adanya pencairan dana TDF yang mempengaruhi kenaikan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.172.143.000,00 (Rp1.131.717.230.248,00 - Rp1.386.889.373.248,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.94
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA		Rp	1.386.889.373.248,00
<u>Penambah:</u>			
1. Penambahan Dana TDF Tahun 2024	Rp	50.615.809.000,00	
Jumlah Penambah	Rp	50.615.809.000,00	
<u>Pengurang:</u>			
1. Pencairan Dana TDF Tahun 2023	Rp	Rp196.206.290.000,00	
2. Dana desa	Rp	109.581.662.000,00	
Jumlah Pengurang	Rp	305.787.952.000,00	
Total Tambah/(Kurang)		Rp	(255.172.143.000,00)
Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO		Rp	1.131.717.230.248,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.95

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Bagi Hasil-LO	55.132.104.364,00	41.571.227.931,00	13.560.876.433,00
Bantuan Keuangan	0,00	2.277.440.000,00	(2.277.440.000,00)
Jumlah	55.132.104.364,00	43.848.667.931,00	11.283.436.433,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya peningkatan alokasi dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi
 - Adanya pelunasan bagi hasil pajak tahun sebelumnya.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.288.770.698,00 (Rp55.132.104.364,00 - Rp49.843.333.666,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96

Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA		Rp	49.843.333.666,00
Penambahan:			
1. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	562.914.596,00	
2. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	729.090.770,00	
3. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	3.765.499.861,00	
4. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Pajak Air Permukaan	Rp	231.265.471,00	
Jumlah Penambah	Rp	5.288.770.698,00	
Total Tambah/(Kurang)		Rp	5.288.770.698,00
Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		Rp	55.132.104.364,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.97
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah – LO	36.395.000,00	798.122.902,00	(761.727.902,00)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00
Jumlah	8.313.490.762,00	798.122.902,00	7.515.367.860,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.98
Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	36.395.000,00	798.122.902,00	(761.727.902,00)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain adanya kondisi darurat atau bencana sehingga dalam situasi tertentu pemerintah pusat dapat memberikan tambahan hibah yang dapat menyesuaikan alokasi anggarannya ke daerah terdampak seperti di tahun 2024 Pemerintah daerah mendapatkan hibah tenda dari kementerian melalui kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.395.000,00 (Rp36.395.000,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.99
Perbandingan Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Hibah Daerah - LRA	Rp	0,00
<u>Penambahan:</u>		
1. Hibah dari kementerian dalam negeri berupa tenda	Rp	36.395.000,00
Jumlah Penambah	Rp	36.395.000,00
Total Tambah/(Kurang)	Rp	36.395.000,00
Saldo Pendapatan Hibah Daerah - LO	Rp	36.395.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.100
Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
--------	--------------------	--------------------	--------------------

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00
--	------------------	------	------------------

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada 14 (empat belas) FKTP sebesar Rp8.277.095.762,00 selama satu tahun anggaran.
2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Rp8.277.095.762,00 - Rp8.277.095.762,00).

5.4.2 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.101
Beban Operasioanal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Pegawai	497.582.380.767,00	425.231.570.909,00	72.350.809.858,00
Beban Barang dan Jasa	382.061.489.250,82	350.755.548.972,15	31.305.940.278,67
Beban Bunga	8.532.517.820,00	11.065.804.150,00	(2.533.286.330,00)
Beban Hibah	58.682.833.607,99	25.369.825.466,00	33.313.008.141,99
Beban Bantuan Sosial	28.282.087.055,00	31.965.226.788,26	(3.683.139.733,26)
Beban Penyisihan Piutang	6.682.168.494,80	1.110.246.240,42	5.571.922.254,38
Beban Penyusutan dan Amortisasi	149.648.534.546,18	136.930.964.996,64	12.717.569.549,54
Beban Bagi Hasil	0,00	933.454.571,00	(933.454.571,00)
Beban Bantuan Keuangan	116.869.929.862,00	103.583.030.310,00	13.286.899.552,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Tidak Terduga	407.476.000,00	0,00	407.476.000,00
Jumlah	1.248.749.417.403,79	1.086.945.672.403,47	161.803.745.000,32

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

5.4.2.1 Beban Pegawai - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.102
Beban Pegawai-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Gaji Pokok ASN	220.890.693.943,00	187.213.344.078,00	33.677.349.865,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.927.674.155,00	17.166.207.732,00	2.761.466.423,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.717.333.096,00	4.752.923.800,00	(35.590.704,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	16.794.336.004,00	14.101.040.100,00	2.693.295.904,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.085.374.000,00	2.386.075.000,00	(300.701.000,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	11.903.458.140,00	10.843.012.080,00	1.060.446.060,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	904.534.863,00	598.206.252,00	306.328.611,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.156.582,00	2.869.980,00	286.602,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.349.308.031,00	7.755.259.790,00	3.594.048.241,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	433.123.351,00	534.943.988,00	(101.820.637,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.195.955.508,00	1.350.459.315,00	(154.503.807,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	109.791.307.469,00	91.945.002.457,00	17.846.305.012,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	3.512.474.011,00	(3.512.474.011,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.514.919.500,00	1.582.942.895,00	931.976.605,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	597.874.250,00	1.439.911.379,00	(842.037.129,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.259.773.150,00	33.517.602.844,00	3.742.170.306,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.810.891.500,00	4.427.400.300,00	383.491.200,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.592.250.000,00	1.689.230.000,00	(96.980.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.007.589.265,00	9.641.311.034,00	(3.633.721.769,00)
Beban Honorarium	3.354.320.000,00	2.751.280.000,00	603.040.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	140.958.400,00	0,00	140.958.400,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	83.750.000,00	0,00	83.750.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	558.495.000,00	557.340.000,00	1.155.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	38.885.700,00	36.514.800,00	2.370.900,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	49.535.280,00	47.724.780,00	1.810.500,00
Beban Uang Paket DPRD	39.952.500,00	47.712.000,00	(7.759.500,00)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	816.551.291,00	808.143.000,00	8.408.291,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	24.953.359,00	29.795.325,00	(4.841.966,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.373.200,00	45.340.050,00	(11.966.850,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.170.000.000,00	3.139.500.000,00	30.500.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	514.500.000,00	777.000.000,00	(262.500.000,00)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	322.829,00	373.528,00	(50.699,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.169.197.562,00	2.160.010.536,00	9.187.026,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.313.500.000,00	3.186.000.000,00	127.500.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.075.000,00	0,00	222.075.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	6.630.000,00	510.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.590.220,00	6.590.220,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	407.557,00	1.487.219,00	(1.079.662,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.980,00	1.980,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	264.600.000,00	(96.600.000,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	578.000.000,00	816.000.000,00	(238.000.000,00)
Beban Pegawai BLUD	29.349.151.682,00	15.924.944.036,00	13.424.207.646,00
Jumlah	497.582.380.767,00	425.231.570.909,00	72.350.809.858,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya perubahan kenaikan gaji maupun tunjangan
 - Adanya penambahan maupun pengurangan pegawai seperti mutasi maupun pensiun.
 - Adanya kebijakan dalam pemberian THR maupun pemberian insentif lainnya bagi ASN
- Pengkakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp336.100.000,00 (Rp497.582.380.767,00 - Rp497.246.280.767,00).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.103
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Belanja Pegawai Daerah - LRA	Rp	497.246.280.767,00
<u>Penambahan:</u>		
1. Utang Belanja Pegawai atas tunjangan fungsional P3K TA 2024 yang belum dibayarkan	Rp	336.100.000,00
Jumlah Penambah	Rp	336.100.000,00
Total Tambah/(Kurang)	Rp	336.100.000,00
Saldo Beban Pegawai Daerah - LO	Rp	497.582.380.767,00

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.104
Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Barang Pakai Habis	99.888.904.244,22	93.333.077.783,15	6.555.826.461,07
Beban Barang Tak Habis Pakai	105.482.800,00	0,00	105.482.800,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	943.797.478,00	219.928.082,00	723.869.396,00
Beban Jasa Kantor	104.634.115.553,00	101.895.476.427,00	2.738.639.126,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	22.973.384.384,00	20.070.297.000,00	2.903.087.384,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.172.577.905,00	2.379.696.500,00	1.792.881.405,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.549.065.000,00	1.162.143.000,00	386.922.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.923.419.599,00	5.748.242.000,00	(2.824.822.401,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.180.568.000,00	947.337.400,00	1.233.230.600,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	900.000.000,00	640.000.000,00	260.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.449.753.200,00	4.759.167.220,00	(309.414.020,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	405.212.000,00	(405.212.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.816.489.984,00	4.988.540.281,00	(172.050.297,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.887.464.811,00	5.342.450.171,00	(2.454.985.360,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.215.623.000,00	4.750.437.900,00	(1.534.814.900,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.341.007.680,00	72.217.472.279,00	15.123.535.401,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	334.235.608,00	(334.235.608,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	425.550.000,00	1.619.484.980,00	(1.193.934.980,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	194.748.000,00	0,00	194.748.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Beban Barang dan Jasa BOS	16.906.108.419,00	17.291.634.955,00	(385.526.536,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	21.553.429.193,60	12.650.715.386,00	8.902.713.807,60
Jumlah	382.061.489.250,82	350.755.548.972,15	31.305.940.278,67

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya perubahan harga barang dan jasa akibat inflasi yang dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik maupun turun
 - Adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam efisiensi anggaran, realokasi dana sehingga berdampak pada nilai beban.
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.896.303.744,67 (Rp382.061.489.250,82 - Rp418.957.792.995,49). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.105
Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LRA		Rp	418.957.792.995,49
<u>Penambah :</u>			
Pelunasan Utang Belanja Barjas (Kas Lainnya)	Rp	39.056.580,00	
Pengurangan Persediaan TA 2024	Rp	1.945.497.513,33	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	478.665.273,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	1.672.657.602,00	
Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ	Rp	1.402.185.000,00	
Jumlah Penambah	Rp	5.538.061.968,33	
<u>Pengurang :</u>			
Kapitalisasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	235.130.700,00	
Kapitalisasi ke Aset Peralatan dan Mesin	Rp	2.509.748.670,00	
Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan	Rp	21.316.099.278,00	
Kapitalisasi ke Aset Tetap JIJ	Rp	11.367.926.990,00	
Kapitalisasi ke KDP	Rp	4.239.163.870,00	
Pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	25.950.000,00	
Kesalahan catat Utang Jangka Pendek Lainnya yang seharusnya Utang Belanja	Rp	114.600,00	
Pengurangan Utang Belanja Barjas	Rp	134.441.980,00	
Penambahan Belanja Dibayar Dimuka - Sewa Kendaraan	Rp	2.605.789.625,00	
Jumlah Pengurang	Rp	42.434.365.713,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Total Tambah/(Kurang)	Rp	(36.896.303.744,67)
Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO	Rp	382.061.489.250,82

5.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.106
Beban Bunga

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	8.314.178.331,00	1.659.124.491,00	6.655.053.840,00
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	218.339.489,00	9.406.679.659,00	(9.625.019.148,00)
Jumlah	8.532.517.820,00	11.065.804.150,00	(2.533.286.330,00)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain Adanya perubahan perhitungan jumlah suku bunga menurun setiap tahunnya
2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bunga dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.347.351,00 (Rp8.532.517.820,00 - Rp8.622.865.171,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bunga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.107
Perbandingan Beban Bunga LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Beban Bunga LRA	Rp	8.622.865.171,00
<u>Penambah</u>		
Utang bunga biaya pengelolaan utang jangka panjang pada PT. SMI 2024	Rp	218.339.489,00
Jumlah Penambah	Rp	218.339.489,00
<u>Pengurang :</u>		
Pembayaran utang bunga biaya pengelolaan utang jangka Panjang pada PT. SMI TA 2023	Rp	308.686.840,00
Jumlah Pengurang	Rp	(308.686.840,00)
Total Tambah/(Kurang)	Rp	(90.347.351,00)
Saldo Perbandingan Beban Bunga LO	Rp	8.532.517.820,00

5.4.2.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.108
Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.200.000.000,00	9.500.000.000,00	33.700.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	166.957.000,00	(166.957.000,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	570.631.945,00	5.596.169.600,00	(5.025.537.655,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.636.595.000,00	3.589.918.950,00	3.046.676.050,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.701.400.000,00	5.764.999.916,00	936.400.084,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	432.180.000,00	0,00	432.180.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	692.026.662,99	651.780.000,00	40.246.662,99
Jumlah	58.682.833.607,99	25.369.825.466,00	33.313.008.141,99

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya peningkatan kebutuhan bantuan kepada Masyarakat/Lembaga, pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah disesuaikan dengan alokasi anggaran berdasarkan usulan dan kebutuhan yang masuk.
 - Adanya kebutuhan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum pada tahun anggaran 2024.
- Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 (Rp58.682.833.607,99 - Rp58.682.833.607,99).

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.109
Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.997.284.050,00	11.875.008.400,00	(1.877.724.350,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada	2.398.525.925,00	0,00	2.398.525.925,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kelompok Masyarakat			
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	15.886.277.080,00	20.090.218.388,26	(4.203.941.308,26)
Jumlah	28.282.087.055,00	31.965.226.788,26	(3.683.139.736,26)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah yang pada tahun berkenaan pemerintah lebih memprioritaskan pengeluaran belanja disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
- Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA Tahun Anggaran 2024 Rp199.850.000,00 (Rp28.282.087.055,00 - Rp28.481.937.055,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.110
Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Beban Bantuan Sosial LRA	Rp	28.481.937.055,00
<u>Pengurang:</u>		
1. Reklasifikasi dari Belanja Bansos ke Bangunan Gedung (Kesra)	Rp	199.850.000,00
Jumlah Pengurang	Rp	199.850.000,00
Total Tambah/(Kurang)	Rp	(199.850.000,00)
Saldo Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO	Rp	28.282.087.055,00

Reklasifikasi dari Belanja Bansos Ke Bangunan Gedung sebesar Rp199.850.000,00 merupakan kesalahan penganggaran yang seharusnya masuk ke rekening belanja modal berupa pekerjaan pemasangan tehel pada pelataran Musholla kantor Bupati Morowali Utara.

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.111
Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	5.250,00	(5.250,00)
Beban Penyisihan Pajak Reklame	3.363.910,00	(51.311.077,90)	54.674.987,90
Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	4.586.497.620,76	216.760.681,76	4.369.736.939,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.567.621.658,25	40.023.180,45	1.527.598.477,80
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	491.209.116,79	896.401.277,21	(405.192.160,42)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.501.106,25	184.268,75	3.316.837,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	275.625,00	(275.625,00)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	204.000,00	(204.000,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.336.875,00	0,00	3.336.875,00
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	26.443.853,49	7.185.934,15	19.257.919,34
Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	194.354,26	517.101,00	(322.746,74)
Jumlah	6.682.168.494,80	1.110.246.240,42	5.571.922.254,38

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain adanya perubahan kualitas nilai piutang yang belum tertagih atau menunggak sehingga hal ini sangat mempengaruhi nilai beban penyisihan piutang.
- Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.681.959.244,80 (Rp8.334.733.537,73 - Rp15.016.692.782,53). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.112
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO dan Neraca Tahun 2024

Saldo Perbandingan Selisih Penyisihan Piutang Neraca		Rp	6.681.959.244,80
Penambahan:			
1. Piutang retribusi pelayanan kepelabuhan yang telah dilunasi	Rp	204.000,00	
2. Piutang pajak resto yang telah dilunasi	Rp	5.250,00	
Jumlah Penambahan	Rp	209.250,00	
Total Tambah/(Kurang)	Rp	209.250,00	
Saldo Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO	Rp	6.682.168.494,80	

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.113
Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyusutan Alat Besar	489.686.765,91	1.463.269.308,00	(973.582.542,09)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.706.529.623,75	14.968.412.627,00	(8.261.883.003,25)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	647.231.801,00	538.910.427,00	108.321.374,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	436.312.836,00	1.417.366.207,00	(981.053.371,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.378.172.628,00	(53.887.416.048,00)	62.265.588.676,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.494.403.853,00	1.490.192.325,00	4.211.528,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.515.942.757,00	48.250.903.371,00	(35.734.960.614,00)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	5.335.058.667,00	18.925.671.180,00	(13.590.612.513,00)
Beban Penyusutan	42.239.665,00	63.154.777,00	(20.915.112,00)
Beban Penyusutan Komputer	9.741.002.706,53	11.285.660.564,00	(1.544.657.857,47)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	4.800.000,00	400.000,00	4.400.000,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.850.000,00	1.162.500,00	687.500,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	295.027.727,00	472.737.781,00	(177.710.054,00)
Beban Penyusutan Alat Peraga	0,00	95.000,00	(95.000,00)
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	162.500,00	131.249,00	31.251,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	174.551.059,00	126.554.945,00	47.996.114,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	156.746.344,00	96.861.176,00	59.885.168,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.562.654.250,00	15.331.341.450,30	1.231.312.799,70
Beban Penyusutan Monumen	44.754.870,00	43.396.997,00	1.357.873,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	134.850.810,00	138.927.336,00	(4.076.526,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	65.345.575.161,00	58.072.372.372,00	7.273.202.789,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	17.587.029.198,00	12.773.398.475,00	4.813.630.723,00
Beban Penyusutan Instalasi	756.127.681,00	3.026.488.867,00	(2.270.361.186,00)
Beban Penyusutan Jaringan	2.606.141.748,00	2.142.578.459,00	463.563.289,00
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.122.500,00	3.407.918,00	714.582,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	187.559.394,99	184.985.733,34	2.573.661,65
Jumlah	149.648.534.546,18	136.930.964.996,64	12.717.569.549,54

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya penghapusan dan pelepasan Aset berupa kendaraan roda empat akibat Lelang dan Gedung VIP RSUD.
 - Adanya Nilai Perolehan dan penambahan Nilai Aset tetap.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.2**.

Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.27**, dan juga dapat dilihat pada Lampiran XXIII.

5.4.3 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.114
Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bagi Hasil	0,00	933.454.571,00	(933.454.571,00)
Beban Bantuan Keuangan	116.869.929.862,00	103.583.030.310,00	13.286.899.552,00
Jumlah	116.869.929.862,00	104.519.725.106,00	12.350.204.756,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.3.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023. Realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar tagihan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

5.4.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.115
Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	116.869.929.862,00	103.575.030.310,00	13.294.899.552,00
Jumlah	116.869.929.862,00	103.583.030.310,00	13.286.899.552,00

Sumber: SIPD 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Adanya peningkatan alokasi dana desa sebagai bagian dari Upaya pemerataan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa.
 - Adanya kenaikan kebutuhan Pembangunan desa sehingga memerlukan tambahan dana.
- Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dengan saldo Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.581.662.00,00 (Rp116.869.929.862,00 - Rp226.451.591.862,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.116
Perbandingan Beban Transfer LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Belanja Bantuan Keuangan LRA	Rp	226.451.591.862,00
<u>Pengurang:</u>		
1. Dana desa	Rp	109.581.662.000,00
Jumlah Pengurang	Rp	(109.581.662.000,00)
Total Tambah/(Kurang)	Rp	(109.581.662.000,00)
Saldo Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO	Rp	116.869.929.862,00

5.4.4 Beban Tidak Terduga

Beban tidak terduga, atau sering disebut sebagai biaya tak terduga, adalah pengeluaran yang muncul secara mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya dalam anggaran. Pengeluaran ini biasanya terjadi akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti kerusakan peralatan, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya. Beban tidak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp407.476.000,00 jika dibandingkan dengan beban tidak terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp267.476.000,00, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang sangat mendesak seperti adanya bencana banjir, longsor dan kebakaran.

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp750.410.000,00 (Rp407.476.000,00 - Rp1.157.886.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.117
Perbandingan Beban Tidak Terduga LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Belanja Tidak Terduga LRA	Rp	1.157.886.000,00
<u>Pengurang:</u>		
1. Kapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	750.410.000,00
Jumlah Pengurang	Rp	750.410.000,00
Total Tambah/(Kurang)	Rp	(750.410.000,00)
Saldo Perbandingan Beban Tidak Terduga LO	Rp	407.476.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.4.5 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023. Surplus BMD merupakan hasil Lelang kendaraan dinas dan surplus lainnya merupakan pelunasan piutang, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118
Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO			
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO			
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	209.250,00	639.580,00	(430.330,00)
Jumlah	2.860.672.850,00	1.154.534.780,00	1.706.138.070,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.6 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023. Dapat dijelaskan nilai sebesar RpRp469.007.976,00 merupakan bangunan VIP RSUD dan sebesar RpRp198.928.572,00 merupakan hasil Lelang kendaraan dinas pada Sek. DPRD,serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.119
Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO			
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	667.936.548,00	0,00	667.936.548,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.7 Surplus/Defisit-Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.120
Surplus/Defisit- LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Kegiatan Operasional			
➤ Pendapatan Daerah – LO			
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	165.415.687.452,99	177.848.630.084,62	(12.432.942.631,63)
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.186.849.334.612,00	1.153.277.453.614,00	33.571.880.998,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	8.313.490.762,00	798.122.902,00	7.515.367.860,00
➤ Beban Operasional			
✓ Beban Operasional	1.248.749.417.403,79	1.086.948.912.628,47	161.800.504.775,32
Kegiatan Non-Operasional			
➤ Surplus Non-Operasional			
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	209.250,00	639.580,00	(430.330,00)
➤ Defisit Non-Operasional			
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	667.936.548,00	0,00	667.936.548,00
Pos Luar Biasa			
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)
Jumlah	114.021.831.725,20	245.989.828.752,15	(131.967.997.026,95)

Sumber: SIPD 2024

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.7.2*

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.121
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.610.983.654.167,99	1.207.655.277.944,42	403.328.376.223,57
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.239.601.187.458,48	1.083.374.370.101,26	156.226.817.357,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	371.382.466.709,51	124.280.907.843,16	247.101.558.866,35

Sumber: SIPD 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.122
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Penerimaan Pajak Daerah			
✓ Pajak Hotel	196.054.950,00	182.041.100,00	14.013.850,00
✓ Pajak Restoran	2.347.793.741,00	2.121.715.078,00	226.078.663,00
✓ Pajak Hiburan	11.800.000,00	8.920.000,00	2.880.000,00
✓ Pajak Reklame	337.875.945,00	99.493.191,00	238.382.754,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	41.769.100.617,00	16.899.697.283,00	24.869.403.334,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.254.572.618,00	5.872.137.110,00	12.382.435.508,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.812.038.018,00	5.646.019.379,00	1.166.018.639,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.826.723.929,00	4.475.512.083,00	351.211.846,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah			
✓ Retribusi Jasa Umum			
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.183.592.035,00	6.313.053.030,00	(3.129.460.995,00)
• Retribusi Pelayanan Pasar	482.495.000,00	511.500.000,00	(29.005.000,00)
✓ Retribusi Jasa Usaha			
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.000.000,00	312.512.204,00	(290.512.204,00)
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	72.750.000,00	68.868.000,00	3.882.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	25.740.000,00	35.020.000,00	(9.280.000,00)
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	314.699.491,00	122.662.204,00	192.037.287,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	63.001.000,00	32.330.000,00	30.671.000,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu			
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	355.590.643,00	0,00	355.590.643,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	17.525.861.100,00	9.860.753.620,00	7.665.107.480,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.229.148.166,00	3.864.163.872,00	1.364.984.294,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah			
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00
✓ Jasa Giro	2.232.544.021,00	4.143.819.084,00	(1.911.275.063,00)
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.608.177.761,59	1.760.001.994,00	(151.824.232,41)
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	319.570,00		319.570,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	5.327.288.027,52	6.775.150.413,42	(1.447.862.385,90)
✓ Pendapatan BLUD	54.948.934.858,88	38.673.695.152,00	16.275.239.706,88
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	8.161.632.091,00	(8.161.632.091,00)
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat			
✓ Dana Perimbangan	1.264.779.580.248,00	921.236.099.328,00	343.543.480.920,00
✓ Dana Desa	109.581.662.000,00	110.554.350.000,00	(972.688.000,00)
✓ Insentif Fiskal	12.528.131.000,00	0,00	12.528.131.000,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah			
✓ Pendapatan Bagi Hasil			
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.895.774.080,00	6.718.905.427,00	176.868.653,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.019.832.291,00	7.205.161.489,00	814.670.802,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.719.078.806,00	14.909.457.838,00	7.809.620.968,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.465.855.075,00	2.905.626.373,00	560.228.702,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.742.793.414,00	8.394.889.973,00	347.903.441,00
✓ Bantuan Keuangan			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	2.277.440.000,00	(2.277.440.000,00)
➤ Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00
Jumlah	1.610.983.654.167,99	1.207.655.277.944,42	403.328.376.223,57

Sumber: SIPD 2024

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.123
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Pembayaran Belanja Pegawai			
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	289.868.847.673,00	246.704.342.115,00	43.164.505.558,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.791.307.469,00	95.457.476.468,00	14.333.831.001,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.367.126.065,00	55.055.678.452,00	1.311.447.613,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.951.341.721,00	10.835.454.019,00	115.887.702,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.506.157,00	173.075.819,00	(569.662,00)
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	746.000.000,00	1.080.600.000,00	(334.600.000,00)
✓ Belanja Pegawai BLUD	29.349.151.682,00	15.924.944.036,00	13.424.207.646,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa			
✓ Belanja Barang	97.796.917.133,89	86.155.198.379,00	11.641.718.754,89
✓ Belanja Jasa	154.942.886.592,00	143.177.571.679,00	11.765.314.913,00
✓ Belanja Pemeliharaan	39.790.645.977,00	43.001.431.073,00	(3.210.785.096,00)
✓ Belanja Perjalanan Dinas	87.341.007.680,00	72.551.707.887,00	14.789.299.793,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	620.298.000,00	1.619.484.980,00	(999.186.980,00)
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	16.912.608.419,00	17.284.204.955,00	(371.596.536,00)
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.553.429.193,60	12.650.715.386,00	8.902.713.807,60
➤ Pembayaran Belanja Bunga			
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.622.865.171,00	1.659.124.491,00	6.963.740.680,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Pembayaran Belanja Hibah			
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	43.200.000.000,00	9.666.957.000,00	33.533.043.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.358.626.945,00	12.197.632.666,00	2.160.994.279,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	432.180.000,00	0,00	432.180.000,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.662,99	651.780.000,00	40.246.662,99
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial			
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.997.284.050,00	11.875.008.400,00	(1.877.724.350,00)
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	18.484.653.005,00	21.340.218.888,26	(2.855.565.883,26)
➤ Pembayaran Belanja Tak Terduga			
✓ Belanja Tak Terduga	1.157.886.000,00	140.000.000,00	1.017.886.000,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil			
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	506.340.755,00	(506.340.755,00)
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	427.113.816,00	(427.113.816,00)
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan			
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	226.451.591.862,00	214.140.316.018,00	12.311.275.844,00
Jumlah	1.239.601.187.458,48	1.083.374.370.101,26	156.226.817.357,22

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.2 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.124
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	2.860.463.600,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	309.983.662.053,18	235.488.131.589,27	309.983.662.053,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(307.123.198.453,18)	(234.334.236.389,27)	(72.788.962.063,91)

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Penjelasan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.125
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan			
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.2.2 Penjelasan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.126
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Perolehan Tanah			
✓ Belanja Modal Tanah Persil	1.963.260.000,00	1.110.890.900,00	852.369.100,00
✓ Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	330.006.300,00	(330.006.300,00)
✓ Belanja Modal Lapangan	0,00	780.884.600,00	(780.884.600,00)
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin			
✓ Belanja Modal Alat Besar	219.385.000,00	35.500.000,00	183.885.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	14.642.085.300,00	3.496.981.100,00	11.145.104.200,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.881.000,00	52.848.600,00	(7.967.600,00)
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	29.514.000,00	1.727.590.520,00	(1.698.076.520,00)
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.699.253.688,00	15.355.110.317,00	(5.655.856.629,00)
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.664.039.500,00	2.863.690.885,00	(1.199.651.385,00)
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.411.169.861,00	2.197.267.554,00	31.213.902.307,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.194.800.000,00	1.352.625.863,00	(157.825.863,00)
✓ Belanja Modal Komputer	8.924.884.382,00	9.095.377.779,00	(170.493.397,00)
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	2.101.176,00	(2.101.176,00)
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	213.160.000,00	106.373.348,00	106.786.652,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	599.089.200,00	(599.089.200,00)
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	46.102.128,00	(38.102.128,00)
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.107.532.824,00	0,00	4.107.532.824,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.057.343.500,00	0,00	2.057.343.500,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan			0,00
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	85.886.267.524,18	77.451.712.195,27	8.434.555.328,91
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.296.962.300,00	2.730.459.593,00	(433.497.293,00)
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00
➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	97.440.430.969,00	86.057.885.870,00	11.382.545.099,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	28.607.837.525,00	19.355.718.711,00	9.252.118.814,00
✓ Belanja Modal Instalasi	49.425.000,00	87.536.000,00	(38.111.000,00)
✓ Belanja Modal Jaringan	14.930.670.980,00	8.169.144.850,00	6.761.526.130,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya			0,00
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	254.614.700,00	94.125.000,00	160.489.700,00
➤ Penyertaan Modal Daerah			0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	2.138.444.000,00	3.500.000.000,00	(1.361.556.000,00)
Jumlah	309.983.662.053,18	235.488.131.589,27	74.495.530.463,91

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.3 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.127

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	48.836.405.892,00	28.487.903.437,00	20.348.502.455,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(48.836.405.892,00)	(28.487.903.437,00)	(20.348.502.455,00)

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Penjelasan atas Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk: Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.128
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	0,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.4 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.129
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90	28.189.279.326,60
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90	28.189.279.326,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Penjelasan atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.130
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
✓ PFK BUD	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90	28.189.279.326,60

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

5.5.4.2 Penjelasan atas Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.131

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➤ Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
✓ PFK BUD	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90	28.189.279.326,60

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.132

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	371.382.466.709,51	124.280.907.843,16	247.101.558.866,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(307.123.198.453,18)	(234.334.236.389,27)	(72.788.962.063,91)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(48.836.405.892,00)	(28.487.903.437,00)	(20.348.502.455,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.422.862.364,33	(138.541.231.983,11)	153.964.094.347,44

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.6.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.133

Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05	(145.184.649.842,11)
Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00	(561.425.154,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00	432.606.533,00
Kas di BLUD	7.968.540.362,00	0,00	7.968.540.362,00
Kas Dana BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59	(1.209.306.677,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00	(87.611.591,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	52.332.702.992,53	190.974.549.361,64	(138.641.846.369,11)

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.134
Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Koreksi atas rekonsiliasi Kas Daerah	0,00	(2.126.686,00)	2.126.686,00
Koreksi atas saldo Kas di Bendahara BLUD	(48.076.016,04)	0,00	(48.076.016,04)
Koreksi kesalahan Kas di Bendahara BOS	14.701.072,00	102.741.072,00	(88.040.000,00)
Jumlah	(33.374.944,04)	(100.614.386,00)	67.239.441,96

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2* di atas.

5.5.7 Saldo Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.135
Saldo Akhir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00	435.276.242,00	(428.577.687,00)
Kas di BLUD	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00
Kas Dana Kapitasi di FKTP	30.106.373,00	213.513.606,00	(183.407.233,00)
Jumlah	67.722.190.412,82	52.332.702.992,53	15.389.487.420,29

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2024 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK dan disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2024.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.3* di atas.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.136

Ekuitas awal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Ekuitas Awal	2.270.452.390.192,32	2.024.706.773.521	245.745.616.671,32

Sumber: SIPD 2024

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan:

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.137
Surplus/Defisit

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Surplus/(Defisit) - LO	114.021.831.725,20	245.989.828.752,00	(131.967.997.026,80)

Sumber: SIPD 2024

Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *poin 5.5.4*

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.138

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Koreksi Ekuitas Aset Lancar	(33.374.944,04)	0,00	(33.374.944,04)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(63.423.327,06)	(244.212.081,00)	180.788.753,94
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	2.374.030.928,00	0,00	2.374.030.928,00
Jumlah	2.277.232.656,90	(244.212.081,44)	2.521.444.737,90

Sumber: SIPD 2024

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar sebesar (Rp33.374.944,04) yang merupakan koreksi atas saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar (Rp48.076.016,04) dan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp116.000,00 akibat salah saji pendapatan dan belanja di tahun sebelumnya dan koreksi atas pengembalian ketekoran kas pada SDN 2 Korowou sebesar Rp14.585.072,00
2. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap sebesar (Rp63.423.327,06) yang merupakan koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan akibat kurang catat dan lebih catat beban penyusutan di tahun sebelumnya
3. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya sebesar 2.374.030.928,00 merupakan koreksi atas pengembalian ketekoran kas pada SDN 2 Korowou sebesar (Rp14.585.072,00) dan aset lainnya yang belum tercatat sebesar Rp2.388.616.000,00 yang merupakan Pembangunan kantor KPU Tahun Anggaran 2023.

5.6.4 Saldo Akhir Ekuitas

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.139
Saldo Akhir Ekuitas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Saldo Ekuitas Akhir	2.386.751.454.574,42	2.270.452.390.192,00	116.299.064.382,42

Sumber: SIPD 2024

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *poin 5.3*.

5.7 Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

Pengungkapan lainnya atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, serta dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Maka perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Kronologis pengajuan keberatan, banding dan gugatan BPHTB PT. TIMUR JAYA INDOMAKMUR:

Pada Tahun 2014 PT. Timur Jaya Indomakmur mengajukan permohonan penetapan BPHTB kepada Bupati Morowali Utara atas lokasi Perkebunan Sawit yang terletak di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara melalui surat Nomor 046/D&L/TJIM/THA/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dimana substansi surat tersebut pihak Perusahaan memohon agar penetapan BPHTB didasarkan pada Nilai Tanah Terendah sebagaimana tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Poso.

- a. Berdasarkan surat permohonan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan dan penetapan BPHTB terhutang berdasarkan Nilai Dasar Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN), yang hasilnya dituangkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB):

- SSPD-BPHTB Nomor 0005.BPHTB/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp2.801.065.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- SSPD-BPHTB Nomor 0008/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp528.106.957,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Berdasarkan SSPD-BPHTB tersebut perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 20 Juli 2014 langsung ke Rekening Kas Daerah pada Bank BRI Unit Wita Mori Kolonodale dengan Nomor Rekening 36.34.01.000096-30-2.

- b. Pada Tahun 2015 BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 dan ditemukan bahwa terdapat kurang bayar BPHTB terhutang atas nama Wajib Pajak PT Timur Jaya Indomakmur sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No.13.C/LHP/XIX.PLU/06/2015 tanggal 14 Juni 2015.

Kemudian BPK-RI merekomendasikan kepada DPPKAD cq. Bidang Pendapatan untuk melakukan penagihan atas kurang bayar BPHTB Tahun 2014 atas nama WP PT. Timu Jaya Indomakmur.

- c. Atas rekomendasi BPK-RI tersebut DPPKAD Morowali Utara cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan kembali BPHTB terhutang atas nama WP PT Timur Jaya Indomakmur dan dituangkan dalam kertas kerja perhitungan kembali BPHTB (terlampir) dengan jumlah selisih kurang bayar BPHTB Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.916.543,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Selisih kurang bayar tersebut kemudian ditetapkan dalam SKPDKB-BPHTB Nomor 01/SLPDKB/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
- d. SKPDKB-BPHTB tersebut kemudian disampaikan kepada WP PT. Timur Jaya Indomakmur melalui surat Bupati Morowali Utara Nomor 970/0342/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Penyampaian Ketetapan BPHTB Kurang Bayar yang diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 19 Agustus 2015.
- e. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Surat Bupati Morowali Utara tersebut diatas, Bupati Morowali Utara kembali mengirim Surat Nomor 910/0451/DPPKAD/IX/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Tindak Lanjut BPHTB Kurang Bayar, dimana dalam Surat tersebut ditegaskan kembali agar Wajib Pajak segera melakukan penyetoran BPHTB Kurang Bayar paling lambat Bulan Desember 2015.
- f. Kemudian pada Bulan Oktober 2015 WP memberikan tanggapan atas surat Bupati tersebut melalui Surat Nomor 037/TJIM-PEMDA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, perihal Tanggapan/Klarifikasi atas BPHTB kurang bayar PT. Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.936.448,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Subtansi dari surat ini adalah bahwa WP tidak setuju dengan penetapan BPHTB kurang bayar sejumlah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Rp8.624.936.448,00 dan menyatakan akan mengajukan keberatan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentang tata cara pengajuan keberatan termasuk meminta alamat resmi surat menyurat sebagai dasar WP mengirimkan surat keberatan.
- g. Surat WP tersebut kemudian dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Surat Kepala DPPKAD Nomor 900/796/DPPKAD/XI/2015 tanggal 4 November 2015, perihal penjelasan tentang Prosedur/Tata cara keberatan atas BPHTB Kurang bayar.
 - h. Pada tanggal 09 November 2015 WP mengajukan keberatan atas SKPDKB-BPHTB dengan Surat Keberatan Nomor 040/TJIM-PEMDA/XI/2015, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 09 November 2015. Atas pengajuan surat keberatan tersebut sebelumnya WP telah menyetor kurang bayar BPHTB sebesar Rp4.398.707.437,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujub Rupiah) pada tanggal yang sama.
 - i. Atas surat keberatan WP tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapan dengan Surat Bupati Morowali Utara Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang pada prinsipnya isi surat menegaskan menolak keberatan WP dengan menyatakan bahwa penetapan kurang bayar BPHTB dimaksud adalah berdasarkan Rekomendasi BPK-RI dan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara surat tersebut sudah merupakan sikap/keputusan formil terhadap keberatan wajib pajak.
 - j. Selanjutnya sebagai penegasan kembali atas surat Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015, Bupati Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0290/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang kemudian dikirim ke WP dan diterima oleh WP pada tanggal 23 Januari 2017 yang isinya menolak permohonan keberatan PT. Timur Jaya Indomakmur dan menyatakan bahwa penetapan SKPDKB-BPHTB sebesar Rp8.624.916.543,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. Atas Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak Jakarta dan sejak itu secara resmi sengketa pajak ini terdaftar sebagai sengketa banding di Pengadilan Pajak Jakarta dengan Nomor Sengketa 32-1111647-2014.
 - m. Sebelum sidang Sengketa Banding dimulai, atas permintaan Pengadilan Pajak Jakarta, Bupati Morowali Utara membuat Surat Uraian Banding (SUB) Nomor 180/0466/HKM/VI/2017 dan kemudian disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 06 Juli 2017.
 - n. Kemudian Pengadilan Pajak menyelenggarakan beberapa kali sidang sengketa pajak yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa (PT. Timur Jaya Indomakmur selaku Pemohon Banding dan Bupati Morowali Utara selaku Terbanding)
 - o. Sidang tersebut kemudian menghasilkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor PUT-111647.32/2014/PP/M.XIA Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 dimana dalam amar Putusan berbunyi : *"mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pemohon"*
 - p. Kemudian menindak lanjuti Putusan Pengadilan Pajak tersebut WP atas Nama PT.Timur Jaya Indomakmur mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Surat Nomor 017/TJIM-PEMDA/IV/2018, dengan jumlah yang dimohonkan untuk dikembalikan dalam surat sebesar Rp6.505.934.684,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
 - q. Atas surat tersebut Bapenda Morowali Utara kemudian melakukan kajian dan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0206.b/IV/2019, tanggal 25 April 2019, dimana isi keputusan adalah menolak Permohonan Wajib Pajak Atas Nama PT Timur Jaya Indomakmur.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- r. Kemudian atas Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kembali mendaftarkan Gugatan BPHTB ke Pengadilan Pajak Jakarta.
- s. Selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah menggelar beberapa kali sidang atas sengketa gugatan tersebut namun sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Tergugat belum pernah menerima Putusan Pengadilan Pajak terkait kasus ini.

5.8 Dana Tugas Pembantuan

Tabel 5.140

Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)		
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
1	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah					
	Persiapan					
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.750.000,00	18.750.000,00	-	Dokumen Pengendalian	1 Dokumen
	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaaan					
	1 Belanja Jasa Konsultan	37.800.000,00	37.800.000,00	-	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen
	2 Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaaan	1.579.200.000,00	1.579.200.000,00	-	Irigasi Perpompaaan	1 Unit
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.850.000,00	11.850.000,00	-	Dokumen Pengendalian	1 Dokumen
	Monitoring dan Pelaporan					
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.350.000,00	23.350.000,00	-	Dokumen Pengendalian	1 Dokumen
2	Irigasi Perpipaa					
	Persiapan					
	1 Belanja Bahan	300.000,00	300.000,00	-		
	2 Belanja Jasa Konsultan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-		
	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan					
	1 Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	282.000.000,00	282.000.000,00	-	Irigasi Perpipaan	1 Dokumen
	Monitoring dan Pelaporan					
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000,00	2.700.000,00		Dokumen Pengelolaan	
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian						



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program/Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)		
1	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian					
	Identifikasi Kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen					
	1 Belanja Bahan	1.000.000,00	1.000.000,00			
	2 Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00		Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.400.000,00	5.400.000,00			
Program Dukungan Manajemen						
1	Layanan Manajemen Keuangan					
	1 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22.700.000,00	22.700.000,00			
	2 Belanja Bahan	700.000,00	700.000,00		Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.450.000,00	6.450.000,00			
Jumlah		2.010.800.000,00	2.010.800.000,00	-		

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2024

5.9 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM. Standar pelayanan minimal meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Pada Tahun anggaran 2024 Alokasi belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Morowali Utara dialokasikan sebesar Rp83.881.453.346,10 dan terealisasi sebesar Rp54.534.858.792,00 atau 65,01 % secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.141

Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TA 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5	6
A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	94,07
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.828.117.770,00	5.816.087.999,00	99,79
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	334.328.498,00	300.716.484,00	89,95



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	24.226.828.914,00	3.980.598.950,00	16,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.286.330.200,00	3.146.058.202,00	95,73
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.144.980.050,00	15.141.713.075,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.897.196.100,00	4.961.544.714,00	71,94
Total			57.647.236.012,00	35.161.777.757,00	60,99
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.721.257,00	217.662.000,00	99,97
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.629.999.692,00	1.627.527.392,00	99,85
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	299.484.400,00	292.853.312,00	97,79
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.985.393.800,00	144.212.293,00	4,83
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	20.999.964,00	20.990.000,00	99,95
Total			5.153.599.113,00	2.303.244.997,00	44,69
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			62.800.835.125,00	37.465.022.754,00	59,66
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.257.200,00	9.250.000,00	99,92
Total			9.257.200,00	9.250.000,00	99,92
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	
Total			-	-	
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.728.400,00	40.728.000,00	100,00
Total			40.728.400,00	40.728.000,00	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.500.800,00	15.066.000,00	77,26
Total			19.500.800,00	15.066.000,00	77,26
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	
Total			-	-	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
6	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.405.500,00	12.720.000,00	82,57
Total			15.405.500,00	12.720.000,00	82,57
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.991.200,00	17.871.000,00	89,39
Total			19.991.200,00	17.871.000,00	89,39
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.991.200,00	18.031.000,00	90,19
Total			19.991.200,00	18.031.000,00	90,19
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	
Total			-	-	
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
Total			19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	
Total			-	-	
12	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.990.400,00	19.985.500,00	99,98
Total			19.990.400,00	19.985.500,00	99,98
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			164.844.700,00	153.631.500,00	93,20
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	304.971.200,00	304.860.800,00	99,96
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.335.496.400,00	2.250.914.900,00	96,38
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000,00	199.830.000,00	66,61
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.531.643.131,10	10.078.687.219,00	80,43
Total			15.472.110.731,10	12.834.292.919,00	82,95
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	550.288.400,00	543.419.943,00	98,75
Total			550.288.400,00	543.419.943,00	98,75



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			16.022.399.131,10	13.377.712.862,00	83,49
D. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	215.857.500,00	215.779.500,00	99,96
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	-	-	
Total			215.857.500,00	215.779.500,00	99,96
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	45.773.800,00	42.430.000,00	92,69
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	112.636.900,00	87.295.400,00	77,50
Total			158.410.700,00	129.725.400,00	81,89
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	56.918.800,00	51.396.004,00	90,30
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	33.867.000,00	32.975.000,00	97,37
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	125.862.400,00	124.000.000,00	98,52
Total			216.648.200,00	208.371.004,00	96,18
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	178.329.760,00	177.724.200,00	99,66
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.750.850,00	49.294.000,00	95,25
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.878.286.400,00	1.875.905.000,00	99,87
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	20.899.600,00	19.965.000,00	95,53
Total			129.266.610,00	2.122.888.200,00	99,70
5		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.511.400,00	16.511.400,00	100,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.373.350,00	97.373.350,00	100,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	
Total			113.884.750,00	113.884.750,00	100,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.834.067.760,00	2.790.648.854,00	98,47
E. SPM Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	137.092.000,00	98,46
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	135.790.000,00	87,36
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	119.435.000,00	95,62
Total			427.644.400,00	400.377.000,00	93,62
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	-	-
Total			427.644.400,00	-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	-	-
Total			427.644.400,00	-	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	-	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	-	-
Total			427.644.400,00	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	85.341.000,00	84.588.822,00	99,12
		Penyediaan Makanan	263.388.030,00	262.977.000,00	99,84
Total			348.729.030,00	347.565.822,00	99,67
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			2.059.306.630,00	747.942.822,00	36,32
JUMLAH TOTAL			83.881.453.346,10	54.534.958.792,00	65,01

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.10 Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.¹ Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah PEN adalah investasi Pemerintah nonpermanen yang dilaksanakan oleh pelaksana Investasi dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai penerima investasi dan/atau investasi langsung. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

- Pemberian pinjaman kepada BUMN;
- Pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
- Pinjaman PEN daerah. Investasi langsung adalah pinjaman dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya.

Pemberian pinjaman kepada BUMN dan kepada lembaga dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan; dan/atau membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga.

Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
- diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a) Merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19;
- b) Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d) Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada Tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kesepakatan bersama dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021 menyepakati Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (Dana PEN) dengan plafond pinjaman sebesar Rp200.000.000.000,00 dan jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 60 bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Dana tersebut diperuntukan untuk membiayai Sektor Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp135.216.175.000,00, pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp24.522.300.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp40.261.525.000,00.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dana PEN yang masuk ke rekening Kas daerah sebesar Rp195.345.654.826,00 yang ditransfer secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak SMI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pencairan Tahap I sebesar Rp50.000.000.000,00 tanggal 09 juni 2022, tahap II sebesar Rp90.000.000.000,00 tanggal 09 November 2022 dan Tahap III sebesar Rp55.345.654.826,00 tanggal 30 Desember 2022. Sampai dengan tanggal 31 desember 2024 dana yang telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan terealisasi sebesar Rp195.345.654.826,00 atau 100%. Tahun anggaran 2024 Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui BPKAD telah membayar bunga Pinjaman Dana PEN sebesar Rp8.314.178.331,00 dari total Biaya Bunga sebesar Rp29.837.279.022,00 sehingga total biaya bunga pinjaman yang telah terbayarkan mulai bulan Juni 2022 sampai dengan per 31 desember 2024 sebesar Rp21.286.556.750,00 sisa bunga pinjaman yang harus dibayarkan sebesar Rp8.471.583.383,00.

Adapun biaya Pokok Pinjaman tahun 2024 yang telah terbayarkan sebesar Rp48.836.405.892,00. Total biaya Pokok pinjaman PEN yang telah terbayarkan mulai bulan Juni tahun 2023 s.d per 31 desember 2024 sebesar Rp77.324.309.329,00 sehingga sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan sebesar Rp118.021.345.497,00. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXIV.

5.11 Aset Tetap Fisik yang tidak ditemukan

Sesuai dengan hasil inventarisasi Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 terdapat aset tetap yang fisiknya tidak ditemukan dan kondisi tidak jelas sebesar Rp34.210.457.309,72 yang merupakan penyerahan dari Kabupaten Morowali dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 5.142
Aset Tetap yang Fisiknya Tidak Ditemukan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	2.348.090.500,00
2	Peralatan dan Mesin	924.681.910,00
3	Gedung dan Bangunan	26.885.730.149,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.919.033.000,00
5	Aset Tetap lainnya	132.921.750,00
Jumlah		34.210.457.309,72

Sumber: Bidang Aset BPKAD

Terhadap hal itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Bidang Aset telah melakukan konfirmasi kepada Bidang Aset Kabupaten Morowali terkait dengan permasalahan Aset tersebut .

Namun pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak dapat menerima kembali aset tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Morowali tentang rekonsiliasi data aset penyerahan tahap I Nomor 028/0317/BUP-BPKAD/III/2018.

Atas hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan reklasifikasi aset sebesar Rp34.210.457.309,72 ke dalam aset lainnya untuk selanjutnya diusulkan dalam penghapusan.

5.12 Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada Satuan Pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2024 dana BOSDA yang telah disalurkan ke 174 sekolah sebesar Rp3.247.260.000,00 sedangkan total belanja Dana BOSDA sebesar Rp3.244.175.000,00. Sisa saldo Dana BOSDA sebesar Rp3.085.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah. Dan pada Tahun 2024 juga terdapat kas tunai dana BOSDA sebesar Rp5.632.000,00 dan pada bulan maret Tahun 2025 telah disetorkan ke kas daerah. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXV.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru yang berkedudukan di Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414).

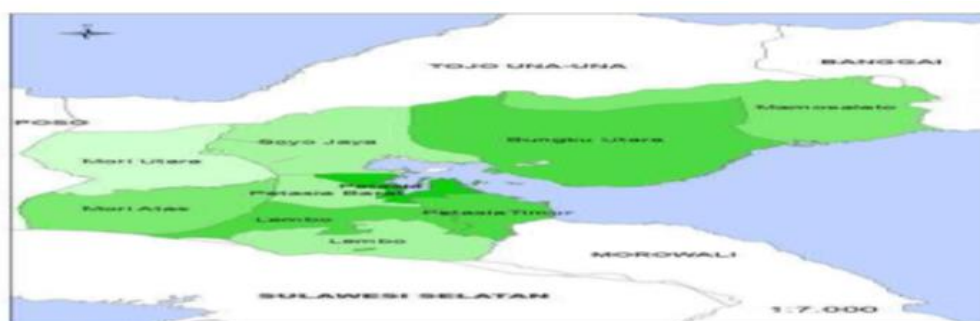
Dalam hal kependudukan luas Wilayah Morowali Utara sebesar 14,73 persen dari total luas daratan Sulawesi Tengah. Dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di Perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan dataran, lembah dan lereng pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| ❖ | Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una |
| ❖ | Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali |
| ❖ | Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan Perairan Teluk Tolo |
| ❖ | Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso |

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km² dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km².

Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.348,55 Km², dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km² atau 24,02 persen dari luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 465,29 Km² atau sebesar 4,79 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Gambar 6 .1
Peta Wilayah Kabupaten Morowali Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali

Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 6.1

Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64
2	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06
3	Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51	6,05
4	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46
5	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80
6	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10
7	Lembo	Beteleme	675,23	6,75
8	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57
9	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48
10	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08
Morowali Utara			10.004,28	100,00

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020

Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara dengan luas 2.406,79 Km² dan Kecamatan terkecil di Kecamatan Petasia Barat seluas 480,30 Km². Pembagian wilayah administrasi desa dalam Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2

Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2024

NO.	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%)
(01)	(02)	(03)	(04)	(01)	(02)	(03)	(04)
01	MAMOSALATO	1.464,99	100,00				
01.01	Kolo Atas	131,95	8,92	01.08	Tambale	108,99	7,36
01.02	Kolo Bawah	29,50	1,99	01.09	Winangabino	201,12	13,59
01.03	Momo	70,30	4,75	01.10	Sea	138,50	9,36
01.04	Tananagaya	18,75	1,27	01.10	Uepakatu	85,59	5,78
01.05	Giri Mulya	5,25	0,35	01.12	Parangisi	128,74	8,70
01.06	Tana Sumpu	20,00	1,35	01.13	Lijo	252,30	17,22
01.07	Pandauke	125,03	8,45	01.14	Menyoe	148,97	10,07
02.	BUNGKU UTARA	2.406,79	100,00	02.12	Kolombang	43,19	1,79
02.01	Tokonanaka	30,22	1,26	02.13	Tirongan Bawah	32,20	1,34
02.02	Matube	539,39	22,41	02.14	Tanaku Raya	6,95	0,29
02.03	Posangke	284,92	11,84	02.15	Opa	118,41	4,92



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%)
02.04	Tokala Atas	177,03	7,36	02.16	Siliti	30,77	1,28
02.05	Uewajo	3,71	0,15	02.17	Ueruru	15,08	0,63
02.06	Baturube	78,95	3,28	02.18	Lemo	42,35	1,76
02.07	Woomparigi	22,38	0,93	02.19	Boba	31,59	1,31
02.08	Tambarabone	7,86	0,33	02.20	Salubiro	117,94	4,90
02.09	Taronggo	580,51	24,12	02.21	Pokeang	17,00	0,17
02.10	Uemasi	116,34	4,83	02.22	Uempanapa	21,00	0,87
02.11	Tirongan Atas	59,00	2,45	02.23	Lemowaliya	30,00	1,25
03.	SOYO JAYA	605,51	100,00				
03.01	Tamainusi	127,75	21,10	03.06	Bau	68,53	11,32
03.02	Tambayoli	114,42	18,990	03.07	Malino Jaya	15,00	2,48
03.03	Lembah Sumara	50,00	8,26	03.08	Malino	121,45	20,06
03.04	Tandoyondo	66,36	10,96	03.09	Sumara Jaya	25,00	4,13
03.05	Panca Makmur	17,00	2,81	03.10	ToddopuliUebangke (G)	...	...
04.	PETASIA	646,34	100,00				
04.01	Koromatantu	69,00	10,68	04.06	Kel. Kolonodale	30,57	4,73
04.02	Korololama	45,28	7,01	04.07	Kel. Bahontula	68,69	10,63
04.03	Korolaki	35,48	5,49	04.08	Kel. Bahoue	45,46	7,03
04.04	Gililana	107,40	16,62	04.09	Ganda-Ganda	161,18	24,94
04.05	Koya	65,28	10,10	04.10	Tanuge	18,00	2,78
05.	PETASIA BARAT	480,30	100,00				
05.01	Onepute	55,00	11,82	05.06	Tiu	69,30	14,43
05.02	Sampalowo	65,57	14,09	05.07	Togomulya	8,00	1,67
05.03	Moleono	65,31	14,04	05.08	Tontowea	101,06	21,04
05.04	Mondowe	40,51	8,71	05.09	Tandaku Jaya	15,02	3,13
05.05	Maralee	45,52	9,78	05.10	Ululaa	15,01	3,12
06.	PETASIA TIMUR	509,77	100,00				
06.01	Masara	3,40	0,67	06.07	Tompira	65,00	12,75
06.02	Molores	60,00	11,77	06.08	Bunta	67,65	13,27
06.03	Mohoni	55,31	10,85	06.09	Keuno	25,00	4,90
06.04	Molino	24,00	4,71	06.10	Polewali	6,35	1,25
06.05	Towara	87,38	19,69	06.11	Towara Pantai (G)	13,00	2,55
06.06	Bungintimbe	92,45	18,14	06.12	Peboa (G)	10,23	2,01



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%)
07.	LEMBO	675,23	100,00				
07.01	Lembobaru	12,45	1,84	07.08	Beteleme	21,71	3,22
07.02	Korobonde	10,04	1,49	07.08	Tinompo	28,85	4,27
07.03	Wawopada	143,02	21,18	07.08	Korowalelo	64,62	9,57
07.04	Waraa	12,13	1,80	07.11	Kumpi	16,29	2,41
07.05	Tingkeao	40,23	5,96	07.12	Korompeli	72,40	10,72
07.06	Mora	34,48	5,11	07.13	Lemboroma	88,11	13,05
07.07	Uluanso	31,29	4,63	07.14	Korowou	99,61	14,75
08.	LEMBO RAYA	657,61	100,00				
08.01	Dolupo Karya	169,90	25,84	08.09	Potangoa	43,00	6,54
08.02	Poona	40,00	6,08	08.09	Bintangor Mukti	73,04	11,11
08.03	Mandula	60,00	9,12	08.08	Jamor Jaya	60,29	9,17
08.04	Petumbea	48,00	7,30	08.09	Paawaru	60,17	9,15
08.05	Ronta	40,00	6,08	08.10	Lembobelala	63,21	9,61
09.	MORI ATAS	1.508,81	100,00				
09.01	Gontara	98,91	6,56	09.08	Taende	194,28	12,88
09.02	Kasingoli	83,75	5,55	09.09	Ensa	189,78	12,58
09.03	Lee	100,85	6,68	09.10	Peonea	97,17	6,44
09.04	Saemba	123,54	8,19	09.11	Kolaka	271,12	17,97
09.05	Tomui Karya	12,00	0,80	09.12	Lanumor	120,99	8,02
09.06	Tomata	92,71	6,14	09.13	Saemba Walati	17,90	1,19
09.07	Londi	90,81	6,02	09.14	Pambarea	15,00	0,99
10.	MORI UTARA	1.048,93	100,00				
10.01	Era	198,88	18,96	10.05	Tiwaa	91,28	8,70
10.02	Peleru	111,61	10,64	10.06	Lembontonara	189,50	18,07
10.03	Wawondula	108,98	10,39	10.07	Mayumba	103,62	9,88
10.04	Tabarano	125,38	11,95	10.08	Tamonjengi	119,68	11,41

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara

Profil singkat kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

Mamosalato : Luas wilayah 1.464,99 Km² atau sebesar 14,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, berjarak 50 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan Laut dengan IbuKota Kecamatan Tanasumpu.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Bungku Utara : Memiliki jarak 45 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara ditempuh dengan kendaraan Laut, dengan luas wilayah 2.406,79 Km² atau sebesar 24,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dan merupakan yang terluas di Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Baturube
- Petasia Barat : Merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Morowali Utara dengan ibuKota Kecamatan di Tiu, memiliki luas wilayah 480,30 Km² atau 4,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 16 Km dari IbuKota Kabupaten;
- Petasia Timur : IbuKota Kecamatan Petasia Timur di Bungintimbe dengan Luas wilayah sebesar 509,77 Km² atau 5,10 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten ditempuh dengan kendaraan darat;
- Lembo : Berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, memiliki Luas wilayah 675,23 Km² atau 6,75 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Beteleme;
- Lembo Raya : Luas wilayah Kecamatan Lembo Raya seluas 657,61 Km², berjarak kurang lebih 44 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, dengan IbuKota Kecamatan di Petumbea;
- Mori Atas : Luas wilayah 1.508,81 Km² atau 15,08 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 85 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan desa Tomata;
- Mori Utara : Luas wilayah 1.048,93 Km² atau 10,48 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 90 Km dari IbuKota Kabupaten, dengan IbuKota Kecamatan di Mayumba.

Batas wilayah Kabupaten Morowali Utara di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten TojoUna-Una. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu'u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari Pemerintah pusat.

Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri sesuai kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyelenggarakan kewenangan Pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah, baik melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yaitu:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 6.3
Unit Organisasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SD INPRES 5 KOLONODALE
		INPRES GANDA-GANDA
		SD INPRES KOYA
		SD INPRES LEMBAH SUMARA
		SD INPRES SUMARA JAYA
		SD INPRES TANDOYONDO
		SD INPRES TIU
		SD NEGERI 1 BATURUBE
		SD NEGERI 1 BETELEME
		SD NEGERI 1 BUNTA
		SD NEGERI 1 KOLAKA
		SD NEGERI 1 KOLONODALE
		SD NEGERI 1 KOROWOU
		SD NEGERI 1 PELERU
		SD NEGERI 1 TALIWAN
		SD NEGERI 1 TANANAGAYA
		SD NEGERI 1 TANASUMPU
		SD NEGERI 1 TOMATA
		SD NEGERI 2 BATURUBE
		SD NEGERI 2 BETELEME
		SD NEGERI 2 BUNTA
		SD NEGERI 2 KOLAKA
		SD NEGERI 2 KOLONODALE
		SD NEGERI 2 KOROWOU
		SD NEGERI 2 PELERU
		SD NEGERI 2 TALIWAN
		SD NEGERI 2 TANASUMPU
		SD NEGERI 2 TOMATA
		SD NEGERI 3 BATURUBE
		SD NEGERI 3 KOLONODALE
		SD NEGERI 4 KOLONODALE



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

		SD NEGERI ANDOLIA
		SD NEGERI BAU
		SD NEGERI BENCUE
		SD NEGERI BIMOR JAYA
		SD NEGERI BINTAGOR MUKTI
		SD NEGERI BOBA
		SD NEGERI BUNGINTIMBE
		SD NEGERI DASAR
		SD NEGERI DOLUPO KARYA
		SD NEGERI ENSA
		SD NEGERI ERA
		SD NEGERI GILILANA
		SD NEGERI GIRI MULYA
		SD NEGERI JAMOR JAYA
		SD NEGERI KALOMBANG
		SD NEGERI KAMUNJANG
		SD NEGERI KARAWASA
		SD NEGERI KASINGOLI
		SD NEGERI KEUNO
		SD NEGERI KOLO ATAS
		SD NEGERI KOLO BAWAH
		SD NEGERI KOROBONDE
		SD NEGERI KOROLOLAMA
		SD NEGERI KOROMATANTU
		SD NEGERI KOROMONTO
		SD NEGERI KORONGKAMA
		SD NEGERI KOROWALELO
		SD NEGERI KUMPI
		SD NEGERI LAMBOLO
		SD NEGERI LANUMOR SMP NEGERI SATAP MORI ATAS
		SD NEGERI LEE
		SD NEGERI LEMBOBARU
		SD NEGERI LEMBOBELALA
		SD NEGERI LEMBONTONARA
		SD NEGERI LEMBOROMA
		SD NEGERI LEMO



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

		SD NEGERI LEMOWALIA
		SD NEGERI LONDI
		SD NEGERI LOSONG
		SD NEGERI MALEI
		SD NEGERI MALINO
		SD NEGERI MALINO JAYA
		SD NEGERI MATUBE
		SD NEGERI MAYUMBA
		SD NEGERI MOHONI
		SD NEGERI MOKOTO
		SD NEGERI MOLEONO
		SD NEGERI MOLINO
		SD NEGERI MOLORES
		SD NEGERI MOMO
		SD NEGERI MONDOWE
		SD NEGERI ONE PUTE
		SD NEGERI PANCA MAKMUR
		SD NEGERI PANDAUKE
		SD NEGERI PARAMBA
		SD NEGERI PARAWI
		SD NEGERI PEBOA
		SD NEGERI PEILIA
		SD NEGERI PEONEA
		SD NEGERI PETUMBEA
		SD NEGERI POKEANG
		SD NEGERI PONTANGOA
		SD NEGERI POONA
		SD NEGERI POSANGKE
		SD NEGERI SAEMBA
		SD NEGERI SAEMBA WALATI
		SD NEGERI SALUBIRO
		SD NEGERI SILITI
		SD NEGERI TADAKU
		SD NEGERI TAENDE
		SD NEGERI TAMAINUSI
		SD NEGERI TAMBALE



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

		SD NEGERI TAMBAROBONE
		SD NEGERI TAMBAYOLI
		SD NEGERI TAMONJENGI
		SD NEGERI TANAUGE
		SD NEGERI TINGKEAO
		SD NEGERI TINGKULUI
		SD NEGERI TINOMPO
		SD NEGERI TIRONGAN ATAS
		SD NEGERI TIRONGAN BAWAH
		SD NEGERI TIWAA
		SD NEGERI TOGO MULYA
		SD NEGERI TOKALA ATAS
		SD NEGERI TOKONANAKA
		SD NEGERI TOMPIRA
		SD NEGERI TOMUI KARYA
		SD NEGERI TONTOWEA
		SD NEGERI TOWARA
		SD NEGERI TOWI
		SD NEGERI UEBANGKE
		SD NEGERI UEMALINGKU
		SD NEGERI UEMASI
		SD NEGERI UERURU
		SD NEGERI ULULAA
		SD NEGERI UNDORO
		SD NEGERI UNGKEA
		SD NEGERI WARAA
		SD NEGERI WAWOPADA
		SD NEGERI WINANGABINO
		SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA
		SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO
		SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 1 LEMBO
		SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 1 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 1 MORI ATAS
		SMP NEGERI 1 MORI UTARA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

		SMP NEGERI 1 PETASIA
		SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT
		SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 1 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 2 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 2 MORI ATAS
		SMP NEGERI 2 PETASIA
		SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 3 LEMBO
		SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 MORI ATAS SATAP
		SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 LEMBO
		SMP NEGERI 4 LEMBORAYA
		SMP NEGERI 4 MORI ATAS SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 MORI UTARA
		SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA
		SMPN 2 LEMBO
		SMPN 2 MORI UTARA
		SMPN 3 PETASIA SATU ATAP
		SMPN 4 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMPN 5 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMPN 5 MORI ATAS SATU ATAP
		SMPN NEGERI 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP
	2	SDN NEGERI SEA
		SDN UPAKATU
	Kesehatan	DINAS KESEHATAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

		PUSKESMAS PETUMBEA
		PUSKESMAS MAYUMBA
		PUSKESMAS PANDAUKE
		PUSKESMAS BATURUBE
		PUSKESMAS TAMBAYOLI
		PUSKESMAS PANCA MAKMUR
		PUSKESMAS LEE
		PUSKESMAS TOMATA
		PUSKESMAS BETELEME
		PUSKESMAS KOLONODALE
		PUSKESMAS MOLINO
		PUSKESMAS ANUTOLUWU
		PUSKESMAS LIJO
		PUSKESMAS WONGKO NDAYA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	Sosial	DINAS SOSIAL DAERAH
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
1	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
3	Administrasi Kependudukan dan Capil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
6	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
III	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAERAH



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2	Pariwisata	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
1	Administrasi Pemerintahan	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
		BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN HUKUM
		BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
2	Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
3	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
6	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN PETASIA
		KECAMATAN PETASIA TIMUR
		KECAMATAN PETASIA BARAT
		KECAMATAN BUNGKU UTARA
		KECAMATAN SOYO JAYA
		KECAMATAN MAMOSALATO
		KECAMATAN LEMBO
		KECAMATAN LEMBO RAYA
		KECAMATAN MORI ATAS
		KECAMATAN MORI UTARA
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.3 Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua.

1. Ketua DPRD : Warda Dg. Mamala, SE
2. Wakil Ketua DPRD :
 1. Hj.Megawati Ambo Asa.S.I.P
 2. H. AMBO MAI



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

6.4 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Susunan Lembaga Eksekutif Kabupaten Morowali Utara saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bupati : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
2. Wakil Bupati : H. Djira K.S.Pd, M.Pd
3. Sekretaris Daerah : Ir.Musda Guntur, MM

6.5 Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Untuk lebih memudahkan melaksanakan Tugas Pokok Pemerintah Daerah Morowali Utara menjabarkan pelimpahan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang melalui perangkat daerah, baik melalui dinas, kantor, maupun badan, dengan menetapkan:

1. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara ;
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Tahun pelaporan 2020 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah, seorang Sekretaris Dewan, 17 orang Kepala Dinas, 6 orang Kepala Badan, 1 orang Inspektur Kabupaten, 1 orang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, 10 orang Camat dan 13 kepala puskesmas

6.6 Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 31 Desember 2024 sebanyak 3.257 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PENDIDI KAN	T.KESE HATAN	T.LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	15	-	-	-	6	2	2	-	25



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PENDIDI KAN	T.KESE HATAN	T.LAINNYA		
Golongan IV/b	-	-	31	1	-	174	24	12	5	261
Golongan IV/a	-	-	69	16	-	176	25	9	13	309
SUB JUMLAH	-	-	100	17	-	356	51	23	18	596
Golongan III/d	-	-	37	99	-	206	91	116	26	575
Golongan III/c	-	-	3	57	-	107	90	34	42	333
Golongan III/b	-	-		34	-	422	162	37	121	776
Golongan III/a	-	-		10	-	75	128	20	287	520
SUB JUMLAH	-	-	40	200	-	810	471	207	476	2204
Golongan II/d	-	-	-	-	-	9	38	5	141	193
Golongan II/c	-	-	-	-	-	15	96	5	75	191
Golongan II/b	-	-	-	-	-	9	2	5	37	53
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	9	10	19
SUB JUMLAH	-	-	-	-	-	33	136	24	263	456
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	31	140	217		1199	658	254	758	3.257

Sumber: BPKAD

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 kualifikasi pendidikan, perangkat golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 3.257 pegawai.

Informasi mengenai dasar hukum pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tiap jenis Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 5
Dasar Hukum Pemugutan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Uraian	Dasar Hukum
1	PAJAK HOTEL	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
2	PAJAK RESTORAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
3	PAJAK HIBURAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
4	PAJAK REKLAME	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
5	PBB-P2	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
6	BPHTB	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN GOL, C	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
8	RET, PELAYANAN KESEHATAN	PERDA NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Dasar Hukum
9	RET, PELAYAYAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
10	RET, PELAYANAN PASAR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
11	RET, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
12	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
13	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
14	RET, TERMINAL	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
15	RET, TEMPAT KHUSUS PARKIR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
16	RET, RUMAH POTONG HEWAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
17	RET, PELAYAYAN KEPELABUHANAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
18	RET, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
19	RET, IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
20	RET, PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
21	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

6.7 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Terkait Kewajiban Kontingensi ini, adapun kasus-kasus yang sedang berada dalam masa sidang atau sudah masuk ke pengadilan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu:

Tabel 6. 6
Penanganan Kasus Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara/Tingkat Pengadilan Lainnya
Dalam Proses Persidangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nomor Perkara/Para Pihak	Objek Sengketa	Tanggal Mulai Penanganan Kasus	Status Perkara
1.	36/G/2021/P TUN.PL (PEMDA MELAWAN MOH.YAMIN ABD.SAMAD, DKK)	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021 TANGGAL 12 MARET 2021 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821.23/01/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.24/02/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821/03/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.23/04/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.24/05/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.22/07/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.23/08/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/09/KEP-B.MU/II/2021 DAN NOMOR: 821/010/KEP-B.MU/II/2021	19 JULI 2021	DALAM PROSES BANDINGPT TUN MAKASSAR (PEMERIKSAAN PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR)
2.	78/G/2021/P TUN.PL (PEMDA MELAWAN SAHARUDIN BU'TUNG	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 188.45/KEP-B.MU/0049.A/V/2014 TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA	24 NOVEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (PENYERAHAN KESIMPULAN)
3.	/G/TF/2021/ PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. ODDELL INDONESIA)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. ODDELL INDONESIA BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ODDELL INDONESIA TANGGAL 20 APRIL 2010 BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	30 DESEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (MENUNGGU PUTUSAN HAKIM MAJELIS)
4.	23/G/TF/202 2/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.015/DESDM/VI/2011 TENTANG PERSETUJUAN	28 MARET 2022	DALAM PROSES PERSIDANGAN TAHAP (PEMERIKSAAN AWAL)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nomor Perkara/Para Pihak	Objek Sengketa	Tanggal Mulai Penanganan Kasus	Status Perkara
		PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING TANGGAL 16 JUNI 2011 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		
5	13/Pdt.G/202 2/PN.Pso (BPBD MELAWAN FIRMANSYA H)	WANPRESTASI ATAS PENGKERJAAN TANGGUL DIWILAYAH BUNGKU UTARA	22 MARET 2022	DALAM PROSES (MEDIASI)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Total realisasi Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.613.844.117.767,99 atau 96,88% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.665.857.452.335,00;
3. Total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.547.446.405.511,66 atau 92,91% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.665.492.192.835,00;
4. Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.299.328.048,49 atau 99,94% dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar Rp52.332.702.392,00;
5. Total realisasi pengeluaran penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.974.849.892,00 atau 96,73% dari anggaran sebesar Rp52.697.961.892,00;
6. Total Saldo Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.360.578.512.826,99;
7. Total Saldo Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.248.749.417.403,79;
8. Nilai Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.506.434.174.755,29;
9. Nilai Kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp119.682.720.180,87;
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.386.751.454.574,42;
11. Arus Kas Tahun 2024 terdiri dari:

a) Arus masuk Kas dari aktivitas operasi sebesar	Rp	1.610.983.654.167,99
b) Arus keluar Kas dari aktivitas operasi sebesar	Rp	1.239.601.187.458,48
c) Arus masuk Kas dari aktivitas investasi sebesar	Rp	2.860.463.600,00
d) Arus keluar Kas dari aktivitas investasi sebesar	Rp	309.983.662.053,18
e) Arus Kas masuk dari aktivitas Pendanaan sebesar	Rp	0,00
f) Arus keluar Kas dari aktivitas Pendanaan sebesar	Rp	48.836.405.892,00
g) Arus masuk Kas dari aktivitas transitoris sebesar	Rp	109.343.513.811,50
h) Arus keluar Kas dari aktivitas transitoris sebesar	Rp	109.343.513.811,50
i) Saldo akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar	Rp	67.722.190.412,82



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Demikian laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024.

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELISUL KARSON HEHI

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG
DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
I	BAPENDA					
1	Piutang Pajak Daerah Galian Golongan C	2022	18.890.009.322,60	1.300.231.607,00	11.709.960.733,00	8.480.280.196,60
2	Piutang Pajak PBB-P2	2022	15.825.199.257,70	6.099.150.999,00	906.808.585,00	21.017.541.671,70
3	Piutang Pajak Reklame	2022	97.446.981,00	22.943.000,00	2.317.000,00	118.072.981,00
4	Piutang Pajak Hotel	2022	-	-	-	-
5	Piutang Pajak Rumah Makan/Restoran	2022	1.050.000,00		1.050.000,00	-
6	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri	2023	43.352.136.352,20	4.680.446.673,00	-	48.032.583.025,20
7	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	2023	36.853.750,00		-	36.853.750,00
	SUB JUMLAH I	-	78.202.695.663,50	12.102.772.279,00	12.620.136.318,00	77.685.331.624,50
II	RSUD KOLONODALE					
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BPJS dan Umum			-		-
	SUB JUMLAH II	-	-	-	-	-
III	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDAG					
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2015	2015 & 2023	41.247.825,00		-	41.247.825,00
	SUB JUMLAH III		41.247.825,00	-	-	41.247.825,00
IV	DINAS PERHUBUNGAN					
1	Piutang Retribusi Pelayanan Keelabuhan	2023	40.800.000,00		40.800.000,00	-
	SUB JUMLAH IV		40.800.000,00	-	40.800.000,00	-
V	DPPKAD					
1	Piutang Lainnya (TP-TGR)	2022	68.155.059,39	-	-	68.155.059,39
2	Piutang Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	2023	6.266.684.152,00	11.555.454.850,00	6.266.684.152,00	11.555.454.850,00
3	Piutang Bantuan Keuangan	2021	5.171.010,00		-	5.171.010,00
4	Piutang Transfer Renumerasi Dana Transfer TDF	2023	1.943.542,58		-	1.943.542,58
	SUB JUMLAH V	-	6.341.953.763,97	11.555.454.850,00	6.266.684.152,00	11.630.724.461,97
	JUMLAH TOTAL	-	84.626.697.252,47	23.658.227.129,00	18.927.620.470,00	89.357.303.911,47

Kolonodale, 28 Agustus 2025



BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN
PIUTANG TIDAK TERTAGIH





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	4	5	6 = 5 - 4
I	PIUTANG PAJAK			
	1. Piutang Galian C	8.480.280.196,60	3.538.289.760,44	4.941.990.436,17
	2. Piutang PBB-P2	21.017.541.671,70	6.526.452.517,57	14.491.089.154,14
	3. Pajak Reklame	118.072.981,00	9.627.713,10	108.445.267,90
	4. Piutang Pajak BPHTB	36.853.750,00	3.685.375,00	33.168.375,00
	5. Piutang Pajak Restoran	-	-	-
	6. Piutang Pajak Penerangan Jalan	48.032.583.025,20	4.803.258.302,52	43.229.324.722,68
	SUB JUMLAH	77.685.331.624,50	14.881.313.668,62	62.804.017.955,88
II	PIUTANG RETRIBUSI			-
	1. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-	-
	2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rsud Kolonodale	-	-	-
	3. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	41.247.825,00	8.735.325,00	32.512.500,00
	SUB JUMLAH	41.247.825,00	8.735.325,00	32.512.500,00
III	PIUTANG DANA BAGI HASIL			-
	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.117.343.076,00	10.586.715,38	2.106.756.360,62
	2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.048.227.584,00	10.241.137,92	2.037.986.446,08
	3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	6.677.782.729,00	33.388.913,65	6.644.393.815,36
	4. Pajak Air Permukaan (PAP)	712.101.461,00	3.560.507,31	708.540.953,70
	5. Pajak Rokok	-	-	-
	SUB JUMLAH	11.555.454.850,00	57.777.274,25	11.497.677.575,75
IV	PIUTANG LAIN-LAIN			-
	1. Piutang TP-TGR	68.155.059,39	68.155.059,39	-
	2. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
	SUB JUMLAH	68.155.059,39	68.155.059,39	-
V	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
	1. Piutang Bantuan Keuangan	5.171.010,00	517.101,00	4.653.909,00
	2. Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (Tdf)	1.943.542,58	194.354,26	1.749.188,32
	SUB JUMLAH	7.114.552,58	711.455,26	6.403.097,32
	JUMLAH	89.357.303.911,47	15.016.692.782,52	74.340.611.128,95

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,


DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA
BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA
BERGULIR





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1		2	3	
Jumlah				

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) DAERAH





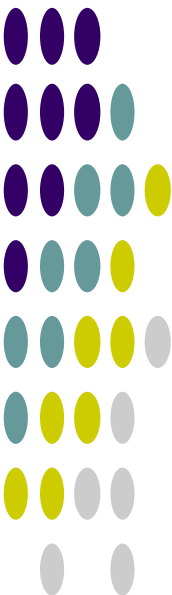
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Tahun Penyetoran Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang telah disertakan Sampai dengan Awal Tahun (2023)	Penyertaan Modal Tahun Ini (2024)	Jumlah Modal Yang Telah disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini (2024)	Sisa Modal Yang Belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini (2024)	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima Kembali Tahun ini (2024)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan Tahun Ini (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2024	PT Bank Sulteng				22.936.197.963	2.138.444.000	25.074.641.963				25.074.641.963
Jumlah						22.936.197.963	2.138.444.000	25.074.641.963	-	-	-	25.074.641.963

KOLONODALE, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS ULKARSON HEHI

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH





KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP KABUPATEN MOROWALI UTARA T.A 2024

NO.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat DPRD	53.880.747.103,20	4.126.817.000,00	2.980.244.000,00	55.027.320.103,20
2	Bagian Umum	131.934.566.609,74	6.326.050.323,00	2.875.354.500,00	135.385.262.432,74
3	Bagian Administrasi Pembangunan	2.252.805.590,00	49.170.000,00	0,00	2.301.975.590,00
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12.149.472.010,00	485.014.000,00	49.966.000,00	12.584.520.010,00
5	Bagian Hukum	583.768.084,00	126.760.000,00	0,00	710.528.084,00
6	Bagian Organisasi	440.663.120,00	234.056.000,00	99.778.000,00	574.941.120,00
7	Bagian Pemerintahan	48.602.984.130,00	2.517.276.000,00	0,00	51.120.260.130,00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.844.056.195,00	1.419.780.775,00	74.890.073,00	3.188.946.897,00
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1.739.286.151,00	42.308.750,00	6.300.000,00	1.775.294.901,00
10	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	300.206.000,00	153.790.000,00	0,00	453.996.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.490.791.874.457,14	211.802.372.364,54	56.402.140.082,85	1.646.192.106.738,83
12	Dinas Perhubungan Daerah	63.140.294.327,00	12.419.948.360,00	3.994.329.000,00	71.565.913.687,00
13	Dinas Kesehatan Daerah	349.885.087.287,00	31.584.326.596,00	9.271.465.405,00	372.197.948.478,00
14	RSUD Kolonadale	214.961.663.888,95	83.167.218.914,27	32.971.751.753,95	265.157.131.049,27
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	357.665.040.532,75	43.282.890.892,00	6.088.924.836,00	394.859.006.588,75
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.706.955.800,00	289.054.000,00	0,00	1.996.009.800,00
17	Dinas Sosial Daerah	2.405.357.143,00	48.400.000,00	0,00	2.453.757.143,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	27.409.106.360,54	3.516.449.000,00	1.281.784.000,00	29.643.771.360,54
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	8.788.282.325,00	543.250.000,00	274.200.000,00	9.057.332.325,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.593.087.047,00	2.222.768.600,00	232.200.000,00	14.583.655.647,00
21	Dinas Pertanian Daerah	23.121.950.429,00	739.580.770,00	123.170.020,00	23.738.361.179,00
22	Dinas Perikanan Daerah	5.718.481.431,00	480.852.000,00	455.728.000,00	5.743.605.431,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.341.981.339,80	20.073.289.628,36	9.659.958.064,18	13.755.312.903,98
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	65.597.758.100,00	1.660.899.000,00	440.950.000,00	66.817.707.100,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.383.338.859,00	4.319.679.000,00	2.258.310.000,00	18.444.707.859,00
26	Badan Pendapatan Daerah	3.558.537.119,00	561.059.228,00	80.000.000,00	4.039.596.347,00
27	Inspektorat Daerah	4.124.216.479,00	1.990.576.000,00	129.400.000,00	5.985.392.479,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.885.095.250,00	116.500.000,00	0,00	5.001.595.250,00
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	10.704.818.370,20	1.082.565.100,00	109.875.000,00	11.677.508.470,20
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah	16.975.894.081,83	1.936.013.500,00	322.850.000,00	18.589.057.581,83
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.227.950.769,00	401.670.000,00	173.100.000,00	2.456.520.769,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	7.354.478.734,00	572.087.000,00	77.781.000,00	7.848.784.734,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.465.764.970,00	16.504.333.538,00	3.866.294.479,00	50.103.804.029,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.161.367.037,00	198.248.800,00	0,00	7.359.615.837,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	6.736.269.306,16	163.170.000,00	274.200.000,00	6.625.239.306,16
36	Dinas Perpustakaan Daerah	2.875.981.931,90	19.685.662.350,00	8.450.148.200,00	14.111.496.081,90
37	Kecamatan Petasia	8.705.393.973,00	1.866.447.982,00	347.813.000,00	10.224.028.955,00
38	Kecamatan Petasia Timur	2.243.993.275,00	502.036.000,00	0,00	2.746.029.275,00
39	Kecamatan Petasia Barat	1.267.892.149,00	197.612.250,00	0,00	1.465.504.399,00
40	Kecamatan Lembo	1.918.482.854,00	55.556.250,00	0,00	1.974.039.104,00
41	Kecamatan Lembo Raya	2.727.778.918,00	56.306.250,00	0,00	2.784.085.168,00
42	Kecamatan Mori Atas	2.091.473.672,00	170.827.000,00	204.150.000,00	2.058.150.672,00
43	Kecamatan Mori Utara	920.112.553,00	44.799.000,00	0,00	964.911.553,00
44	Kecamatan Soyo Jaya	2.267.209.235,00	179.274.150,00	0,00	2.446.483.385,00
45	Kecamatan Bungku Utara	1.920.899.660,00	385.965.000,00	82.920.000,00	2.223.944.660,00
46	Kecamatan Mamosoloto	2.289.454.620,00	57.906.250,00	25.000.000,00	2.322.360.870,00
	JUMLAH	3.027.661.879.277,21	478.360.617.621,17	143.684.975.413,98	3.362.337.521.484,40

Kolonadale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEKS JULKARSON HEHI

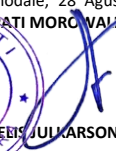
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP





KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 1 JANUARI 2024	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	99.870.808.551,00	4.917.752.877,00	-	104.788.561.428,00
2	PERALATAN DAN MESIN	443.916.784.251,99	80.133.815.725,00	13.208.263.173,00	510.842.336.803,99
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	817.801.391.584,60	160.504.587.716,45	41.751.302.339,18	936.554.676.961,87
4	JALAN JARINGAN, DAN IRIGASI	1.569.798.060.994,76	168.373.393.658,54	26.263.310.501,60	1.711.908.144.151,70
5	ASET TETAP LAINNYA	14.227.864.046,00	1.263.149.100,00	54.914.700,00	15.436.098.446,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	82.046.969.848,86	50.184.048.151,18	49.423.314.307,20	82.807.703.692,84
	JUMLAH	3.027.661.879.277,21	465.376.747.228,17	130.701.105.020,98	3.362.337.521.484,40

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULIARSON HEHI

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI
DALAM PEKERJAAN





KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN (KDP)
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran XIV Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)								
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG				Saldo Aset Tetap KDP 2024
			Kapitalisasi Aset	Reklas Belanja Modal	Total Mutasi Tambah	Reklas Belanja Modal	KDP	Pengakuan Utang Tahun 2023	Total Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat DPRD	10.499.169.237,20			-				-	10.499.169.237,20
2	Bagian Umum	24.462.130,00			-	-			-	24.462.130,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-		-	-
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	49.966.000,00			-	49.966.000,00	-		49.966.000,00	-
5	Bagian Hukum	-			-	-	-		-	-
6	Bagian Organisasi	-			-	-	-		-	-
7	Bagian Pemerintahan Umum	1.133.107.600,00			-	-	-		-	1.133.107.600,00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-			-	-	-		-	-
9	Bagian Humas dan Protokol	-			-	-	-		-	-
10	Bagian Administrasi Perekonomian	-			-	-	-		-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.472.240.978,71	4.036.550.020	21.446.306.155	25.482.856.175,00	15.829.259.900,99		156.995.453,26	15.986.255.354,25	38.968.841.799,46
12	Dinas Perhubungan	854.965.000,00		424.079.000,00	424.079.000,00	-			-	1.279.044.000,00
13	Dinas Kesehatan Daerah	7.754.625.599,00	202.613.850	2.589.404.896	2.792.018.746,00	2.410.855.749,00			2.410.855.749,00	8.135.788.596,00
14	RSUD Kolonadale	30.856.936.203,95			-	30.827.056.203,95			30.827.056.203,95	29.880.000,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	304.992.000,00			-				-	304.992.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			-				-	-
17	Dinas Sosial	-			-				-	-
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.846.700,00			-				-	44.846.700,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-				-	-
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-			-				-	-
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	-			-				-	-
22	Dinas Perikanan Daerah	67.580.000,00			-				-	67.580.000,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	394.324.000,00		9.582.518.064	9.582.518.064,18				-	9.976.842.064,18
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-			-				-	-
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			-				-	-
26	Badan Pendapatan Daerah	-			-				-	-
27	Inspektorat Daerah	-			-				-	-
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-			-				-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	-			-				-	-

30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	340.723.400,00			-			-	340.723.400,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-			-			-	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-			-			-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.130.000,00		2.938.050.666	2.938.050.666,00	49.280.000,00		49.280.000,00	3.037.900.666,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-			-			-	-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-			-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	99.901.000,00	813803000	8150722500	8.964.525.500,00		99.901.000,00	99.901.000,00	8.964.525.500,00
37	Kecamatan Petasia	-			-			-	-
38	Kecamatan Petasia Timur	-			-			-	-
39	Kecamatan Petasia Barat	-			-			-	-
40	Kecamatan Lembo	-			-			-	-
41	Kecamatan Lembo Raya	-			-			-	-
42	Kecamatan Mori Atas	-			-			-	-
43	Kecamatan Mori Utara	-			-			-	-
44	Kecamatan Soyo Jaya	-			-			-	-
45	Kecamatan Bungku Utara	-			-			-	-
46	Kecamatan Mamosolato	-			-			-	-
		82.046.969.848,86	5.052.966.870,00	45.131.081.281,18	50.184.048.151,18	49.166.417.853,94	99.901.000,00	49.423.314.307,20	82.807.703.692,84

Kelonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA





KABUPATEN MOROWALI UTARA

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2024

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Bagian Umum	148.276.333,00	-	-	148.276.333,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	322.024.000,00	-	-	322.024.000,00
5	Bagian Hukum	-	-	-	-
6	Bagian Organisasi	-	-	-	-
7	Bagian Pemerintahan	99.780.000,00	-	-	99.780.000,00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-
10	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	3.058.283.000,00	-	3.058.283.000,00
12	Dinas Perhubungan Daerah	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan Daerah	2.153.629.553,00	-	-	2.153.629.553,00
14	RSUD Kolonadale	5.235.228.206,00	-	87.516.000,00	5.147.712.206,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	56.544.497.462,54	8.500.000,00	15.510.072,00	56.537.487.390,54
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	27.600.000,00	-	-	27.600.000,00
17	Dinas Sosial Daerah	14.380.050,00	-	-	14.380.050,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	1.089.285,00	124.455.000,00	2.074.250,00	123.470.035,00
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	10.598.200,00	-	-	10.598.200,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56.388.000,00	-	-	56.388.000,00
21	Dinas Pertanian Daerah	360.413.000,00	-	-	360.413.000,00
22	Dinas Perikanan Daerah	28.194.000,00	-	-	28.194.000,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.600.000,00	-	-	48.600.000,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	-	-	-	-
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	228.163.961.679,04	45.811.969.931,73	196.206.705.833,33	77.769.225.777,44
26	Badan Pendapatan Daerah	253.420.200,00	-	84.473.400,00	168.946.800,00
27	Inspektorat Daerah	119.333.333,33	-	1.666.666,66	117.666.666,67
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	357.008.000,00	-	-	357.008.000,00
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	28.194.000,00	-	-	28.194.000,00
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah	-	-	-	-
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-	-	-	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	-	-	-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.994.000,00	-	9.998.000,00	19.996.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	-	-	-	-
36	Dinas Perpustakaan Daerah	-	54.914.700,00	915.245,00	53.999.455,00
37	Kecamatan Petasia	65.191.390,00	-	-	65.191.390,00
38	Kecamatan Petasia Timur	-	-	-	-
39	Kecamatan Petasia Barat	2.478.571,00	-	-	2.478.571,00
40	Kecamatan Lembo	617.857,00	-	-	617.857,00
41	Kecamatan Lembo Raya	-	-	-	-
42	Kecamatan Mori Atas	-	-	-	-
43	Kecamatan Mori Utara	-	-	-	-
44	Kecamatan Soyo Jaya	67.904.260,00	-	-	67.904.260,00
45	Kecamatan Bungku Utara	46.333.000,00	-	-	46.333.000,00
46	Kecamatan Mamosoloto	41.022.260,00	-	-	41.022.260,00
	JUMLAH	289.422.317.571,64	49.058.122.631,73	196.408.859.466,99	146.875.419.804,65

KOLONDALE, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA



DELIS JULKARSON HEHI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
dsb								
Jumlah								

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS GULKARSON HEHI

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat DPRD	1.091.503,20	-	-	1.091.503,20
2	Bagian Umum	25.950.000,00		25.950.000,00	-
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.590.000,00	-	-	4.590.000,00
5	Bagian Hukum	-	-	-	-
6	Bagian Organisasi	-	-	-	-
7	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-
10	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291.164.700,86	839.712.587,00	291.164.700,86	839.712.587,00
12	Dinas Perhubungan Daerah	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan Daerah	89.195.300,00		39.000.000,00	50.195.300,00
14	RSUD Kolonadale			-	-
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	-			-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
17	Dinas Sosial Daerah	-	-	-	-
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	-	-	-	-
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	-	-	-	-
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
21	Dinas Pertanian Daerah	8.837.800,00	-	-	8.837.800,00
22	Dinas Perikanan Daerah	-	-		-
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			-
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	-			-
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	49.300.477.524,00	316.100.000,00	136.700.379,33	49.479.877.144,67
26	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
27	Inspektorat Daerah	6.745,00	-	-	6.745,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	-	-	-	-
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Daerah	40.656.036,00			40.656.036,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-	-	-	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	-	-	-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000.000,00	72.699.100,00	400.000.000,00	72.699.100,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	-	-	-	-
36	Dinas Perpustakaan Daerah	57.180,00	57.180,00	-	114.360,00
37	Kecamatan Petasia	-	-	-	-
38	Kecamatan Petasia Timur	-	-	-	-
39	Kecamatan Petasia Barat	-	-	-	-
40	Kecamatan Lembo	-	-	-	-
41	Kecamatan Lembo Raya	-	-	-	-
42	Kecamatan Mori Atas	-	-	-	-
43	Kecamatan Mori Utara	-	-	-	-
44	Kecamatan Soyo Jaya	-	-	-	-
45	Kecamatan Bungku Utara	-	-	-	-
46	Kecamatan Mamosoloto	-	-	-	-
JUMLAH		50.162.026.789,06	1.228.568.867,00	892.815.080,19	50.497.780.575,87

Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DESI ULKARSON HEHI

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG



LAMPIRAN XIX

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN SAMPAI
AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN
KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN
BERIKUTNYA





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN
SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN DALAM
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN 2024		JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
				PAGU ANGGARAN	REALISASI	
					-	-
Jumlah				-	-	-

Kolonodale, 28 Agustus 2025

**BUPATI MOROWALI UTARA**
DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XX

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH /
PERUSAHAAN DAERAH**





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Lampiran XX Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2025

NO	BUMD/Perusahaan Daerah	Sumber (a)	Status (b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Perbankan 1. PT.BANK SULTENG						-			-								-
	Sub Total (1)																	
Jumlah Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kelonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS QULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**





KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
			Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	597.821.561.970	551.234.844.394,60	270.733.681.844	250.071.486.426,00	0	0,00	0	0,00
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	258.557.393.871	219.253.510.655,00	32.499.580.945	30.951.615.789,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	258.557.393.871	219.253.510.655,00	32.499.580.945	30.951.615.789,00	0	0,00	0	0,00
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	258.317.375.359	254.529.258.796,60	66.429.282.071	65.858.274.006,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN DAERAH	165.771.996.394	162.638.825.110,00	20.402.304.327	20.084.802.968,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	78.853.486.735	79.071.569.087,60	44.883.065.444	44.751.673.838,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS LEE	399.767.332	394.684.013,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS TOMATA	1.372.059.036	1.323.736.758,00	25.024.500	33.677.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS BETELEME	1.525.360.094	1.431.620.122,00	208.725.000	207.550.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS PETUMBEA	884.196.697	839.433.001,00	127.198.000	127.198.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS MOLINO	1.262.337.023	1.155.485.582,00	212.142.500	189.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KOLONODALE	1.770.223.294	1.659.836.332,00	71.682.850	74.602.850,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS BATURUBE	1.872.941.036	1.703.726.579,00	187.300.000	162.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS PANCAMAKMUR	755.309.125	695.368.121,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PANDAUKE	1.063.854.223	999.769.975,00	25.000.000	3.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS WONGKO NDAYA	431.603.533	414.818.688,00	24.387.000	24.380.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS TAMBAYOLI	387.271.748	370.983.292,00	29.427.500	17.427.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS ANUTOLUWU	697.510.425	649.114.864,00	109.868.700	64.592.100,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	363.258.817	352.326.125,00	7.906.250	7.906.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS MAYUMBA	906.199.847	827.961.147,00	85.250.000	79.110.750,00	0	0,00	0	0,00
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44.178.770.928	42.082.746.170,00	134.589.025.413	117.394.464.769,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	44.178.770.928	42.082.746.170,00	134.589.025.413	117.394.464.769,00	0	0,00	0	0,00
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.559.102.660	3.547.740.283,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	3.559.102.660	3.547.740.283,00	24.630.010.519	24.446.364.608,00	0	0,00	0	0,00
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.771.481.534	25.080.231.768,00	12.536.982.895	11.372.367.254,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	15.767.282.587	15.477.590.334,00	457.951.200	457.911.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.004.198.947	9.602.641.434,00	12.079.031.695	10.914.456.254,00	0	0,00	0	0,00
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.437.437.616	6.741.356.722,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00

1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAERAH	7.437.437.616	6.741.356.722,00	48.800.000	48.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	89.092.900.017	84.170.683.138,00	37.644.758.999	33.222.727.824,18	0	0,00	0	0,00
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.323.120.972	5.119.934.925,00	543.400.000	457.660.000,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.323.120.972	5.119.934.925,00	543.400.000	457.660.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.035.793.000	1.008.543.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	1.035.793.000	1.008.543.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	426.777.250	386.618.500,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	426.777.250	386.618.500,00	12.830.000	12.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.672.912.327	8.383.769.964,00	973.000.000	972.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	8.672.912.327	8.383.769.964,00	973.000.000	972.690.100,00	0	0,00	0	0,00
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.133.841.796	5.833.268.293,00	2.244.950.000	543.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	6.133.841.796	5.833.268.293,00	2.244.950.000	543.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.922.864.322	13.321.350.183,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	13.922.864.322	13.321.350.183,00	289.400.000	289.054.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.505.959.881	12.823.283.657,00	900.000.000	819.274.600,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	13.505.959.881	12.823.283.657,00	900.000.000	819.274.600,00	0	0,00	0	0,00
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.684.729.285	7.298.677.900,00	9.499.565.625	9.095.214.360,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	7.684.729.285	7.298.677.900,00	9.499.565.625	9.095.214.360,00	0	0,00	0	0,00
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.717.602.444	8.086.766.495,00	205.737.000	141.370.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	8.717.602.444	8.086.766.495,00	205.737.000	141.370.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.602.911.747	4.293.602.088,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	4.602.911.747	4.293.602.088,00	85.360.000	85.360.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.845.348.003	7.560.517.929,00	10.548.024.550	10.413.331.564,18	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	7.845.348.003	7.560.517.929,00	10.548.024.550	10.413.331.564,18	0	0,00	0	0,00
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.739.472.850	4.241.320.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH	4.739.472.850	4.241.320.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175.145.000	128.451.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	175.145.000	128.451.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	48.726.000	45.382.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.464.829.700	1.223.125.213,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.464.829.700	1.223.125.213,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.614.928.240	4.238.439.904,00	12.336.901.824	10.387.103.200,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	4.614.928.240	4.238.439.904,00	12.336.901.824	10.387.103.200,00	0	0,00	0	0,00
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	177.937.200	177.629.516,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	177.937.200	177.629.516,00	5.590.000	5.590.000,00	0	0,00	0	0,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	78.944.733.576	75.487.870.195,89	6.815.766.803	6.396.025.270,00	0	0,00	0	0,00
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.924.598.270	13.500.538.774,00	317.626.000	310.124.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAERAH	13.924.598.270	13.500.538.774,00	317.626.000	310.124.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.149.992.787	7.621.774.523,00	1.395.635.541	1.155.911.500,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH	8.149.992.787	7.621.774.523,00	1.395.635.541	1.155.911.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.150.608.419	48.720.408.686,89	736.167.683	722.250.770,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	51.150.608.419	48.720.408.686,89	736.167.683	722.250.770,00	0	0,00	0	0,00
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.328.509.850	3.300.638.610,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	3.328.509.850	3.300.638.610,00	1.307.337.579	1.303.740.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	534.999.850	511.256.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	534.999.850	511.256.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.856.024.400	1.833.252.852,00	3.059.000.000	2.903.999.000,00	0	0,00	0	0,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	132.873.281.362	125.833.329.641,00	12.995.647.850	9.035.203.373,00	0	0,00	0	0,00
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	92.892.422.701	88.454.154.430,00	8.724.847.850	4.908.386.373,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0	4.318.651.460,00	0	915.060.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	36.878.225.171	31.749.663.632,00	768.385.000	758.374.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.030.799.950	885.292.428,00	49.200.000	49.170.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN PEMERINTAHAN	2.554.584.950	1.312.522.976,00	5.914.207.150	1.226.850.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.521.346.080	42.706.053.235,00	235.400.000	235.198.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN HUKUM	1.251.158.050	1.007.894.292,00	126.841.950	126.760.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN ORGANISASI	1.303.415.000	1.147.937.833,00	134.585.000	134.278.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.020.205.000	2.630.759.299,00	1.284.250.000	1.266.597.623,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.182.127.450	872.242.907,00	169.670.000	153.790.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.150.561.050	1.823.136.368,00	42.308.750	42.308.750,00	0	0,00	0	0,00
4.02		SEKRETARIAT DPRD	39.980.858.661	37.379.175.211,00	4.270.800.000	4.126.817.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	39.980.858.661	37.379.175.211,00	4.270.800.000	4.126.817.000,00	0	0,00	0	0,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	94.854.985.190	75.849.957.263,00	5.717.579.294	4.365.077.028,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.01		PERENCANAAN	9.157.365.453	8.801.655.495,00	126.506.644	116.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.157.365.453	8.801.655.495,00	126.506.644	116.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02		KEUANGAN	74.754.316.438	56.556.105.895,00	5.377.752.650	4.050.328.228,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62.948.166.494	45.480.177.647,00	4.895.752.650	3.569.269.000,00	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.806.149.944	11.075.928.248,00	482.000.000	481.059.228,00	0	0,00	0	0,00
5.03		KEPEGAWAIAN	7.918.968.209	7.527.416.175,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.918.968.209	7.527.416.175,00	213.320.000	198.248.800,00	0	0,00	0	0,00

5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.550.810.800	2.491.531.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	473.524.290	473.248.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	473.524.290	473.248.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.351.649.599	13.068.739.776,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01		INSPEKTORAT DAERAH	14.351.649.599	13.068.739.776,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	14.351.649.599	13.068.739.776,00	2.058.322.500	1.861.176.000,00	0	0,00	0	0,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	36.118.049.444	34.139.359.329,00	2.498.629.371	2.484.272.132,00	0	0,00	0	0,00
7.01		KECAMATAN	36.118.049.444	34.139.359.329,00	2.498.629.371	2.484.272.132,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PETASIA	7.468.424.665	7.312.347.667,00	1.529.362.221	1.518.121.982,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN PETASIA BARAT	2.758.363.240	2.573.337.158,00	7.906.250	7.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PETASIA TIMUR	3.163.049.885	3.001.521.785,00	313.000.000	310.311.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BUNGKU UTARA	4.668.125.078	4.485.847.752,00	303.300.000	303.045.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN MAMOSALATO	2.917.442.688	2.710.964.051,00	32.906.250	32.906.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SOYO JAYA	2.417.414.749	2.178.804.054,00	29.292.150	29.292.150,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN LEMBO	3.609.450.832	3.437.591.998,00	55.556.250	55.556.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN LEMBO RAYA	2.612.927.521	2.516.923.900,00	56.306.250	56.306.250,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MORI ATAS	3.380.285.625	3.221.524.208,00	171.000.000	170.827.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN MORI UTARA	3.122.565.161	2.700.496.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	51.355.784.062	50.554.017.468,99	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.355.784.062	50.554.017.468,99	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	51.355.784.062	50.554.017.468,99	402.000.000	401.670.000,00	0	0,00	0	0,00
		Jumlah	1.095.412.945.221	1.010.338.801.206,48	338.866.386.661	307.837.638.053,18	3.150.000.000	1.157.886.000,00	228.062.860.952	226.451.591.862,00

Kotabondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS ULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
DAERAH UNTUK PEMENUHAN
BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN(MANDATORY SPENDING)**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY TAHUN ANGGARAN 2024

A	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN DAN URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		292.521.804.516,00	251.428.251.657,00	85,95
	BELANJA OPERASI	260.022.223.571,00	220.476.635.868,00	84,79
	a. Belanja Pegawai	204.432.239.771,00	173.547.629.844,00	84,89
	b. Belanja Barang dan Jasa	53.199.985.846,00	44.545.231.024,00	83,73
	c. Belanja Hibah	2.389.997.954,00	2.383.775.000,00	99,74
	BELANJA MODAL	32.499.580.945,00	30.951.615.789,00	95,24
B	URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.951.830.064,00	14.625.543.104,00	86,28
	BELANJA OPERASI	4.614.928.240,00	4.238.439.904,00	91,84
	a. Belanja Pegawai	2.268.111.658,00	2.016.810.615,00	88,92
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.346.816.582,00	2.221.629.289,00	94,67
	BELANJA MODAL	12.336.901.824,00	10.387.103.200,00	84,2
C	URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	89,49
	BELANJA OPERASI	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	89,49
	a. Belanja Pegawai	0	0	0
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.558.632.350	2.331.320.488,00	91,12
	c. Belanja Hibah	2.180.840.500	1.910.000.000,00	87,58
D	BELANJA DILUAR URUSAN PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA UNTUK MENUNJANG KEBUTUHAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN	5.796.440.000,00	5.796.440.000,00	100
JUMLAH FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN (A+B+C+D)		320.009.547.430,00	276.091.555.249,00	86,28
E	URUSAN BIDANG INFRASTRUKTUR			
1	BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	304.456.491.753,18	89,85
	a. Tanah	5.570.407.150,00	1.048.200.000,00	18,82
	b. Peralatan dan Mesin	82.070.107.453,00	76.239.045.055,00	92,9
	c. Bangunan Gedung	96.842.669.687,51	85.886.267.524,18	88,69
	d. Jalan Jaringan dan Irigasi	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,5
	e. Aset tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85
2	BELANJA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN	357.957.064.454,98	353.404.088.501,99	98,73
	f. Belanja Pemeliharaan	42.940.333.219,98	39.787.725.977,00	92,66
	g. Belanja Hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83
	h. Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86
	i. Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71
JUMLAH FUNGSI BIDANG INFRASTRUKTUR (1+2)		696.823.451.116,80	657.860.580.255,17	94,41
F	URUSAN BIDANG KESEHATAN			
1	BELANJA OPERASI	165.771.996.394,00	162.638.825.110,00	98,11
	a.Belanja Pegawai	105.528.435.843,00	104.638.345.627,00	99,16
	b. Belanja Barang dan Jasa	59.543.560.551,00	57.300.479.483,00	96,23
	c. Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	100
2	BELANJA MODAL	20.402.304.327,70	20.084.802.968,00	98,44
3	BELANJA DILUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN	13.506.798.289,00	11.496.185.375,00	85,11
	a. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.311.851.902,00	11.354.794.431,00	85,3
	b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59.981.747,00	48.197.562,00	80,35
	c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.464.640,00	5.486.400,00	84,87
	d. Medical Chek UP bagi KDH/WKDH	66.000.000,00	65.993.482,00	99,99
	e. Medical Chek UP bagi DPRD	62.500.000,00	21.713.500,00	34,74
JUMLAH URUSAN BIDANG KESEHATAN (1+2+3)		199.681.099.010,70	194.219.813.453,00	97,26
G	ALOKASI DANA DESA (ADD)			
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	92.307.586.898,00	80.602.288.885,00	87,32
JUMLAH ALOKASI DANA DESA		92.307.586.898,00	194.219.813.453,00	97,26
I	BELANJA BAGI HASIL			
	a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	512.743.648,00	0	0
	b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	0	0
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL		944.103.854,00	0	0
H	URUSAN BIDANG PENGAWASAN			
1	BELANJA OPERASI	16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	90,98
	a. Belanja Pegawai	5.807.132.111,00	5.544.361.691,00	95,48
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.544.517.488,00	7.524.378.085,00	88,06
2	BELANJA MODAL	2.058.322.500,00	1.861.176.000,00	90,42
JUMLAH BIDANG PENGAWASAN		16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	90,98

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DEKUS IULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
UNTUK PEMENUHAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM)**





KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024

A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	94,07
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.828.117.770,00	5.816.087.999,00	99,79
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	334.328.498,00	300.716.484,00	89,95
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	24.226.828.914,00	3.980.598.950,00	16,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.286.330.200,00	3.146.058.202,00	95,73
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.144.980.050,00	15.141.713.075,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.897.196.100,00	4.961.544.714,00	71,94
Total			57.647.236.012,00	35.161.777.757,00	60,99
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.721.257,00	217.662.000,00	99,97
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.629.999.692,00	1.627.527.392,00	99,85
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	299.484.400,00	292.853.312,00	97,79
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.985.393.800,00	144.212.293,00	4,83
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	20.999.964,00	20.990.000,00	99,95
		Total			5.153.599.113,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			62.800.835.125,00	37.465.022.754,00	59,66
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.257.200,00	9.250.000,00	99,92
Total			9.257.200,00	9.250.000,00	99,92
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	
Total			-	-	
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.728.400,00	40.728.000,00	100
Total			40.728.400,00	40.728.000,00	100
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.500.800,00	15.066.000,00	77,26
Total			19.500.800,00	15.066.000,00	77,26
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	
Total			-	-	
6	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.405.500,00	12.720.000,00	82,57
Total			15.405.500,00	12.720.000,00	82,57
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.991.200,00	17.871.000,00	89,39
Total			19.991.200,00	17.871.000,00	89,39
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.991.200,00	18.031.000,00	90,19
Total			19.991.200,00	18.031.000,00	90,19
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	
Total			-	-	
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.980.000,00	19.980.000,00	100
Total			19.980.000,00	19.980.000,00	100
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	
Total			-	-	
12	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.990.400,00	19.985.500,00	99,98
Total			19.990.400,00	19.985.500,00	99,98
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			164.844.700,00	153.631.500,00	93,2
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	304.971.200,00	304.860.800,00	99,96
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.335.496.400,00	2.250.914.900,00	96,38
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000,00	199.830.000,00	66,61
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.531.643.131,10	10.078.687.219,00	80,43
Total			15.472.110.731,10	12.834.292.919,00	82,95
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	550.288.400,00	543.419.943,00	98,75

			Total	550.288.400,00	543.419.943,00	98,75
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				16.022.399.131,10	13.377.712.862,00	83,49
D. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		215.857.500,00	215.779.500,00	99,96
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia		-	-	
Total				215.857.500,00	215.779.500,00	99,96
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		45.773.800,00	42.430.000,00	92,69
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		112.636.900,00	87.295.400,00	77,5
Total				158.410.700,00	129.725.400,00	81,89
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		56.918.800,00	51.396.004,00	90,3
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		33.867.000,00	32.975.000,00	97,37
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		125.862.400,00	124.000.000,00	98,52
Total				216.648.200,00	208.371.004,00	96,18
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		178.329.760,00	177.724.200,00	99,66
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		51.750.850,00	49.294.000,00	95,25
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		1.878.286.400,00	1.875.905.000,00	99,87
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		20.899.600,00	19.965.000,00	95,53
Total				.129.266.610,00	2.122.888.200,00	99,7
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		-	-	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		16.511.400,00	16.511.400,00	100
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		97.373.350,00	97.373.350,00	100
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		-	-	
Total				113.884.750,00	113.884.750,00	100
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				2.834.067.760,00	2.790.648.854,00	98,47
E. SPM Bidang Sosial						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		139.237.200,00	137.092.000,00	98,46
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		8.060.000,00	8.060.000,00	100
		Penyediaan Alat Bantu		155.437.600,00	135.790.000,00	87,36
		Penyediaan Permakanan		124.909.600,00	119.435.000,00	95,62
Total				427.644.400,00	400.377.000,00	93,62
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlarang di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu		155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan		124.909.600,00	-	-
Total				427.644.400,00	-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlarang di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu		155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan		124.909.600,00	-	-
Total				427.644.400,00	-	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlarang di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu		155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan		124.909.600,00	-	-
Total				427.644.400,00	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial		85.341.000,00	84.588.822,00	99,12
		Penyediaan Makanan		263.388.030,00	262.977.000,00	99,84
Total				348.729.030,00	347.565.822,00	99,67
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial				2.059.306.630,00	747.942.822,00	36,32
JUMLAH TOTAL				83.881.453.346,10	54.534.958.792,00	65,01

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATIN MOROWALI UTARA
DELLIS JULKARSON HEHI

**RINGKASAN REALISASI PENJABARAN
APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK,JENIS,OBYEK,RINCIAN
OBYEK,PENDAPATAN BELANJA DAN
PEMBIYAAAN**





PEMERINTAHAN KAB. MOROWALI UTARA
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	
				% 2024	RP
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.665.857.452.335,00	1.613.812.686.555,99	96,88	(52.044.765.779,01)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.610.133.180,00	168.802.883.879,99	73,84	(59.807.249.300,01)
4.1.01	Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.555.959.818,00	62,72	(44.319.040.182,00)
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000,00	196.054.950,00	98,03	(3.945.050,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	156,52	847.793.741,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00	11.800.000,00	47,20	(13.200.000,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	100.000.000,00	337.875.945,00	337,88	237.875.945,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	78.020.000.000,00	41.769.100.617,00	53,54	(36.250.899.383,00)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000.000,00	18.254.572.618,00	73,02	(6.745.427.382,00)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	6.812.038.018,00	68,12	(3.187.961.982,00)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.826.723.929,00	120,67	826.723.929,00
4.1.02	Retribusi Daerah	39.125.000.000,00	22.045.729.269,00	56,35	(17.079.270.731,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.600.000.000,00	3.666.087.035,00	101,84	66.087.035,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	525.000.000,00	498.190.491,00	94,89	(26.809.509,00)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	35.000.000.000,00	17.881.451.743,00	51,09	(17.118.548.257,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	(632.407.834,00)
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	(632.407.834,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.748.577.180,00	66.972.046.626,99	103,43	2.223.469.446,99
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	2.860.463.600,00	0,00	2.860.463.600,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.232.544.021,00	74,42	(767.455.979,00)
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	(1.630.000.000,00)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.000.000,00	1.608.177.761,59	76,58	(491.822.238,41)
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	319.570,00	0,00	319.570,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	8.050.036.817,00	5.295.856.815,52	65,79	(2.754.180.001,48)
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	109,97	4.980.394.495,88
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	228.610.133.180,00	168.802.883.879,99	73,84	(59.807.249.300,01)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	8.567.468.071,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.059.614.000,00	1.386.889.373.248,00	100,20	2.829.759.248,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	(3.020.365.752,00)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	(3.020.365.752,00)
4.2.01.05	Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	0,00

4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	5.850.125.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	116.259.668.000,00	122.109.793.000,00	287,60	5.850.125.000,00
					0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	5.737.708.823,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	5.737.708.823,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	5.737.708.823,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	8.567.468.071,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	(804.984.550,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	(804.984.550,00)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	(804.984.550,00)
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	(804.984.550,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.665.857.452.335,00	1.613.812.686.555,99	96,88	(52.044.765.779,01)
5	BELANJA DAERAH	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	(118.045.787.323,34)
5.1	BELANJA OPERASI	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	(83.421.235.624,70)
5.1.01	Belanja Pegawai	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93	(49.597.468.748,36)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.403.752.186,96	289.868.847.673,00	88,54	(37.534.904.513,96)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.568.582.264,00	109.791.307.469,00	88,14	(14.777.274.795,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.812.818.766,40	56.367.126.065,00	97,50	(1.445.692.701,40)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.049.685.981,00	10.951.341.721,00	99,11	(98.344.260,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	196.640.136,00	172.506.157,00	87,73	(24.133.979,00)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	828.000.000,00	746.000.000,00	90,10	(82.000.000,00)
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117,47	4.364.881.501,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.830.016.908,82	418.957.792.995,49	92,72	(32.872.223.913,33)
5.1.02.01	Belanja Barang	104.549.758.439,84	97.796.917.133,89	93,54	(6.752.841.305,95)
5.1.02.02	Belanja Jasa	166.022.331.469,00	154.942.886.592,00	93,33	(11.079.444.877,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.940.333.219,98	39.790.645.977,00	92,66	(3.149.687.242,98)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.851.421.731,00	87.341.007.680,00	93,06	(6.510.414.051,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	677.500.000,00	620.298.000,00	91,56	(57.202.000,00)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.679.177.468,00	16.912.608.419,00	81,79	(3.766.569.049,00)
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	465.000.000,00	0,00	0,00	(465.000.000,00)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	95,18	(1.091.065.387,40)
5.1.03	Belanja Bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	(218.339.489,00)
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	(218.339.489,00)
5.1.05	Belanja Hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83	(693.216.474,01)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	(200.000.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.850.637.218,00	14.358.626.945,00	96,69	(492.010.273,00)
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	(1.206.201,00)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.663,00	692.026.662,99	100,00	(0,01)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86	(39.987.000,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100,00	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	18.524.640.005,00	18.484.653.005,00	99,78	(39.987.000,00)
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	(83.421.235.624,70)

5.2	BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	(31.021.168.608,64)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	(3.607.147.150,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	(3.607.147.150,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.070.107.453,00	76.216.049.055,00	92,87	(5.854.058.398,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	224.293.351,00	219.385.000,00	97,81	(4.908.351,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.656.242.700,00	14.642.085.300,00	82,93	(3.014.157.400,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.887.405,00	44.881.000,00	99,99	(6.405,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.742.000,00	29.514.000,00	82,58	(6.228.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.034.901.134,00	9.699.253.688,00	96,66	(335.647.446,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.725.339.517,00	1.664.039.500,00	96,45	(61.300.017,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.547.601.141,00	33.411.169.861,00	99,59	(136.431.280,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.195.153.750,00	1.194.800.000,00	99,97	(353.750,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.640.645.250,00	8.924.884.382,00	92,58	(715.760.868,00)
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	213.163.360,00	213.160.000,00	100,00	(3.360,00)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.604.362.245,00	4.107.532.824,00	73,29	(1.496.829.421,00)
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	96,15	(82.432.100,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26	(8.459.739.863,33)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	94.132.372.787,51	85.886.267.524,18	91,24	(8.246.105.263,33)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.510.296.900,00	2.296.962.300,00	91,50	(213.334.600,00)
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	(300.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50	(13.099.837.897,31)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	106.524.179.989,20	97.440.430.969,00	91,47	(9.083.749.020,20)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.167.484.451,01	28.607.837.525,00	94,83	(1.559.646.926,01)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00	49.425.000,00	98,85	(575.000,00)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	17.386.537.931,10	14.930.670.980,00	85,87	(2.455.866.951,10)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	(385.300,00)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	(385.300,00)
	JUMLAH BELANJA MODAL	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	(31.021.168.608,64)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	(1.992.114.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	(1.992.114.000,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	(1.992.114.000,00)
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	(1.992.114.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	(1.611.269.090,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	944.103.854,00	0,00	0,00	(944.103.854,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	512.743.648,00	0,00	0,00	(512.743.648,00)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	0,00	0,00	(431.360.206,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	(667.165.236,00)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	(667.165.236,00)
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	(1.611.269.090,00)
	JUMLAH BELANJA	1.665.492.192.835,00	1.547.446.405.511,66	92,91	(118.045.787.323,34)
	SURPLUS/DEFISIT	365.259.500,00	66.366.281.044,33	18.169,62	66.001.021.544,33

6	PEMBIAYAAN DAERAH	(365.259.500,00)	1.324.478.156,49	(362,61)	1.689.737.656,49
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	(33.374.343,51)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	(33.374.343,51)
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	(33.374.343,51)
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.332.702.392,00	52.299.328.048,49	99,94	(33.374.343,51)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	(1.723.112.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	(1.723.112.000,00)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	(1.723.112.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.697.961.892,00	50.974.849.892,00	96,73	(1.723.112.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	(365.259.500,00)	1.324.478.156,49	(362,61)	1.689.737.656,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	67.690.759.200,82	0,00	67.690.759.200,82

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS YULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
DAERAH UNTUK PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI**





Peraturan Daerah
Nomor: 2 Tahun 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KOMITMEN BELANJA PDN (RP)	REALISASI BELANJA PDN (RP)	PRESENTASE REALISASI PDN (%)	PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN
I	BELANJA OPERASI					
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	451.830.016.908,82	180.732.006.763,53	347.691.744.623,00	76,95	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	59.376.050.082,00	23.750.420.032,80	58.682.833.607,99	98,83	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	28.521.924.055,00	11.408.769.622,00	28.481.937.055,00	99,86	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
II	BELANJA MODAL					
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.070.107.453,00	32.828.042.981,20	76.205.549.055,00	92,85	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.842.669.687,51	38.737.067.875,00	88.382.929.824,18	91,26	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.128.202.371,31	61.651.280.948,52	141.028.364.474,00	91,50	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	102.000.000,00	254.614.700,00	99,85	Beberapa Perangkat Daerah Tidak melakukan realisasi Sesuai Dengan Rencana PDN
	Total	873.023.970.558	349.209.588.223,06	740.727.973.339,17	84,85	

Kotabondale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS IRIKARSON HEHI

**REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS
PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**





Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD								Jumlah		
				Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer				
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA

DELISULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
DAERAH UNTUK PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Penurunan Stunting			
	Peningkatan skring anemia remaja putri			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
2	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
3	Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care)			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
4	Konsumsi TTD Ibu Hamil			
	Belanja Operasi	83.854.700,00	81.961.050,00	97,74
	Belanja Barang dan Jasa	83.854.700,00	81.961.050,00	97,74
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
5	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Kurang Energi Kronik (KEK)			
	Belanja Operasi	1.284.840.000,00	931.056.000,00	72,46
	Belanja Barang dan Jasa	1.284.840.000,00	931.056.000,00	72,46
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
6	Pemantauan Tumbuh Kembang Balita, Termasuk Penyediaan Antropometri Set			
	Belanja Operasi	89.744.800,00	75.712.500,00	84,36
	Belanja Barang dan Jasa	89.744.800,00	75.712.500,00	84,36
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	1.501.610.000,00	1.501.610.000,00	100
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.501.610.000,00	1.501.610.000,00	100
7	Pemberian ASI Eksklusif Sejak Lahir sampai Bayi Berusia 6 Bulan			
	Belanja Operasi	128.084.625,00	120.546.625,00	94,11
	Belanja Barang dan Jasa	128.084.625,00	120.546.625,00	94,11
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
8	Pemberian Makanan Tambahan Protein Hewani bag Bayi yang Berusiadi Bawah Dua Tahun (Baduta)			
	Belanja Operasi	1.094.016.000,00	1.079.330.000,00	98,66
	Belanja Barang dan Jasa	1.094.016.000,00	1.079.330.000,00	98,66
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
9	wasting, dan stunting)			
	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
10	Peningkatan Cakupan dan Perluasan Jenis Imunisasi			
	Belanja Operasi			

	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Peralatan dan Mesin			



Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DELISULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
DAERAH DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten				
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	427.644.400,00	400.377.000,00	94%
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	207.579.400,00	196.546.800,00	95%
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			

	6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	10.206.423.073,00	9.523.479.797,00	93%
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya	36.090.734.544,00	36.070.589.838,00	100%
	7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	2.325.572.800,00	2.276.911.400,00	98%
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya	13.146.537.931,00	10.557.381.519,00	80%
	8	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitas distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	64.649.000,00	39.312.900,00	61%
Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		12.830.000,00	12.830.000,00	100%	
2	Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota				
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	438.898.000,00	418.483.573,00	95%
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
		3	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	185.055.200,00	168.407.860,00	91%

		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
3	Menyusun Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)				
	1	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
4	Melakukan pembinaan dan pengawar kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem				
	1	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	2	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
5	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepda Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali				
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah			
		Belanja Gedung dan Bangunan			

		Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Dst				



Kolonodale, 28 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS LULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
MELALUI E-PURCHASING**





PEMERINTAH DAERAH MOROWALI UTARA
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI *E-PURCHASING*
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama KLPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing	Persentase (%)	Keterangan
1	PUSKESMAS TAMBAYOLI	184.418.630,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
2	PUSKESMAS ANUTOLUWU	190.517.950,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
3	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	279.321.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
4	PUSKESMAS LEE	290.589.929,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
5	KECAMATAN MORI UTARA	296.599.550,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
6	KECAMATAN PETASIA BARAT	352.999.474,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
7	PUSKESMAS BATURUBE	364.710.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
8	PUSKESMAS PANCAMAKMUR	368.079.840,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
9	KECAMATAN SOYO JAYA	375.000.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
10	PUSKESMAS WONGKO NDAYA	377.540.533,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
11	KECAMATAN LEMBO RAYA	485.191.495,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
12	KECAMATAN MORI ATAS	487.999.838,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
13	KECAMATAN MAMOSALATO	491.800.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
14	PUSKESMAS MAYUMBA	518.278.050,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
15	PUSKESMAS PETUMBEA	548.430.318,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
16	PUSKESMAS PANDAUKE	598.913.600,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
17	PUSKESMAS MOLINO	662.529.830,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
18	KECAMATAN LEMBO	714.989.900,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
19	PUSKESMAS TOMATA	754.009.204,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
20	KECAMATAN BUNGKU UTARA	804.999.900,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
21	KECAMATAN PETASIA TIMUR	896.268.955,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
22	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	992.200.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
23	PUSKESMAS BETELEME	1.032.920.634,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
24	PUSKESMAS KOLONODALE	1.169.343.426,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
25	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.328.997.450,00	77.010.000,00	0,06	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
26	BAGIAN HUKUM	1.355.200.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
27	BAGIAN ORGANISASI	1.415.200.000,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
28	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.451.220.400,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL DAERAH	2.618.040.001,00	532.511.000,00	0,20	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
30	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.442.955.000,00	929.950.000,00	0,27	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
31	KECAMATAN PETASIA	3.954.887.781,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
32	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	4.454.159.808,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing

No	Nama KLPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing	Persentase (%)	Keterangan
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.455.145.145,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
34	DINAS SOSIAL DAERAH	4.538.551.818,00	180.680.000,00	0,04	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	5.467.879.500,00	145.090.000,00	0,03	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.654.453.008,00	104.000.000,00	0,02	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.858.839.920,00	1.076.880.000,00	0,18	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	6.401.697.194,00	681.000.000,00	0,11	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
39	BAGIAN PEMERINTAHAN	6.630.246.900,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
40	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.032.239.895,00	129.915.000,00	0,02	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
41	INSPEKTORAT DAERAH	8.487.319.988,00	895.730.000,00	0,11	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
42	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	9.693.933.100,00	1.069.778.000,00	0,11	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
43	DINAS PERIKANAN DAERAH	10.028.581.186,00	491.400.000,00	0,05	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
44	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	10.346.039.506,00	26.800.000,00	0,00	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	10.743.314.148,00	304.470.000,00	0,03	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
46	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	11.298.070.029,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	12.639.042.141,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
48	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	13.253.682.346,00	2.996.930.000,00	0,23	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
49	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	14.947.039.733,00	299.946.000,00	0,02	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.182.484.357,00	2.844.500.000,00	0,17	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19.058.286.494,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
52	BAGIAN UMUM	21.845.595.066,00	3.072.000.000,00	0,14	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
53	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	25.811.594.565,00	150.100.000,00	0,01	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
54	SEKRETARIAT DPRD	27.130.311.094,00	2.171.200.000,00	0,08	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
55	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	35.499.552.944,00	8.322.434.700,00	0,23	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	49.363.430.577,00	-	-	Tidak Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	74.412.704.676,00	8.723.512.000,00	0,12	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
58	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	80.053.703.748,00	38.114.083.475,00	0,48	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
59	DINAS KESEHATAN DAERAH	81.372.124.872,00	17.286.891.018,00	0,21	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
60	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	204.408.530.080,00	276.470.000,00	0,00	Melakukan pengadaan melalui E-Purchasing
TOTAL		816.872.706.526,00	90.903.281.193,00	0,11	

Kolonodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DELSA ULKARSON HEHI

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA
HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI YANG
BERSUMBER DARI APBD**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD TA 2024

NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM	25.125.000.000,00	25.125.000.000,00		
2	BADAN PENGAWAS PEMILU	7.875.000.000,00	7.875.000.000,00		
3	TNI	2.900.000.000,00	2.700.000.000,00		
4	POLRI	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		
	JUMLAH	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	-	

Kotenodale, 28 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI UTARA
DESI JULI KARSON HEHI